PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

LPPD
2025

SILPPD

LPPD TA 2025

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN 2025

Sekretariat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, No. Tlp: (0261) 201313,
Website : setda.sumedangkab.go.id E-mail : humas_sumedang@yahoo.com , 45323

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke Khadirat Allah SWT, karena atas ridho dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025 sesuai waktu yang telah ditentukan. Laporan ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Barat dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bertujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak-hak yang diperoleh daerah berdasarkan hasil capaian kinerja sesuai rencana kerja yang telah direncanakan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 memuat gambaran tentang penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan selama tahun Anggaran 2025 secara jelas dan terukur. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 dapat berjalan dengan baik. Berbagai upaya dilakukan oleh segenap pihak untuk tetap konsisten dan terarah sesuai dengan penetapan kinerja di masing-masing bidang urusan.

Kami sangat berterima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Sumedang yang telah berperan aktif menyampaikan data dan informasi. Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya saran dan masukan, untuk penyempurnaan penyusunannya.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 tentang penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan selama tahun Anggaran 2025 ini dapat dijadikan bahan evaluasi Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 31Maret 2026

BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Pusat Merintahan Sumedang-45352
Telp. (0261) 211 207 E-mail : inspektorat.kab.sumedang@gamil.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini .

Sumedang, 25 Maret 2026
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
INSPEKTORAT DAERAH

DADANG SULAEMAN,S.Sos.,M.Kes.,CGCAE.,CGRE
Pembina Utama Muda
NIP.197011261993031006

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**
SURAT PERNYATAAN REVIU OLEH APIP ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
Daftar Tabel xv
Daftar Gambar xxi
Daftar Grafik xxii

BAB I PENDAHULUAN..... **I-1**
1.1. Latar Belakan..... **I-1**
1.1.1. Penjelasan Umum..... I-1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah..... I-2
b. Data Geografis Wilayah..... I-6
1. Batas Administrasi Daerah..... I-6
2. Luas Wilayah..... I-6
3. Topografi..... I-8
4. Klimatologi..... I-9
c. Jumlah Penduduk I-11
1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin..... I-11
2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia..... I-13
3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan..... I-13
4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan..... I-16
d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang..... I-17
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang I-24
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..... I-30
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah..... I-33
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah..... I-33
b. Visi dan Misi Kepala Daerah..... I-119
1. Visi Kepala Daerah..... I-120
2. Misi Kepala Daerah..... I- 123
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah..... I-139

Halaman

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan..... I-181
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... I-333
a. Rencana Program dan Pendanaan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025..... I-333
b. Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumedang Tahun 2025..... I-333

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... II-1

2.1 Capaian Kinerja Makro..... II-1
1 Indek Pembangunan Daya Manusia..... II-1
2 Kemiskinan..... II-2
3 Ketenagakerjaan..... II-3
4 Laju Pertumbuhan Ekonomi..... II-4
5 Pendapatan Per Kapita..... II-5
6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan..... II-5
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... II-7
a. Indikator Kinerja Kunci Hasil..... II-7
b. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... II-14
2.3 Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah..... II-15
2.3.1 Capaian Kinerja..... II-16

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN..... III-1

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan..... III-1

BAB IV PENCAPAIAN SPM..... IV-1

4.1 Bidang Urusan Pendidikan..... IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM..... IV-1
4.1.2 Target SPM 2025..... IV-14
4.1.3 Realisasi Target SPM 2025..... IV-14
4.1.4 Alokasi Anggaran. 2025..... IV-16
4.1.5 Dukungan Personil..... IV-17
4.1.6 Permasalahan dan Solusi..... IV-19
4.2 Bidang Urusan Kesehatan..... IV-20
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM..... IV-20
4.2.2 Target SPM 2025..... IV-23
4.2.3 Realisasi Target SPM 2025..... IV-24
4.2.4 Alokasi Anggaran. 2025..... IV-33
4.2.5 Dukungan Personil..... IV-34
4.2.6 Permasalahan dan Solusi IV-77
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang..... IV-78
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM..... IV-78
4.3.2 Target SPM 2025..... IV-88
4.3.3 Realisasi Target SPM 2025..... IV-89

Halaman

	4.3.4	Alokasi Anggaran. 2025	IV-90
	4.3.5	Dukungan Personil	IV-91
	4.3.6	Permasalahan dan Solusi	IV-95
4.4		Bidang Urusan Perumahan Rakyat	IV-96
	4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar SPM	IV-96
	4.4.2	Target SPM 2025	IV-101
	4.4.3	Realisasi Target SPM 2025	IV-101
	4.4.4	Alokasi Anggaran. 2025	IV-104
	4.4.5	Dukungan Personil	IV-104
	4.4.6	Permasalahan dan Solusi	IV-106
4.5		Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-107
	4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar SPM	IV-107
	4.5.2	Target SPM 2025	IV-123
	4.5.3	Realisasi Target SPM 2025	IV-123
	4.5.4	Alokasi Anggaran. 2025	IV-129
	4.5.5	Dukungan Personil	IV-129
	4.5.6	Permasalahan dan Solusi	IV-132
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV-133
	1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-133
	2.	Dukungan Personil	IV-135
	3.	Permasalahan dan Solusi	IV-136
4.6		Bidang Urusan Sosial	IV-136
	4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar SPM	IV-136
	4.6.2	Target SPM 2025	IV-141
	4.6.3	Realisasi Target SPM 2025	IV-141
	4.6.4	Alokasi Anggaran. 202	IV-145
	4.6.5	Dukungan Personil	IV-145
	4.6.6	Permasalahan dan Solusi	IV-147
4.7		Program Kegiatan	IV-149
	1.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan	IV-149
	2.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan	IV-149
	3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	IV-160
	4.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	IV-164
	5.	Bidang Urusan Ketrentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Dan Penanggulangan Bencana	IV-166
	6.	Bidang Urusan Sosial	IV-177
BAB V		**PENUTUP**	**V -1**
LAMPIRAN		**SURAT PERNYATAAN REVIU OLEH APIP**	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan……..	I-6
1.2	Iklim Perbulan Berdasarkan Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, Tekanan Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2025……..	I-9
1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2025……..	I-11
1.4	Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk.....	I-12
1.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025……	I-13
1.6.	Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Jenis Pekerjaan…….. ……	I-13
1.7	Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pendidikan…	I-16
1.8	Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumedang……	I-17
1.9	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2025.....	I-28
1.10	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025……	I-30
1.11	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025……	I-31
1.12	Kerangka Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sumedang.....	I-48
1.13	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas.....	I-54
1.14	Penentuan Isu Strategis Daerah….....	I-104
1.15	Sasaran Visi dan Target Kinerja Sasaran Visi Tahun 2025-2029……..	I-122
1.16	Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun2025-2045…….	I-125
1.17	Pencapaian Visi yang Didukung oleh 4 (empat) Misi……..	I-128
1.18	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-202……..	I-130
1.19	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029……..	I-132
1.20	Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025-2029……	I-142
1.21	Pentahapan Pembangunan Tahun 2025-2029……..	I-161
1.22	Arah Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029……..	I-163
1.23	Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2025-2029……..	I-170
1.24	Uraian Urusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Perubahan 2025……	I-181
1.25	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumedang Tahun 2025……..	I-334
2.1	Capaian kinerja makro Kabupaten Sumedang Tahun 2025.....	II-6
2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil Tahun 2025……..	II-6

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.3	Indikator Kinerja Kunci Hasil Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 2025……..	II-14
2.4	Realisasi dan Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	II-16
2.5	Skala Nilai perangkat Kinerja.....	II-19
2.6	Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah…….....	II-23
2.7	Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja……	II-27
2.8	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumedang……	II-30
2.9	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang……..	II-31
2.10	Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja……..	II-35
2.11	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian KinerjaIndeks…	II-40
2.12	Skor tiap Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama……..	II-43
2.13	Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja IKUB Tahun 2025..	II-46
2.14	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian KinerjaLaju…….	II-52
2.15	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian KinerjaLaju…….	II-57
2.16	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan……..	II-63
2.17	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Laju……..	II-68
2.18	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2025……	II-70
2.19	Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja……	II-72
2.20	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja……	II-80
2.21	Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja Nilai komposit FSVA	II-85
2.22	Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja……..	II-90
2.23	Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja……..	II-95
2.24	Perubahan Indikator Indeks Desa Membangun dan Indeks Desa……	II-96
2.25	Perbandingan Status Desa di Kabupaten Sumedang dengan Nasional	II-98
2.26	Indeks Desa se- Jawa Barat Tahun 2025……	II-98
2.27	Realisasi Anggaran Program Penunjang Capaian Kinerja……..	II-102
2.28	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja……..	II-109
2.29	Kriteria IKLH……	II-108
2.30	Indeks Kualitas Air Sungai……..	II-110
2.31	Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU).....	II-111
2.32	Indeks Kualitas Lahan……..	II-111
2.33	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja IKLH…….	II-113
2.34	Realsiasi Anggaran Program Penunjang Capaian Kinerja Indeks……..	II-116
2.35	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja……..	II-122
2.36	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja……..	II-127
2.37	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja……..	II-133
2.38	Domain dan Aspek Penilaian SPBE……..	II-134
2.39	Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja……..	II-139
2.40	Realisasi Anggaran Program……..	II-140

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1.1	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan.....	IV-2
4.1.2	Indikator Urusan Pendidikan Target Tahun 2025.....	IV-14
4.1.3	Realisasi Target SPM 2025.....	IV-14
4.1.4	Alokasi SPM APBD tahun anggaran 2025.....	IV-17
4.1.5	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2025.....	IV-17
4.2.1	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025.....	IV-21
4.2.2	Target Pencapaian SPM Data Indikator Urusan Kesehatan Target Tahun 2025.....	IV-23
4.2.3	Realisasi Target Mutu Layanan SPM 2025.....	IV-24
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	IV-34
4.2.5	Daftar Pegawai Asn Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Tahun 2025.....	IV-34
4.3.1	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 2025.....	IV-80
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	IV-88
4.3.3	Realisasi Target Mutu Layanan SPM 2025.....	IV-89
4.3.4	Alokasi anggaran.....	IV-91
4.3.5	Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2025.....	IV-91
4.4.1	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 2025.....	IV-97
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	IV-101
4.4.3	Realisasi Target Mutu Layanan SPM 2025.....	IV-102
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	IV-104
4.4.5	Personil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	IV-104
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal.....	IV-108
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	IV-123
4.5.3	Realisasi Target Mutu Layanan SPM 2025.....	IV-123
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	IV-129
4.5.5a	Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Menurut Tingkat Pendidikan.....	IV-130
4.5.5b	Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025.....	IV-135
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal.....	IV-138
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	IV-141
4.6.3	Realisasi Target Mutu Layanan SPM 2025.....	IV-141
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	IV-145
4.6.5	Jumlah Personil Dinas Sosial Tahun 2025.....	IV-146

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.7.1	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2025……	IV-152
4.7.2	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025……	IV-158
4.7.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang PUTR Tahun 2025……	IV-161
4.7.4	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025……..	IV-164
4.7.5	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketrentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Tahun 2025…	IV-167
4.7.6	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2025……..	IV-177

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Peta Wilayah Administrastif Kabupaten Sumedang.....	I-8
1.2	Konteks Isu Global yang Dihadapi Provinsi Jawa Barat Dalam "Megatrend Jawa Barat 2045"……..	I-82
1.3	Isu Strategis Terkait Green and Blue Economy serta Pembangunan Inklusif……	I-93
1.4	Isu Terkait Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia……	I-94
1.5	Isu Terkait Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar……..	I-96
1.6	Isu Terkait Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan……..	I-97
1.7	Isu Terkait Keberlanjutan Penataan Ruang……	I-99
1.8	Isu Terkait Kualitas Tata Kelola Pemerintahan……	I-101
1.9	Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis RPJPD serta Isu Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD……	I-109
1.10	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Astacita)……..	I-126
1.11	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029……..	I-129
2.1	Program pendukung capaian kinerja……..	II-23
2.2	Rekomendasi penyesuaian target……..	II-25
2.3	Program pendukung capaian kinerja……	II-27
2.4	Program pendukung capaian kinerja……	II-37
2.5	Program pendukung capaian kinerja……	II-40
2.6	Tren Indeks Kerukunan Umat Beragama……	II-42
2.7	Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026……	II-46
2.9	Program pendukung capaian kinerja……..	II-52
2.10	Program pendukung capaian kinerja……..	II-57
2.11	Program pendukung capaian kinerja……..	II-62
2.12	Program pendukung capaian kinerja……..	II-68
2.13	Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026……..	II-74
2.14	Program pendukung capaian kinerja……..	II-80
2.15	Program pendukung capaian kinerja……..	II-84
2.16	Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026……..	II-87
2.17	Program pendukung capaian kinerja……..	II-90
2.18	Program pendukung capaian kinerja……..	II-95
2.19	Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026……..	II-97
2.20	Program pendukung capaian kinerja Indek Desa……	II-101

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.21	Program pendukung capaian kinerja……..	II-107
2.22	Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026……..	II-110
2.23	Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026……..	II-115
2.24	Program pendukung capaian kinerja Nilai Sakip Kabupaten..	II-122
2.25	Program pendukung capaian kinerja Nilai LPPD Kabupaten..	II-126
2.26	Program pendukung capaian kinerja Nilai LPPD Kabupaten.	II-133
2.27	Rekomendasi penyesuaian target Tahun 2026……..	II-137

DAFTAR GRAFIK

Nomor Grafik	Judul Grafik	Halaman
1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2025……..	I-12
1.2	Komparasi Gini Ratio……..	I-36
2.1	Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang 2025.....	II-2
2.2	Angka Kemiskinan Kabupaten Sumedang 2025.....	II-3
2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang 2025....	II-3
2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang 2025……	II-5
2.5	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita 2021-2025	II-5
2.6	Gini Ratio Kabupaten Sumedang 2025	II-6
2.7	Tren Rata-rata Lama Sekolah……..	II-20
2.8	Tren Harapan Lama Sekolah……	II-25
2.9	Tren angka harapan Hidup.....	II-29
2.11	Tren Indeks Pembangunan Gender……..	II-36
2.12	Laju ppertumbuhan sektor industri……..	II-48
2.13	Laju ppertumbuhan sektor Perdagangan……	II-54
2.14	Tren Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian……..	II-59
2.15	Tren Laju Pertumbuhan Sektor Akomodasi……..	II-65
2.16	Tren Indeks Kualitas Infrastruktur……..	II-70
2.17	Tren Persentase Peningkatan penanaman modal……..	II-73
2.18	Tren Nilai komposit FSVA……..	II-82
2.19	Tren Nilai komposit FSVA……..	II-86
2.20	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang……	II-92
2.21	Tren Indeks Ketahanan Daerah……..	II-103
2.22	Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup……..	II-109
2.23	Tren Indeks Profesionalitas ASN……..	II-115
2.24	Tren Nilai AKIP Kabupaten Sumedang……..	II-118
2.25	Tren Nilai LPPD Kabupaten Sumedang……..	II-124
2.26	Tren Indeks Pelayanan Publik……..	II-130
2.27	Tren Sistem SPBE……	II-137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas :
    a. Capaian kinerja makro Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.
    b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
    c. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.
    d. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
    e. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan
3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah Provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

4. Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2026;dan
36. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA Tanggal 24 Desember Tahun 2024 Perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

Kabupaten Sumedang merupakan sebuah kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Sumedang memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Sebelum berbentuk kabupaten, Sumedang merupakan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sumedang Larang. Sebelum bernama Sumedang Larang, cikal bakalnya bernama Kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih. Kemudian ketika kekuasaan kerajaan berpindah kepada putranya, nama kerajaan berganti menjadi Himbar Buana dan kemudian berganti lagi menjadi Kerajaan Sumedang Larang.

Kerajaan Sumedang Larang menjadi pewaris kekuasaan Kerajaan Padjadjaran ketika Kerajaan Padjadjaran runtuh setelah menerima empat orang Kandaga Lante Kerajaan Padjadjaran beserta simbol kerajaan berupa Mahkota Binokasih. Pada saat itu wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang semakin luas sebagai warisan dari Kerajaan Padjadjaran. Sepeninggal Prabu Geusan Ulun, kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang melemah menyebabkan banyak wilayah yang melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang. Dan akhirnya kekuasaannya hanya meliputi Parakanmuncang, Bandung dan Sukapura saja. Dan ketika Kerajaan Mataram memperluas kekuasaannya sampai ke wilayah Jawa Barat,

Sumedang memilih untuk tunduk dan menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Mataram dengan status bukan lagi sebagai kerajaan namun lebih sebagai sebuah kabupaten.

Ketika penjajah Belanda atau VOC bisa menguasai wilayah Jawa Barat dari kekuasaan Kerajaan Mataram, pihaknya membagi-bagi wilayah Jawa Barat menjadi beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Sumedang.

Untuk peresmian Kabupaten Sumedang sendiri sebagai sebuah Kabupaten di bawah pemerintahan Propinsi Jawa Barat dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 2851).

b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Sumedang terletak antara 6º44'-70º83' Lintang Selatan dan 107º21'-108º21' Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 156.741 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 272 desa dan 7 Kelurahan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

2. Luas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang

Selanjutnya luas wilayah Kabupaten berdasarkan kecamatan serta jumlah desa/kelurahan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3	4
1	Jatinangor	2.573,21	12
2	Cimanggung	4.307,68	11

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3	4
3	Tanjungsari	4.325,32	12
4	Sukasari	3.902,81	7
5	Pamulihan	5.382,05	11
6	Rancakalong	5.607,35	10
7	Sumedang Selatan	9.679,76	10/4
8	Sumedang Utara	3.145,33	10/3
9	Ganeas	2.533,46	8
10	Situraja	4.943,60	15
11	Cisitu	6.415,55	10
12	Darmaraja	5.417,83	12
13	Cibugel	5.011,87	7
14	Wado	7.318,99	10
15	Jatinunggal	6.327,42	9
16	Jatigede	11.390,63	11
17	Tomo	8.250,07	9
18	Ujungjaya	8.674,74	9
19	Conggeang	11.175,68	12
20	Paseh	3.390,17	10
21	Cimalaka	4.766,77	14
22	Cisarua	1.454,06	7
23	Tanjungkerta	4.403,39	12
24	Tanjungmedar	6.690,80	9
25	Buahdua	11.158,76	14
26	Surian	7.626,78	9
	Jumlah	156.741,00	270 / 7

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Sumedang berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena sebagian diantaranya masuk dalam wilayah Kawasan Cekungan Bandung yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh Pemerintah Pusat dan juga sebagai penyangga Ibukota Propinsi. Hal ini menjadikan Kabupaten Sumedang memiliki beberapa sektor unggulan untuk dikembangkan lebih lanjut diantaranya yaitu industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

Pembagian wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peta Administratif adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Peta Administratif Kabupaten Sumedang

Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

3. **Topografi**

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan kedalam 5 kelas, yaitu :

1. 0 – 8%, merupakan daerah datar dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkotaan;
2. 8–15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15 – 25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di Wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25 – 40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;

5. Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

4. Klimatologi

Berdasarkan kondisi alamnya, secara umum wilayah Kabupaten Sumedang termasuk dalam kriteria iklim basah, sehingga hampir setiap vegetasi bisa tumbuh di tempat ini. Hal ini berarti bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sumedang pada umumnya cocok untuk pengembangan sistem pertanian dan perkebunan, dan baik untuk hampir semua jenis tanaman budidaya, berikut tabel iklim Kabupaten Sumedang per bulan berdasarkan Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, Tekanan Udara, Curah Hujan dan Penyinaran matahari tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Iklim Perbulan Bedasarkan Suhu, Kelembaban, Kecepatan Angin, Tekanan Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2025

Bulan / Month	Suhu/Temperature (0C)			Kelembaban/Humidity (%)			Kecepatan Angin (m/det) Wind Velocity (m/sec)			Tekanan Udara Atmospheric Pressure (mb)			Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Januari/*January*	22.6	27.0	34.2	59.0	86	98.0	0.8	2.2	4.2	1002,0	1004.4	1006.9	638	29	33
Februari/*February*	22.8	26.8	33.8	62.0	88	98.0	1.1	2.2	4.4	1002,5	1005.4	1008.1	334	21	28
Maret/*March*	23.2	27.5	34.4	51.0	86	98.0	0.6	1.9	3.9	1000,7	1004.6	1007.4	503	26	48
April/*April*	22.0	27.5	34.6	49.0	83	97.0	0.3	1.6	2.5	1004,0	1005.5	1007.5	322	21	29
Mei/*May*	23.4	27.9	35.2	53.0	82	97.0	1.1	1.8	2.8	1002,9	1004.7	1008.1	390	20	67
Juni/*June*	23.0	27.7	34.8	50.0	80	97.0	0.6	1.9	5.8	1004.4	1006.2	1007.4	70	13	64
Juli/*July*	21.2	27.7	35.4	36.0	74	97.0	1.4	2.8	8.1	1003.8	1005.9	1007.5	48	7	82
Agustus/*August*	21.2	27.3	35.0	42.0	77	98.0	0.3	2.8	7.2	1004.4	1006.7	1008.3	210	15	31
September/*September*	23.0	28.5	36.6	39.0	72	98.0	1.4	3.4	10.0	1005.7	1006.7	1007.6	45	11	77
Oktober/*October*	23.0	28.6	37.8	40.0	75	98.0	0.6	3.1	5.0	1001.8	1005.8	1008.8	101	16	69
November/*November*	23.2	27.7	35.2	51.0	82	97.0	1.1	2.1	4.2	1003.2	1005.1	1007.3	430	28	56
Desember/*December*	23.4	27.5	34.6	55.0	84	98.0	0.6	2.0	3.9	1002.0	1007.1	1004.5	492	27	53

Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka, BPS 2025

Berdasarkan Tabel di atas sepanjang tahun 2025 suhu udara maksimun rata-rata berada pada bulan Oktober 28,6 dan terendah pada bulan Februari 26,8, Kelembaban maksimun rata-rata berada pada bulan Februari 88 dan terendah pada bulan Juli 74, Kecepatan angin maksimun rata-rata berada pada bulan September 3,4 menit/detik dan terendah pada bulan Juni dan Bulan April 1,6 menit/detik, Tekanan Udara maksimun rata-rata berada pada bulan Agustus dan September 1006,7 dan terendah pada bulan Januari 1004,4, Curah Hujan maksimun berada pada bulan Januari 638 mm sebanyak 29 hari dan terendah pada bulan September 45 mm sebanyak 11 hari dan Penyinaran Matahari maksimun berada pada bulan Juli 82 % dan terendah pada bulan Februari 28 %.

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan didalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah tersebut. Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 (empat) DAS dengan 6 (enam) Sub DAS yaitu :

1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles,
2. Sub DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
3. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
4. DAS Cipunegara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
5. DAS Cipanas

Adapun berdasarkan penggunaan lahan**,** menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 encana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Lindung
    1. Kawasan Hutan Lindung;
    2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
    3. Kawasan perlindungan setempat;
    4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
    5. Kawasan rawan bencana alam;
    6. Kawasan Lindung geologi; dan
    7. Kawasan Lindung lainnya
b. Kawasan Budidaya
    1. Kawasan peruntukan Hutan produksi;
    2. Kawasan peruntukan Hutan Rakyat;
    3. Kawasan peruntukan pertanian;
    4. Kawasan peruntukan perikanan;
    5. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
    6. Kawasan peruntukan industri;
    7. Kawasan peruntukan pariwisata;
    8. Kawasan peruntukan permukiman; dan

9. Kawasan peruntukan lainnya

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2025 tercatat sebanyak 1.241.795 jiwa. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, jenis pekerjaan dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin meliputi 627.241 jiwa atau 50,51% penduduk laki-laki dan 614.554 jiwa atau 49,49% penduduk perempuan. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumedang Utara yaitu 106.424 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Surian yaitu 12.402 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Jenis Kelamin Per Wilayah Tahun 2025

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	WADO	24.202	23.127	47.329
2	JATINUNGGAL	24.487	23.670	48.157
3	DARMARAJA	19.570	19.002	38.572
4	CIBUGEL	13.598	13.129	26.727
5	CISITU	16.089	15.618	31.707
6	SITURAJA	22.071	21.533	43.604
7	CONGGEANG	14.845	14.976	29.821
8	PASEH	19.999	19.772	39.771
9	SURIAN	6.269	6.133	12.402
10	BUAHDUA	17.001	17.213	34.214
11	TANJUNGSARI	46.650	45.780	92.430
12	SUKASARI	18.659	18.065	36.724
13	PAMULIHAN	34.988	34.469	69.457
14	CIMANGGUNG	50.076	48.245	98.321
15	JATINANGOR	49.634	48.203	97.837
16	RANCAKALONG	22.063	21.719	43.782
17	SUMEDANG SELATAN	42.731	42.046	84.777
18	SUMEDANG UTARA	53.730	52.694	106.424
19	GANEAS	13.621	13.215	26.836
20	TANJUNGKERTA	18.360	17.791	36.151
21	TANJUNGMEDAR	14.249	14.189	28.438
22	CIMALAKA	33.472	32.735	66.207
23	CISARUA	10.975	10.764	21.739

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
24	TOMO	12.024	12.124	24.148
25	UJUNGJAYA	16.271	16.552	32.823
26	JATIGEDE	11.607	11.790	23.397
	JUMLAH	**627.241**	**614.554**	**1.241.795**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, Tahun 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang semester II tahun 2025 berjumlah 1.241.795 jiwa,mengalami kenaikan 1.23% dibandingkan tahun sebelumnya semester II (tahun 2024) yang berjumlah 1.226.660 jiwa. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2025 sebanyak 453.380 keluarga dengan rata-rata anggota keluarga sebesar 3 orang.

Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata sebesar 797 jiwa/km2. Sedangkan dilihat dari sex ratio yaitu sebesar 102,06%, artinya bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Berikut dapat digambarkan dalam grafik dan tabel dibawah ini.

Grafik 1.1

Tabel 1.4
Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk per Km^2	Sex Ratio
797 Jiwa	102,06%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang (diolah) 2025

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa kelompok usia produktif, yaitu antara usia 15-64 tahun dengan prosentase sebesar 67,34% atau sebanyak 836.235 jiwa sisanya terdiri dari penduduk usia 0 – 14 tahun yaitu sebesar 268.099 jiwa dengan prosentase sebesar 21,59% dan penduduk usia lanjut yaitu usia 65 tahun ke atas sebesar 137.461 jiwa dengan prosentase sebesar 11,07%,. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Sumedang yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif. Angka Ketergantungan adalah persentase jumlah penduduk non produktif atas penduduk produktif. Rumusannya yaitu jumlah penduduk non-produktif dibagi penduduk yang produktif dikalikan 100%. Artinya dari 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 60 orang penduduk usia non-produktif.

Dari data di bawah dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumedang terbanyak berada pada usia produktif, dan ini merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka pemerintah dituntut untuk memberdayakan guna membangun Kabupaten Sumedang. Jumlah penduduk terbesar pada usia produktif ini merupakan modal dasar dalam pembangunan. Program-program pemerintah hendaknya mengarah kepada pendayagunaan penduduk pada usia ini.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025

No.	Kelompok Umur	Jumlah	
		n (jiwa)	%
1	2	3	4
1.	0 – 14	268.099	21,59
2.	15 – 59	772.485	62,21
3.	60-64	63.750	5,13
Jumlah		> 65	137.461

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang, 2025

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat tergambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.6

Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK		
		L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	127.153	108.786	235.939

NO	JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK		
		L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	43	335.661	335.704
3	PELAJAR/MAHASISWA	121.844	105.907	227.751
4	PENSIUNAN	7.148	3.852	11.000
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	7.223	6.026	13.249
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	1.723	12	1.735
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	1.881	70	1.951
8	PERDAGANGAN	3.011	837	3.848
9	PETANI.PEKEBUN	55.684	6.034	61.718
10	PETERNAKAN	279	97	376
11	NELAYAN	25	2	27
12	INDUSTRI	258	74	332
13	KONSTRUKSI	370	1	371
14	TRANSPORTASI	616	2	618
15	KARYAWAN SWASTA	49.926	24.279	74.205
16	KARYAWAN BUMN	1.190	411	1.601
17	KARYAWAN BUMD	405	162	567
18	KARYAWAN HONORER	3.224	2.802	6.026
19	BURUH HARIAN LEPAS	80.353	1.871	82.224
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	5.367	317	5.684
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	17	1	18
22	BURUH PETERNAK	40	3	43
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	2	139	141
24	TUKANG CUKUR	25	-	25
25	TUKANG LISTRIK	11	-	11
26	TUKANG BATU	44	-	44
27	TUKANG KAYU	680	-	680
28	TUKANG SOL SEPATU	2	-	2
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	26	-	26
30	TUKANG JAHIT	239	51	290
31	TUKANG GIGI	1	-	1
32	PENATA RIAS	10	26	36
33	PENATA BUSANA	2	2	4
34	PENATA RAMBUT	1	4	5
35	MEKANIK	128	-	128
36	SENIMAN	86	12	98
37	TABIB	2	-	2
38	PARAJI	-	11	11
39	PERANCANG BUSANA	1	-	1
40	PENTERJEMAH	2	3	5
41	IMAM MASJID	7	-	7
42	PENDETA	8	-	8
43	PASTOR	-	-	-
44	WARTAWAN	30	2	32
45	USTADZ/MUBALIGH	136	6	142
46	JURU MASAK	5	2	7
47	PROMOTOR ACARA	-	-	-

NO	JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK		
		L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*
48	ANGGOTA DPR RI	-	-	-
49	ANGGOTA DPD RI	-	-	-
50	ANGGOTA BPK	-	-	-
51	PRESIDEN	-	-	-
52	WAKIL PRESIDEN	-	-	-
53	ANNGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-
54	ANNGOTA KABINET KEMENTRIAN	-	-	-
55	DUTA BESAR	1	-	1
56	GUBERNUR	-	-	-
57	WAKIL GUBERNUR	-	-	-
58	BUPATI	1	-	1
59	WAKIL BUPATI	1	-	1
60	WALIKOTA	-	-	-
61	WAKIL WALI KOTA	-	-	-
62	ANGGOTA DPRD PROV	2	-	2
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	8	5	13
64	DOSEN	264	192	456
65	GURU	2.354	4.349	6.703
66	PILOT	1	-	1
67	PENGACARA	31	5	36
68	NOTARIS	9	5	14
69	ARSITEK	8	2	10
70	AKUNTAN	1	1	2
71	KONSULTAN	39	11	50
72	DOKTER	106	150	256
73	BIDAN	-	718	718
74	PERAWAT	354	969	1.323
75	APOTEKER	32	90	122
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	1	2	3
77	PENYIAR TELEVISI	1	-	1
78	PENYIAR RADIO	3	2	5
79	PELAUT	83	-	83
80	PENELITI	13	2	15
81	SOPIR	1.867	2	1.869
82	PIALANG	1	1	2
83	PARANORMAL	3	3	6
84	PEDAGANG	11.965	3.098	15.063
85	PERANGKAT DESA	667	160	827
86	KEPALA DESA	94	12	106
87	BIARAWATI	-	-	-
88	WIRASWASTA	140.017	7.248	147.265
89	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	49	17	66
90	ARTIS	-	-	-
91	ATLIT	1	1	2
92	CHEFF	-	-	-
93	MANAJER	-	-	-

NO	JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK		
		L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*
94	TENAGA TATA USAHA	1	1	2
95	OPERATOR	-	-	-
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	-	-	-
97	TEKNISI	1	-	1
98	ASISTEN AHLI	1	-	1
99	PEKERJA LAINNYA	33	43	76
TOTAL		**627.241**	**614.554**	**1.241.795**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Berdasarkan jenis pekerjaan, masyarakat Kabupaten Sumedang mayoritas masih didominasi oleh pekerjaan mengurus rumah tangga sebanyak 335.704 Jiwa, Petani/Pekebun sebanyak 61.718 Jiwa, pegawai swasta sebanyak 74.205 Jiwa, bekerja sebagai buruh harian lepas sebanyak 82.224 Jiwa kemudian pegawai negeri sipil sebanyak 13.249 Jiwa. Kondisi penduduk yang belum / tidak bekerja cukup banyak yaitu sebanyak 235.939 jiwa atau sebesar 19,00%, kondisi tersebut dikarenakan penduduk yang berusia tidak produktif yaitu usia 0-5 tahun dan > 59 tahun, dan sisanya merupakan pelajar/mahasiswa dan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Perbandingan antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja serta penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Sumedang masih cukup baik karena prosentase penduduk yang bekerja adalah sebesar 81% sedangkan sisanya adalah belum / tidak bekerja dan masih berstatus pelajar.

4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Komposisi Penduduk Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1.	Tidak/Belum sekolah	202.870
2.	Belum tamat SD/sederajat	110.858
3.	Tamat SD/sederajat	366.393
4.	SLTP/ sederajat	223.660
5.	SLTA/ sederajat	269.810
6.	D-1 dan D-2	3.523
7.	D-3 (Sarjana Muda)	13.231
8.	D-4 / S-1	48.319

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
9.	S-2	2.901
10.	S-3	230
	Jumlah	**1.241.795**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, 2025

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (diploma dan sarjana), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Sarjana S1 sebanyak 45.692 jiwa. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah dan dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA/sederajat sebanyak 255.500 jiwa, SLTP/sederajat 220.478 jiwa, tidak/belum sekolah sebanyak 207.521 jiwa dan tamat SD/sederajat sebanyak 367.201 jiwa.

d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumedang

Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 terdiri dari 26 Kecamatan, 270 Desa dan 7 Kelurahan, dengan nama-nama Kecamatan, Desa/Kelurahan seagaimana table berikut :

Tabel 1.8

Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan
Di Kabupaten Sumedang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Wado	10	1. Cimungkal	Desa
			2. Ganjarresik	Desa
			3. Cilengkrang	Desa
			4. Cikareo Selatan	Desa
			5. Cikareo Utara	Desa
			6. Wado	Desa
			7. Mulyajaya	Desa
			8. Sukajadi	Desa
			9. Cisurat	Desa
			10. Sukapura	Desa
2	Jatinunggal	9	1. Sirnasari	Desa
			2. Tarikolot	Desa
			3. Sarimekar	Desa
			4. Banjarsari	Desa
			5. Sukamanah	Desa
			6. Cipeundeuy	Desa
			7. Cimanintin	Desa
			8. Pawenang	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			9. Kirisik	Desa
3	Darmaraja	12	1. Darmaraja	Desa
			2. Darmajaya	Desa
			3. Sukamenak	Desa
			4. Sukaratu	Desa
			5. Cikeusi	Desa
			6. Cipeuteuy	Desa
			7. Cieunteung	Desa
			8. Karangpakuan	Desa
			9. Pakualam	Desa
			10. Neglasari	Desa
			11. Tarunajaya	Desa
			12. Ranggon	Desa
4		7	1. Jayamekar	Desa
			2. Buanamekar	Desa
			3. Cibugel	Desa
			4. Cipasang	Desa
			5. Tamansari	Desa
			6. Suka Raja	Desa
	Cibugel		7 . Jayamandiri	Desa
5	Cisitu	10	1. Cisitu	Desa
			2. Situmekar	Desa
			3. Pajagan	Desa
			4. Cigintung	Desa
			5. Sundamekar	Desa
			6. Linggajaya	Desa
			7. Ranjeng	Desa
			8. Cilopang	Desa
			9. Cimarga	Desa
			10. Cinangsi	Desa
6	Situraja	15	1. Situraja Utara	Desa
			2. Situraja	Desa
			3. Mekarmulya	Desa
			4. Cikadu	Desa
			5. Kaduwulung	Desa
			6. Karangheuleut	Desa
			7. Cijeler	Desa
			8. Ambit	Desa
			9. Malaka	Desa
			10. Sukatali	Desa
			11. Pamulihan	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			12. Jatimekar	Desa
			13. Bangbayang	Desa
			14. Cijati	Desa
			15. Cicarimanah	Desa
7	Conggeang	12	1. Conggeang Kulon	Desa
			2. Conggeang Wetan	Desa
			3. Cipamekar	Desa
			4. Cibeureuyeuh	Desa
			5. Jambu	Desa
			6. Babakan Asem	Desa
			7. Padaasih	Desa
			8. Ungkal	Desa
			9. Karanglayung	Desa
			9. Karanglayung	Desa
			10. Cacaban	Desa
			11. Narimbang	Desa
			12. Cibubuan	Desa
8	Paseh	10	1. Paseh Kidul	Desa
			2. Paseh Kaler	Desa
			3. Legok Kidul	Desa
			4. Legok Kaler	Desa
			5. Bongkok	Desa
			6. Padanaan	Desa
			7. Pasireungit	Desa
			8. Cijambe	Desa
			9 Haur Kuning	Desa
			10 Citepok	Desa
9	Surian	9	1 Wanasari	Desa
			2 Wanajaya	Desa
			3 Pamekarsari	Desa
			4 Tanjung	Desa
			5 Surian	Desa
			6 Suriamukti	Desa
			7 Suriamedal	Desa
			8 Ranggasari	Desa
			9 Nanjungwangi	Desa
10	Buahdua	14	1. Buahdua	Desa
			2. Hariang	Desa
			3. Karangbungur	Desa
			4. Mekarmukti	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			5. Citaleus	Desa
			6. Nagrak	Desa
			7. Cibitung	Desa
			8. Sekarwangi	Desa
			9. Gendereh	Desa
			10 Panyindangan	Desa
			11 Cilangkap	Desa
			12 Bojongloa	Desa
			13. Cikurubuk	Desa
			14. Ciawitali	Desa
11	Tanjungsari	12	1. Gudang	Desa
			2. Tanjungsari	Desa
			3. Jatisari	Desa
			4. Margaluyu	Desa
			5. Kutamandiri	Desa
			6. Margajaya	Desa
			7. Raharja	Desa
			8. Cijambu	Desa
			9. Pasigaran	Desa
			10. Gunungmanik	Desa
			11 Kadakajaya	Desa
			12 Cinanjung	Desa
12	Sukasari	7	1. Sukasari	Desa
			2. Genteng	Desa
			3. Banyuresmi	Desa
			4. Nanggerang	Desa
			5. Mekarsari	Desa
			6. Sindangsari	Desa
			7. Sukarapih	Desa
13	Pamulihan	11	1. Cigendel	Desa
			2. Cijeruk	Desa
			3. Pamulihan	Desa
			4. Haurgombong	Desa
			5. Cilembu	Desa
			6. Cimarias	Desa
			7. Cinanggerang	Desa
			8. Mekarbakti	Desa
			9. Sukawangi	Desa
			10. Ciptasari	Desa
			11. Citali	Desa
14	Cimanggung	11	1. Cimanggung	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			2. Sindangpakuon	Desa
			3. Tegalmanggung	Desa
			4. Sindulang	Desa
			5. Sindanggalih	Desa
			6. Sawahdadap	Desa
			7. Cikahuripan	Desa
			8. Sukadana	Desa
			9. Mangunarga	Desa
			10. Cihanjuang	Desa
			11. Pasirnanjung	Desa
15	Jatinangor	12	1. Cikeruh	Desa
			2. Hegarmanah	Desa
			3. Cibeusi	Desa
			4. Cipacing	Desa
			5. Sayang	Desa
			6. Mekargalih	Desa
			7. Cintamulya	Desa
			8. Jatimukti	Desa
			9. Cisempur	Desa
			10. Jatiroke	Desa
			11. Cileles	Desa
			12. Cilayung	Desa
16	Rancakalong	10	1. Nagarawangi	Desa
			2. Cibunar	Desa
			3. Pangadegan	Desa
			4. Sukahayu	Desa
			5. Sukamaju	Desa
			6. Pamekaran	Desa
			7. Rancakalong	Desa
			8. Sukasirnarasa	Desa
			9. Cibungur	Desa
			10. Pasirbiru	Desa
17	Sumedang Selatan	14	1. Sukagalih	Desa
			2. Baginda	Desa
			3. Cipancar	Desa
			4. Citengah	Desa
			5. Gunasari	Desa
			6. Sukajaya	Desa
			7. Margamekar	Desa
			8. Ciherang	Desa
			9. Margalaksana	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan		Status
1	2	3	4		5
			10	Mekar Rahayu	Desa
			11	Regolwetan	Kelurahan
			12	Kotakulon	Kelurahan
			13	Pasanggrahan Baru	Kelurahan
			14	Cipameungpeuk	Kelurahan
18	Sumedang Utara	13	1	Padasuka	Desa
			2	Mulyasari	Desa
			3	Girimukti	Desa
			4	Mekarjaya	Desa
			5	Margamukti	Desa
			6	Sirnamulya	Desa
			7	Kebonjati	Desa
			8	Jatihurip	Desa
			9	Jatimulya	Desa
			10	Rancamulya	Desa
			11	Kotakaler	Kelurahan
			12	Situ	Kelurahan
			13	Talun	Kelurahan
19	Ganeas	8	1.	Ganeas	Desa
			2.	Dayeuhluhur	Desa
			3.	Cikoneng	Desa
			4.	Sukaluyu	Desa
			5.	Sukawening	Desa
			6.	Tanjunghurip	Desa
			7.	Cikondang	Desa
			8.	Cikoneng Kulon	Desa
20	Tanjungkerta	12	1.	Sukamantri	Desa
			2.	Cipanas	Desa
			3.	Gunturmekar	Desa
			4.	Mulyamekar	Desa
			5.	Banyuasih	Desa
			6.	Kertamekar	Desa
			7.	Kertaharja	Desa
			8.	Cigentur	Desa
			9.	Tanjungmekar	Desa
			10.	Tanjungmulya	Desa
			11.	Boros	Desa
			12.	Awilega	Desa
21	Tanjungmedar	9	1.	Cikaramas	Desa
			2.	Wargaluyu	Desa
			3.	Jingkang	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			4. Kamal	Desa
			5. Kertamukti	Desa
			6. Tanjungwangi	Desa
			7. Sukamukti	Desa
			8. Sukatani	Desa
			9. Tanjungmedar	Desa
22	Cimalaka	14	1. Cimalaka	Desa
			2. Galudra	Desa
			3. Cibeureum Kulon	Desa
			4. Naluk	Desa
			5. Nyalindung	Desa
			6. Trunamanggala	Desa
			7. Cikole	Desa
			8. Cibeureum Wetan	Desa
			9. Mandalaherang	Desa
			10. Licin	Desa
			11. Citimun	Desa
			12. Serang	Desa
			13. Padasari	Desa
			14. Cimuja	Desa
23	Cisarua	7	1. Cisarua	Desa
			2. Ciuyah	Desa
			3. Cimara	Desa
			4. Bantarmara	Desa
			5. Cipandanwangi	Desa
			6. Cisalak	Desa
			7 Kebon Kalapa	Desa
24	Tomo	9	1. Tomo	Desa
			2. Tolengas	Desa
			3. Darmawangi	Desa
			4. Marongge	Desa
			5. Jembarwangi	Desa
			6. Bugel	Desa
			7. Cipeles	Desa
			8. Karyamukti	Desa
			9. Mekarwangi	Desa
25	Ujungjaya	9	1. Ujungjaya	Desa
			2. Palabuan	Desa
			3. Palasari	Desa
			4. Keboncau	Desa
			5. Sakurjaya	Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Nama Desa/Kelurahan	Status
1	2	3	4	5
			6. Kudangwangi	Desa
			7. Sukamulya	Desa
			8. Cipelang	Desa
			9. Cibuluh	Desa
26	Jatigede	11	1. Cijeungjing	Desa
			2 Kadujaya	Desa
			3 Lebaksiuh	Desa
			4 Cintajaya	Desa
			5. Cipicung	Desa
			6. Mekarasih	Desa
			7 Ciranggem	Desa
			8. Cisampih	Desa
			9. Jemah	Desa
			10. Karedok	Desa
			11. Kadu	Desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumedang 2025

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah di Kabupaten Sumedang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan bahwa jenis perangkat daerah pada Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan serta Kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dimaksud, juga mengatur mengenai kriteria tipologi perangkat daerah, kelembagaan rumah sakit daerah, nomenklatur perangkat daerah serta jabatan perangkat daerah. Implementasi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Namun pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan lainnya tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan hukum. Beberapa perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah ini meliputi aspek perubahan bentuk kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipologi B sebagaimana hasil evaluasi kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dengan pertimbangan aspek efektivitas pelaksanaan urusan, terjadi pengalihan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga pengalihan urusan pemerintahan ini berdampak pada perubahan nomenklatur dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial dengan Tipologi A, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan disertai dengan peningkatan Tipologi yang semula Tipe B menjadi Tipe A. Selanjutnya perubahan kelembagaan Rumah sakit Daerah yang semula berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi unit organisasi bersifat khusus dibawah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada aspek nomenklatur, dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah yaitu, yang semula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Aspek terakhir yang dilakukan adalah penyesuaian jabatan perangkat daerah khusus pada rumah sakit daerah.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Susunan Perangkat Daerah dimaksud, terdiri atas :

a. Sekretariat Daerah tipe A;
b. Sekretariat DPRD tipe A,
c. Inspektorat Daerah tipe A,
d. Dinas Daerah terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat;
    5. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
    6. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
    7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
    8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

9. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
12. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tipe A menyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Urusan Pemeringtahan bidangStatistik;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian ;
15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
16. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan, Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
17. Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
18. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
19. Dinas Perikanan Dan Peternakan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan dan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Peternakan;

e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan ;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan Keuangan;
4. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan keuangan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Buahdua tipe A;
2. Kecamatan Cimalaka tipe A;
3. Kecamatan Cimanggung tipe A;
4. Kecamatan Conggeang tipe A;
5. Kecamatan Darmaraja tipe A;
6. Kecamatan Jatigede tipe A;
7. Kecamatan Jatinangor tipe A;
8. Kecamatan Pamulihan tipe A;
9. Kecamatan Paseh tipe A;
10. Kecamatan Situraja tipe A;
11. Kecamatan Sumedang Selatan tipe A;
12. Kecamatan Sumedang Utara tipe A;
13. Kecamatan Tanjungkerta tipe A;
14. Kecamatan Tanjungsari tipe A;
15. Kecamatan Wado tipe A;
16. Kecamatan Jatinunggal tipe A;
17. Kecamatan Rancakalong tipe A;
18. Kecamatan Tomo tipe A;
19. Kecamatan Ujungjaya tipe A;
20. Kecamatan Cibugel tipe A;
21. Kecamatan Cisarua tipe A;
22. Kecamatam Cisitu tipe A;
23. Kecamatan Ganeas tipe A;
24. Kecamatan Sukasari tipe A;
25. Kecamatan Surian tipe A;
26. Kecamatan Tanjungmedar tipe A;

g. Kantor terdiri dari :
   a. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   b. Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah data pegawai berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2025 sebanyak 10.122 orang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9

Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2025

No	SKPD	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Struktural			Total
				II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20	24	1	4	2	51
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4	25	1	4	1	35
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	5	65	1	5	9	85
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	50	1	4	2	62
5	Badan Pendapatan Daerah	6	84	1	5	9	105
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	22	44	1	6	2	75
7	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	16	39	1	3	1	60
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	50	1	4	2	66
9	Dinas Kesehatan	1484	277	1	4	29	1795
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	19	38	1	3	1	65
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	11	129	1	5	10	156
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	24	241	1	5	13	284
13	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	11	48		5	1	65
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	24	337	1	6	23	391
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9	29	1	5	2	46
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	32	1	5	1	59
17	Dinas Pendidikan	5590	2974	1	5	9	8579
18	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4	79	1	5	30	119
19	Dinas Perhubungan	8	144	1	5	15	173
20	Dinas Perikanan Dan Peternakan	46	77	1	4	25	153
21	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	112	106	1	6	54	279
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	15	54	1	4	2	76

No	SKPD	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Struktural			Total
				II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Dinas Sosial	13	48		4	1	66
24	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	13	39	1	5	4	62
25	Inspektorat Daerah	57	16	1	6	1	81
26	Kecamatan Buahdua		22		1	7	30
27	Kecamatan Cibugel		18		2	7	27
28	Kecamatan Cimalaka	1	16		2	6	25
29	Kecamatan Cimanggung	1	24		2	7	34
30	Kecamatan Cisarua		18		2	6	26
31	Kecamatan Cisitu		28		2	8	38
32	Kecamatan Conggeang	1	20		2	7	30
33	Kecamatan Darmaraja		30		2	7	39
34	Kecamatan Ganeas	1	26		1	7	35
35	Kecamatan Jatigede		19		2	6	27
36	Kecamatan Jatinangor		19		2	7	28
37	Kecamatan Jatinunggal	2	22		2	6	32
38	Kecamatan Pamulihan		24		2	7	33
39	Kecamatan Paseh	1	19		2	7	29
40	Kecamatan Rancakalong	1	21		2	7	31
41	Kecamatan Situraja	1	24		2	7	34
42	Kecamatan Sukasari	1	20		1	6	28
43	Kecamatan Sumedang Selatan		29		2	7	38
44	Kecamatan Sumedang Utara	1	31		2	7	41
45	Kecamatan Surian	1	14		2	7	24
46	Kecamatan Tanjungkerta	1	15		2	7	25
47	Kecamatan Tanjungmedar		14		2	7	23
48	Kecamatan Tanjungsari		28		2	7	37
49	Kecamatan Tomo		28		2	7	37
50	Kecamatan Ujungjaya	1	25		2	5	33
51	Kecamatan Wado		18		2	7	27
52	Kelurahan Cipameungpeuk		10			5	15
53	Kelurahan Kota Kaler		13			4	17
54	Kelurahan Kotakulon		12			5	17
55	Kelurahan Pasanggrahan Baru		11			5	16
56	Kelurahan Regolwetan		7			5	12
57	Kelurahan Situ		12			5	17
58	Kelurahan Talun		12			5	17
59	Rumah Sakit Umum Daerah	612	216	1	8	1	838
60	Satuan Polisi Pamong Praja	56	168	1	5	14	244
61	Sekretariat Daerah	41	184	7	11	4	247
62	Sekretariat Dprd	6	61	1	4	2	74
	Total	**8276**	**6327**	**33**	**196**	**481**	**15313**

Sumber : BKPSDM Kab. Sumedang 31Desember 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp. 2.943.318.459.991,00** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar **Rp. 2.904.851.845.803,08** atau **98,69 %**. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		Persentase (%)
	Target	Realisasi	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
PENDAPATAN DAERAH	**2.943.318.459.991,00**	**2.904.851.845.803,08**	**98,69**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**698.437.352.527,00**	**659.239.630.761,08**	**94,38**
Pajak Daerah	331.553.573.179,00	312.573.783.700,00	94,27
Retribusi Daerah	340.780.073.450,00	324.898.341.320,00	95,33
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.236.555.322,00	9.963.879.399,00	75,27
Lain-lain PAD yang Sah	12.867.150.576,00	11.803.626.342,08	91,73
PENDAPATAN TRANSFER	**2.244.881.107.464,00**	**2.245.612.215.042,00**	**100,03**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.100.179.849.000,00	2.103.992.616.181,00	100,18
Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.701.258.464,00	141.619.598.861,00	97,87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Sumedang, 2026 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Target yang ditetapkan sebesar **Rp. 698.437.352.527,00** terealisasi sebesar Rp. **659.239.630.761,08** atau sebesar **94,38 %** yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 331.553.573.179,00 terealisasi sebesar Rp. 312.573.783.700,00 atau sebesar 94,27 %;
2. Hasil retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 340.780.073.450,00 terealisasi sebesar Rp. 324.898.341.320,00 atau sebesar 95,33 %;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 13.236.555.322,00 terealisasi sebesar Rp. 9.963.879.399,00 atau mencapai 75,27 %;
4. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 12.867.150.576,00 terealisasi sebesar Rp. 11.803.626.342,08 atau terealisasi sebesar 91,73 %.

b. Pendapatan Trasfer

Target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.244.881.107.464,00 terealisasi sebesar Rp. **2.245.612.215.042,00** atau mencapai **100,03 %** yang terdiri dari :

1. Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp. 2.100.179.849.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.103.992.616.181,00 atau mencapai 100,18 %;
2. Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp. 144.701.258.464,00 terealisasi sebesar Rp. 141.619.598.861,00 atau mencapai 97,87 %.

Komposisi belanja daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Jumlah pagu anggaran belanja daerah Tahun 2025 sebesar **Rp. 3.007.990.996.807,34** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.913.267.643.941,00** atau mencapai **96,85 %**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		Persentase (%)
	Target	Realisasi	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
BELANJA DAERAH	**3.007.990.996.807,34**	**2.913.267.643.941,00**	**96,85**
BELANJA OPERASI	**2.339.974.706.318,00**	**2.285.234.081.300,00**	**97,66**
Belanja Pegawai	1.261.021.221.804,00	1.243.401.568.813,00	98,60
Belanja Barang dan Jasa	1.018.726.500.514,00	981.808.012.496,00	96,37
Belanja Subsidi	775.655.000,00	702.187.500,00	90,52
Belanja Hibah	56.926.479.000,00	56.797.462.491,00	99,77
Belanja Bantuan Sosial	2.524.850.000,00	2.524.850.000,00	100,00
BELANJA MODAL	**192.239.246.288,00**	**182.135.665.627,00**	**94,74**
Belanja Modal Tanah	11.343.509.400,00	10.904.785.474,00	96,13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.972.173.513,00	63.511.104.318,00	89,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.185.893.737,00	50.912.350.195,00	99,46
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.110.414.638,00	53.280.324.140,00	96,67
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	114.055.000,00	113.851.500,00	99,82
Belanja Modal Aset Lainnya	3.513.200.000,00	3.413.250.000,00	97,15
BELANJA TIDAK TERDUGA	**29.956.169.801,34**	**664.976.500,00**	**2,21**
Belanja Tidak Terduga	29.956.169.801,34	664.976.500,00	2,21
BELANJA TRANSFER	**445.820.874.400,00**	**445.232.920.514,00**	**99,86**
Belanja Bagi Hasil	35.138.866.000,00	35.138.829.050,00	99,99
Belanja Bantuan Keuangan	410.682.008.400,00	410.094.091.464,00	99,85

Sumber : BKAD Kab. Sumedang, 2026 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa belanja daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Target Belanja Operasi dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 2.339.974.706.318,00** yang terealisasi sebesar **Rp. 2.285.234.081.300,00** Mencapai **97,66 %**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Belanja Pegawai dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.261.021.221.804,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.243.401.568.813,00 atau mencapai 98,60 %.
2. Target Belanja Barang dan Jasa dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.018.726.500.514,00 yang terealisasi sebesar Rp. 981.808.012.496,00 atau mencapai 96,37 %.
3. Target Belanja Subsidi dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 775.655.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 702.187.500,00 mencapai 90,52 %.
4. Target Belanja Hibah dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 56.926.479.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 56.797.462.491,00 mencapai 99,77 %.
5. Target Belanja Bantuan Sosial dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.524.850.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 2.524.850.000,00 mencapai 100 %.

b. Belanja Modal

Target Belanja Modal dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 192.239.246.288,00** yang terealisasi sebesar **Rp. 182.135.665.627,00** Mencapai **94,74 %,** dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Belanja Modal tanah dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 11.343.509.400,00 yang terealisasi sebesar Rp. 10.904.785.474,00 mencapai 96,13 %.
2. Target Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 70.972.173.513,00 yang terealisasi sebesar Rp. 63.511.104.318,00 mencapai 89,48 %.
3. Target Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 51.185.893.737,00 terealisasi sebesar Rp. 50.912.350.195,00 mencapai 99,46 %.
4. Target Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 55.110.414.638,00 yang terealisasi sebesar Rp. 53.280.324.140,00 mencapai 96,67 %.
5. Target Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 114.055.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 113.851.500,00 mencapai 99,82 %.
6. Target Belanja Modal Aset Lainnya dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.513.200.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 3.413.250.000,00 mencapai 97,15 %.

c. Belanja Tidak Terduga

Target Belanja Tidak Terduga dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 29.956.169.801,34** yang terealisasi sebesar **Rp. 664.976.500,00** mencapai **2,21 %**.

d. Belanja Transfer

Target Belanja Transfer dari anggaran APBD Tahun 2025 sebesar **Rp. 445.820.874.400,00** yang terealisasi sebesar **Rp. 445.232.920.514,00** mencapai **99,86 %,** dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Belanja Bagi Hasil dari anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 35.138.866.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 35.138.829.050,00 mencapai 99,99 %.
2. Target Belanja Bantuan Keuangan dari anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 410.682.008.400,00 yang terealisasi sebesar Rp. 410.094.091.464,00 mencapai 99,85 %.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

a. Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan kabupaten Sumedang mencakup (1) Aspek Geografi, (2) Aspek Demografi, (3) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (4) Aspek Daya Saing dan (5) Aspek Pelayanan Umum. Aspek-aspek tersebut sesungguhnya saling berhubungan satu dengan lainnya. Permasalahan dari setiap aspek diidentifikasi berdasarkan gambaran umum wilayah dan hasil analisis capaian/kinerja penyelenggaraan pembangunan yang menyertakan catatan-catatan kondisi dan permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Sumedang di periode pembangunan sebelumnya.

a. Aspek Geografi

1. Struktur Geologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berada di daerah dengan topografi pegunungan dan berbukit yang memiliki ketinggian 25 sampai 1.667 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sumedang merupakan daerah dengan tingkat gerakan tanah rendah hingga tinggi. Luas kawasan rawan bencana gerakan tanah mencapai kurang lebih 21.671 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektar tersebar di sebagian Wilayah Kabupaten. Struktur geologi Kabupaten Sumedang tersusun dari jenis batuan aluvial, produk gunung api muda, dan produk gunung api tua. Proses pelapukan yang terjadi pada batuan vulkanik akan menyebabkan terbentuknya batuan lapuk dan tanah yang bersifat residual. Sifat dari tanah residual sendiri yaitu mudah terlepas dan rentan akan terjadinya proses tanah longsor.

Disamping itu, Kabupaten Sumedang dilalui sejumlah sumber gempa patahan aktif yang berpotensi menyebabkan terjadinya gempa di antaranya Sesar Lembang, Sesar Baribis, Sesar Cicalengka, Sesar Cileunyi-Tanjungsari dan Sesar Tomo. Pada akhir tahun 2023 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang yang bersumber dari sesar

baru yang aktif akibat dari aktivitas sesar aktif yaitu Sesar Cileunyi-Tanjungsari. Akibat gempa bumi tersebut ditemukan sesar aktif baru yang melewati Sumedang yaitu Sesar Cipeles (Sumber BMKG, Tahun 2024).

2. Ancaman Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrim

   Bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari pengaruh perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Selain dipengaruhi struktur geologi, risiko bencana pergerakan tanah longsor semakin meningkat ketika curah hujan tahunan ekstrim diatas 3.000 mm atau saat fenomena la nina terjadi di wilayah Indonesia khsusunya Jawa Barat. Bencana banjir juga kerap terjadi pada wilayah Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Sumedang Selatan saat curah hujan tinggi.

   Ketika terjadi perubahan iklim dengan curah hujan yang rendah atau saat adanya fenomena el nino beberapa wilayah di timur dan utara Kabupaten Sumedang rentan mengalami kekeringan. Sedangkan Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor rentan kekeringan akibat daya dukung air yang telah melampaui ambang batas.

   Bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan kekeringan menyebabkan kerugian pada sektor pertanian, ketahanan pangan dan permukiman. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim juga menyebabkan timbulnya penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

3. Alih Fungsi Lahan Khususnya Lahan Produktif

   Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah pertanian di Jawa Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi rata-rata 20% dari total PDRB Kabupaten Sumedang. Dalam dua dekade terakhir terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang mengharuskan terjadinya alih fungsi lahan produktif di Kabupaten Sumedang. Proyek strategis nasional tersebut antara lain Bendungan Jatigede, Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Sadawarna, dan Bendungan Cipanas.

   Meskipun alih fungsi lahan pertanian mencapai lebih dari 1.000 hektar, namun Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas produksi pertanian dan pencetakan sawah baru. Namun disisi lain alih fungsi lahan pertanian juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan petani gurem di Kabupaten Sumedang.

   Alih fungsi lahan produktif juga disebabkan urban sprawl atau penyebaran permukiman yang tidak terkendali dari Kawasan Metropolitan Bandung telah menyebabkan. Urban Sprawl akan berpotensi meningkat di wilayah yang berdekatan dengan Kawasan Segitiga Emas Rebana. Pembangunan permukiman di Kabupaten Sumedang juga mendesak ke lahan yang berada di lereng dengan kemiringan landai dan agak curam.

b. Aspek Demografi

   Pertambahan penduduk yang eksponensial akan berdampak pada pembangunan kualitas sumber daya manusia, kesetaraan peluang dalam aktivitas ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan hidup dan tekanan terhadap lingkungan hidup. Dengan proyeksi rata-rata pertambahan penduduk 3,81% hingga tahun 2045, diperlukan peningkatan dan pemerataan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, hunian, sanitasi, air bersih, pangan dan energi. Peningkatan pelayanan dasar perlu memperhatikan pada kelompok perempuan dan usia lanjut yang diproyeksi akan semakin meningkat.

Kabupaten Sumedang tetap memperoleh bonus demografi pada rentang usia 30-44 tahun. Bonus demografi akan menjadi modal dalam peningkatan perekonomian. Oleh karena itu infrastruktur konektivitas dan mobilitas masyarakat akan semakin dibutuhkan. Infrastruktur jalan harus dapat menghubungkan seluruh wilayah simpul-simpul perekonomian. Begitu pula jaringan telekomunikasi dan informasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah.

Peningkatan kepadatan penduduk diproyeksikan masih berada di Kecamatan Jatinganor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Pamulihan. Kepadatan di empat kecamatan tersebut akibat peningkatan kebutuhan hunian di Wilayah Metropolitan Bandung. Kepadatan penduduk juga tetap terkonsentrasi di Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Cimalaka sebagai wilayah perkotaan Kabupaten Sumedang. Peningkatan kepadatan penduduk dapat terjadi di Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo sebagai dampak pengembangan Kawasan Segitiga Rebana.

Sistem pengelolaan sampah dan limbah perlu dipersiapkan sebagai eksternalitas pertambahan penduduk dan aktivitas sosial ekonominya. Pengelolaan sampah harus dimulai dengan mengurangi timbulan sampah dari rumah tangga dan pengolahan sampah di tingkat lingkungan. Aktivitas ekonomi yang meningkat juga perlu menjaga kawasan lindung dalam tata ruang sehingga tetap dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

c. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

1. Kemiskinan

Tren kemiskinan absolut di Kabupaten Sumedang menurun dalam 20 tahun terakhir. Namun demikian persentase penduduk miskin sebesar 9,36% (tahun 2023) masih menjadi permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan di Kabupaten Sumedang terkonsentrasi pada penduduk yang bermata pencaharian petani atau penduduk yang tergantung pada sektor pertanian. Dengan sumber daya alam yang mendukung hampir sepertiga rumah tangga di Kabupaten Sumedang bergantung pada sektor pertanian. Jika diproporsikan, kelompok penduduk miskin di sektor pertanian mencapai sebesar 35,71% pada tahun 2022.

Secara kewilayahan proporsi penduduk miskin tertinggi berada di sentra pertanian seperti Jatinunggal dan Jatigede. Sedangkan Kecamatan Cimanggung dan

Kecamatan Pamulihan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya.

Beberapa akar permasalahan yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di sektor pertanian antara lain pendapatan yang rendah, pola pertanian yang masih subsisten, penguasaan dan akses lahan yang makin terbatas, perubahan iklim, rendahnya kemampuan untuk melakukan pengolahan hasil pertanian, keterbatasan akses pasar, dan rantai niaga yang tidak efektif.

2. Ketimpangan

Gini Ratio ini menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, di mana semakin rendah nilai Gini, semakin merata distribusi pendapatannya. Pada tahun 2024, Sumedang mencatatkan Gini Ratio sebesar 0,337 untuk wilayah perkotaan dan perdesaan; 0,349 untuk wilayah perkotaan; dan 0,319 untuk wilayah perdesaan. Ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam ketimpangan, dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat (0,434 untuk perkotaan) dan Indonesia (0,399 untuk perkotaan). Hal ini mencerminkan bahwa Sumedang telah berhasil mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan secara keseluruhan, lebih baik dari rata-rata provinsi dan nasional.

Namun, meskipun ada perbaikan secara keseluruhan, terdapat fluktuasi yang lebih besar di wilayah perdesaan, terutama pada tahun 2022 yang mencatatkan ketimpangan yang lebih tinggi. Gini Ratio untuk perdesaan Sumedang sempat mencapai 0,374 pada tahun 2022, yang menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang lebih tinggi di daerah pedesaan. Meskipun demikian, ketimpangan di perdesaan menunjukkan penurunan kembali di 2024 menjadi 0,319, yang mengindikasikan adanya perbaikan meskipun fluktuasi masih terlihat.

Grafik 1.2 Komparasi Gini Ratio

3. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi permasalahan pembangunan daerah dalam periode RPJPD 2005-2025. TPT tertinggi terjadi pada

tahun 2020 yaitu sebesar 9,89% dan TPT terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,41%. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja serta pembatasan aktivitas pada saat Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan peningkatan TPT.

TPT Kabupaten Sumedang masih didominasi penduduk usia 15-24 tahun dengan proporsi diatas 50% dari keseluruhan angkatan kerja. Tingginya TPT juga didominasi para pengangguran terdidik sebesar akibat ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja (job-education mismatch). Ketidaksiapan mental bagi angkatan kerja usia muda menjadi faktor yang cukup mempengaruhi peningkatan jumlah pengangguran. Selepas masa pandemi jumlah pengangguran dengan karakteristik putus asa semakin meningkat, sedangkan pengangguran dengan karakteristik sedang mencari pekerjaan jumlahnya menurun.

Rendahnya tingkat serapan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang dipengaruhi pula oleh tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tergolong tinggi. UMK Kabupaten Sumedang hampir setara dengan UMK Kabupaten Bandung dan UMK Kabupaten Bandung Barat yang tergolong daerah industri. Hal ini menyebabkan penanaman modal untuk industri padat karya lebih bergeser ke arah pengembangan Kawasan Segitiga Rebana terutama Kabupaten Majalengka dengan UMK lebih rendah dari Kabupaten Sumedang.

b. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang sejak tahun 2010 menunjukkan tren yang positif meningkat meskipun kontraksi perekonomian yang dalam pernah terjadi saat Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 hingga mencapai -1,12%. Pertumbuhan ekonomi daerah pada rentang antara 4,0 – 6,5 %, belum dapat menjadi akselarator penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Tiga kontributor PDRB terbesar yaitu Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan menjadi kantung kemiskinan dikarenakan distribusi dari pertumbuhan yang tidak inklusif. Daya lenting (resiliensi) perekonomian Kabupaten Sumedang juga tergolong lambat. Tercatat perlu waktu enam tahun untuk memulihkan ekonomi kembali diatas 6% sejak perekonomian tertekan pada tahun 2014. Begitu pula sejak disrupsi ekonomi akibat Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang belum dapat kembali tumbuh diatas 6%. Beberapa faktor penyebab tingkat resiliensi perekonomian Kabupaten Sumedang yang lambat antara lain ketergantungan ekonomi pada sektor padat karya, infrastruktur yang belum merata, serta begitu kompleksnya penanganan krisis ekonomi karena tidak hanya ditataran lokal tapi dipengaruhi juga oleh pengaruh regional yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan pemerintah daerah.

1. Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap perlu diprioritaskan dalam perencanaan permbangunan daerah tahun 2025-2029. Pemerintah daerah perlu

mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia untuk menumbuhkan produktivitas. Pada aspek pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sumedang masih tergolong rendah. Pembangunan pendidikan selama dua puluh tahun terakhir menghantarkan capaian RLS tahun 2024 sampai dengan 8,74 tahun dan HLS tahun 2024 sampai dengan 13,02 tahun.

Adapun pengeluaran per kapita yang mengindikasikan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baru mencapai 11,59 juta rupiah pada tahun 2024.

Pembangunan manusia yang diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 mencapai 74,57 poin mendingkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 74,02 poin.

Selain itu Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara lak-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024 sebesar 96,22 poin, meningkat disbanding tahun 2023 yang mencapai 96,13 poin. Nilai IPG ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IDG Kabupaten Sumedang Tahun 2024 mencapai 76,99 poin, meningkat disbanding tahun 2023 yang mencapai 72,60 poin atau di atas Provinsi Jawa Barat dengan 72,76 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dibanding tahun sebelumnya.

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumedang tahun 2024 sebesar 0,217 poin masuk kategori ketimpangan rendah. Hal ini penurunan signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 0,438 poin. Nilai ini lebih rendah dari IKG Jabar sebesar 0,458 poin. Mencermati ketimpangan gender di Kabupaten Sumedang masuk katagori rendah, maka peran semua pihak dibutuhkan untuk terus

mempertahankan dan meningkatkan upaya di berbagai dimensi agar perempuan memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan kapasitasnya.

Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumedang. Faktor lainnya adalah keterbatasan dan ketidaksetaraan akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

b. Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya

Keseimbangan pembangunan selain pembangunan secara fisik tapi harus juga di perkuat dan mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya. Hal tersebut akan membangun kekuatan secara mental dan spiritual sehingga dapat tercipta situasi yang kondusif dan harmonis dalam berbagai aspek pembangunan.

Selain dukungungan regulasi, kondusifitas wilayah juga sangat berperan dalam mendukung iklim investasi dan pembangunan. Terkait hal tersebut, dalam rangka Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban terutama kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara maupun kehidupan beragama; dengan tujuan menguatkan Komitmen kebangsaan, memelihara toleransi, membangun tindakan anti kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi.

Selain itu upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal menjadi hal yang sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal di Kabupaten Sumedang.

Modernisasi yang semakin menguat di Tengah perkembangan global mengakibatkan berkurangnya menjaga nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini tentunya perlu diperhatikan seiring dengan teknologi informasi yang berkembang cepat perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan.

d. Aspek Daya Saing

1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang masih lambat, hal tersebut dikarenakan Struktur ekonomi Kabupaten Sumedang sejak 2019 masih didominasi 3 sektor utama (Industri, Pertanian, dan Perdagangan), sehingga sangat rentan terhadap guncangan eksternal dapat di cirikan ketergantungan terhadap Industri pengolahan yang berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB sebesar 19,32% pada Tahun 2024 yang terus menurun dari tahun 2023, dikarenakan Kawasan industri hanya di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor. Sedangkan untuk sektor pertanian masih mendominasi tenaga kerja namun secara proporsi terus menurun sejak tahun 2020 dikarenakan profesi sebagai petani bukan menjadi harapan untuk

generasi muda. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 19,27%. Sementara untuk sektor perdagangan berkontribusi sebesar 15,82%.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat belum dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan masih terbatasnya kapasitas fiskal menjadi salah satu faktor penyebab program pembangunan belum menjangkau seluruh wilayah dan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai sektor perekonomian masih belum dikembangkan optimal dalam dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Sektor- sektor tersebut antara lain meliputi pariwisata, kelautan dan perikanan, ekonomi kreatif, serta industri pengolahan sekala kecil (IKM/UMKM).

2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pusat dari pembangunan sosial ekonomi karena mempunyai kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan dalam proses pembangunan. Salah satu indikator yang menentukan daya saing SDM adalah tingkat Pendidikan.

Rata-rata Lama sekolah (RLS) di Kabupaten Sumedang sampai tahun 2024 berdasarkan data dari BPS baru 8,74 tahun. Capaian ini masih lebih rendah dibanding RLS Provinsi Jawa Barat dan RLS Nasional. Sementara untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sumedang sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang terus meningkat. Harapan lama sekolah anak usia tertentu di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah 13,02 tahun. Lebih tinggi disbanding HLS Provinsi Jawa Barat namun masih berada di bawah HLS Nasional. Tingkat Pendidikan ini tentunya akan memperbesar peluang untuk anak mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang.

Salah satu indikator lainnya yang dapat menggambarkan daya saing sumber daya manusia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 mencapai 69,24%, meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 67,76%, artinya bahwa pada tahun 2024 menggambarkan semakin banyak penduduk usia kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan.

3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah

Kondisi jalan mantap merujuk pada kondisi jalan yang layak untuk dilalui kendaraan dan tidak mengalami kerusakan signifikan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas atau membahayakan keselamatan pengguna jalan. Suatu jalan dinyatakan dalam kondisi mantap apabila Permukaan jalan rata, tidak berlubang, dan tidak bergelombang secara signifikan meskipun ada sedikit kerusakan namun masih bisa dilewati dengan aman dan nyaman.

Jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang menunjukan tren meningkat secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Puncak capaian terjadi pada tahun 2023 sebesar 88,24% yang menandakan keberhasilan dalam program pembangunan dan pemeliharaan jalan. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 87,54%. Adanya penambahan ruas jalan baru serta kerusakan akibat bencana alam atau cuaca serta keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan jalan menjadi salah satu faktor penurunan capaian.

Jembatan merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi yang berfungsi menghubungkan wilayah, mendukung konektivitas antar-wilayah, serta menunjang kelancaran distribusi barang dan mobilitas penduduk. Kondisi jembatan yang mantap mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan rutin, rehabilitasi, serta pembangunan jembatan baru salah satu upaya yang dilakukan agar jembatan berada dalam kondisi mantap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 tercatat panjang jembatan dalam kondisi mantap adalah 2.819,08 meter.

Pengelolaan sistem irigasi yang efektif merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di tingkat daerah. Daerah irigasi yang tertata dengan baik berperan besar dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian secara merata, berkelanjutan, dan tepat waktu. Tiga pilar pengelolaan sumber daya air meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang mencapai 2.115.811 meter yang mengairi lahan seluas 30.069 Ha, dari luasan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kondisi irigasi yang mengairi, yaitu irigasi dengan kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Luasan areal yang terairi irigasi baik dengan kondisi baik, rusak ringan ataupun rusak berat sangat fluktuatif. Akan tetapi di Tahun 2024, areal yang diairi oleh irigasi kondisi baik semakin bertambah menjadi 21.469 Ha dari 21.108 Ha di tahun 2023. Hal ini akibat dari adanya rehabilitasi ataupun perbaikan kondisi irigasi yang rusak berat. Sehingga di tahun 2024 areal yang diairi irigasi dengan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 3.765 Ha menjadi 3.404 Ha. Begitupun dengan panjang irigasi primer dan sekunder yang mengalami peningkatan panjang irigasi dengan kondisi baik di tahun 2024.

Peningkatan kondisi irigasi baik dari sisi luasan areal maupun panjangnya sangat berpengaruh terhadap rasio jaringan irigasi yang telah mencapai 70,37 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem irigasi di Kabupaten Sumedang berfungsi optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi kegiatan pertanian serta pengelolaan sumber daya air. Adapun sarana penyedia air untuk irigasi di Kabupaten

Sumedang berasal dari 15 titik mata air dan 3 (tiga) buah bendungan, yaitu Bendungan Jatigede, Bendungan Cipanas dan Bendungan Sentig.

Infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat konkuren dalam rangka penyediaan akses Masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Di Kabupaten Sumedang sampai tahun 2024 persentase cakupan pelayanan akses air minum layak baru 82,34% yang terus diupayakan melalui program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dari sisi penanganan persampahan, Kabupaten Sumedang dibagi kedalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

a. Wilayah I Jatinangor meliputi 8 kecamatan;
b. Wilayah II Sumedang Kota meliputi 9 kecamatan;
c. Wilayah III Jatigede meliputi 9 kecamatan.

Sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Permasalahan persampahan tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, volume sampah yang dihasilkan juga terus bertambah setiap tahunnya. Jika tidak dikelola secara baik dan benar, sampah dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan, penyakit, serta berbagai masalah perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan pengelolaan sampah, sehingga jumlah sampah yang dikelola menunjukan tren positif. Pada tahun 2023 jumlah sampah yang dikelola meningkat 5.105,53 ton dari tahun sebelumnya menjadi 61.896,40 ton (35,41%). Pengelolaan sampah ini dilakukan melalui metode pengurangan sampah (pendaur ulangan sampah) dan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir. Meskipun demikian Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang masih belum terlaksana secara optimal, karena jumlah sampah yang tidak dikelola masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang terkelola.

Untuk sektor perumahan, sejak tahun 2021 dikembangkan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (RTHL) yang memiliki definisi operasional yakni rumah yang harus memenuhi keseluruhan aspek: 1) secara teknis memenuhi syarat ketahanan bangunan; 2)memiliki luas per kapita minimal 7,2 m2; 3)memiliki akses air minum layak; dan 4) memiliki akses sanitasi layak.

Capaian Persentase RTHL Kabupaten Sumedang 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2023) terus menurun, Tahun 2022 pada angka 66,75 dan terakhir pada angka 59,63 di tahun 2023.

Sebelum tahun 2021 penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah, dan cakupan pelayanan persampahan. Namun sejak tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan Sustainable Development Goals (SDG).

3. Daya Saing Iklim Investasi

Dalam Upaya mendorong daya saing Investasi di Kabupaten Sumedang saat ini sudah terbit Saat ini telah terbit Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentng Pemberian Insentif Kemudahan Investasi yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi sehingga akan menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.

Dengan adanya regulasi ini adalah untuk diharapkan akan meningkatkan Investasi di Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis mengenai nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa tren yang signifikan, terutama dampak dari pandemi COVID-19. Nilai ICOR terendah dalam 13 tahun terakhir dicapai tahun 2019, sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Angka ini menunjukkan efisiensi yang relatif baik dalam investasi untuk menghasilkan output ekonomi. ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun ini cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lonjakan besar dalam ICOR pada tahun 2020 mengindikasikan penurunan efisiensi investasi yang drastis. Hal ini disebabkan oleh gangguan ekonomi yang parah akibat pandemi Covid-19. Investasi yang dilakukan selama tahun 2020 tidak mampu menghasilkan pertumbuhan output yang signifikan karena pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasok, dan penurunan permintaan agregat.

Seiring pemulihan pandemi Covid-19, penurunan ICOR menunjukkan bahwa efisiensi investasi terus membaik, mendekati tingkat pra-pandemi. Ini menandakan bahwa ekonomi Sumedang mulai stabil dan investasi mulai memberikan hasil yang lebih baik dalam hal pertumbuhan output. Pencapaian di tahun 2023 sebesar 4,83 mengindikasikan untuk meningkatkan 1 trilyun rupiah pada PDRB maka diperlukan 4,83 trilyun investasi. Angka ini menunjukkan bahwa efisiensi investasi pada tahun

2023 hampir kembali ke tingkat pra-pandemi (2019). Namun demikian pada tahun 2024 ICOR Kabupaten Sumedang Kembali mengalami kenaikan menjadi 5,72 artinya untuk meningkatkan 1 trilyun rupiah pada PDRB maka diperlukan 5,72 trilyun investasi. Hal ini menunjukkan perlunya berbagai upaya untuk perbaikan lebih lanjut dalam efisiensi investasi.

e. Aspek Pelayanan Umum

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi yang menjadi suatu kebutuhan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Arah perubahan tersebut lebih diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas regulasi, peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolok ukur dari keberlanjutan pelaksanaan birokrasi tersebut.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, di mana dirasakan terdapat kekurangan pada aspek manajemen SDM, kepemimpinan, kebijakan, penentuan perundang-undangan, SOP, sistem penganggaran berbasis kinerja, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi, penyusunan perencanaan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam struktur organisasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024 berdasarkan publikasi Kementerian PANRB, menembus angka 89,62. Demikian juga capaian indikator lainnya di tahun 2024, seperti Indeks Profesionalitas ASN (IPA) berdasarkan informasi dari BKN, menembus 83,75, ini pun sama menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional. Terkait Indeks Pelayanan Publik, Kementerian PANRB memberikan apresiasi kepada Pemda Kabupaten Sumedang sebagai salah satu yang terbaik tingkat nasional dengan capaian sebesar 4,58. Untuk Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dari BPKP, capaiannya cukup baik yakni ada pada level 3. Adapun untuk Kepatuhan Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Ombudsman, nilainya juga sangat baik mencapai 92,90. Sedangkan untuk hasil MCP yang dirilis KPK, nilainya menembus 91.

Indikator lainnya untuk melihat kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dilihat dari capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipublikasikan Kementerian PANRB, dimana pada tahun 2024 mencapai 77,44, salah satu yang terbaik di tingkat Jawa Barat maupun Nasional. Terakhir, untuk Indeks Sistem Merit tahun 2024 sebagaimana disampaikan KASN mencapai 348, terbaik pertama tingkat nasional untuk kategori kabupaten.

Namun dengan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumedang yang sudah cukup baik belum dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pelayanan Publik

Salah satu indikator yang dapat mengukur Tingkat kualitas pelayanan public di suatu Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Publik yang pengukurannya dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang berdasarkan data yang dirilis Kementerian PANRB untuk Tahun 2024 adalah 4,58. Nilai ini sedikit meningkat dibanding tahun 2023 yang mencapai 4,19 poin.

Selain Indeks Pelayanan Publik, hasil penilaian Lembaga Ombudsman selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukan kualitas pelayanan public yang semakin baik dilihat dari sisi kepatuhan dalam menerapkan standar pelayanan. Nilai Tahun 2023 hasil penilaian Ombudsman adalah 92,35 dengan kategori A. Untuk tahun 2024 nilai kepatuhan semakin baik pada angka 92,90 dengan kategori A (opini Kualitas Tertinggi).

Dari hasil penilaian tersebut belum berdampak terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat secara merata di setiap wilayah karena perlu dukungan sarana prasarana dan Sumber Daya aparatur pelayanan yang memadai.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan harapan menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan optimal.

Nilai SPBE diperoleh dari akumulasi nilai masing-masing Domain penyangga SPBE. Pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang yang dihasilkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk pencapaian yang lebih baik, perlu dilakukan proses evaluasi pada berbagai aspek tidak hanya dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik saja, tetapi juga dilakukan oleh Perangkat Daerah lain terkait aspek SPBE. Dokumen Arsitektur SPBE perlu diperbarui sesuai dengan format terbaru. Konten Arsitektur SPBE dan Peta Rencana harus diselaraskan dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Perlunya standar proses pengembangan aplikasi yang mengikuti kebutuhan namun tetap memenuhi dokumentasi SDLC. Diperlukan pemberdayaan pada Perangkat Daerah yang mempunyai peran masing-masing indicator SPBE sesuai

tugas dan fungsi pokok serta diperlukan kerja Tim Koordinasi SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu melibatkan Inspektorat sebagai PIC utama dan Manajemen SPBE perlu dilaksanakan pada semua aktivitas oleh semua Perangkat Daerah.

4. Inovasi Daerah

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Berdasarkan banyak bukti empiris, inovasi merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pencapaian daya saing sebuah daerah. Inovasi tidak dapat berkembang dengan sendirinya, melainkan harus didukung berbagai elemen lain. Dukungan nyata agar inovasi dapat berkembang dengan optimal adalah dengan membangun suatu sistem, yaitu sistem inovasi.

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terus meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya penyusunan inovasi di Kabupaten Sumedang. Dalam kurun waktu 2021-2022 telah tersusun sebanyak 330 inovasi.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kematangan inovasi yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 2 aspek yakni aspek Satuan Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi 3 variabel dan 15 indikator. Serta Aspek Satuan Inovasi terbagi menjadi 5 variabel dan 20 indikator. Pada tahun 2021 Kabupaten Sumedang memperoleh Indeks Inovasi sebesar 60,19 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dengan indeks 63,21. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 60,06 point. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 73,23 point. Prestasi yang didapatkan tersebut diharapkan menjadi pondasi untuk memperoleh predikat kategori Kabupaten Terinovatif

Dari hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tersebut dapat diketahui bahwa inovasi yang disusun oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang, tingkat kematangannya belum optimal. Inovasi tersebut sudah berjalan dengan baik dilapangan, namun belum dilengkapi dengan data dukung administrasi.

Kinerja Pembangunan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih

terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan pembangunan kedepan dari seluruh aspek akan semakin besar, sehingga kita perlu meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Sumedang akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, pada gambar berikut dapat dilihat skematis rangkuman permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumedang berdasarkan aspek-aspek sebagaimana telah dijelaskan. Selanjutnya dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikenali akar permasalahan pada setiap aspek sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12

Kerangka Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sumedang

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
1.	Geografi	Struktur Geologi	Struktur geologi yang rawan bencana	· Kabupaten Sumedang masuk dalam Kawasan gempa yaitu Sesar Lembang, Sesar Baribis, Sesar Cicalengka, Sesar Cileunyi-Tanjungsari dan Sesar Tomo serta sesar patahan baru (sesar cipeles). · Secara geografis menjadi zona merah kawasan rawan longsor. · Belum optimalnya kinerja penanggulangan bencana terutama pada aspek kelembagaan, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan sistem pemulihan pasca bencana.
		Ancaman perubahan iklim dan cuaca ekstrim	Bencana hidrometeorologi	· Resiko Banjir masih tinggi di beberapa wilayah (Cimanggung, Jatinangor, Ujungjaya, Sumedang Utara dan Selatan). · Tingginya ancaman kekeringan terhadap produktivitas pertanian. · Masih rendahnya peningkatan kualitas lingkungan hidup, Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana.
		Alih fungsi lahan khususnya lahan produktif	Berkurangnya Lahan produktif	· Proyek Strategis Nasional (Tol Cisumdawu, Waduk Jatigede, Waduk Sadawarna dan Waduk Cipanas) yang mengurangi lahan produktif. · Masih Rendahnya mencetak lahan pertanian dan sawah baru. · Masuk ke Kawasan strategis Nasional (Kawasan Rebana dan Cekungan Bandung). · Peningkatan penyebaran Kawasan permukiman dan perumahan. · Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
2.	Aspek Demografi	Pertumbuhan Penduduk	Laju pertambahan penduduk	· Tingginya tingkat kelahiran.
				· Penanganan penduduk usia tua belum optimal.
				· Tingginya angka urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan.
3.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan Ekonomi	Kemiskinan	· Tingginya angka kemiskinan di sektor pertanian antara lain pendapatan yang rendah, pola pertanian yang masih subsisten, penguasaan dan akses lahan yang makin terbatas, perubahan iklim, rendahnya kemampuan untuk melakukan pengolahan hasil pertanian, keterbatasan akses pasar, dan rantai niaga yang tidak efektif.
				· Kebijakan yang belum menerapkan konsep *pro poor, pro job, pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan *community empowerment*.
				· Masih ditemukan belum tepat sasaran terkait bantuan Sosial.
				· Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam.
			Ketimpangan	· Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi karena disparitas upah tenaga kerja yang lebih lebar dan diversitas jenis pekerjaan yang lebih beragam.
				· Ketimpangan akses pemerataan pembangunan ekonomi.
				· Kebijakan yang mengatur redistribusi pendapatan dan pajak belum menjadi instrumen yang mengurangi ketimpangan.
			Penganguran	· Produktivitas sumber daya manusia yang masih rendah.
				· Belum optimalnya sistem pengembangan lapangan kerja baru berbasis kewirausahaan (pelatihan wirausaha, pendampingan usaha, bantuan perijinan, akses jejaring pemasaran, analisa laporan keuangan, dan akses permodalan sesuai kebutuhan).
				· Pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja.
				· Belum *link and match* nya antara Pendidikan dengan dengan kebutuhan pasar kerja.
				· Keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan kaum disabilitas ke dunia kerja.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
			Pertumbuhan Ekonomi	· Masih tergantungnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. · Masih rendahnya Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata. · Kinerja ekosistem ekonomi digital yang belum optimal karena belum meratanya infrastruktur digital dan literasi digital bagi pelaku usaha. · Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan pendapatan terutama di sektor ekonomi kreatif. lapangan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).
		Kesejahteraan Sosial Budaya	Kualitas Sumber Daya Manusia.	· Masih minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan dasar. · Masih kurangnya kualitas, distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. · Jangkauan akses ke pelayanan dasar terbatas karena ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas. · Tingkat kesadara masyarakat yang masih rendah terhadap kesehatan mental. · Masih Tingginya angka kematian Ibu dan Bayi. · Belum Optimalnya pelayanan menuju New Zero Stunting. · Belum meratanya Pelayanan jaminan Kesehatan. · Rendahnya partisipasi angkatan kerja Perempuan dibanding laki-laki karena aspek kesempatan kerja dan penghasilan. · Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kabupaten Sumedang masih pada kategori menengah kebawah.
			Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya	· Rendahnya peran ekonomi budaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, partisipasi pendidikan, serta ketahanan sosial yang dapat menciptakan sikap toleran dan rasa aman bagi masyarakat. · Belum optimalnya peran nilai agama dalam membentuk nilai-nilai masyarakat, motivasi, dan kontrol sosial kehidupan bermasyarakat. · Menurunnya nilai budaya lokal akibat perkembangan teknologi. · Menurunnya tingkat mental para generasi muda dalam kehidupan.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
4.	Aspek Daya Saing	Daya Saing Ekonomi	Lambatnya Pertumbuhan ekonomi	· Belum meratanya infratruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. · Proyek Strategis Nasional belum berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. · Masih rentannya sektor-sektor ekonomi akibat dampak dari resesi global maupun regional. · Belum optimalnya pengembangan ekonomi pada sektor ekonomi kreatif, Perdagangan, Industri padat modal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasar Induk dan UMKM. · Belum optimalnya pemanfaatan potensi Sumber Daya alam.
		Daya Saing Sumber Daya Manusia	Capaian IPM Kabupaten Sumedang masih rendah.	· Rendahnya partisipasi sekolah dan tingginya anak tidak sekolah. · Belum optimalnya literasi digital dan pemanfaatan TIK dalam meningkatkan daya saing SDM. · Kurangnya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja. · Masih Rendahnya usia kerja yang memperoleh pekerjaan. · Pengeluaran per kapita masih rendah di bawah provinsi dan nasional.
		Daya Saing Infrastruktur Wilayah	Masih rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur	· Cakupan Pelayanan Irigasi belum memadai dengan luas lahan pertanian yang terairi irigasi teknis. · Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih dan bersanitasi layak masih rendah. · Infrastruktur Konektivitas pendukung perekonomian belum merata. · Kualitas permukiman dan Perumahan serta sarana prasarana pendukungnya masih rendah. · Kecepatan penanganan terhadap kerusakan infrastuktur belum optimal. · Perencanaan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah dan limbah belum optimal. · Infrastruktur pengembangan Digital belum merata. · Masih rendahnya Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. · Belum meratanya Infrastruktur Ruang Publik terbuka hijau yang Ramah anak dan Lansia di setiap Kecamatan.

No	Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan	Uraian Masalah	Akar Masalah
		Daya saing Investasi	Tingkat Investasi masih rendah	· Penerapan Regulasi terkait investasi belum optimal. · Belum optimalnya dukungan penyediaan infrastruktur wilayah yang dapat mendorong aksesibilitas terhadap lokasi investasi potensial.
5.	Aspek Pelayanan Umum	Reformasi Birokrasi	Belum Optimalnya penyelenggaraan pemerintah berintegritas.	· Sistem Tata Kelola pemerintahan belum terpadu. · Sarana dan prasarana pemerintahan yang belum memadai di beberapa perangkat daerah · Profesionalisme aparatur dikaitkan dengan beban kerja yang belum merata. · Distribusi ASN belum sesuai kebutuhan organisasi. · Kapasitas birokrasi yang belum adaptif dan responsive terhadap dinamika global dan tuntutan masyarakat. · Akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal dan merata.
		Pelayanan Publik	Tingkat pelayanan publik belum optimal	· Optimalisasi Pelayanan kepada masyarakat belum merata. · Masih terdapat pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. · Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik.
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum optimalnya dampak Penerapan SPBE terhadap Tata kelola Pemerintahan	· Belum terpadu penerapan SPBE di setiap perangkat daerah. · Sistem informasi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan menggunakan SIPD sehingga tingkat sangat tergantung pada server pemerintah pusat (kemendagri).

Sumber: Analisis BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merinci permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah di Kabupaten Sumedang yang menjadi hak dan kewajiban setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1.13 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pendidikan		
Belum meratanya pelayanan pendidikan yang memadai	Pelayanan Pendidikan belum Optimal yang didukung sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia yg memadai	Literasi peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum mencapai 62,20% di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sehingga masih perlu peningkatan (Capaian Literasi)
		Masih rendahnya Numerasi peserta didik yang telah mencapai kompetensi mencapai 51,92% pada tahun 2023 di Kabupaten Sumedang (Capaian Numerasi)
		Karakter peserta didik pada jenjang SD sebesar 89,74% dan jenjang SMP 47,93% di Kabupaten Sumedang sehingga masih perlu dikembangkan (Capaian Surver Karakter)
		Persentase Sebaran Guru Sekolah Dasar (Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru PAI, dan Guru PJOK) masih rendah yaitu 50,30% (Jumlah Guru Ideal jenjang Sekolah Dasar sebanyak 6.313 orang, Keadaan Guru saat ini sebanyak 4.269 orang, sehingga kebutuhan guru saat ini sebanyak 2.044 orang)
		Persentase Sebaran Guru Sekolah Menengah Pertama (Kepala Sekolah, Guru PAI, Guru PKn, Guru B.Indo, Guru Math, Guru IPA, Guru IPS, Guru Ing, Guru SenBud/Muatan Lokal, Guru Prakarya, Guru BK, dan Guru PJOK) masih rendah yaitu 45,58% (Jumlah Guru Ideal jenjang Sekolah Dasar sebanyak 2.145 orang, Keadaan Guru saat ini sebanyak 1.484 orang, sehingga kebutuhan guru saat ini sebanyak 661 orang)
		Masih rendahnya Jumlah pendidik yang memiliki ijazah S1/D4, S2, dan S3 pada jenjang PAUD yaitu 37,16% dari total pendidik di seluruh satuan PAUD formal maupun nonformal (Proporsi Pendidik Berijazah Minimal S1/D4)
		Masih rendahnya Rasio Penilik PAUD DIKMAS yang saat ini 1:27 lembaga sedangkan rasio ideal adalah 1:10 lembaga
		Masih rendahnya Rasio Pengawas TK yang saat ini 1:20 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:15 satuan Pendidikan
		Masih rendahnya Rasio Pengawas SD yang saat ini 1:14 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:10 satuan Pendidikan
		Masih rendahnya Rasio Pengawas SMP yang saat ini 1:11 satuan pendidikan sedangkan rasio ideal adalah 1:7 satuan Pendidikan
		Rendahnya Persentase peserta didik yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD, yaitu 49,22% dari seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD (Angka Kesiapan Sekolah)
		Masih terdapat sekolah yang kekurangan RKB terutama di wilayah padat penduduk
		Masih terdapat bangunan sekolah yang rusak dan membahayakan siswa dan membahayakan warga sekolah
		Masih banyak sekolah sekolah yang kekurangan TIK dalam mendukung proses belajar mengajar contohnya dlam melaksankan AKM. Serta msih terdapat sekolah sekolah yang tidak terjangkau oleh jringan internet

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kesehatan		
Pelayanan kesehatan yang belum merata di setiap wilayah	Pelayanan kesehatan belum optimal	Tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian Balita (AKI/AKB)
		Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan
		Masih terdapat kesulitan akses ke pelayanan Kesehatan
		Jumlah tempat tidur di RSUD masih belum ideal
		Belum optimalnya UHC (Universal Health Coverage
	Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting	Masih terdapatnya kasus stunting
	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular belum optimal	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) dan Tidak Menular
	Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal	Pola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Belum meratanya Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah	Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis Masih kurang Memadai	Lebar Jalan Kabupaten dan jalan strategis rata- rata kurang memenuhi standar Jalan Kabupaten
		Akses Jalan menuju akses ke Pariwisata kondisi nya rusak sedang
		Akses Jalan menuju akses ke Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE kondisinya rusak sedang
		Kondisi Jalan dan Saluran Drainase Jalan Kabupaten yang terlintasi oleh akses jalur tol kondisinya rusak berat
		Jalan Kabupaten yang berada di perbatasan wilayah kondisinya masih rusak berat.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Rendahnya Sumber daya air	Cakupan Area Irigasi masih Rendah	Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air yang belum optimal
		Jaringan irigasi masih banyak mengalami kerusakan
		Banyak sungai dan sumber daya air lainnya yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor
		Banyaknya lokasi jaringan irigasi yang terdampak oleh bencana banjir/longsor
		Perubahan fungsi ruang pertanian menjadi perumahan/permukiman dan infrastruktur lainnya
	Ketersediaan Air Minum belum mencukupi secara merata	Penurunan Kapasitas sumber air baku karena alih fungsi lahan
		Berkurangnya kapasitas sumber air baku pada saat musim kemarau
		Kondisi WTP yang sudah tidak optimal
		Tingkat kebocoran air pada jalur transmisi dan distribusi yang masih cukup tinggi
		Bangunan SPAM perdesaan terbangun ada yang terbengkalai
		Pembinaan terhadap keberlanjutan kelompok masyarakat pengelola SPAM kurang optimal
	Rumah Tangga Bersanitasi	Perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hidup sehat
		Masyarakat masih ada yang belum memiliki Sarana dan prasarana sanitasi (basis data Podes)
		Penyediaan tanah/lahan untuk membangun sanitasi komunal sangat sulit sehingga saat ini limbah domestik masih dibuang ke sungai
	Masih Rendah kondisi bangunan yang sesuai standar	Gedung pemerintahan belum memiliki PBG dan SLF
		Kurangnya pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Umum

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum Optimalnya Penataan Ruang untuk mendukung Proyek Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Dokumen Tata Ruang belum sesuai dengan perubahan regulasi dan perkembangan pembangunan	Perlu dilaksanakan reviu Rencana Tata Ruang Wilayah dikarenakan banyaknya dinamika regulasi
		Investasi belum berjalan secara optimal dikarenakan baru ada 1 (satu) RDTR yang sudah terkoneksi dengan OSS
		Perkembangan alih fungsi lahan sehingga perlu adanya pemutakhiran data
		Perlu dilaksanakan pemutakhiran dokumen Rencana Detail Tata Ruang karena adanya peraturan perundangan terbaru mengenai penataan ruang
		Perlu disusunnya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang, serta kebijakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang
	Masih Rendahnya Ketaatan Penata Ruangan	Terdapat pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak masyarakat dan dunia usaha belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam rencana tata ruang, khususnya terkait dengan arahan pemanfaatan ruang sehingga perlu dilaksanakan pengendalian terhadap rencana tapak yang sudah disahkan
Masih rendahnya Pelayanan Jasa Kontruksi	Belum tertibnya pelayanan Jasa Konstruksi	Tenaga kerja Konstruksi belum bersertifikat
		Layanan Data dan Informasi Jasa Konstruksi pada SIMJAKON belum Optimal (Profil Tenaga Kerja Konstruksi dan BUJK, Pasar Jasa Konstruksi, Materal dan Peralatan Jasa Konstruksi, Pelatihan Jasa Konstruksi, Profil Kecelakaan Kerja proyek Jasa Konstruksi, Peraturan Jasa Konstruksi, Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan
		Penyedia Jasa Konstruksi belum mempunyai SBU
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi belum Optimal.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Belum merata dan terjangkau ketersediaan infrastruktur dasar, Perumahan dan pemukiman	Penanganan Infrastruktur Perumahan dan pemukiman belum optimal	Belum optimalnya penanganan limbah domestic, tidak berfungsinya IPLT, belum adanya operator khusus yang mengelola Air Limbah domestik, kesadaran masyarakat terhadap sanitasi masih rendah
		Belum Optimalnya Penanganan Kawasan Kumuh
		Belum adanya database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan Permukiman yang tidak memenuhi standar
		Belum tersusunnya Dokumen RP3KP selaku dokumen perencanaan sektoral bidang perumahan permukiman serta legalisasinya (Perda/Perbup)
		Backlog Rumah di Kabupaten Sumedang Masih Tinggi
		Rasio Rumah Tidak Layak Huni masih rendah
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Belum Optimalnya Penguatan Penegakan regulasi Daerah	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan daerah
		Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Terdapatnya Regulasi yang tumpang tindih
		Daya Dukung pembinaan dan pemberdayaan anggota Satlinmas kurang optimal. Banyak anggota Linmas yang telah berusia lanjut sehingga berpengaruh kepada kualitas SDM Satlinmas
		Kurang minatnya warga masyarakat pemuda/pemudi yang ingin menjadi anggota linmas
Sebagian besar wilayah yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim	Penanggulangan dan Penanganan Bencana belum optimal	Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
		Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana
		Belum memadainya Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana
		Kurangnya Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Sosial		
Pelayanan PPKS yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih belum Optimal	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum akurat (Valid)
		Peran Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal
		Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa
		Sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai.
Tenaga kerja		
Masih terdapatnya mismatch dan miseducation antara kompetensi angkatan kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja	Kompetensi Pencari Kerja masih rendah	Program pelatihan yang disediakan oleh LPK swasta masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas lulusan BLK/LPK di dalam pasar kerja
	Tidak sebandingnya antara jumlah pencari kerja dengan ketersediaan kesempatan Kerja	Kurang efektivitasnya informasi pasar kerja
		Belum optimalnya Keppres 04 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas komunikasi antara pekerja dengan pengusaha
		Masih adanya permasalahan hubungan antara pekerja dengan pengusaha
	Belum memadainya SDM Pndukung Ketenaga kerjaan	Kurangnya tenaga fungsional mediator hubungan industrial
		Belum tersedianya SDM fungsional pengantar kerja
		Masih kurangnya tenaga SDM instruktur BLK yang berkompeten

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Responsif Gender	Rendahnya kualitas hidup perempuan	Masih rendahnya kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan
		Belum tersedianya data terbaru mengenai organisasi wanita yang aktif
		Partisipasi perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum masih rendah
		Masih rendahnya tingkat kesejahteraan anak
	Masih Adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perempuan dan anak masih menjadi sasaran utama tindak kekerasan
		Kurangnya sosialiasasi mengenai Lembaga-lembaga perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak
Pangan		
Ketahanan pangan yang rentan tehadap disrupsi ekonomi	Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat	Belum meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah.
		Tingginya potensi penduduk yang terkena rawan pangan; dan
		Lemahnya akses data dan informasi harga pasokan dan akses pangan.
		Intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi.
		Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang.
		Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal.
		Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dimasyarakat sebagai sumber pangan bergizi dan pendapatan keluarga.
		Belum optimalnya sosialisasi keamanan PSAT kepada masyarakat, produsen, dan pelaku usaha.
		Kesadaran pelaku usaha untuk registrasi PSAT-PDUK masih rendah, karena kesadaran dan pemahaman keamanan PSAT masih rendah.
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk uji lab keamanan PSAT.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Rendahnya diversifikasi pangan	Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras.
		Masih rendahnya konsumsi penganekaragaman pangan masyarakat.
		Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting).
		Kurangnya Promosi Pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) di tingkat masyarakat.
		Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang.
Pertanahan		
Belum optimalnya kinerja bidang Pertanahan	Proses Pengadaan lahan untuk kepentingan umum, penanganan sengketa tanah dan pemanfaatan Tanah belum optimal	Terkendalanya pembebasan lahan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana pelayanan umum lainnya
		Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Tol CISUMDAWU, Bendungan Jatigede, dan Bendungan Sadawarna oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
		Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Eks HGU serta Sengketa Penguasaan Hutan, dan permasalahan LC Kelurahan Situ
Lingkungan Hidup		
Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Degradasi kualitas lingkungan hidup
		Peningkatan timbulan sampah
		Penyelenggaraan prasarana sarana persampahan belum optimal

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
Belum meratanya Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatatan sipil belum optimal	Belum Optimalnya proses pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk
		Jangkauan pelayanan yang sangat luas
		Ketersediaan blangko KTP dari Pusat terbatas alokasinya untuk daerah
		Belum optimalnya proses pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil.
		Belum Optimalnya pencatatan peristiwa penting lainnya (kelahiran, kematian, perkawinan dll)
		Pemanfaatan data penduduk yang masih belum maksimal penggunaannya
		Akses ke Data Center sangat terbatas sehingga menghambat pelayanan Data Kependudukan
		Belum Optimalnya Penggunaan Layanan Daring
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Masih rendahnnya junlah Desa Mandiri	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mendorong Pertumbuhan Perekonomian belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
		Belum optimalnya penyediaan kebutuhan dan data untuk Desa Wisata dan Inovasi Desa
		Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna di desa
		Masih rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan desa
		Belum optimalnya fasilitasi Perencanaan Pembangunan di desa dari mulai penyusunan RPJMDes, RKPdes, RAPBDes dan APBDes
		Kualitas Pengelolaan Desa Dalam Siskeudes, Pemanfaatan Potensi Desa dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sesuai Standar belum optimal

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
Masih Tingginya Angka TFR	Belum optimalnya pengendalian penduduk melalui KB	Tingginya angka Pasangan Usia Subur Muda
		Struktur penduduk usia muda tinggi
		Masih cukup tinggi angka kelahiran
		Masih tingginya cakupan yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (unmet need)
		Tingginya pernikahan dibawah usia 20 tahun
		Rendahnya kesertaan KB Pria
		Masih rendahnya capaian KB MKJ
Kemandirian keluarga peserta KB belum optimal	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I masih tinggi	Rendahnya motivasi keluarga pra sejahtera dalam berwirausaha
		Belum optimalnya penyuluhan tentang pemberdayaan ekonomi terhadap keluarga Pra sejahtera
		Bantuan modal untuk usaha masih terkendala
Perhubungan		
Masih rendahnya kenyamanan, Keselamatan dan Ketertiban Pengguna Jalan.	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	Belum berhasilnya penanganan masalah kemacetan di simpul titik kemacetan Kabupaten Sumedang, yaitu simpangan pusat aktifitas di ibukota, Pasar dan Alun-alun Tanjungsari, pertigaan Cimalaka, dan Jatinangor
		Belum optimalnya pengelolaan parkir termasuk pengendalian parkir liar
		Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C yang sudah ada dan Belum Adanya Terminal Barang sesuai kewenangan kabupaten
		Belum memadainya koordinasi terkait pembatasan angkutan barang yang melalui jalan arteri di Kabupaten Sumedang, sehingga berakibat pada kemacetan, polusi, rawan kecelakaan, dan lain-lain
		Belum memadainya Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan dalam mendukung Program Prioritas daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum memadainya trayek angkutan penumpang antar kecamatan
		Minimnya sarana dan prasarana uji kendaraan
		Belum adanya pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi air Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) dan dampak aktifitas Pariwisata di sekitar Waduk
		Belum adanya Dokumen Perencanaan Tatanan Transportasi Lokal sesuai perkembangan Tata ruang dan perubahan regulasi.
		Belum optimalnya sosialisasi keselamatan berlalu lintas
		Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuhan kualifikasi teknis dalam bidang Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika		
Literasi Digital masih belum optimal	Layanan komunikasi dan informasi masih perlu peningkatan	Sistem pengendalian dan pengawasan komunikasi belum optimal;
		Kurangnya kewenangan dalam penanganan permasalahan komunikasi;
		Peran dan fungsi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) maupun Lembaga Komunikasi Masyarakat lainnya dalam diseminasi informasi belum optimal;
		Belum optimalnya peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
		Partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik masih rendah
		Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik;
		Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi public
		Kurangnya kapasitas Back Up listrik untuk NOC (Network Operation Control);
		Kurangnya Infrastruktur pendukung NOC (Network Operation Control);
		Kurangnya Kapasitas Bandwidth Internet untuk mengcover kebutuhan Internet setiap OPD Kabupaten Sumedang;
		Kurangnya Pengembangan Keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikasi di bidang Informatika.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		
Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi Koperasi dan UMKM	Melemahnya peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Kurangnya pengetahuan sumber daya aparatur dalam pemanfaatan IT
		Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
		Tingginya persaingan dengan lembaga keuangan lainnya
		Terbatasnya permodalan dalam pengembangan koperasi
		Lemahnya manajemen koperasi
		Rendahnya tingkat kewirausahaan koperasi
	Peningkatan UMKM belum optimal	Rendahnya pemanfaatan IT oleh pelaku usaha
		Database UMKM belum tersedia secara akurat
		Kualitas produk usaha mikro belum bisa bersaing
		Terbatasnya pelaku usaha yang dapat mengakses permodalan
Penanaman Modal		
Belum Optimalnya Iklim Investasi Daerah	Jumlah penanaman modal di Kabupaten Sumedang belum sebanding dengan potensi investasi	Belum adanya peta data potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah
		Belum adanya data potensi investasi yang sudah diolah dan dikembangkan menjadi peluang investasi melalui analisis
		Belum adanya data peluang investasi unggulan daerah (sudah dilakukan analisis) sebagai bahan promosi
		Belum adanya dokumen strategi promosi investasi sebagai bahan atau acuan pelaksanaan kegiatan promosi

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kepemudaan Dan Olahraga		
Masih Rendahnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam mendorong percepatan pembangunan	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan
		Belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan kepemudaan
		Belum maksimalnya sarana dan prasarana kepemudaan
		Rendahnya daya kreasi generasi muda
		Masih tingginya kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang
		Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi pemuda maupun kelompok kepemudaan berprestasi
	Masih minimnya jumlah atlet berprestasi	Belum maksimalnya prestasi keolahragaan di event-event Kejuaraan regional Jawa Barat maupun Nasional
		Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga
		Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan
		belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan keolahragaan
		Pembinaan maupun pembibitan belum terencana dengan baik
		Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kejuaraan
		Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi atlet maupun tenaga keolahragaan berprestasi
Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih minimnya jumlah atlet berprestasi	Belum maksimalnya prestasi keolahragaan di event-event Kejuaraan regional Jawa Barat maupun Nasional
		Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga
		Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan
		belum maksimalnya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan keolahragaan
		Belum optimalnya Pembinaan maupun pembibitan para atlet;
		Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kejuaraan
		Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi atlet maupun tenaga keolahragaan berprestasi
		Masih kurangnya dukungan fasilitas sarana dan prasarana olahraga

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Statistik		
Ketersediaan data yang akurat dan berkualitas	Masih rendahnya kualitas Data dan realtime	Masih kurangnya pemahaman terhadap Pengelolaan Data dari setiap produsen data
		Masih banyak data yang belum disampaikan oleh Produsendata kepada walidata
		Beberapa data yang dikumpulkan masih belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan dimensi kualitas data
		Masih adanya perbedaan konsep dan defisini data antara produsen data
		Masih terdapat kesalahan dalam Proses input data dari produsen data
		Masih banyak Perangkat Daerah selaku produsen data yang belum melakukan Updating data secara periodik sesuai dengan waku rillis data
		Masih kurangnya SDM dalam pengelolaan data
Persandian		
Pengamanan Informasi daerah	Masih Rendahnya Pengamanan Skor Informasi daerah	Pemahaman pengguna aplikasi dalam aspek keamanan informasi masih renda
		Belum optimalnya penggunaan tahapan dalam pembangunan sistem elektronik yang ada
		Sarana prasarana masih belum memadai, seperti: laptop, pc, lisensi aplikasi pentest, lisensi windows, lisensi antivirus.
		Kurangnya alat pendukung dalam menjalankan monitoring keamanan informasi
Kebudayaan		
Belum optimalnya pemanfaatan kebudayaan daerah dalam menunjang pariwisata	Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kebudayaan
		Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya
		Pelaksanaan event seni budaya/promosi budaya masih terbatas
		Pelestarian situs cagar budaya belum optimal (masih banyak yang tidak terpelihara)
		Belum optimalnya sosialisasi dan implemntasi Sumedang Puseur Budaya Sunda;

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Perpustakaan		
Masih Rendahnya Indeks Literasi	Sarana dan prasarana perpustakaan belum memadai	Koleksi bahan pustaka sangat terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
		Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai
		Layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka
		Masyarakat Kabupaten Sumedang banyak tersebar di desa-desa, sehingga akses terhadap pelayanan perpustakaan daerah sangat terbatas, sementara perpustakaan desa kurang berkembang
		Jangkauan perpustakaan keliling sangat terbatas
		Minat baca masyarakat masih rendah
Kearsipan		
Rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Belum adanya kesamaan persepsi di setiap PD terhadap kearsipan	Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap kearsipan
		Belum adanya peraturan yang mengatur tentang jadwal retensi arsip
		Belum adanya fitur pada aplikasi Super e-Office untuk penyusutan arsip
		Masih rendahnya pemeliharaan kearsipan
Kelautan Dan Perikanan		
Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk budidaya perikanan
		Penggunaan pakan yang tidak tepat
		Masih rendahnya Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Perikanan terutama untuk Kelompok Perikanan
		Belum adanya pusat atau sentra produksi perikanan dan pengolahan, dan belum terpetakannya potensi antar wilayah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Perubahan iklim dan cuaca
		Belum optimalnya penerapan teknologi perikanan
		Belum optimalnya pemanfaatan Potensi Perairan Umum Daratan (PUD)
		Belum adanya orientasi bisnis dalam usaha budidaya, penangkapan dan pengolahan perikanan
		Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perikanan
		Belum optimalnya kelembagaan perikanan
		Rendahnya kualitas benih ikan
	Konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat, sebagai akibat terdapatnya beberapa masyarakat yang tidak menyukai konsumsi utuh ikan, sehingga diperlukan upaya diversifikasi olahan perikanan dan Optimalisasi Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)
	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya akses ke pasar
		Harga yang tidak stabil
Pariwisata		
Rendahnya kunjungan wisata	Sarana prasarana pariwisata masih kurang memadai	Akses menuju destinasi wisata kurang memadai
		Terbatasnya promosi pariwisata seni dan budaya
		Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan
		Masih rendahnya atraksi pariwisata
		Belum tersedianya amenitas dilokasi wisata
		Masih rendahnya kualitas SDM bidang kepariwisataan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Sub sektor ekonomi kreatif belum berkembang	Pengetahuan masyarakat dan ASN mengenai ekonomi kreatif masih kurang
		Kurangnya kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI)
		Masih kurangnya infrastruktur serta sarana dan prasarana ekonomi kreatif
		Belum terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif
		Peran komunitas pelaku ekonomi kreatif belum maksimal
		Kualitas SDM ekonomi kreatif masih kurang
		Masih kurangnya event-event untuk apresiasi dan promosi ekonomi kreatif
		Masih kurangnya konsumsi dan pemanfaatan produk ekonomi kreatif
		Belum terciptanya sistem distribusi produk ekonomi kreatif yang efektif
		Forum komunitas pelaku ekonomi kreatif belum terbentuk sampai tingkat kecamatan
Pertanian		
Masih Rendahnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya akses ke pasar
		Ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dirantai pasokan atau monopoli
	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan usaha pertanian	Rendahnya kualitas SDM petani
		Rendahnya regenerasi petani.
		Rendahnya kapasitas petani milenial
		Terbatasnya jumlah SDM penyuluh pertanian; dan
		Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh.

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Produksi komoditas pertanian yang rendah	Ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida non organik
		Sulitnya akses terhadap pupuk
		Biaya produksi yang tinggi
		Terbatasnya penyebaran dan penyediaan benih unggul bersertifikat
		Belum optimalnya penanganan Organisme Penganggu Tanaman (OPT)
		Rendahnya dukungan sarana prasarana dalam rangka penerapan budidaya pertanian yang ramah lingkungan.
		Rendahnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dalam budidaya pertanian yang baik, Good Handling Practices (GHP) dalam penanganan pascapanen yang baik, dan Good Manufacturing Practices (GMP) dalam sistem yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan diawasi sesuai dengan standar kualitas.
		Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan (Pemetaan Cluster Pertanian).
		Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) serta percepatan tanam baik kuantitas maupun kualitas.
		Teknologi bidang pertanian dan Digitalisasi Pertanian masih rendah
		Alih Fungsi Lahan Pertanian.
		Minimnya Akses terhadap permodalan.
		Perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim
	Persaingan dengan produk impor	Rendahnya kualitas produk pertanian
	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	Terbatasnya Pengolahan Hasil Pertanian dan promosi produk pertanian
		Kurangnya investasi dalam teknologi bidang pertanian

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Masih Rendahnya Nilai Tukar Petani Peternak	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya negosiasi harga
		Kurangnya akses ke pasar
		Tidak adanya jaminan kualitas
	Persaingan yang tidak sehat	Struktur pasar yang tidak sehat
		Belum optimalnya kelembagaan peternakan.
	Kurangnya akses teknologi modern	Rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM peternak terhadap teknologi dan inovasi.
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi usaha peternakan.
	Rendahnya produksi peternakan	Semakin berkurangnya lahan untuk budidaya peternakan dan sumber pakan sebagai akibat pembangunan proyek strategis nasional, pemukiman, dan pembangunan lainnya
		Usaha budidaya peternakan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan / belum berorientasi bisnis
		Masih kurangnya sarana pendukung usaha peternakan seperti Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Sumber Air Peternakan, Puskeswan / Klinik Hewan, Pusat Promosi, Instalasi Pembibitan, Kawasan Peternakan dan sebagainya.
		Harga pakan dan bahan baku pakan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, dimana pakan merupakan komponen terbesar biaya produksi peternakan.
		Masih adanya serangan wabah penyakit ternak
		Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana produksi peternakan.
	Rendahnya nilai tambah produk peternakan	Rendahnya kualitas pakan ternak
		Belum optimalnya pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
		Kurangnya manajemen peternakan yang baik
		Biaya produktifitas yang tinggi.
	Pasar yang tidak efisien	Kurangnya akses ke pasar
		Harga yang tidak stabil

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kehutanan		
Belum Optimalnya Perekonomian masyarakat sekitar Taman Hutan Rakyat	Kreativitas ekonomi masyarakat sekitar penyangga Tahura belum optimal	Kurang efisiensinya pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura);
		Hutan Kota belum dikembangkan
Perdagangan		
Usaha Perdagangan yang kurang berkembang	Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan	Belum adanya kesepakatan kerjasama antara distributor, koperasi dan pelaku usaha perdagangan untuk melakukan sistem jaringan usaha
		Kurang fahamnya masyarakat untuk melakukan perdagangan secara online
	Revitalisasi Pasar Rakyat	Belum terwujudnya kesepakatan antara warga pasar dengan Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan pasar
		Masih terdapatnya lahan-lahan belum bersertifikat yang akan diperuntukan pembangunan pasar
		Belum adanya data valid mengenai perdagangan besar dan eceran yang tersebar di Kabupaten Sumedang
	Akses permodalan	Kurangnya informasi permodalan bagi pelaku usaha
	Kurangnya infrastruktur yang memadai	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan
Perindustrian		
Laju Pertumbuhan Industri pengolahan masih rendah	Kurangnya tingkat investasi	Kurangnya akses terhadap permodalan
		Kondisi ekonomi yang kurang stabil
		Biaya produksi yang tinggi
		Kurangnya dukungan infrastruktur
		Sertifikasi hasil industri belum menyeluruh
		Masih kurangnya promosi peluang investasi
	Kurangnya penerapan teknologi dan inovasi	Kurangnya SDM yang terampil
		Resistensi dari pekerja
	Kurangnya pemasaran	Masih kurangnya promosi produk IKM
		Belum optimalnya pemasaran produk IKM

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Transmigrasi		
Belum optimalnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi	Keterbatasan kuota penempatan transmigrasi
		Belum tersedianya lahan untuk transmigrasi
		Masih rendahnya kuantitas SDM bidang transmigrasi
		Belum tersedianya SDM fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Perencanaan		
Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	Terdapat Beberapa Program pada Perencanaan yang tidak terdanai pada Penganggaran	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
		Belum semua Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian pembangunan yang berkategori baik
		Perencanaan belum optimal sesuai dengan hasil evaluasi pembangunan
		Kurangnya pemahaman akan kedudukan perencanaan pembangunan
Keuangan		
Belum sebandingnya antara pendapatan dan kebutuhan	Kebutuhan Belanja tidak sebanding dengan pendapatan	Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah
		Masih rendahnya kualitas dokumen keuangan daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Pendapatan Daerah		
Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung Pembangunan Daerah	Pengelelolaan Potensi PAD dan Pajak Daerah belum optimal	Belum optimalnya pelayanan pajak
		Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah
		Belum adanya dukungan sistem yang terintegrasi
		Kualitas layanan pendataan masih rendah
		Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur
		Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian
		Belum Optimalnya pemutakhiran data potensi pajak daerah
		Belum memiliki data potensi pendapatan daerah
		Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah
		Belum dilakukan penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar
		Ketersediaan data piutang yang tidak valid
		Belum adanya sistem terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi
		Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah secara elektronik
		Pembayaran pajak belum tepat waktu;
		Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan
		Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Sumedang

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan		
Belum Optimalnya Indeks Profesionalitas ASN	Kualitas dan Kompetensi ASN belum Merata	Belum optimal dan terpetakannya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi secara riil
		Tambahan Penghasilan Pegawai masih berdasarkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan perilaku dan kehadiran kerja tanpa target kinerja
		Masih kurangnya aparatur yang memiliki kualifikasi teknik serta distribusi PNS yang belum merata secara kualitas dan kuantitas
		Belum optimalnya pengevaluasian kinerja dan disiplin pegawai yang terintegrasi
		Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik, bersih dan melayani
		Beberapa pelayanan administrasi kepegawaian di BKPSDM belum seluruhnya berbasis teknologi informasi
		Belum optimalnya dan terintegrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian
Penelitian dan Pengembangan		
Hasil penelitian belum seluruhnya diimplementasikan	Dokumen Kajian belum optimal menjadi dasar pelaksanaan kegiatan	Terbatasnya fungsional peneliti
		Belum optimalnya penyebarluasan informasi arah rencana penelitian dan pengembangan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Sekretariat Daerah		
Belum Optimalnya Perumusan Kebijakan pada Sekretariat Daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	- Bagian Tata Pemerintahan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan
		Masih rendahnya respon OPD dalam penyusunan LKPJ dan LPPD
		- Bagian Hukum
		Belum tercapainya target program pembentukan Perda sesuai dengan yang ditetapkan
		Belum tersedianya pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum dan pustakawan
		- Bagian Organisasi
		Masih adanya OPD yang belum menyusun dan menerapkan SOP dan standar pelayanan
		Belum adanya evaluasi kelembagaan, analisa jabatan dan analisa Beban kerja sesuai dengan SOTK yang baru
		Masih rendahnya respon dan pemahaman OPD terhadap dukungan data penyusunan LAKIP
		Belum tersedianya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan analis dan penyusun

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		- Bagian Kerjasama
		Belum adanya regulasi daerah yang mengatur kerjasama daerah
		Belum adanya SOP yang mengatur administrasi kerjasama OPD
		Rendahnya respon OPD terkait potensi kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti
		Kurangnya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai tupoksi
		Belum tersedianya data potensi kerjasama
		- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Masih adanya BUMD dengan status Tidak Sehat
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi analis ekonomi daerah
		Tingkat responsif pelayanan informasi analisa ekonomi daerah yang belum optimal
		Belum adanya SOP yang mengatur sistem informasi ekonomi daerah
		- Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Belum optimalnya koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat
		Masih adanya kegiatan-kegiatan teknis
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		- Bagian Administrasi Pembangunan
		Masih rendahnya dukungan data pelaksanaan pembangunan dari OPD terkait
		Belum optimalnya pelayanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan OPD
		- Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Belum tersedianya pejabat fungsional PPBJ
		Tingkat responsif pelayanan yang masih belum optimal
		Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana PBJ
		Belum optimalnya layanan informasi pengadaan barang dan jasa
		- Bagian Umum
		Belum tersedianya SOP pelayanan kerumah tanggaan Setda dan pimpinan daerah
		Tingkat responsif dan kualitas pelayanan yang masih belum optimal
		Belum adanya pemisahan tugas antara pelayanan rumah tangga pimpinan daerah dan di lingkungan Sekretariat Daerah
		Belum tersedianya pejabat pejabat fungsional arsiparis
		Bagian Protokol, dan Komunikasi Pimpinan
		Tingkat pelayanan publikasi pimpinan daerah yang masih belum optimal
		Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan protokoler daerah
		Masih rendahnya tingkat responsivitas OPD terkait pengaduan masyarakat

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		- Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Masih adanya keterlambatan pelaporan keuangan Setda
		Masih rendahnya kualitas kompetensi pengelola keuangan di lingkungan Setda
		Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi perencana
		Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan
Sekretariat DPRD		
Belum optimalnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum Optimalnya kinerja Sekretariat DPRD	Kurang optimalnya kajian produk hukum terkait permasalahan daerah sebagai bahan Raperda Inisiatif DPRD
		Kurangnya tenaga fungsional analisis hukum
		Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah masih bersifat administrasi belum sampai ke tingkat teknis operasional dilapangan
		Kurangnya SDM pengolah data dan informasi berbasis teknologi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Inspektorat Daerah		
Belum optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah di Kabupaten Sumedang	Belum Meratanya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 3;
		Penerapan Manajemen Resiko pada Perangkat Daerah masih rendah
		Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah belum optimal
		Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan dengan rekomendasi belum optimal
		Temuan penyimpangan terhadap APBD masih terjadi
		Masih terdapat kesenjangan (GAP) kapasitas APIP, khususnya dalam sertifikasi perjenjangan dan DIKLAT substanstif pengawasan akibat minimnya sumber daya anggaran
		Masih terdapat kesenjangan (GAP) infrastuktur penunjang pengawasan, khususnya alat uji dan teknisinya
		Masih belum otpimalnya manajemen pengawasan, khususnya penegakan kode etik bagi APIP, sehingga masih terindikasikan terdapat oknum yang menerima gratifikasi dan suap
		Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas
		Pemberian konsultasi pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa belum optimal

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Kesatuan Bangsa Dan Politik		
Belum optimalnya tingkat cipta kondisi kondusif	Masih adanya potensi konflik dan unjuk rasa	Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
		Gangguan PEKAT masih tinggi
		Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing
		Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada
		Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik social
		Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi
		Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social
		Belum optimalnya penanganan potensi ganggunan HAM
		Belum optimalnya forum-forum strategis (forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.)
		Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
		Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi
		Pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
		Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang salah)
		Peran ormas di masyarakat belum optimal
		Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas
		Belum terbentuknya sistem informasi ormas
		Sinergitas antar lembaga masih kurang terurtama forum-forum strategis masyarakat (contoh FKUB, FKDM, FPK, Forkopinda)
	Masih rendahnya partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, pilkada dan parpol
		Belum optimalnya pendidikan politik
		Belum optimalnya Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Sumedang

Sumber: Analisia BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang 2024 (diolah)

2. Isu Strategis Daerah

1. Isu Sesuai Konteks

a. Isu Global

Sejumlah isu global menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah. Langkah awal pembangunan jangka menengah 2025- 2029 harus mampu menjadi landasan / fondasi bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang sudah mengantisipasi konteks tantangan global tersebut. Berdasarkan Draft RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, terdapat sejumlah isu global yang perlu diperhatikan, disebut sebagai “megatrend Jawa Barat 2045”.

Berdasarkan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045, terdapat sejumlah isu global yang perlu diperhatikan, disebut sebagai “megatrend Jawa Barat 2045”.

Gambar 1.2

Konteks Isu Global yang Dihadapi Provinsi Jawa Barat

Dalam ”Megatrend Jawa Barat 2045”

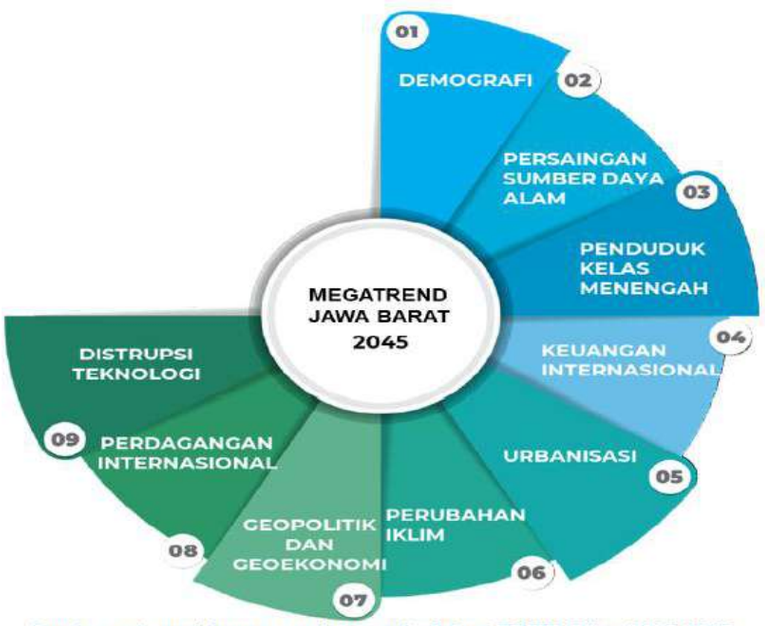

Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan

nasional. Terlebih lagi laporan dari World Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1(satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi windows of opportunity sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing- masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Dalam bonus demografi dimana mencermati dinamika penduduk Provinsi Jawa Barat yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan konfigurasi tingkat pendidikan penduduk. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada keterampilan manusia sangat diperlukan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) aspek yang harus diantisipasi dalam menghadapi bonus demografi yaitu:

Keberlanjutan ekonomi, melalui peningkatan pertumbuhan LPE dengan menekan rasio gini serta menurunkan TPT dengan penguatan akses ketenagakerjaan di sektor formal dan informal;

Keberlanjutan sosial budaya, melalui peningkatan serta efektivitas sistem perlindungan sosial yang inklusif, dan pemajuan kebudayaan;

Keberlanjutan ekologi, melalui efektivitas pemenuhan standar lingkungan yang tinggi serta penggunaan energi baru dan terbarukan dalam menopang aktivitas pembangunan; dan

Investasi SDM untuk menjawab daya saing Jawa Barat agar bisa unggul atau setidaknya kompetitif diberbagai aspek di level internasional, memaksimalkan era industri 4.0 menuju society 5.0 yang ditandai dengan masyarakat telah mencapai comport, vitality and high quality life.

Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi. Perdagangan internasional. Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

Urbanisasi dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa.

b. Isu Nasional

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak

yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat saat ini.

Bonus demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nila PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produkproduk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isuisu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

Konektivitas dan infrastruktur dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas,

dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Ke depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi.

Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

Desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

c. Isu Regional Jawa Bali

Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kewilayahan tersebut penting untuk Provinsi Jawa Barat yang memang potensi dan kontribusinya bagi nasional cukup besar. Peluang besar Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan arahan tersebut tentunya didukung dengan modalitas yang ada dan adanya perubahan peran Jakarta.

Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Sebagai kota global, Jakarta akan menjadi kota yang melayani dan membiayai kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional. Perubahan peran tersebut tentunya menciptakan nilai ekonomi yang besar dan akan mempengaruhi daerah sekitarnya.

Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Namun demikian, daya saing SDM secara umum masih perlu ditingkatkan terlebih di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar. Dengan wilayah yang luas, ketersediaan akses pendidikan juga masih belum merata. Selain itu, masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha perlu menjadi perhatian ke depannya.

Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap perubahan tatanan sosial budaya yang ada. Didorong dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan pertukaran informasi berlangsung makin cepat sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Provinsi Jawa Barat pun mengalami gejala demikian. Salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat.

Ketimpangan wilayah utara-selatan memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi ke depannya. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari angka kemiskinan dan pengganggguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan. Kondisi demikian juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga ke depannya perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang sudah berlarut-larut terjadi itu.

Perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk ke depannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Kondisi tersebut juga berlaku dalam konteks Provinsi Jawa Barat.

Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi ke depannya. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak menjadi suatu keharusan. Kondisi demikian juga berlaku untuk Provinsi Jawa Barat yang ke depannya juga makin kompleks permasalahan yang dihadapi.

d. Isu Berdasarkan West Java Development Forum (WJDF)

West Java Development Forum (WJDF) 2023 merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang meminta daerah menerjemahkan rencana pembangunan jangka panjang sampai tahun 2045. WJDF 2023 melibatkan berbagai pihak seperti kalangan akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, inohong Jabar, Forkopimda, media, hingga generasi milenial. Dilibatkannya stakeholders dari berbagai kalangan diharapkan dapat membuat rencana pembangunan lebih maksimal, merata dan mewakili harapan seluruh masyarakat. Semua stakeholders yang mewakili memberikan pandangan bagaimana Jawa Barat di tahun 2045. Berdasarkan hasil WJDF tersebut, pembangunan tak bisa fokus hanya pada satu sektor, melainkan harus multidimensi. Namun dari pandangan generasi muda, setidaknya ada tiga sektor penting yang harus diakomodir, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Pertimbangan-pertimbangan dari berbagai stakeholder tersebut kemudian distrukturkan dan menjadi isu yang diharapkan dapat memberi masukan dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Sejumlah isu yang dihasilkan dari WJDF diuraikan berikut ini.

2. Fokus Pembangunan Daerah

a. Fokus Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan

Isu layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera, mencakup: akses layanan kesehatan bersama; tuntas wajib belajar sampai dengan SMA; stunting; pemenuhan layanan pendidikan masyarakat; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama; pemenuhan akses layanan dasar yang berkualitas (kesehatan, pendidikan); dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung bonus demografi.

Adapun isu perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, mencakup: kemiskinan dan rumah tidak layak huni; penanganan kemiskinan melalui ekonomi keluarga; sistem informasi PPKS; perlindungan masyarakat miskin secara tepat sasaran; pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama wilayah perbatasan; pemberdayaan masyarakat miskin petani dan nelayan; layanan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan wilayah perbatasan; dan skenario mitigasi bertambahnya penduduk miskin.

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah, mencakup: pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal; pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal ketimpangan akses sosial dan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif; kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat; pemerataan kualitas hidup berbasis teknologi; dan skenario mitigasi melebarnya tingkat ketimpangan Isu penciptaan dan perluasan

lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja, mencakup; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; industri padat karya untuk penyerapan tenaga kerja lokal; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; optimalisasi kuantitas dan kualitas BLK; pencetakan wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; digital skill kepada tenaga kerja pemuda; kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja; SDM tenaga kerja yang kompeten; dan perluasan kesempatan kerja untuk semua kalangan.

Isu kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan), mencakup: konflik antar nelayan dalam pemanfaatan ruang laut; pengelolaan ekosistem pesisir dan perikanan tangkap bersama pada batas wilayah laut 12 mil; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut; dan pemanfaatan bersama pelabuhan perikanan.

Sedangkan isu sistem pangan yang berkelanjutan, meliputi: produktivitas pertanian dan perikanan; adaptasi varietas pertanian berketahanan iklim; sistem pangan berkelanjutan; kelancaran distribusi ternak wilayah perbatasan; belum optimalnya penerapan pola konsumsi pangan yang berkelanjutan; pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang berkelanjutan; produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; ketersediaan pangan berkelanjutan; ketersediaan dan akses pangan; dan optimalisasi logistic global value chain dan blue economy.

Fokus Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan

Isu infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana, meliputi: aglomerasi perkotaan di Bodebekpunjur, Rebana, dan Cekungan Bandung sebagai engine of growth; infrastruktur persampahan berkelanjutan dan sistem transportasi yang efisien penyediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air, air bersih, limbah, jalan, sampah yang merata; penyediaan dan layanan sistem transportasi; konektivitas antar pusat kegiatan; persampahan serta rantai pasok pangan yang efisien; infrastruktur berkelas dunia; keselamatan pelayaran ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) lintas provinsi; infrastruktur wilayah dan logistik terintegrasi (kereta, sistem logistik pelabuhan dan bandara, air bersih, transportasi darat); infrastruktur perbatasan terintegrasi, handal dan adaptif bencana (jalan, sampah, air bersih, pelabuhan kereta, air limbah); dan peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung perekonomian.

Untuk isu infrastruktur digital yang merata dan berkualitas, mencakup: pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam ekonomi digital; kesiapan transformasi digital yang berkelanjutan; keterjangkauan akses digital yang merata; dan penggunaan teknologi digital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun isu transformasi energi fosil ke energi baru terbarukan, mencakup pengembangan EBT untuk mendukung green economy dan transisi energi.

Sementara, isu infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mencakup penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan, penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan, ketersediaan air baku dn air bersih yang berkualitas dan continue, serta penangan banjir terintegrasi dan berkelanjutan pelayanan sistem irigasi.

b. Fokus Peningkatan Produktivitas Daerah

Isu produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian, mencakup: Kawasan Pantura sebagai basis industri hijau, perikanan dan ketahanan pangan; optimalisasi pengembangan ekowisata terintegrasi; pengembangan IKM dan UKM; optimalisasi kinerja sektor-sektor ekonomi pariwisata dan ekraf; peningkatan investasi dan promosi investasi industri; peningkatan produktivitas tenaga kerja industri; pengembangan pariwisata kelas dunia; kerjasama perdagangan dalam penguatan rantai pasok pangan berkualitas; Jawa Barat sebagai bagian dari rantai pasok pangan berkualitas; link an match antara industri dan sektor hulu; dan mengembangkan rantai nilai regional pada produk-produk yang berdaya saing di pasar internasional.

Adapun isu UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, mencakup: peran pemuda dalam kewirausahaan; peningkatan produktivitas dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; optimalisasi pertumbuhan startup; pemberdayaan UMKM dan startup; penguatan IKM dan UMKM; pemberdayaan UMKM dan koperasi; peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi spesifik wilayah (pariwisata, UMKM dan Industri); pelatihan dan pemasaran digital produk UMKM; integrasi pengembangan ekraf; pemberdayaan UMKM dan koperasi wilayah perbatasan; kewirausahaan yang berkelanjutan melalui UKM; dan komoditas pertanian sebagai komoditas wirausaha/bisnis.

c. Fokus Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan

Isu pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya, mencakup: pendidikan usia dini berbasis lingkungan hidup; peningkatan kualitas pendidikan pada usia dini (0-5 tahun); pemajuan kebudayaan; pengelolaan SDM yang terintegrasi (publik, swasta, dan masyarakat); penguatan kurikulum adaptif berbasis TIK; pengembangan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); pelestarian masyarakat adat dan cagar budaya; optimalisasi kompetensi tenaga kerja; pendidikan vokasi; keselarasan subsidi pendidikan; akses pendidikan lintas batas wilayah perbatasan; pemajuan kebudayaan daerah; dan peningkatan kualitas dan akses pendidikan.

Adapun isu kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan, meliputi: pemberdayaan masyarakat yang inklusif; pembangunan yang merata dan inklusif; dan inklusivitas dalam pembangunan bagi semua kalangan. Adapun isu ketersediaan infrastruktur digital meliputi: peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital; peningkatan kemampuan SDM digital (digital skill); akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi melalui peningkatan literasi digital; transformasi digital; dan digital divide/kesenjangan untuk mengakses teknologi digital.

d. Fokus Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju

Isu pembangunan keluarga yang berkualitas, mencakup: sistem informasi PPKS; Jabar sebagai provinsi yang memperhatikan lansia; meminimalisir gangster; dan awareness terhadap kesehatan mental. Adapun isu pemajuan kebudayaan, mencakup: aspek regulasi muatan lokal kebudayaan daerah; platform kebudayaan; dan penanaman nilai agama dan budaya bangsa.

e. Fokus Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan, meliputi: penanganan kualitas lingkungan terintegrasi; alih fungsi lahan; peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup; kerusakan pesisir pantai; pengelolaan sampah; Banjir Rob Pantai Utara akibat perubahan iklim; alih fungsi lahan; ekonomi berkelanjutan berbasis industri hijau; pemenuhan kawasan lindung; pengelolaan limbah; RTH dan imbal jasa ekologis; pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan; ekonomi hijau berbasis digital; dan dampak pengembangan industri manufaktur terhadap lingkungan.

Adapun isu mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat, meliputi: mitigasi tsunami pada zona megathrust pantai selatan; penanganan bencana yang belum optimal karena terbatasnya penyebaran informasi kepada masyarakat; mitigasi bencana dan perubahan iklim; timbulnya abrasi di pesisir laut yang menyebabkan luas daratan berkurang; dan perlindungan sosial adaptif.

f. Fokus Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Isu tata kelola pemerintahan kolaboratif, meliputi: kelembagaan kerjasama antar daerah; struktur organisasi yang efektif; kolaborasi pentahelix dalam penanganan berbagai masalah infrastruktur dasar; tata kelola pemerintahan yang inklusif; environmental leadership; dan perbaikan regulasi dalam semua aspek birokrasi.

Adapun isu pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik, meliputi: pelayanan adaptif dan terintegrasi pada kawasan greater metro pemanfaatan citra digital dalam pendataan kendaraan bermotor optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam pelayanan publik; digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, dan kemudahan izin berusaha dan investasi.

Sementara isi sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan, meliputi: kawasan perbatasan yang berdaya saing; penyiapan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien; transformasi digital; pencarian alternatif sumber pendanaan yang lain belum optimal; pemimpin yang adaptif dan responsif; insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah; pembangunan inklusif yang berkelanjutan; pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan inovasi dalam pembangunan berkelanjutan; dan Peningkatan partisipasi pada forum-forum inovasi IPTEK dan sains.

3. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Isu strategis terkait Pembangunan Berkelanjutan (PB/SDG's) dihasilkan dari rangkaian tahapan dan proses yang dilalui dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029.

Dari hasil KLHS, telah disepakati terdapat 9 (sembilan) isu pembangunan berkelanjutan strategis yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, yaitu:

1. Belum meratanya distribusi dan kualitas dari akses dan sarana prasarana serta SDM pendidikan di segala jenjang termasuk pengembangan sistem teknologi informasi digital;
2. Belum optimalnya perlindungan sosial yang tepat sasaran guna mewujudkan inklusivitas dan masyarakat yang adaptif;
3. Belum merata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pelayanan dalam penanganan dampak lingkungan dari persampahan, sanitasi, konektivitas publik, dan energi yang tidak ramah lingkungan;
4. Belum meratanya pelayanan, pengendalian pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan serta kurangnya SDM bidang kesehatan, baik secara kuantitas dan kualitas;
5. Belum optimalnya ekonomi daerah, akses permodalan, pembinaan UMKM, pariwisata, serta pengembangan ekonomi biru dan hijau berbasis keunggulan wilayah;
6. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim , serta upaya penurunan gas rumah kaca;
7. Belum optimalnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tata ruang, tata kelola pemerintahan, serta kerja sama antar pihak termasuk masyarakat adat;
8. Penurunan kualitas dan daya dukung lahan akibat alih fungsi lahan, khususnya untuk ketersediaan pangan dan air; dan
9. Belum optimalnya pengelolaan DAS dan rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati darat dan laut.

4. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

   Berikut adalah sintesa hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Jawa Barat yang mencakup sejumlah isu utama yang menjadi isu strategis untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat.

5. Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif

   Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal. Paradigma green dan blue economy yang berkembang saat ini harus melibatkan masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari keseimbangan sistem sosial ekologi di Jawa Barat, sesuai dengan semangat konsep pembangunan green and blue economy.

Gambar 1.3

Isu Strategis Terkait Green and Blue Economy serta Pembangunan Inklusif

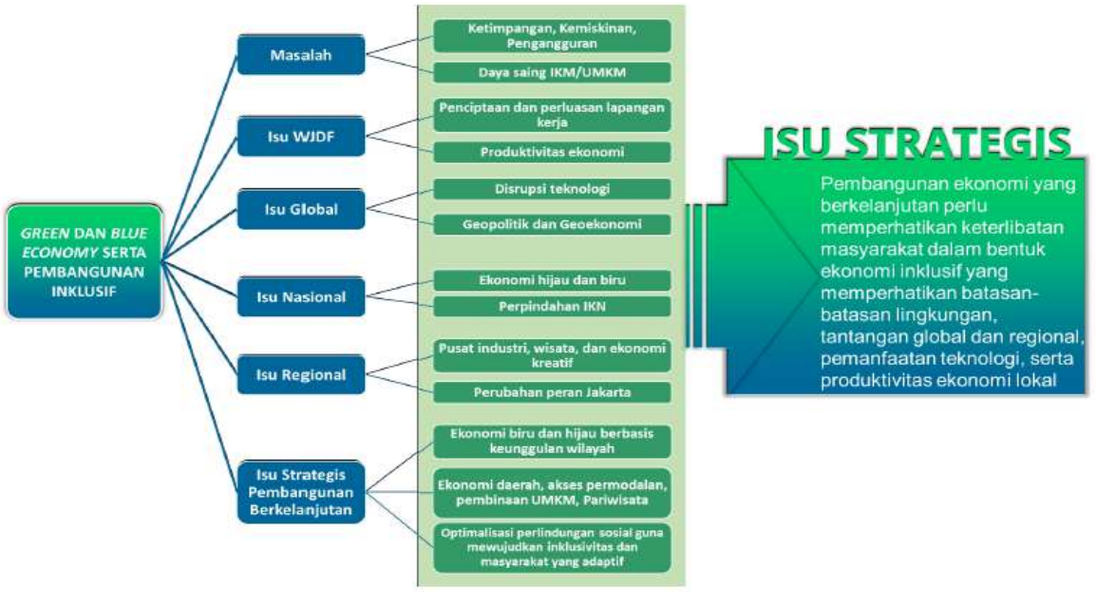

Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Green economy merujuk pada model ekonomi yang berfokus pada pengembangan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan, efisiensi energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan dari segi lingkungan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara luas. Blue economy, di sisi lain, berkaitan dengan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Konsep ini mencakup pengembangan ekonomi yang memanfaatkan potensi laut dan sumber daya alam yang ada di ekosistem laut secara berkelanjutan. Blue economy menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut, pemanfaatan sumber daya dengan cara yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidup dari laut.

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan atau rentan. Ini melibatkan penciptaan kesempatan kerja yang adil, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa green dan blue economy dengan pembangunan inklusif berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

6. Isu Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Perkembangan penduduk menciptakan potensi sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional. Kondisi ini perlu dilakukan antara lain dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat.

Gambar 1.4

Isu Terkait Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

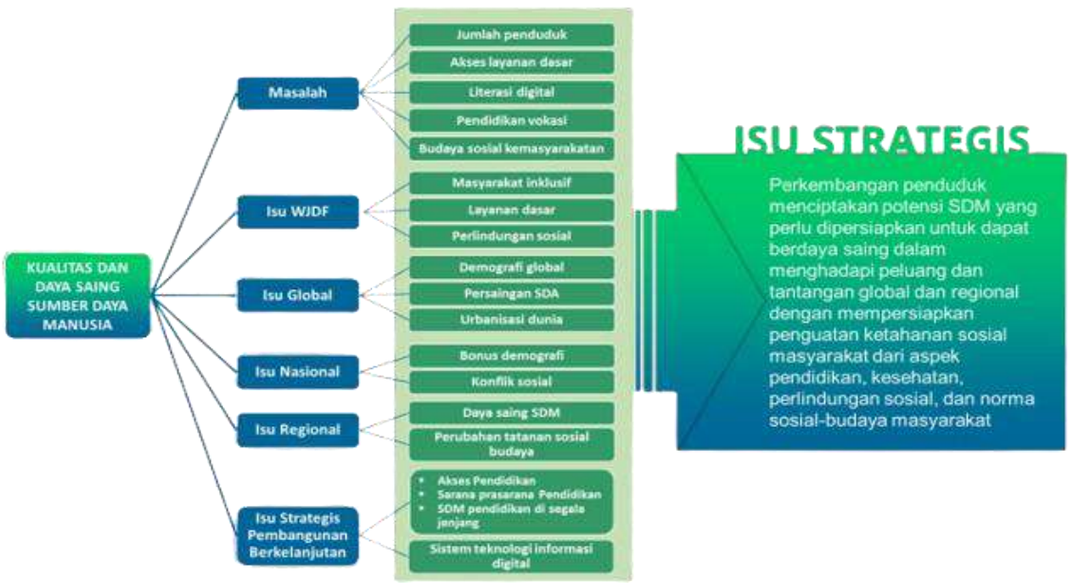

Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut beberapa poin penting terkait isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia :

a. Kualitas Pendidikan dan Pelatihan

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Penting untuk memastikan bahwa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja global yang terus berubah.

b. Relevansi Keterampilan

Sumber daya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi saat ini. Program pendidikan dan pelatihan harus dapat menghasilkan lulusan yang siap terjun langsung ke dunia kerja atau yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar.

c. Inovasi dan Kreativitas

Selain keterampilan teknis, penting juga untuk mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan sumber daya manusia. Kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi adalah faktorfaktor yang mendorong daya saing individu dan organisasi.

d. Kesejahteraan dan Motivasi

Faktor-faktor non-finansial seperti lingkungan kerja yang kondusif, pengakuan atas prestasi, serta kesempatan untuk pengembangan karir juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kesejahteraan mental dan fisik juga harus diperhatikan untuk menjaga produktivitas dan kualitas kerja yang optimal.

e. Pemberdayaan dan Keterlibatan

Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki yang kuat dan motivasi untuk berkontribusi secara positif.

f. Adaptasi terhadap Perubahan

Globalisasi dan teknologi telah mengubah lanskap ekonomi secara signifikan. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini akan lebih mampu mempertahankan daya saingnya dalam pasar kerja yang kompetitif.

Perbaikan terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, inovasi, kesejahteraan, dan pemberdayaan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini dalam upaya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

7. Isu Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wilayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu permasalahan sekaligus tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat. Kesenjangan dalam penyelenggaraan pembangunan akan menciptakan perbedaan kualitas kehidupan, termasuk kualitas sumber daya manusianya. Dalam Indonesia Development Forum (2018), kesenjangan ini berkaitan dengan permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar meliputi kurangnya akses pada layanan dasar khususnya di antara masyarakat marginal yang dapat menyebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Kesenjangan wilayah merupakan hal yang wajar dalam sebuah pembangunan (Saratri, 2009). Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan faktor geografi, kualitas sumber daya alam dan manusia, hingga keterbatasan aksesibilitas perhubungan antar daerah. Masalah pokok yang harus dipecahkan adalah adanya konsepsi kuat untuk jangka waktu yang panjang yang dilandasi keadilan sosial dan sistem ekonomi yang tidak memihak terlalu kuat pada wilayah tertentu.

Gambar 1.5

Isu Terkait Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Isu tentang kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi akses dan kualitas hidup Masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait isu kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar :

a. Akses yang Tidak Merata

Salah satu masalah utama adalah ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, dan telekomunikasi. Daerah perkotaan biasanya lebih terjamin infrastrukturnya dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil.

b. Dampak pada Kualitas Hidup

Kesenjangan infrastruktur dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan risiko penyakit dan menghambat pembangunan ekonomi lokal.

c. Pengembangan Ekonomi

Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang efisien dan listrik yang stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ketidakmampuan untuk mengakses infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi pengembangan ekonomi lokal.

d. Inklusivitas Sosial

Infrastruktur pelayanan dasar yang merata merupakan prasyarat untuk inklusi sosial yang sejati. Semua warga harus memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan yang mendasar untuk memastikan keadilan sosial.

e. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan

Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam juga penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap ancaman ini.

f. Pemerataan Pembangunan

Penting untuk menerapkan kebijakan dan program yang mengarah pada pemerataan pembangunan infrastruktur, baik dari segi geografis maupun sosial-ekonomi. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

g. Tantangan Finansial

1. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar seringkali melibatkan tantangan finansial yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang atau daerah yang terpencil. Diperlukan strategi keuangan yang inovatif dan berkelanjutan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ini.
2. Penanggulangan kesenjangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Investasi yang tepat waktu dan strategi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak dasarnya secara merata dan berkelanjutan.

8. Isu Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana merupakan salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan RPJMD dalam tahap Pembangunan Fondasi Daerah di Jawa Barat 2025-2029.

Gambar 1.6

Isu Terkait Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

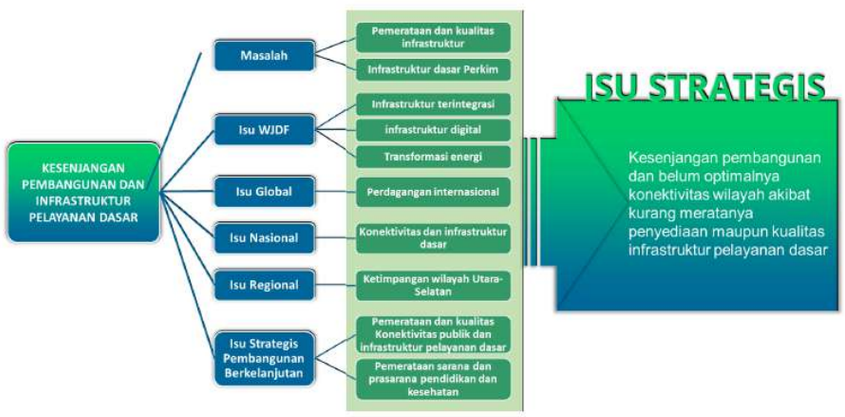

Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Upaya pengelolaan dan penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dipersiapkan sejak tahap awal pembangunan Jawa Barat ini untuk menjamin kelancaran

pembangunan dalam jangka panjang. Isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan tema isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut sejumlah poin utama yang terkait dengan isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

a. Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung populasi spesies tertentu atau aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Daya tampung, di sisi lain, mengacu pada kapasitas maksimum lingkungan untuk menanggung beban dari aktivitas manusia atau faktor lainnya tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan yang signifikan.

1. Overexploitasi Sumber Daya
   Salah satu masalah utama adalah overexploitasi sumber daya alam seperti air tanah, hutan, dan lahan pertanian. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada penurunan kualitas lingkungan, degradasi tanah, penurunan keanekaragaman hayati, dan hilangnya ekosistem.
2. Perubahan Iklim
   Perubahan iklim juga mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanasan global dapat mengubah pola hujan, meningkatkan suhu permukaan laut, dan menyebabkan perubahan ekstrem cuaca, yang semuanya berdampak pada ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.
3. Manajemen Sumber Daya
   Penting untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan hutan secara lestari, konservasi air, penggunaan energi terbarukan, dan pengendalian polusi, untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini dan mendatang.
4. Kehidupan Berkelanjutan
   Konsep keberlanjutan mencakup tidak hanya perlindungan lingkungan fisik tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
5. Kolaborasi Global
   Isu keberlanjutan lingkungan adalah masalah global yang memerlukan kerjasama internasional dan komitmen bersama untuk mengatasi tantangannya. Kesepakatan internasional seperti Persetujuan Paris tentang perubahan iklim menunjukkan pentingnya kerjasama global dalam mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks.
6. Pendidikan dan Kesadaran
   Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan adalah langkah krusial dalam mendukung perubahan perilaku dan keputusan yang lebih ramah lingkungan di semua tingkatan masyarakat.

Pengelolaan sumberdaya alam untuk pemanfaatan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan yang dapat menopang kehidupan manusia merupakan tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang keberlanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/ataukomponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan.

Perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa ekosistem wilayah dan lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

9. Isu Keberlanjutan Penataan Ruang

Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi linduang guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Isu keberlanjutan penataan ruang menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan.

Gambar 1.7

Isu Terkait Keberlanjutan Penataan Ruang

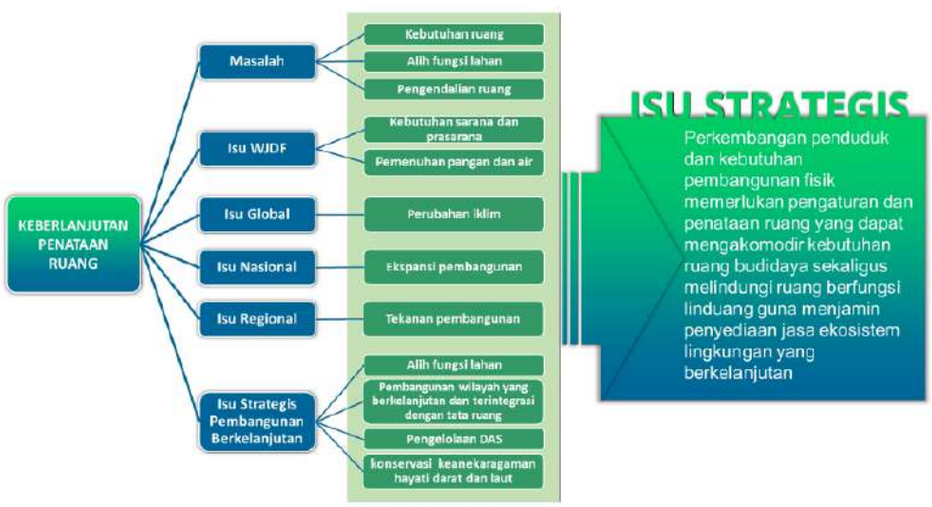

Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait isu keberlanjutan penataan ruang :

a. Pertumbuhan Perkotaan yang Berkelanjutan

Pembangunan perkotaan yang cepat sering kali menghadapi tantangan dalam hal penggunaan lahan yang efisien, penataan kawasan yang terintegrasi, dan infrastruktur yang memadai. Keberlanjutan penataan ruang mencakup pembangunan perkotaan yang terencana dengan baik untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, dan kerusakan lingkungan.

b. Perlindungan Lingkungan
Penataan ruang yang berkelanjutan memperhatikan perlindungan lingkungan alam, termasuk pelestarian ruang terbuka hijau, konservasi ekosistem, dan penanganan limbah secara efektif. Hal ini membantu menjaga kualitas udara, air, dan tanah, serta keanekaragaman hayati yang ada di sekitar area perkotaan dan pedesaan.

c. Keadilan Sosial
Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan harus mengutamakan keadilan sosial, memastikan akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu.

d. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan kondisi lingkungan secara global. Penataan ruang yang berkelanjutan mencakup infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti drainase yang baik untuk mengatasi banjir, penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan, dan desain yang mengurangi jejak karbon.

e. Penggunaan Lahan yang Efisien
Isu keberlanjutan penataan ruang juga melibatkan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Ini mencakup zonasi yang tepat untuk penggunaan lahan, perlindungan terhadap tanah subur dan area lindung, serta pengelolaan pertanian yang berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi pedesaan.

f. Partisipasi Masyarakat
Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan penataan ruang, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi ini juga memastikan penerimaan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

g. Kolaborasi Antar Pemerintah
Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antar pemerintah, termasuk pemerintah lokal, regional, dan nasional, serta sektor swasta dan masyarakat sipil. Ini penting untuk menyinkronkan kebijakan dan strategi dalam mengelola pertumbuhan perkotaan dan pedesaan secara holistik.

Melalui pendekatan yang berkelanjutan dalam penataan ruang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, inklusif, dan produktif bagi generasi saat

ini dan masa depan. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap keputusan penataan ruang diharapkan dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh.

10. Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan.

Gambar 1.8

Isu Terkait Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sumber : Ranwal RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Barat, 2025

Isu kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa aspek penting yang terkait dengan isu kualitas tata kelola pemerintahan :

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur dari seberapa transparan dan akuntabelnya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi publik dan proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.

b. Keterlibatan Masyarakat

Tata kelola yang baik melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga negara. Partisipasi aktif masyarakat juga membantu dalam memonitor kinerja pemerintah dan mendorong perubahan positif dalam kebijakan publik.

c. Keadilan dan Keterbukaan

Kualitas tata kelola pemerintahan juga mencakup keadilan dalam penyediaan layanan publik dan distribusi sumber daya. Pemerintah yang efektif harus memastikan bahwa

keputusan dan layanan yang disediakan tidak diskriminatif dan tersedia untuk semua warga tanpa pandang bulu.

d. Efisiensi dan Efektivitas
Tata kelola yang baik menuntut efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya dengan baik agar program-program pembangunan dan layanan publik dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

e. Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi
Penegakan hukum yang kuat dan sistem anti-korupsi yang efektif adalah komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan menghambat distribusi sumber daya secara adil.

f. Inovasi dan Teknologi
Pemerintah yang efektif harus mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

g. Kolaborasi dan Kemitraan
Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk menciptakan solusi bersama atas tantangan yang kompleks dan lintas-batas.

Secara keseluruhan, kualitas tata kelola pemerintahan berperan penting dalam membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah yang baik mampu mengelola negara dengan adil, efektif, dan transparan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dan mendukung perkembangan yang berkelanjutan.

11. Isu Strategis Kabupaten Sumedang

Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan mengunakan kriteria-kriteria yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan daerah; dan potensial untuk dikelola. Hasil perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta dengan memperhatikan isu Pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD selain memperhatikan pula isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045. Isu Pembangunan berkelanjutan berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang meliputi:

Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga;

Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah;

Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata;

Belum optimalnya sarana prasarana dan pelayanan cakupan akses kesehatan, pengendalian dan pencegahan stunting, penyakit menular, serta kapasitas tenaga kesehatan yang masih rendah dan belum merata;

Kualitas regulasi dan koordinasi perencanaan dan pengelolaan wilayah yang kurang mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati;

Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta perlunya peningkatan pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Tabel 1.14 Penentuan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penduduk Usia Produktif Masih Dominan dan puncaknya sampai Tahun 2030 (Berdasarkan Proyeksi Data BPS) Terdapat peluang untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan dengan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan pembelajaran serda Keberadaan Kawasan Pendidikan Tinggi di Jatinangor	RLS dan HLS masih Rendah	Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta perlunya peningkatan pelestarian budaya dan kearifan lokal	**Demografi** memainkan peran penting karena pertumbuhan dan distribusi penduduk akan menentukan kebutuhan infrastruktur pendidikan serta kualitas SDM di masa depan	**Bonus Demografi** bagi Kabupaten Sumedang memiliki peluang besar untuk memanfaatkan bonus demografi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi SDM unggul yang siap bersaing di pasar kerja regional maupun global	**Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia** berkaitan dengan pendidikan dan SDM. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kompetensi masyarakat agar dapat bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar melibatkan distribusi pembangunan dan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur pendidikan (seperti sekolah dan laboratorium) juga termasuk dalam kategori ini.	**SDM dan Peningkatan Kualitas Hidup Massyarakat**
	Akses terbatas terhadap pendidikan tinggi dan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan					
	Angka Stunting masih tinggi (14,4% Data SSGI)	Belum optimalnya sarana prasarana dan pelayanan cakupan akses kesehatan, pengendalian dan pencegahan stunting, penyakit menular, serta kapasitas tenaga kesehatan yang masih rendah dan belum merata				
	Kasus TBC Masih tinggi					
	Jumlah Kematian Ibu dan Bayi masih cukup tinggi					

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Reformasi Birokrasi berjalan Baik dibuktikan dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Profesionalitas Aparatur, Indeks Pelayanan Publik dan Nilai SAKIP yang sudah cukup tinggi	1) Beberapa layanan publik belum sepenuhnya berbasis digital. 2) Kapasitas ASN belum merata, terutama di kecamatan-kecamatan terpencil. 3) Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan skor kategori rentan				Kualitas Tata Kelola Pemerintahan ini berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintah dalam mengelola pembangunan.	**Tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur**
Ketersediaan aksesibilitas dan infrastruktur yang terhubung dengan kawasan dan sentra perekonomian	Infrastruktur dasar yang belum memadai, terutama di daerah yang terhubung dengan wilayah perdesaan yang terpencil	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Kebutuhan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan standar perubahan iklim dan energi terbarukan	Penyelarasan pembangunan infrastruktur dengan ekonomi hijau	Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar melibatkan distribusi pembangunan dan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur pendidikan (seperti sekolah dan laboratorium) juga termasuk dalam kategori ini.	**Infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah**

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Posisi geografis Sumedang yang strategis, serta sumber daya alam yang melimpah (pertanian, kehutanan, energi terbarukan, dan air)	Penurunan kualitas air, konversi lahan pertanian untuk pembangunan, dan risiko bencana alam	Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan dan bencana alam	Kebijakan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Pengelolaan kawasan perbatasan DAS yang dapat mempengaruhi kualitas air	**Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif**
Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan penyediaan air dengan dua DAS besar (Cimanuk dan Citarum)	Ketidakmampuan beberapa kecamatan dalam mencapai ambang batas ketersediaan pangan dan air yang memadai, serta potensi pengurangan kapasitas daya dukung lingkungan akibat pembangunan	Pengelolaan daya dukung alam yang terintegrasi untuk ketahanan pangan dan air.	Perubahan iklim secara langsung memengaruhi pola tanam, ketersediaan air, serta produktivitas lahan pertanian akibat cuaca ekstrem seperti kekeringan atau banjir. Hal ini menjadi tantangan besar bagi petani di Sumedang untuk mempertahankan hasil produksi pangan yang stabil	Pengelolaan pertanian yang berkelanjutan Perubahan Iklim, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumedang. Pola cuaca yang tidak menentu, seperti musim kemarau yang lebih panjang atau curah hujan ekstrem, dapat memengaruhi pola tanam, produktivitas lahan, dan distribusi air untuk irigasi	Green Economy (Ekonomi Hijau) dapat diterapkan melalui praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, agroforestri, dan pengelolaan lahan dengan pendekatan ramah lingkungan. Blue Economy (Ekonomi Biru) dapat dimanfaatkan melalui optimalisasi sumber daya air untuk mendukung pertanian. Pembangunan Inklusif juga penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan kelompok marjinal, dapat berpartisipasi dalam aktivitas pertanian dan menikmati hasilnya	**Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif**

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kabupaten Sumedang memiliki potensi dalam sektor ekonomi berkelanjutan, terutama dalam pengembangan industri kreatif, pariwisata, dan pertanian	Terdapat kesenjangan pendapatan yang signifikan antara daerah perkotaan (seperti Jatinangor) dan daerah pedesaan, yang mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan layanan dasar	Pengelolaan sumber daya sosial yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah kaya dan miskin	Perubahan tren pasar global yang mempengaruhi pendapatan sektor informal.	Ketimpangan ekonomi yang masih signifikan di berbagai daerah, termasuk ketimpangan akses layanan dan pendapatan	Ketimpangan akses dan kualitas pekerjaan di daerah pedesaan yang lebih bergantung pada sektor pertanian	**Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif**
Sumedang berada di kawasan dengan kerentanannya terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan	Kurangnya kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana di beberapa wilayah.	Meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana	Perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam	Kebijakan mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas adaptasi di daerah rawan bencana	Kerentanan terhadap bencana alam yang semakin meningkat di wilayah perbatasan dengan kawasan perkotaan	**Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif**
Potensi besar dalam mengembangkan sektor industri kecil dan menengah yang berkelanjutan, serta pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan digital	Keterbatasan keterampilan tenaga kerja di sektor formal, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, yang mengurangi daya saing tenaga kerja Sumedang di pasar global	Pengembangan pelatihan yang berbasis pada teknologi hijau dan sumber daya alam lokal untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan industri masa depan	Perkembangan teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan baru dan adaptif	Proses industrialisasi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tinggi dalam bidang manufaktur dan teknologi	Keterbatasan kesempatan kerja di daerah pedesaan yang mendorong urbanisasi.	**Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif**

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Keberadaan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang sudah berjalan dan berpotensi lebih ditingkatkan, terutama dengan pendekatan berbasis lingkungan	Tingginya angka kemiskinan di beberapa kecamatan, terutama di daerah perbatasan, yang memerlukan intervensi sosial-ekonomi lebih cepat	Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga	Krisis ekonomi global akibat pandemi Covid-19 yang memperburuk situasi masyarakat miskin dan memengaruhi akses pangan	Strategi pengurangan kemiskinan dengan pendekatan yang holistik dan terpadu antara sosial-ekonomi dan lingkungan	Tantangan daerah pedesaan dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan daerah perkotaan	**Kesejahteraan dan ketahanan sosial**

Dari Tabel di atas, maka isu strategis Kabupaten Sumedang untuk periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat
2. Tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur
3. Infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah
4. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
5. Kesejahteraan dan ketahanan sosial

Gambar 1.9

Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis RPJPD serta Isu Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD

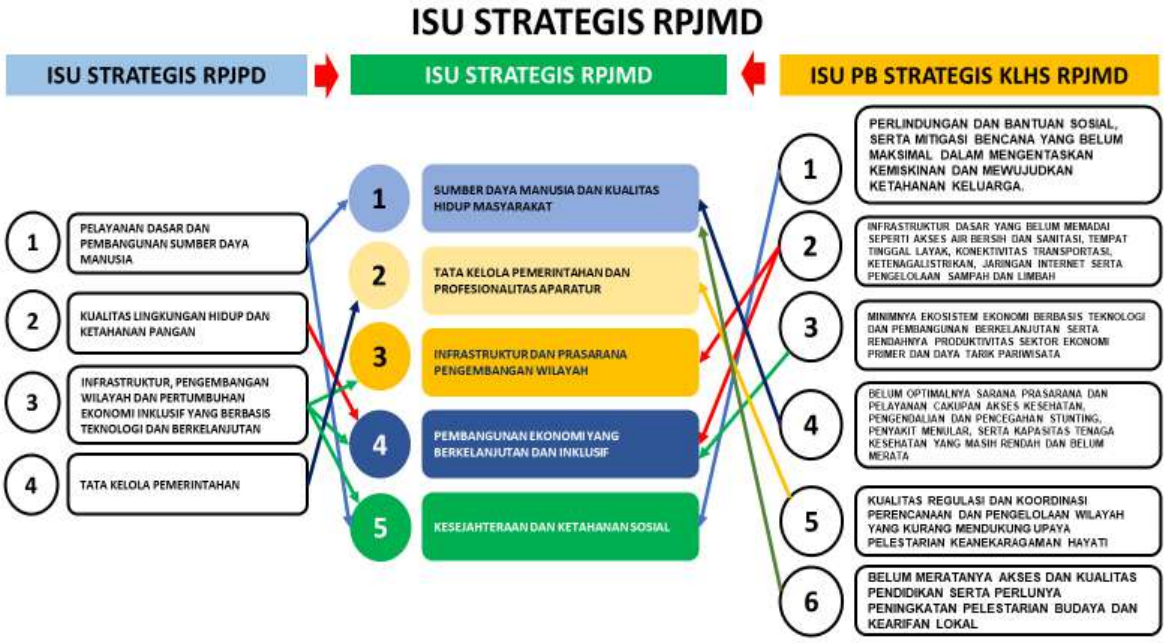

12.Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar untuk mengembangkan SDM yang unggul dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan isu strategis tersebut melalui aspek-aspek berikut:

1. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang relatif masih rendah dibandingkan dengan standar regional maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya : a. Minimnya akses pendidikan di wilayah terpencil. Banyak masyarakat di daerah pedesaan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas atau perguruan tinggi karena keterbatasan fasilitas dan biaya; b. Tingginya angka putus sekolah

dikarenakan faktor ekonomi keluarga sering menjadi alasan utama anak-anak tidak melanjutkan Pendidikan; c. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum yang kurang adaptif terhadap kebutuhan industri menyebabkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan menurun.

2. Pemerataan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

   Kualitas Pendidikan relatif masih tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kurangnya tenaga pengajar berkualitas di daerah terpencil dan tenaga pengajar profesional cenderung memilih bekerja di wilayah perkotaan. Sarana prasarana yang minim di beberapa sekolah di pedesaan yang tidak memiliki fasilitas memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi. Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran tradisional masih mendominasi, sehingga kurang efektif dalam meningkatkan kompetensi siswa.

3. Pemerataan Pelayanan Kesehatan di setiap wilayah

   Pemerataan pelayanan kesehatan di setiap wilayah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Isu ini menjadi prioritas karena kesehatan adalah fondasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung produktivitas ekonomi, dan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Namun, kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi kabupaten Sumedang memiliki karakteristik geografis yang cukup kompleks, dengan wilayah dataran tinggi, pegunungan, hingga dataran rendah. Kondisi ini menyebabkan distribusi fasilitas kesehatan tidak merata, sehingga masyarakat di wilayah terpencil sering kali kesulitan mengakses layanan kesehatan.

4. Penguatan Ahlak dan Nilai-nilai Budaya

   Penguatan akhlak dan nilai-nilai budaya merupakan hal yang sangat relevan dalam pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi yang semakin pesat, menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal serta memperkuat akhlak masyarakat menjadi tantangan sekaligus prioritas utama. Kabupaten Sumedang, yang kaya akan warisan budaya tradisional, memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya ini ke dalam pembangunan manusia (SDM) yang unggul dan berkepribadian luhur. Namun, di tengah arus perubahan zaman, terjadi erosi nilai-nilai budaya lokal dan moralitas yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penguatan akhlak dan nilai-nilai budaya tidak hanya penting untuk menjaga identitas daerah, tetapi juga untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis karakter.

5. Zero New Stunting dan Pencegahan Penyakit Menular

Zero new stunting (nol kasus baru stunting) dan pencegahan penyakit menular sangat penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Sumedang. Hal tersebut memiliki dampak langsung terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), produktivitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kabupaten Sumedang, sebagai daerah dengan potensi besar dalam sektor pertanian, industri, dan pariwisata, memerlukan SDM yang sehat dan berkualitas untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerahnya.

Adanya tantangan seperti tingginya angka stunting dan penyebaran penyakit menular masih menjadi kendala serius di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, penanganan kedua aspek ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan produktif.

6. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tidak hanya menjadi indikator kesehatan masyarakat, tetapi juga cerminan dari kualitas layanan kesehatan, aksesibilitas fasilitas kesehatan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan maternal dan neonatal. Kabupaten Sumedang, sebagai daerah dengan potensi besar dalam sektor pertanian, industri, dan pariwisata, membutuhkan SDM yang sehat dan berkualitas untuk mendukung visi pembangunannya. Oleh karena itu, penurunan AKI dan AKB menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

13. Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur

Kabupaten Sumedang sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kebijakan. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait isu Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur :

a. Penguatan Integritas & Profesionalitas Aparatur

Penguatan integritas dan profesionalitas aparatur merupakan solusi strategis yang sangat relevan dalam menangani isu tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Dengan meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini tidak hanya akan mendukung pembangunan daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

b. Penguatan Inovasi, Digitalisasi dan Kemudahan Akses Layanan Publik.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Untuk memastikan keberhasilan penguatan inovasi, digitalisasi, dan kemudahan akses layanan publik, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan.

c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kaitan yang sangat erat dengan penanganan isu strategis pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang, dalam konteks Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur. PAD adalah salah satu sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kemandirian fiskal daerah. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga memberikan lebih banyak ruang untuk inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

d. Penguatan Akuntabilitas
Dalam menangani isu-isu terkait tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur di Kabupaten Sumedang. Akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam good governance yang menjamin bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dalam hal proses maupun hasilnya.

Dengan memperkuat akuntabilitas, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, penguatan akuntabilitas juga akan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko praktik korupsi.

14. Infrastruktur dan Prasarana Pengembangan Wilayah
Infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi besar dalam pengembangan wilayah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta

pembangunan berkelanjutan. Beberapa aspek penting terkait isu strategis Infrastruktur dan Prasarana Pengembangan Wilayah sebagi berikut :

a. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Jalan
   Infrastruktur jalan yang baik dan merata tidak hanya menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang terencana dan terintegrasi, peningkatan infrastruktur jalan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.
b. Pembukaan Akses Jalan Baru, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah
   Pembangunan infrastruktur jalan baru, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan wilayah menjadi elemen kunci yang harus diperhatikan secara strategis. Ketiga aspek ini saling terkait dan dapat berkontribusi pada percepatan pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, implementasi yang tepat, dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, Kabupaten Sumedang dapat menjadi daerah yang maju, kompetitif, dan inklusif.
c. Peningkatan Kualitas Irigasi Pertanian
   Memiliki potensi pertanian yang besar, dengan sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor ini. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi pertanian sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan daerah. Peningkatan irigasi tidak hanya berdampak langsung pada produktivitas pertanian, tetapi juga menjadi kunci dalam menangani isu strategis terkait infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang.
d. Pemerataan konektivitas jaringan internet
   Ketimpangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan serius. Minimnya konektivitas digital di wilayah pedesaan menghambat transformasi ekonomi dan sosial masyarakat. Digitalisasi layanan publik juga memerlukan jaringan internet yang stabil.
e. Infrastruktur Pengelolaan Sampah
   Masalah persampahan masih memerlukan penanganan serius. Terutama sampah makanan menjadi penyumbang terbesar masalah sampah, sementara sistem pengelolaan sampah belum optimal. Hal ini berdampak negatif pada kualitas

lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Untuk itu infrastruktur pengelolaan sampah memang merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Permasalahannya tidak hanya terkait dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

f. Akses Air Bersih dan Sanitasi
   Ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi yang baik tidak hanya menjadi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga berperan krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Akses air bersih dan sanitasi merupakan elemen penting dalam pembangunan infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang. Dengan meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta penerapan teknologi inovatif dan kebijakan yang tepat.

g. Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan
   Tata ruang merupakan instrumen utama dalam perencanaan pembangunan wilayah yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan lahan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Sementara itu, alih fungsi lahan sering kali menjadi isu strategis karena dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, tata ruang dapat menjadi alat untuk mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, sementara pengendalian alih fungsi lahan dapat melindungi ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.

h. Energi Baru Terbarukan (EBT)
   Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan energi secara berkelanjutan, tetapi juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi hijau. Dengan memanfaatkan potensi EBT, Kabupaten Sumedang dapat mencapai kemandirian energi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi

antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta penerapan teknologi dan kebijakan yang tepat.

i. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni
Rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan sehat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kualitas hidup, pembangunan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan memastikan akses terhadap rumah layak huni, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan.

15. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Inklusif
Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan transformasi ekonomi, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengidentifikasi isu strategis serta memberikan solusi dalam mendorong ekonomi Kabupaten Sumedang yang tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan, disajikan beberapa aspek penting sebagai berikut :

a. Pengembangan Kawasan Perekonomian
Dengan memanfaatkan potensi lokal, inovasi teknologi, dan kolaborasi antar-pihak, pengembangan kawasan ini dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pengembangan kawasan perkonomian baru memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya kapasitas SDM, dan kurangnya investasi, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti potensi lokal, dukungan kebijakan, dan perkembangan teknologi. Dengan strategi yang tepat, seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan SDM, dan kolaborasi antar-pihak, pengembangan kawasan perkonomian baru dapat menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten Sumedang.

b. Peningkatan Nilai Inverstasi Daerah
Investasi daerah tidak hanya membawa modal finansial, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, dapat menjadi tujuan investasi yang

menarik bagi pelaku usaha domestik maupun internasional. Peningkatan nilai investasi daerah merupakan solusi strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Sumedang.

c. Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil, Ekonomi Kreatif dan Koperasi
Pengembangan dan penguatan Usaha Mikro Kecil (UMK), Ekonomi Kreatif, serta Koperasi merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketiga sektor ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memberikan akses permodalan, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, memanfaatkan teknologi digital, dan membangun sinergi antar-sektor.

d. Digitalisasi Ekonomi
Pembangunan infrastruktur digital menjadi fondasi utama dalam upaya digitalisasi ekonomi. Tanpa akses internet yang memadai, potensi digitalisasi tidak akan tercapai. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan memberdayakan masyarakat secara lebih merata. Digitalisasi ekonomi di Kabupaten Sumedang dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital, pemberdayaan pelaku ekonomi lokal, pengembangan ekonomi kreatif, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

e. Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja serta Perluasan Lapangan Pekerjaan
Pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif merupakan salah satu prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja serta perluasan lapangan pekerjaan menjadi elemen kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal, mengembangkan sumber daya manusia, dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Pengembangan Sektor Pertanian dan Peternakan untuk mendukung Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat secara kuantitas dan kualitas, aman, merata, serta terjangkau oleh semua lapisan

masyarakat. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan.

Pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sumedang harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, petani, peternak, akademisi, hingga pelaku industri. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Sumedang dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mencapai ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

g. Penanganan dan Pengelolaan Persampahan

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Ini berdampak pada kerusakan ekosistem lokal, seperti sungai yang tersumbat sampah atau lahan yang terkontaminasi limbah. Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle (3R) dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, pengolahan sampah organik menjadi kompos atau biogas dapat mendukung pertanian lokal dan energi terbarukan.

h. Penanganan Bencana

Kabupaten Sumedang, sebagai salah satu daerah di Jawa Barat, memang dikenal sebagai wilayah yang rawan bencana alam, seperti tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan kekeringan. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis, topografi, serta aktivitas manusia yang dapat memperburuk kerentanan lingkungan. Oleh karena itu, penanganan bencana menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut. Penanganan bencana di kabupaten Sumedang bukan hanya soal respons terhadap kejadian bencana, tetapi juga merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memperhatikan aspek keberlanjutan serta inklusivitas, Sumedang dapat mengurangi risiko bencana dan membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana alam.

i. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta melestarikan budaya dan lingkungan. Namun, pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh

seluruh lapisan masyarakat tanpa merusak sumber daya alam dan budaya setempat. Dengan mengelola pariwisata secara bijak, Sumedang dapat memanfaatkan potensinya sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus melindungi keberlanjutan sumber daya alam dan budaya lokal.

j. Ketersediaan dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
Kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, sayuran, dan lainnya adalah elemen dasar yang mendukung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang ini sangat krusial untuk menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya ini tidak hanya akan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

16. Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial
Kabupaten Sumedang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kecil menengah (IKM). Namun, pertumbuhan ekonominya masih dipengaruhi oleh tantangan seperti kesenjangan ekonomi antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih menjadi perhatian serius. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin relatif masih tinggi, terutama di wilayah pedesaan. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan UMKM. Berikut beberapa aspek penting terkait dengan Isu Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial adalah:

a. Efektivitas Perlindungan Sosial dan Bantuan Sosial
Beberapa kebijakan yang dimiliki Kabupaten Sumedang telah dirancang untuk melindungi masyarakat rentan dan memberikan bantuan kepada kelompok miskin atau terdampak bencana, meliputi: a. Program Keluarga Harapan (PKH): Program nasional yang juga dilaksanakan di Sumedang untuk membantu keluarga miskin, b. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Bantuan dalam bentuk voucher atau kartu elektronik untuk membeli kebutuhan pangan, c. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 atau bencana alam, dJaminan Sosial: Termasuk program jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin, e. Program Inovatif Lokal: Pemerintah

Kabupaten Sumedang juga menciptakan program inovatif seperti "Sumedang Simpati" yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Jika tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, maka distribusi bantuan dan perlindungan sosial dapat terhambat.

b. Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak
Masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak mencakup berbagai aspek, termasuk kekerasan, ketimpangan gender, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, serta faktor budaya. Solusi yang efektif adalah memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi perempuan dan anak. Dengan melibatkan edukasi, penguatan institusi, peningkatan akses ekonomi dan kesehatan, serta dorongan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

c. Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Merupakan salah satu program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, anak terlantar, korban kekerasan, keluarga miskin, dan kelompok lain yang memerlukan perlindungan sosial. Dengan berbagai program yang telah dilaksanakan, program ini telah memberikan manfaat signifikan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan data yang tidak akurat perlu di atasi agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan merata.

d. Penguatan Peran Kelembagaan Sosial
Penguatan Peran Kelembagaan Sosial dalam menangani isu strategis kesejahteraan dan ketahanan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi perlu melakukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat lokal. Dengan fokus pada peningkatan kapasitas, kolaborasi, dan pemberdayaan, isu strategis kesejahteraan dan ketahanan sosial dapat ditangani secara efektif.

b. Visi, Misi Kepala Daerah

Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas untuk pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2029. Visi dan misi yang dimaksud dalam

penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2029 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2025 – 2029. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diupayakan diukur melalui indikator yang bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah Program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *Cascading* (penurunan) kinerja.

Visi dan Misi

1. Visi Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

"Sumedang SIMPATI Semakin ***Maju Menuju Indonesia Emas 2045" SIMPATI*** adalah **Sejahtera** Masyarakatnya, **Agamis** Akhlaqnya, **Maju** Daerahnya, **Profesional** Aparaturnya dan **Kreatif** Ekonominya.

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Sejahtera : Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat secara adil dan merata.

Agamis : sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maju : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertata kawasan serta terbukanya kebijakan shareholding pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

Profesional : Pemerintah Kabupaten Sumedang mewujudkan good governance dimana penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

Kreatif : masyarakat Kabupaten Sumedang memiliki kreativitas dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dan atau jasa yang lebih baik unggul secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Kreativitas dan produktivitas ini akan ditunjang dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dampak dari pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi ini adalah proses pembangunan yang akan semakin menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan ini akan berimbas (trickle-down effect) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickle-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai arus utama dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sasaran Visi.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, terdapat lima

Sasaran Visi, Indikator Visi dan targetnya yang harus dicapai selama periode RPJMD Tahun 2025-2029. Sasaran Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan per kapita
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan;
3. Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Berdaya Saing;
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
5. Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission

Untuk lebih rinci Sasaran visi dan target kinerja dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.15

Sasaran Visi dan Target Kinerja Sasaran Visi Tahun 2025-2029

Sasaran Visi	Indikator	Target (Tahun)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. PDRB Perkapita (ADHB) (Rp.Juta)	39.55 - 39.91*	44.3 - 45.27*	47.7 - 49.45*	51.33 - 54.13*	51.33 - 54.13*	59.5 - 65.71*
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	19.62*	19.71*	19.8*	19.89*	19.99*	20.09*
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	8.23 - 9.09*	7.64 - 8.34*	6.62 - 7.48*	5.39 - 6.46*	5.39 - 6.46*	3.59 - 4.92*
	b. Rasio Gini (Poin)	0.352 - 0.359*	0.342 - 0.403*	0.343 - 0.424*	0.346 - 0.397*	0.353 - 0.379*	0.357 - 0.38*
	c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	1.64*****	1.65*****	1.65*****	1.65*****	1.65*****	1.65*****
	d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.79 - 5.20*	4.77 - 6.03*****	4.84 - 7.42*****	4.88 - 7.57*****	5.04 - 7.89*****	5.08 - 5.61*****
3. Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Berdaya Saing	a. Indeks Inovasi Daerah	73,3	73,35	73,4	73,45	73,5	73,55
	b. Indeks Daya Saing Daerah	3,593	3,651	3,710	3,770	3,831	3,893
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (%)	74.48*	74.73*	75.00*	75.31*	75.66*	76.02*
5. Penurunan Emisi GRK menuju Net	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton	6.05*	6.44*	6.87*	7.42*	7.96*	8.40*

Sasaran Visi	Indikator	Target (Tahun)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Zero Emission	CO2eq/2010 IDR Milyar)						
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	66.25*	66,5	66,76	67,01	67.26*	67,51

Sumber : Hasil Analisis, Bappppeda 2025

2. Misi Kepala daerah

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi menggambarkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang perlu dilakukan. Misi juga memberikan arah dan batasan dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan, langkah-langkah akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama : Mujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter.

Misi ini mendorong pembangunan SDM masyarakat Kabupaten Sumedang yang tidak hanya cerdas secara intelektual, sehat secara fisik dan mental, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. SDM yang agamis dan berkarakter akan menjadi pondasi dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misi Kedua : Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif.

Misi ini mendorong upaya membentuk birokrasi pemerintahan yang berintegritas, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Birokrasi yang profesional dan responsif adalah kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Misi Ketiga : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan.

Infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, perumahan, pengelolaan sampah akan langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Namun, disparitas akses

dan kualitas infrastruktur antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan, Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang **merata dan berkeadilan** menjadi prioritas untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh manfaat pembangunan.

Misi Keempat : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup jika tidak disertai pemerataan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif (merangkul semua golongan, termasuk masyarakat rentan, miskin, dan UMKM) serta berkelanjutan (tidak merusak lingkungan, memperhatikan generasi mendatang). Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, UMKM, pariwisata, industri kreatif, dan industri pengolahan serta perdagangan, Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola potensi itu agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kawasan tertentu, tetapi bisa dirasakan secara merata dan adil.

Misi Kelima : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial

Pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari tingkat kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat. Kesejahteraan menekankan pada terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas hidup, sementara ketahanan sosial merujuk pada kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, konflik sosial, dan berbagai persoalan kehidupan (kerentanan sosial, ketidaksetaraan akses untuk mendapatkan pelayanan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak dan perempuan).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diatas pada implementasinya dilandasi oleh 3 (tiga) pondasi yaitu

1. **Agama,** agar implementasi perwujudannya agar terarah sesuai dengan kaidah nilai-nilai agama;
2. **Budaya**, agar implementasi perwujudannya membumi dengan menekankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
3. **Teknologi**, agar implementasi perwujudannya lebih akseleratif dan sesuai dengan perkembangan teknologi global.

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2025. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visiantara menuju visi jangka panjang. Visi jangka panjang Kabupaten Sumedang adalah "*Sumedang Yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil Dan Berkelanjutan (Sumedang MANDALA)*" diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu *"Sumedang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045".*

Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.16

Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun2025-2045

MISI RPJPD	MISI RPJMD
Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing	**Misi 1 :** Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter. **Misi 5 :** Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial.
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif	**Misi 4 :** Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Misi 3 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Akuntabel	**Misi 2 :** Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif.
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Aman dan Berkeadilan	**Misi 1 :** Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter. **Misi 2 :** Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif.
Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan	**Misi 1 :** Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter **Misi 4 :** Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan **Misi 5 :** Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial.
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah yang Merata.	**Misi 3 :** Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan
Misi 7 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas.	**Misi 3 :** Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan
Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	**Misi 3 :** Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan

MISI RPJPD	MISI RPJMD
	Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Sumber : Hasil Analisis, Bappppeda 2025

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Astacita).

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029 tentunya harus selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan Visi ***"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"***, sedangkan visi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 adalah ***"Sumedang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045".*** Keselarasan visi dan misi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.10

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Astacita)

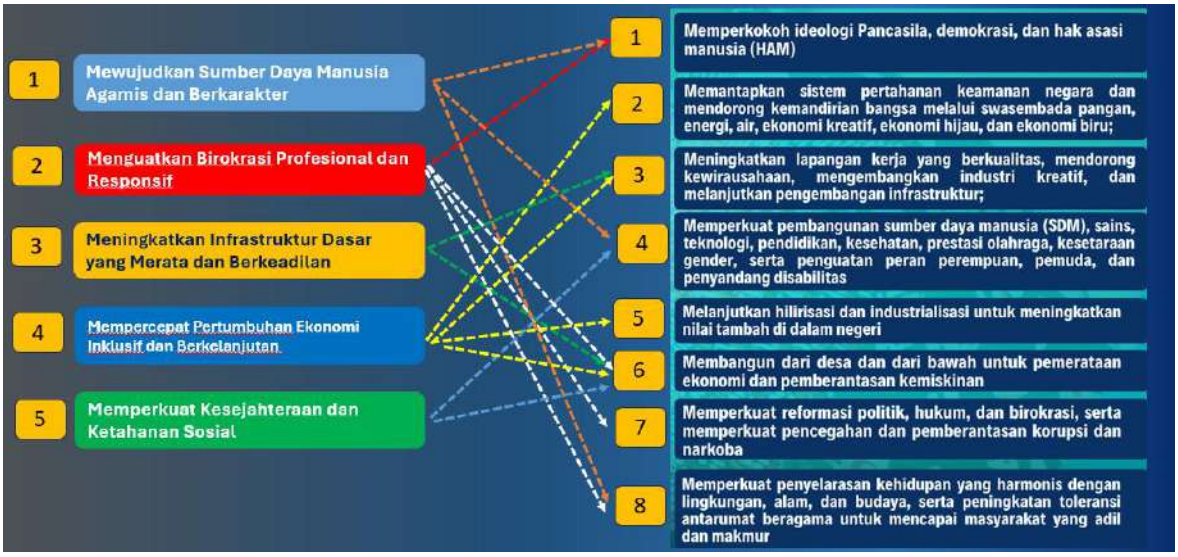

Sumber : Hasil analisis, Bappppeda 2025

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dengan Visi **"Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan"**. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan Visi "**Jabar Istimewa -Lembur diurus Kota di Tata".** Pernyataan **Jawa Barat Istimewa** mengandung makna tata kelola wilayah yang adil dan seimbang antara pengembangan wilayah pedesaan dan perkotaan, antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Kalimat visi tersebut memberi pemahaman bahwa tujuan pembangunan daerah pada tahun 2025-2029 adalah untuk menciptakan kondisi Jawa Barat yang istimewa dalam penyelenggaraan pembangunannya, dengan memperhatikan unsur mikro (dimaknai dengan kota/perkotaan) sebagai potensi pengungkit pertumbuhan wilayah yang dapat mendorong kemampuan Jawa Barat untuk bersaing sebagai daerah yang unggul dalam segala bidang pembangunan.

Secara filosofis frase, kalimat Jawa Barat Istimewa – Lembur Diurus, Kota Ditata, memiliki makna kata sebagai berikut:

- **JABAR** merupakan akronim dari Jawa Barat sebagai Provinsi yang terdiri atas penduduk/masyarakat dan wilayah/daerah yang terbagi dalam 27 Kabupaten/Kota.

- **ISTIMEWA** memiliki arti situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan , maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas.

- **LEMBUR DIURUS**, Lembur dalam bahasa Sunda berarti desa atau kampung, dan Diurus berarti dikelola atau dipelihara menjadi lebih baik. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa agar berkembang dan menikmati kesejahteraan yang setara dengan daerah perkotaan.

  Pengelolaan perdesaan meliputi pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata serta sektor lainnya yang dilaksanakan dengan tetap menjaga fungsi konservasi dan keberlanjutan

lingkungan hidup serta menjaga kearifan lokal dan tradisi.

- **KOTA DITATA** memiliki arti pembangunan wilayah perkotaan sebagai Kawasan perdagangan barang dan jasa, serta Kawasan industri yang dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah.

Kota merujuk pada kawasan perkotaan atau kota-kota besar di Jawa Barat, sedangkan ditata berarti dikelola atau ditata dengan baik. Slogan ini mengandung arti bahwa pemerintah akan fokus pada penataan kota, termasuk perbaikan infrastruktur, transportasi, tata ruang, pengelolaan limbah, dan pembangunan ekonomi yang lebih terencana.

Ini bertujuan untuk menjadikan kota-kota di Jawa Barat sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, dengan memperhatikan kesejahteraan warganya dan menciptakan kota yang lebih maju, modern, serta ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, "Lembur Diurus, Kota Ditata" mencerminkan visi pembangunan yang seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Jawa Barat ingin memastikan bahwa daerah pedesaan tidak akan tertinggal dalam hal pembangunan dan pemberdayaan, sementara di sisi lain, kotakota di Jawa Barat juga mendapat perhatian serius dalam hal penataan dan perbaikan kualitas hidup. Visi ini berfokus pada pemerataan pembangunan, sehingga baik desa maupun kota dapat berkembang secara berkelanjutan dan harmonis.

Tabel 1.17

Pencapaian Visi yang di dukung oleh 4 (empat) misi

Misi 1		**:**	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul.
Misi 2		**:**	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif.
Misi 3		**:**	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
Misi 4		**:**	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Untuk menciptakan keselarasan pembangunan antara Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka perlu adanya telaahan kesesuaian antara visi-misi provinsi dengan visi-misi kabupaten/kota. Dalam konteks pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang,

diketahui terdapat irisan persamaan antara substansi visi misi Kabupaten Sumedang dengan substansi visi-misi Provinsi Jawa Barat. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.11

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

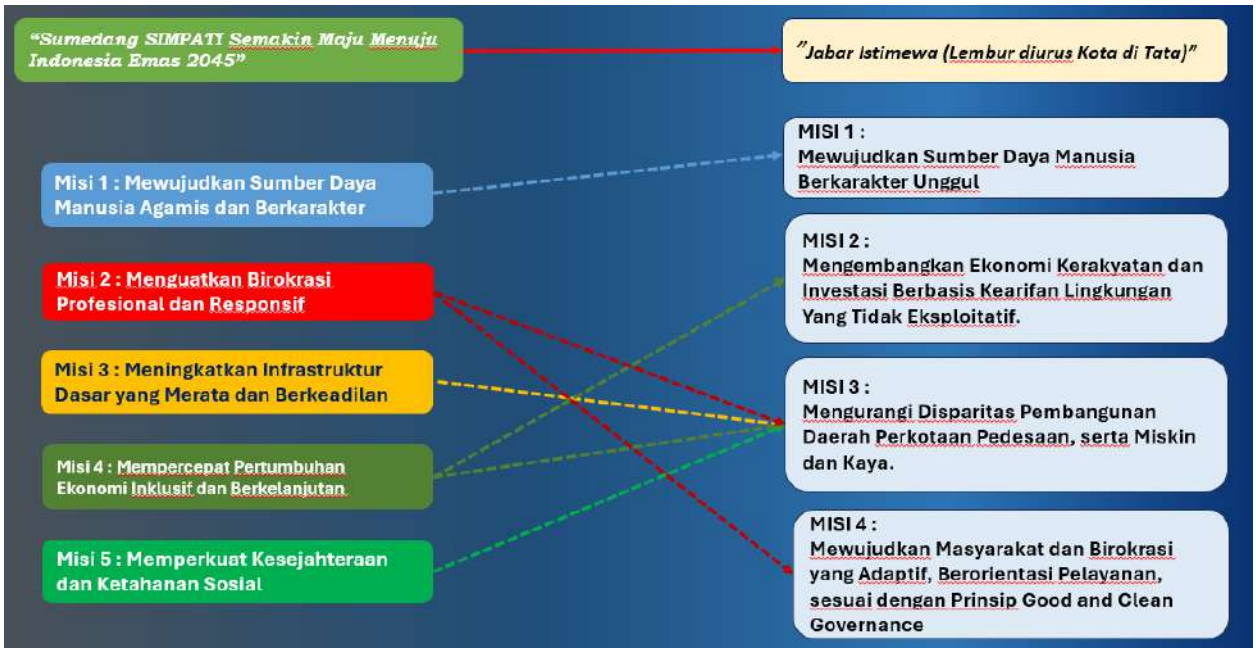

Sumber : Hasil analisis, Bappppeda 2025

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.18

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Misi 1	**:**	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter**
Tujuan	:	Mewujudkan Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter.
Sasaran 1	:	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran 2	:	Meningkatnya Pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan Pendidikan serta literasi masyarakat
Sasaran 3	:	Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis
Misi 2	:	**Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif**
Tujuan	:	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif berbasis teknologi Digital.
Sasaran 1	:	Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa.
Sasaran 2	:	Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital.
Sasaran 3	:	Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum dalam upaya peningkatan ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat.
Sasaran 4	:	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Sasaran 5	:	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah
Misi 3	**:**	**Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan**
Tujuan	:	Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas.
Sasaran 2	:	Meningkatnya ketahanan air
Misi 4	**:**	**Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**
Tujuan	:	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Sasaran 1	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Teknologi.
Sasaran 2	:	Terkendalinya Stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah
Sasaran 3	:	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
Sasaran 4	:	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau
Sasaran 5	:	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Sasaran 6	:	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim.
Misi 5	**:**	**Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial**
Tujuan	:	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial.
Sasaran 1	:	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat
Sasaran 2	:	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang menjabarkan kepada Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.19

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045											
Misi 1 : 'Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter	**Mewujudkan Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter**		**Indeks Pembangunan Manusia**	74,57	**74,48***	**74,73**	**75,00**	**75,31**	**75,66**	**76,02**	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	75,42	75,62	75,81	76	76,2	76,39	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,4	12,58	11,82	11,11	10,45	9,82	9,23	
			Penanganan Tuberkulosis: a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	N/A	91	91	91	91	91	91	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	N/A	91	91	91	91	91	91	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan Pendidikan serta literasi masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,74	8, 75 - 8,92	8,77 - 9,01	8,79 - 9,11	8,81 - 9,2	8,83 - 9,29	8,85 -9,39	
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,02	13,09	13,13	13,17	13,21	13,25	13,29	
		Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,6	76,95 - 77,7	77,7 - 78,2	78,2 - 78,7	78,7 - 79,2	79,2 - 79,7	79,7 - 80,2	
			Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100	100	100	100	100	100	100	
			Tingkat Bina Demokratisasi	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan (%)	N/A	19	22	25	27	30	33	
			Partisipasi dan peran Pemuda dalam Pembangunan (%)	N/A	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Misi 2 : 'Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif	**Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas,**		**Indeks daya Saing Daerah**	**3,86**	**3,593**	**3,651**	**3,710**	**3,770**	**3,831**	**3,893**	
			Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	**89,65**	**90,00**	**91,00**	**92,00**	**93,00**	**94,00**	**95,00**	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	adaptif dan Inovatif berbasis teknologi Digital	Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa	Indeks Profesionalisme ASN (Nilai)	81	81	82	83	84	85	87	
			Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) %	68,6	80	80,5	81	81,5	82	82,5	
			Indeks Inovasi Daerah	73,23	73,3	73,35	73,4	73,45	73,5	73,55	
			Indeks Desa (%)	N/A	80	82	84	86	88	90	
		Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,51	4,6	4,65	4,7	4,75	4,80	4,85	
		Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum dalam upaya Peningkatan ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	Indeks Kepatuhan Daerah	N/A	65	66	67	68	69	70	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	N/A	4,71	4,71	4,73	4,74	4,75	4,76	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Nilai Skor LPPD Kabupaten	3,64 (2023)	3,647	3,648	3,649	3,650	3,651	3,652	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan	**Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah**		**Indeks Kualitas Infrastruktur (%)**	**75,59**	**76,02**	**76,46**	**76,90**	**77,34**	**77,79**	**78,24**	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	N/A	7,02	12,4	17,77	23,15	28,52	33,9	
			Persentase kemantapan Jalan (%)	87,54	**88,85**	**90,18**	**91,53**	**92,91**	**94,30**	**95,70**	
		Meningkatnya Ketahanan air	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	N/A	2,26	2,61	2,95	3,31	3,66	4.02	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	N/A	32,55	35,92	39,29	42,67	46,04	49,41	
Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**4,05**	**4.79 - 5.20**	**4.77 - 6.03**	**4.84 - 7.42**	**4.88 - 7.57**	**5.04 - 7.89**	**5.08 - 5.61**	
			PDRB Perkapita (ADHB) (Rp.Juta)	**39,7**	**39.55-39.91**	**44.3-45.27**	**47.7-49.45**	**51.33-54.13**	**55.18-59.33**	**59.5-65.71**	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar)	**N/A**	**6,05**	**6,44**	**6,87**	**7,42**	**7,96**	**8,4**	
			Indeks Resiko Bencana	**127,24**	**137,5**	**136,47**	**135,44**	**134,41**	**133,38**	**132,35**	
			Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Poin)	N/A	49,6	51,19	51,87	52,63	53,41	54,21	
		Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,32	19,62	19,71	19,8	19,89	19,99	20,09	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	5,49	5,24	5,34	5,45	5,56	5,68	5,8	
			Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	15,82	17,93	19,63	21,33	23,03	24,73	26,43	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	N/A	3,74	3,92	4,11	4,31	4,52	4,74	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	6,16	6.13 - 6.68	5.89 - 6.44	5.88 - 6.43	5.86 - 6.4	5.84 - 6.38	5.8 - 6.34	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	N/A	23,51	23,59	23,67	23,75	23,84	23,92	
			Net Ekspor Impor Antar Daerah (% PDRB)	N/A	-1,5 sd -0,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Nilai Tukar Petani (NTP)	N/A	105,85	106,70	107,55	108,40	109,25	110,10	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Terkendalinya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	N/A	0,709	0,715	0,742	0,791	0,866	0,863	
			Persentase Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) (%)	N/A	90	92	95	97	100	100	
			Total kredit/PDRB (%)	N/A	19,13	19,63	21,48	23,04	24,57	27,650	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	N/A	5,01	4,83	4,61	4,36	4,08	3,8	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,47	66,25*	66,50	66,76	67,01	67,26	67,51	
			Penurunan Emisi GRK/Kumulatif (Ton Co2eq)	N/A	456726,86	501743,13	549988,17	606325,34	672001,06	743714,08	
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahahan Daerah	0,49	0,54	0,56	0,57	0,58	0,6	0,61	
	Mewujudkan Kesejahteraan		**Tingkat Kemiskinan (%)**	**9,1**	**9,09 - 8,23**	**8.34 - 7,64**	**7.48 - 6,62**	**6,46 - 5,39**	**5,35 - 3,96**	**4,92 - 3,59**	
			Rasio Gini (Poin)	**0,337**	**0.352-0.359**	**0.342-0.403**	**0.343-0.424**	**0.346-0.397**	**0.353 0.379**	**0.357-0.38**	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial	**Masyarakat dan Ketahanan Sosial**	Meningkatnya Ketahanan Sosial masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Rp.Juta/Tahun)	11,59	11,430 - 12,325	11,632 - 12,713	11,858 - 13,092	12,035 - 13,536	12,235 - 13,971	-	
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,83	65,29	67,29	69,29	71,29	73,29	75,29	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,217	0,45 - 0,44	0,43 - 0,42	0,42 - 0,41	0,41 - 0,4	0,4 - 0,39	0,39 - 0,38	
			Indeks Pembangunan Gender								
			Indeks Pemberdayaan Gender								
			Indeks Perlindungan Anak	68,44	69,80	71,19	72,61	74,06	75,54	77,05	

Sumber : hasil Analisis, Bappppeda 2025

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

1. Strategi, Arah Kebijakan

Upaya pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran perlu didukung oleh penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Sumedang, maka rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintahan Kabupaten Sumedang untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Sedangkan perencanaan merupakan terjemahan dari visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang dapat dioperasionalkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis. Rumusan strategi dan arah kebijakan bertujuan untuk memberikan rujukan supaya dalam merumuskan capaian target kinerja pembangunan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melalui pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis mencapai visi dan misi melalui program-program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategis dilakukan dari waktu ke waktu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka arah kebijakan akan mengarahkan langkah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai dan sekaligus memberi pedoman, pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2025-2029 sebagai periodesasi dari dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan periodesasi perencanaan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045. Berdasarkan RPJPD, periode RPJMD saat ini berada dalam periode pertama. Arah kebijakan yaitu pada RPJPD “Sumedang Yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil Dan Berkelanjutan (Sumedang MANDALA)”

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan berpedoman pada rumusan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategis" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bagian sebelumnya, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam sumber dari isu-isu strategis tersebut apakah internal atau eksternal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan salah satu penggunaan metode untuk menentukan strategi adalah analisis SWOT, penggunaan metode ini karena cenderung lebih sederhana dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan analisis di atas, strategi Kabupaten Sumedang untuk periode pembangunan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan
3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan.
6. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan merata.
7. Pengembangan penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan/non formal.
8. Peningkatan Literasi Masyarakat Secara Menyeluruh untuk Mendukung Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.
9. Peningkatan kehidupan sosial yang agamis, toleran, taat hukum, berbudaya dan demokratis.

10. Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila.
11. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.
12. Peningkatan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi.
13. Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan ekosistem digital dalam rangka mendukung penguatan transformasi digital.
15. Penyederhanaan dan Peningkatan kualitas regulasi daerah serta peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
16. Peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan responsif.
17. Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja Terintegrasi dan transparan.
18. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah daerah.
19. Pengimplementasian pengembangan tata ruang wilayah.
20. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak huni), bangunan tahan bencana dan infrastruktur konektivitas daerah, serta peningkatan Kualitas permukiman.
21. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
22. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pengembangan dan pembangunan proyek strategis regional maupun Nasional.
23. Perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja.
24. Kualitas dan daya saing industri kecil menengah dan Koperasi.
25. Peningkatan pengelolaaan, Pengembangan dan Penataan kawasan dayatarik wisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif.
26. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis.
27. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Komoditas Daerah serta digitalisasi perdagangan
28. Penerapan Ekonomi hijau (Green economy).
29. Mendorong Stabilitas Keuangan dan Daya Saing Investasi Daerah.
30. Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam.
31. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan menuju kemandirian pangan.
32. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
33. Memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim.
34. Mempercepat Penanggulangan dan penuntasan kemiskinan.
35. Meningkatkan pemberdayaan dan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.
36. Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang pembangunan.

Strategis dan Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang pada 5 (lima) tahun kedepan harus selaras dengan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 1.20

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025-2029

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
1	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter**	**Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter**	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan sarana dan Prasarana Kesehatan	1	**Meningkatkan status Pustu Menjadi Puskesmas dan pemerataan Tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan di setiap Desa**
						2	**Penguatan regulasi dalam upaya pengadaan tenaga kesehatan di setiap wilayah**
						3	Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
				2	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	1	**Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan**
						2	**Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.**
						3	Peningkatan kualitas pendidikan tenaga Kesehatan
						4	Pemenuhan dan pemerataan kebutuhan tenaga kesehatan yang terutama di daerah perbatasan.
				3	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	1	**Memperluas layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif**
						2	**Meningkatkan cakupan layanan kesehatan universal**
						3	**Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.**

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
						4	Pengendalian dan pencegahan eliminasi penyakit manular dan penyakit tropis yang terabaikan melalui upaya preventif dan meningkatkan tingkat literasi masyarakat bidang kesehatan
						5	**Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya**
			Meningkatnya Pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan Pendidikan serta literasi masyarakat	4	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
				5	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan	1	**Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan**
						2	**Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan**
						3	Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga pendidik
						4	**Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah perbatasan.**
						5	Penguatan dan penataan regulasi dalam upaya pengadaan guru dan tenaga kependidikan di setiap wilayah
				6		1	**Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)**

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
					Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan merata	2	Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
						3	Pemenuhan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
						4	Pembangunan manajemen Talenta dan prestasi peserta didik
				7	Pengembangan penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan/non formal	1	**Pembangunan layanan pendidikan kesetaraan jarak jauh berbasis digital dan TIK.**
						2	**Pembangunan Sekolah terbuka dan Pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama**
				8	Peningkatan Literasi Masyarakat Secara Menyeluruh untuk Mendukung Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Pengembangan dan revitalisasi perpustakaan daerah, desa dan ruang publik (digital dan fisik) didukung dengan distribusi buku dan bahan bacaan yang berkualitas, relevan, dan bermuatan lokal.
						2	Penyediaan akses internet di ruang publik.
						3	Kampanye literasi keluarga, mendorong orang tua menjadi pendidik literasi awal bagi anak-anak.
						4	Kolaborasi dengan lembaga nonformal untuk kelas belajar masyarakat.

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
						5	Pelatihan literasi digital bagi pelajar dan masyarakat.
						6	Integrasi program literasi digital ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan kerja.
			Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis	9	Peningkatan kehidupan sosial yang agamis, toleran, taat hukum, berbudaya dan demokratis	1	Peningkatan kerukunan antar etnis, umat beragama dan golongan
						2	**Peningkatan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah**
						3	**Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.**
				10	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila	1	Peningkatan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal
						2	Integrasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Pancasila dalam Pendidikan dan Kehidupan Sosial
				11	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	1	Penguatan kelembagaan pemuda dan olahraga
						2	Peningkatan kapasitas pemuda dan atlet
2	**Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif**	**Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif berbasis teknologi Digital**	Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa.	12	Peningkatan kualitas aparatur yang berorientasi pada reformasi birokrasi	1	**Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja**
						2	**Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko**

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
						3	Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara efektif.
						4	Meningkatkan kapasitas APIP dalam melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kinerja.
				13	Perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik	1	Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam etika pemerintahan, manajemen keuangan, dan pelayanan publik.
						2	Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital	14	Pembangunan ekosistem digital dalam rangka mendukung penguatan transformasi digital	1	**Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok.**
						2	**Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.**
			Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum dalam upaya peningkatan ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	15	Penyederhanaan dan Peningkatan kualitas regulasi daerah serta peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1	Penyelerasan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
						2	Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan.
						3	Peningkatan efektivitas penegakan hukum.
						4	Penguatan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
						5	Penguatan layanan darurat dan pengaduan masyarakat.
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16	Peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan responsif	1	Peningkatan kepatuhan atas implementasi standar pelayanan publik.
						2	Mengembangkan berbagai layanan publik melalui platform digital terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi.
						3	Peningkatan edukasi penggunaan layanan publik digital bagi masyarakat.
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	17	Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja Terintegrasi dan transparan	1	**Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi**
						2	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan.
						3	**Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan**
						4	Penguatan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan
				18	Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam	1	**Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah**
						2	**Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan**

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
					upaya mendukung kinerja Pemerintah daerah	3	Penguatan regulasi dan kerjasama dengan Lembaga pendidikan tinggi
3	**Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan**	**Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah**	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas.	19	Pengimplementasian pengembangan tata ruang wilayah	1	**Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)**
						2	Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
				20	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak huni), bangunan tahan bencana dan infrastruktur konektivitas daerah, serta peningkatan Kualitas Permukiman	1	**Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan**
						2	Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan dan pendukungnya
						3	**Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta kawasan strategis kabupaten lainnya.**
						4	Perluasan Cakupan dan Peningkatan kecepatan akses internet
						5	Rekonstruksi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
						6	Perluasan cakupan layanan air minum Perkotaan
						7	Peningkatan dan Pemerataan akses layanan air Bersih dengan jaringan perpipaan dan sanitasi
						8	Penguatan kelembagaan dan SDM dalam penilaian standarisasi bangunan yang tahan bencana dan iklim
						9	Peningkatan akses kepemilikan rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan
						10	Peningkatan akses kepemilikan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
						11	Pengurangan luasan kawasan kumuh kewenangan kabupaten
						12	**Percepatan pengadaan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas**
				21	Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pengembangan dan pembangunan proyek	1	**Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon**

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
					strategis regional maupun Nasional	2	**Fasilitasi dan koordinasi Pengadaan lahan dalam Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon**
						3	**Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung**
						4	**Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Bandung**

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
						5	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan di kawasan cincin tampomas, waduk jatigede dan waduk cipanas untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
			Meningkatnya Ketahanan air	22	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	1	Peningkatan infrastruktur air baku dan sistem irigasi
						2	Peningkatan konservasi air yang terintegrasi dari hulu ke hilir
						3	Penguatan sinergi lintas sektor dan wilayah dalam pengelolaan air
						4	Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan perlindungan sumber air
4	**Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan**	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi	23	Perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja serta sertifikasi keahlian sesuai kebutuhan lapangan kerja	1	**Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling**
						2	**Penguatan Pelatihan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri**
				24	Kualitas dan daya saing industri kecil menengah dan Koperasi	1	**Pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan**
						2	**Peningkatan keterkaitan usaha mikro dan kecil pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif**
						3	**Penyiapan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi**

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
				25	Peningkatan pengelolaaan, Pengembangan dan Penataan kawasan dayatarik wisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif	1	**Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif**
						2	**Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha**
						3	Penguatan kelembagaan mitra strategis pariwisata
						4	**Peningkatan konektivitas kawasan pariwisata**
						5	**Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif**
						6	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan *Geo Heritage*
				26	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis	1	Pengembangan Industri Berbasis Keunggulan Wilayah dan ramah lingkungan
						2	Penguatan rantai pasok lokal dengan melibatkan UMKM dan industri kecil menengah dalam ekosistem industri
						3	**Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri**
						4	Pengembangan Kawasan Industri BUTOM
				27	Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Akses Pasar dan	1	Pengembangan diversifikasi produk komoditas unggulan daerah dalam upaya meningkatkan nilai tambah
						2	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen produksi dan kualitas produk.

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
					Promosi Komoditas Daerah serta digitalisasi perdagangan	3	Meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal dalam pameran, promosi dagang, dan misi dagang nasional maupun internasional.
						4	Peningkatan standarisasi produk melalui sertifikasi
						5	Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, gudang, dan pusat distribusi terpadu.
						6	Digitalisasi sistem informasi perdagangan dan logistik (tracking, e-payment, e-logistics).
						7	**Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri**
				28	Penerapan Ekonomi hijau (Green economy)	1	**Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk sektor pertanian dan perikanan budidaya**
						2	Penyiapan regulasi dan pengelola pengembangan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau yang berkelanjutan
						3	Pengembangan teknologi tepat guna untuk pertanian organik, pengelolaan limbah, energi bersih, dan bangunan hijau.

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
						4	Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat melalui edukasi pentingnya ekonomi hijau, perlibatan pelaku usaha dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan
						5	Pemanfaatan energi terbarukan di sektor publik dan swasta.
						6	**Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami**
			Terkendalinya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah	29	Mendorong Stabilitas Keuangan dan Daya Saing Investasi Daerah	1	**Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (KPBUD dan CSR), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional**
						2	**Peningkatan pengendalian inflasi daerah**
						3	**Peningkatan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.**
						4	**Penyediaan Akses Pembiayaan Kredit Usaha Pertanian**
						5	**Penguatan dan restrukturisasi BUMD**

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
						6	**Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan**
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	30	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	1	Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
				31	Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan menuju kemandirian pangan	1	**Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global**
						2	**Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis**
						3	**Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian**
						4	**Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity**

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
						5	**Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan**
						6	**Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring**
						7	**Modernisasi sarana dan prasarana perikanan**
						8	**Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional**
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	32	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1	Penegakan regulasi terhadap pencemaran udara, air, dan tanah serta Pengawasan ketat terhadap limbah industri, domestik, dan pertanian
						2	Fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lahan kritis, hutan, dan daerah aliran sungai (DAS) dan Perlindungan kawasan lindung dan keanekaragaman hayati
						3	**Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular**

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
						4	Kemitraan dengan dunia usaha dalam implementasi program CSR berbasis lingkungan
						5	Penyediaan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan
			Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	33	Mmemperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim	1	**Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi**
						2	Pemanfaatan data dan kajian ilmiah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan adaptif
5	**Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial**	**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial**	Meningkatnya Ketahanan Sosial masyarakat	34	Mempercepat Penanggulangan dan penuntasan kemiskinan	1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalu program perlindungan masyarakat
						2	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menangah
						3	Meningkatkan infrastruktur dasar di kantung-kantung kemiskinan

NO	MISI	Tujuan	Sasaran RPJMD	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	35	Meningkatkan pemberdayaan dan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia	1	**Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang**
						2	**Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan**
				36	Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan	1	**Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan**

Sumber : Hasil analisis, Bappppeda 2025

Ket : Cetak Tebal arah kebijakan Transformasi

Pelaksanaan strategi dilaksanakan melalui pentahapan pembangunan sebagai prioritas pembangunan tahunan periode 2025-2029. Pentahapan ini merupakan bagian dari tahap pertama atau pondasi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045. Tahap ini merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Pemenuhan Pelayanan dasar pendidikan dan Kesehatan dalam menunjang Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak, Berkarakter, Berkualitas, dan Inklusif;
2. Penguatan Produksi dan Produktivitas sektor Ekonomi Primer;
3. Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil yang Berintegritas, Kolaboratif dan Inovatif;
4. Penyelenggaraan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah;
5. Peningkatan akses terhadap nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan;
6. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang berkualitas;
7. Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar;dan
8. Penataan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan tahapan pertama atau pondasi di atas, maka perumusan pentahapan pembangunan pada RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 1.21

Pentahapan Pembangunan Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TAHAP VI
2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia Yang Berdaya saing dan Reformasi Birokrasi *(Infrastruktur pelayanan dasar, Infrastruktur jalan dan jembatan, Peningkatan kualitas SDM (Pendidikan, kesehatan, dan keterampilan dll), Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Daya tampung dan daya*	**Peningkatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia Yang Berdaya saing dan Reformasi Birokrasi** *(Infrastruktur pelayanan dasar, Infrastruktur jalan dan jembatan, Peningkatan kualitas SDM (Pendidikan, kesehatan, dan keterampilan dll), Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Daya tampung dan daya dukung kualitas lingkungan)*	**Akselerasi pertumbuhan produktivitas sektor ekonomi** *(Peningkatan Produktifitas Pertanian, perikanan dan peternakan, Peningkatan Industri pengolahan didukung penguatan Usaha Mikro Kecil dan ekonomi kreatif serta sektor konstruksi, Hilirisasi industri, Pengembangan*	**Optimalisasi Pembangunan Daerah berkelanjutan** *(Peningkatan Produktifitas Pertanian, perikanan dan peternakan, Peningkatan Industri pengolahan didukung penguatan Usaha Mikro Kecil dan ekonomi kreatif serta sektor konstruksi, Hilirisasi industri, Pertumbuhan sektor*	**Perwujudan Sumedang SIMPATI semakin Maju** *SDM berdaya saing, pelayanan publik berkualitas, good governance, infrastruktur mantap, sektor ekonomi yang bertumbuh dan ketahanan daerah*	**Pemantapan Pembangunan Berkelanjutan** *Pemantapan SDM berdaya saing, pelayanan publik berkualitas, good governance, infrastruktur mantap, sektor ekonomi yang bertumbuh dan*

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TAHAP VI
2025	2026	2027	2028	2029	2030
dukung kualitas lingkungan)		*Kawasan Pariwisata, Sosial Budaya (Nilai-nilai sosial, budaya, dan tradisi masyarakat).*	*pariwisata berbasis budaya, Daya tampung dan daya dukung kualitas lingkungan)*		*ketahanan daerah*

Sumber : Hasil Perumusan, Bappppeda 2025

Arah Kebijakan Kewilayahan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang mempedomani RTRW Kabupaten Sumedang melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW pada periode berkenaan. RPJMD yang disusun diharapkan selaras dan mengadaptasi rencana yang dimuat dalam RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) baik secara vertikal maupun horizontal. SPPR dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW, dengan menyelaraskan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dalam kaitannya dengan penyelarasan Dokumen RPJMD dan RTRW, dokumen SPPR ini menjadi instrumen yang dapat dipergunakan dalam melakukan sinkronisasi antara program dalam dokumen RPD agar selaras dengan program pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTRW. Dengan demikian, program-program pembangunan yang bersifat spasial dapat memiliki lokus yang jelas dan berbasis ruang.

Sesuai dengan pendekatan penyusunan perencanaan berdasarkan substansinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pendekatan holistik, tematik integratif, dan spasial.

a. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kabupaten.

Dalam Upaya mendorong pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang mengacu kepada terminologi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud yaitu:

a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung meliputi Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari
b. Pusat Pelayanan Kawasan BUTOM meliputi: Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Tomo. Dalam mendukung pengembangan wilayah ini telah terbit Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Detil tata Ruang Wilayah Perencanaan Ujungjaya Tahun 2024-2044.
c. Pusat Pelayanan Kawasan Jatigede meliputi Kecamatan Jatigede, Kecamatan Wado, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Cisitu

d. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Ibu Kota Perkotaan Sumedang yang telah didukung dengan adanya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040.

b. Pengembangan Kewilayahan dalam Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Sesuai arak kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, bahwa untuk pembangunan kewilayahan di Kabupaten Sumedang dapat dijabarken sebagai berikut :

1. Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk-Cisanggarung.
2. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung.
3. Reaktivasi layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari
4. Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung.
5. Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya.
6. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasanstrategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau DaerahAfirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati).

c.Pengembangan Kewilayahan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional Tahun 2025-2029.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, bahwa dalam rencana pembangunan di wilayah Jawa Barat khususnya Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 pada tabel di bawah ini

Tabel 1.22

Arah Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

No.	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
1	2	*3*
1.	Kawasan swasembada Pangan, Air, dan Enegi Citarum cimanuk Cisanggarung	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Jatiluhur, D.I. Rentag, D.I. Cihea, D.I. Cikeusik, D.I. Seuseupan, D.I. Cipanas II, D.I. Cipancuh, D.I. Cileuleuy, D.I. Leuwinangka. b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah. c. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).

No.	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
1	2	*3*
		d. Peningkatan produktifitas Peternakan/pangan hewani (termasuk pengembanggn kawasan peternakan). e. Pengeembangan dan peningkatan produktifitas holtikultura. f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air bcrkelanjutan untuk pertanian tananan pangan, peternakan, dan hortikultura. g. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean. h. Pembangunan infrastruktur pcmantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean, serta Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, waduk Saguling, waduk Jatigede, Waduk Darea, Waduk Sadawama, Waduk Ciparrcuh, Situ Iembang, Situ Patenggang, Situ Chanti, Situ Cipanunjang-Cileunca. i. Pembangunan Infrastruktur PLTP Tampomas. j. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain memalui kebijakan tata ruang untuk p€dindungan lahan pertanian; reforma agraria, rcdistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik. k. Peningkatan produltifitas melalui intensifikasi dan peringkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penycdiaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektifitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen Eelalui peningkatan prasarana pascapanen. l. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui : peningkatan literasi keuangan pctani dan penguatan manajemen poktan/gapokan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan

No.	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
1	2	*3*
		dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layaran sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama. m. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas ungul dan budidaya lokal, peningkatan produktifitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

Sumber : Dokumen RPJPN TAHUN 2025-2029

Sebagaimana diketahui bahwa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 dalam proses revisi. Maka untuk secara detail akan di sajikan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program-Program Prioritas Daerah**.**

Program Prioritas atau Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang kepada masyarakat yang menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti masyarakat, bermanfaat dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat yang direncanakan dan dilaksanakan setiap tahun selama masa jabatan. Program prioritas atau Program Unggulan disusun dengan mempertimbangkan Strategi yang akan dijalankan dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada periode 2025-2029.

Adapun Program Prioritas atau Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. **Jawara Anti Korupsi (Pencapaian Zona Integritas : Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).**

Program ini merujuk pada semangat, strategi, dan implementasi nyata dalam mewujudkan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi dan mampu memberikan layanan publik secara optimal. Dengan penjabaran sebagai berikut :

- **"Jawara"** di sini bisa dimaknai sebagai tokoh utama atau pelopor yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi dan pembenahan birokrasi. Konsep ini mendukung pencapaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

  Makna dari **"Jawara"** adalah :

  a. **J**ujur : Aparatur menjunjung kejujuran dalam pelayanan dan pengelolaan anggaran.
  b. **A**manah : Bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas.
  c. **W**aspada : Selalu siaga terhadap potensi fraud atau penyalahgunaan wewenang.

d. **A**ktif : Proaktif melakukan perbaikan sistem dan pelayanan.
e. **R**esponsif : Cepat dan tepat dalam melayani kebutuhan masyarakat.
f. **A**nti Korupsi : Menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan penyimpangan.

2. **Program Sekolah/Pesantren Produktif dan Ramah Lingkungan (terawat bangunannya, asri pekarangannya, santun gurunya, kreatif muridnya, akuntabel tata kelolanya serta terbuka kontrol sosialnya).**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan satuan pendidikan (sekolah atau pesantren) yang berdaya guna (produktif) serta berwawasan lingkungan (ramah lingkungan), dengan menekankan enam pilar utama berikut:

a. **Terawat Bangunannya,** bangunan sekolah yang representatif (aman, bersih, sehat dan nyaman) dengan perawatan yang berkala dengan melibatkan warga sekolah.
b. **Asri Pekarangannya,** lingkungan sekolah yang hijau, asri, bersih dengan mengedepankan pengelolaan sampah yang baik (3R/ reduce, reuse, recycle) dengan didukung sarana edukasi lingkungan (Bank sampah, kompos, hidropinik dll).
c. **Santun Gurunya**, guru menjadi teladan dalam bersikap, berbahasa, dan bertindak dengan mengedepankan etika, empati, dan pembinaan karakter siswa dan pendekatan pembelajaran yang humanis dan berintegritas.
d. **Kreatif Muridnya**, siswa harus aktif dalam kegiatan kewirausahaan, seni, teknologi, dan inovasi dengan proses pembelajaran berbasis proyek, riset kecil, dan eksplorasi bakat dengan ditunjang lingkungan belajar yang mendukung ekspresi dan pertumbuhan minat siswa.
e. **Akuntabel Tata Kelolanya**, Sistem manajemen sekolah transparan, efektif, dan efisien melalui perencanaan dan pelaporan keuangan/administrasi dilakukan terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan serta melibatkan semua elemen dalam pengambilan keputusan.
f. **Terbuka Kontrol Sosialnya**, Sekolah harus terbuka terhadap masukan dari masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan dengan adanya saluran untuk menerima pengaduan atau aspirasi dan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. **Melanjutkan kegiataan Magrib Mengaji Online (MMO).**

Program ini merupakan pembelajaran atau pembacaan Al-Qur'an yang dilakukan secara *virtual (live streaming atau video* conference*)* setiap waktu magrib, bertujuan melestarikan budaya mengaji sambil memanfaatkan teknologi digital. Kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum dengan tujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an.

4. **Melanjutkan Ta'lim Aparatur dan Pesantren Aparatur.**

Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan integritas pada para pegawai pemerintahan:

- **Ta'lim aparatur,** kegiatan pembinaan keagamaan yang ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintahan melalui pengajian rutin, Ceramah keagamaan Diskusi atau kajian kitab yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan.

- **Pesantren Aparatur,** Program ini merupakan bentuk pelatihan intensif yang mengadaptasi sistem pesantren dalam membina aparatur berupa pelatihan karakter dan spiritual berbasis pesantren bagi ASN atau pejabat pemerintahan, yang biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

5. **Program memulyakan dan memperkuat ASN sebagai upaya memajukan dan meninggikan harkat ASN birokrasi.**

Program merupakan menempatkan ASN bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tapi juga sebagai pilar utama pembangunan dan teladan moral di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya melalui :

a. Keterbukaan dan kepastian jengjang jabatan dan karier serta pendapatan ASN berbasis kinerja.
b. Menjamin kenyamanan dan kepuasan kerja serta perlindungan hukum bagi ASN.
c. Fasilitasi ASN menjelang pensiun / MPP melalui pemberdayaan usaha dan atau *social preneurship.*
d. Pamong SIMPATI Award (prioritas pada: penyuluh berprestasi, petugas gizi berprestasi, guru berprestasi, bidan desa berprestasi, karyawan kantor.

6. **Jalan Leucir nepi ka Desa. Membangun infrastruktur pelayanan dasar penunjang pertumbuhan ekonomi.**

Program ini merupakan upaya untuk membangun infrastruktur baik infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur konektivitas wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, melalui :

a. Jalan kabupaten dan desa dalam kondisi baik.
b. Kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.
c. Pembukaan Akses Jalan Baru seperti pembangunan jalan poros Sukasari – Lembang.

6. **Memajukan Gerakan Wirausaha Pemuda/kaum milenial untuk pendayagunaan & kejayaan melinial Sumedang.**

Program ini merupakan upaya sistematis dan kolaboratif untuk mendorong, membina, dan memberdayakan pemuda/milenial agar terjun dalam dunia wirausaha produktif, kreatif, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya dapat melalui :

a. Bimbingan teknis kreatifitas milenial pd berbagai cabang ekonomi kreatif.
b. Fasilitasi jejaring dan permodalan ekonomi kreatif.
c. Pendirian dan pembinaan kelembagaan, kelompok ekonomi kreatif.
d. Optimalisasi Gedung Creative Centre untuk kreativitas milenial.

7. **Revolusi Pertanian *(Revolper)* atau Program 3A (Ada Air, Ada Pupuk, Ada Benih) agar mampu memajukan sektor pertanian serta Peternakan agar petani dan peternak berusaha dengan lebih menguntungan**.

Program ini merupakan transformasi pertanian dan peternakan secara sistemik, dengan fokus pada **penyediaan sarana produksi yang lengkap dan berkelanjutan**, serta pemberdayaan

petani/peternak agar dapat berproduksi optimal, berdaya saing tinggi dan mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan, melalui :

a. Membangun irigasi guna penyediaan air sepanjang musim.
b. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), mekanisasi pertanian dan bioteknologi.
c. Asuransi usaha tani dan ternak.
d. Pelayanan Kesehatan ternak.
e. Membangun jalan usaha tani (JUT).
f. Penyediaan saprotan, pupuk, benih & bibit sepanjang musim.
g. Fasilitasi insentif permodalan berusaha tani ternak dan perikanan.

8. Program Usaha Mikro Kecil Unggul. Memajukan Sektor perdagangan, koperasi dan UKM guna meningkatkan omzet dan keuntungan pelaku usaha.

Program ini memperlakukan UMKM bukan hanya sebagai pelengkap ekonomi, melainkan sebagai penggerak utama ekonomi lokal yang perlu pembinaan, perlindungan, dan pemberdayakan, melalui :

a. Fasilitasi insentif perizinan dan permodalan.
b. Revitalisasi pasar tradisional, membangun pasar induk dan tempat usaha lainnya.
c. Fasilitasi bantuan teknologi produksi & pemasaran.
d. Membuat market place produk unggulan.

9. Memajukan Sektor Industri Manufaktur, Jasa Perhotelan dan Pariwisata.

Program ini merupakan strategi untuk penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui :

a. Fasilitasi kemudahan perizinan dan insentif berusaha lainya.
b. Fasilitasi solusi masalah /kesulitan dihadapi investor yg telah lama berusaha di Sumedang melalui forum pertemuan rutin *anual meeting/memaintenance investor existing*

10. Program Kadeudeuh Simpati

Program ini salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam membantu penguatan pembangunan di Desa dan pemberian insentif bagi para penggerak masyarakat serta bantuan bagi lembaga keagamaan, berupa :

a. Penguatan Keuangan Desa melalui bantuan keuangan desa yang merata.
b. Melanjutkan Program Insentif Guru ngaji.
c. Melanjutkan Insentif bagi RT/RW.
d. Insentif bagi PKK.
e. Melanjutkan Insentif bagi Kader Posyandu.
f. Melanjutkan Bantuan kepada Pesantren.
g. Insentif bagi Linmas.
h. Dukungan administrasi Guru Honorer

11. Optimalisasi Pelayanan Rumah SIMPATI untuk Fakir miskin dan lansia.

Program ini merupakan program inklusif pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ibu hamil dan mendorong terbentuknya pelayanan lansia (Geriatri), serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, melalui :

a. Program Stunting untuk anak dan ibu hamil.
b. Program Rantang Simpati (pemberian makan gratis bagi fakir miskin Lansia)
c. Layanan Geriatri/ Lansia di semua rumah sakit pemerintah.
d. Pencegahan kekerasan perempuan dan perdagangan orang.

12. Program Implementasi Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) pada lingkungan Pemerintahan dan Masyarakat.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda, bahwa sebagai pesemaian untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan budaya sunda secara sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat peran pelaku seni budaya, kelompok kreatif dan komunitas seni tradisi serta mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis kekayaan alam dan kebudayaan dalam rangka implementasi SPBS (Sumedang Puseur Budaya Sunda), melalui :

a. Menggiatkan acara-acara kesenian dan kebudayaan.
b. Pembuatan pusat kuliner dan seni kreatif;
c. Kerjasama pembukaan wisata alam dan budaya;
d. Dukungan pendidikan dan pelestarian seni tradisi Sumedang.

Tabel berikut memperlihatkan keterkaitan perencanaan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran hingga menghasilkan Program Prioritas sebagaimana dimaksud.

Tabel 1.23

Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2025-2029

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
Misi 1 : 'Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter	**Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter**			**Indeks Pembangunan Manusia**		
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas (kemudahan menjangkau layanan) dan kualitas (standar pelayanan yang diterima) secara adil di seluruh wilayah	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Program Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan kesehatan	
			Meningkatnya pengendalian dan eliminasi Tuberkulosis (TBC).	**Penanganan Tuberkulosis:** a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	Program Sumedang Bebas TBC	
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
			Menurunnya prevalensi stunting melalui pelaksanaan aksi konvergensi yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berbasis data di seluruh wilayah intervensi.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Program Optimalisasi Aksi Konvergensi Stunting	
		Meningkatnya Pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan Pendidikan serta literasi masyarakat	Meningkatnya Partisipasi sekolah dalam upaya mencipatakan SDM yang berwawasan dan berdayasaing	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Program Pengembangan Pendidikan dasar yang beretika dan berkarakter	
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	Program Penguatan Literasi Digital dan Informasi (Program Sumedang Resep Maca)	
		Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat,	Terciptanya kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang yang harmonis, toleran, dan rukun dalam keberagaman melalui penguatan moderasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Program penguatan moderasi beragama, pemajuan kebudayaan dan nilai kebangsaan dalam	
				Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan (%)		
				Tingkat Cipta Kondisi Kondusif		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
		yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis	beragama, pelestarian budaya, dan internalisasi nilai kebangsaan	Tingkat Bina Demokratisasi	mewujudkan Sumedang Harmonis dan Kondusif	
			Terwujudnya generasi muda yang berkarakter kuat, berdaya saing danberjiwa kepemimpinan,	Partisipasi dan peran Pemuda dalam Pembangunan (%)	Program Penguatan karakter kepemudaan ('Program Pemuda Sumedang Motekar)	
Misi 2 : 'Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif	**Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif berbasis teknologi Digital**			**Indeks daya Saing Daerah**		
				Indeks Reformasi Birokrasi		
		Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat Desa	Meningkanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif hingga tingkat desa melalui transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.	Indeks Profesionalisme ASN	Program Tranformasi birokrasi dalam mewujudkan *good governance* sampai tingkat desa	
				Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) %		
				Indeks Inovasi Daerah		
				Indeks Desa		
		Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
		Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum dalam upaya peningkatan ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat		Indeks Kepatuhan Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah		Nilai Skor LPPD Kabupaten		
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan	**Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah**			**Indeks Kualitas Infrastruktur**		
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak huni, sehat, aman, tertata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Program Peningkatan Kualitas permukiman layak dan berkelanjutan (Program Imah Merenah)	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
			Meningkatnya konektivitas antarwilayah hingga ke desa	Tingkat Konektivitas Jalan (%)	Program Jalan Leucir nepi ka desa	
		Meningkatnya Ketahanan air	Terpenuhinya kebutuhan air secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas untuk mendukung kehidupan masyarakat, pertanian, dan ekosistem.	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	Program Peningkatan Ketersediaan dan Ketahanan Air	
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		
Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**			**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		
				PDRB Perkapita (ADHB) (Rp.Juta)		
				Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar)		
				Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Poin)		
				Indeks Resiko Bencana		
		Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya industri yang kompetitif dan berdaya saing tinggi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Program Pengembangan dan Penguatan Industri	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
		daerah berbasis inovasi dan teknologi	Meningkatnya destinasi pariwisata unggulan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing, yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, pendapatan daerah, serta kesejahteraan masyarakat lokal.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Program Penguatan Pariwisata Unggulan	
			Terciptanya sistem distribusi dan rantai pasok perdagangan yang efisien, inklusif, dan terintegrasi secara digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan daya saing pelaku usaha	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	Program penguatan efektivitas distribusi dan rantai pasok perdagangan serta pengembangan ekosistem Perdagangan Digital	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
			Terciptanya pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mandiri, berdaya saing, inovatif, dan mampu naik kelas serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Program Usaha Mikro Kecil Unggul	
			Terciptanya generasi muda yang produktif, kompeten, dan mandiri melalui peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan, serta terbukanya lebih banyak peluang kerja layak di berbagai sektor	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda (Memajukan Gerakan Wirausaha Pemuda / kaum milenial)	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
			Terciptanya iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif sehingga mendorong peningkatan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Program Peningkatan Investasi Daerah	
			Meningkatnya jumlah produk unggulan yang memenuhi standar mutu nasional/internasional	Net Ekspor Impor Antar Daerah (% PDRB)	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Unggulan Daerah	
			Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha tani melalui terpenuhinya sarana dan prasarana produksi pertanian secara tepat, merata, dan terintegrasi.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Program Peningkatan Produktivitas Pertanian melalui 4A (Ada Air, Ada Pupuk, Ada Benih, Ada Alat Mesin Pertanian)	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
		Terkendalinya stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah	Terciptanya stabilitas fiskal daerah yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan tangguh terhadap dinamika ekonomi.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) Persentase Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) (%) Total kredit/PDRB (%)	Program Peningkatan Stabilitas Fiskal dan Moneter Daerah	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), serta meningkatnya kemandirian dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Program Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menurunnya emisi Gas Rumah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program pengendalian dan pengawasan lingkungan	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
			Kaca (GRK) guna mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, lestari, dan adaptif terhadap perubahan iklim	Penurunan Emisi GRK/Kumulatif (Ton Co2eq)	hidup serta mitigasi GRK (Sumedang Pro Iklim)	
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Terwujudnya masyarakat dan wilayah Kabupaten Sumedang yang tangguh terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana secara terintegrasi dan partisipatif.	Indeks Ketahanan Daerah	Program Sumedang Tangguh Bencana	
Misi 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial	**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial**			**Tingkat Kemiskinan (%)**		
				Rasio Gini (Poin)		
		Meningkatnya Ketahanan Sosial masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial serta meningkatnya kualitas hidup	Pengeluaran Per Kapita (Rp.Juta/Tahun)	Program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas	

VISI/MISI	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045						
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.	keluarga, kesetaraan gender, dan perlindungan yang inklusif bagi kelompok rentan	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan kelompok rentan (Perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas)	
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
				Indeks Pemberdayaan Gender		
				Indeks Pemberdayaan Gender		
				Indeks Perlindungan Anak		

Sumber : Hasil Analisis, Bappppeda 2025

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 berdasarkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025.

Adapun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 dengan uraian urusan program ,Kegiatan dan sub kegiatan di bawah ini:

Tabel 1.24

Uraian Urusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Perubahan 2025

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Dinas Pendidikan	1.031.977.779.997
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.031.977.779.997
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.031.977.779.997
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	275.509.849.280
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	134.219.013.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	960.436.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	200.000.000
Pengadaan Mebel Sekolah	12.450.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.700.000.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	75.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	500.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93.382.230.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	75.025.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000
Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.352.609.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.450.000.000
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	503.725.000
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	50.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.536.955.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	161.360.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	321.673.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	81.013.181.280
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.146.489.580
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.518.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	400.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.750.000.000
Pengadaan Mebel Sekolah	10.000.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.050.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	150.000.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	52.139.980.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100.000.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	125.000.000
Pembangunan Ruang Kelas Baru	400.000.000
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	497.487.700
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	236.224.000
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	39.373.475.000
Pengadaan Mebel PAUD	3.432.000.000
Pengadaan Perlengkapan PAUD	500.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	300.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	480.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	50.000.000
Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.010.860.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.733.640.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	5.616.975.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.950.000.000
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.904.180.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	300.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.000.000.000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.554.180.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	250.000.000
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	150.000.000
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100.000.000
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50.000.000
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50.000.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100.000.000
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	756.117.930.717
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.570.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.710.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.900.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.650.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.260.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	744.049.373.217
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	744.039.423.217
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.350.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.564.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.350.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.164.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.050.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	151.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.430.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.673.200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.228.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.794.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.735.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.507.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.492.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.295.815.600
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.800.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.240.015.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.640.827.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.168.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.563.659.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.850.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.850.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000
Dinas Kesehatan	297.353.483.962
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	297.353.483.962
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	135.489.559.369
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.334.696.157
Pembangunan Puskesmas	5.000.000.000
Pengembangan Puskesmas	1.280.000.000
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.489.408.349
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.348.241.120

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.150.000.000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	25.267.046.688
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	500.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.304.863.212
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.300.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	300.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	288.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	200.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	200.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	217.850.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	200.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	200.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	200.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	200.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	500.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.611.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	145.471.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.000.000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	412.935.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	150.000.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	206.645.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	350.000.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	78.601.100.500
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	240.281.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.000.000.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	1.919.483.112
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	517.051.000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.700.000.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	15.000.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10.000.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.274.046.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	500.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	500.000.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	350.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.829.016.000
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	200.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	200.000.000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	53.830.000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	53.830.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.575.186.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.575.186.000
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.224.775.000
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	200.000.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	200.000.000
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	824.775.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	824.775.000
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	200.000.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	200.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.603.000.000
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	150.000.000
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	200.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.253.000.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.253.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.207.133.593
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.470.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.110.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.900.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.650.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.760.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	154.957.047.013
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154.947.097.013
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.350.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.064.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.350.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.664.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.050.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.385.600
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.385.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.595.740
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.034.840
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.495.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.200.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.063.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.830.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.972.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.013.240
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.013.240
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767.732.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.912.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	636.820.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	908.826.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.938.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	724.888.000
Rumah Sakit Daerah	271.694.363.688
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	21.970.477.610
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.970.477.610
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.970.477.610
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	249.723.886.078
Peningkatan Pelayanan BLUD	249.723.886.078
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	249.723.886.078
Puskesmas Jatinangor	4.929.104.109
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	840.383.800
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840.383.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	58.396.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.699.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.504.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.940.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	276.381.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.108.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.850.800
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.959.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.188.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	166.763.600
Operasional Pelayanan Puskesmas	167.223.200
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12.915.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	986.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	82.873.600
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	792.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.801.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.031.200

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.031.200
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.031.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.079.689.109
Peningkatan Pelayanan BLUD	4.079.689.109
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.079.689.109
Puskesmas Cimanggung	5.015.258.132
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	641.396.200
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	641.396.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	109.670.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.372.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.336.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.722.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.290.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.197.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.342.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.640.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.276.800
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	123.696.000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.705.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	42.050.400
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	792.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	13.305.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.027.200
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.027.200
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.027.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.369.834.732
Peningkatan Pelayanan BLUD	4.369.834.732
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.369.834.732
Puskesmas Tanjungsari	4.819.951.327
PROGRAM PEMENUHA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	758.291.600
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	758.291.600

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.358.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.364.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.652.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.107.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	208.782.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.108.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.286.400
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.227.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.217.600
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156.888.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	174.453.600
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.013.600
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	475.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	73.900.800
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	475.200
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.979.200
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.258.400
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.258.400
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.258.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.058.401.327
Peningkatan Pelayanan BLUD	4.058.401.327
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.058.401.327
Puskesmas Margajaya	2.772.607.424
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	708.904.400
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	708.904.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	137.188.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.375.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.476.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.852.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	217.445.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.980.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.256.400

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.586.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.454.400
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	140.905.600
Operasional Pelayanan Puskesmas	152.700.000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.130.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.575.200
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	1.980.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.425.600
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.425.600
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.425.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.062.277.424
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.062.277.424
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.062.277.424
Puskesmas Sukasari	2.655.500.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	735.937.600
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	735.937.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	109.670.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.888.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.564.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.830.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	197.216.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.653.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.048.800
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.262.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.942.800
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	146.558.400
Operasional Pelayanan Puskesmas	149.346.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	77.263.200
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	316.800
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.376.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.562.400
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.562.400

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.562.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.900.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.900.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.900.000.000
Puskesmas Haurngombong	2.566.042.857
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	710.192.800
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	710.192.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	105.129.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.819.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.128.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.048.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	212.926.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.930.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.306.400
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.028.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.168.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	129.816.800
Operasional Pelayanan Puskesmas	153.360.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.275.200
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	14.256.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.307.200
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.307.200
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.307.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.848.542.857
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.848.542.857
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.848.542.857
Puskesmas Pamulihan	3.228.717.349
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	672.112.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	672.112.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	101.836.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.988.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.326.400

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.504.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	287.712.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.128.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.820.800
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.870.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11.404.800
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63.354.800
Operasional Pelayanan Puskesmas	139.314.400
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.396.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	950.400
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.504.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.488.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.488.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.488.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.549.117.349
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.549.117.349
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.549.117.349
Puskesmas Rancakalong	3.203.533.244
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	878.683.200
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	878.683.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	139.008.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.529.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.376.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.355.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	245.736.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.702.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.147.600
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.880.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.762.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	170.517.200

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Operasional Pelayanan Puskesmas	167.943.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	45.508.800
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	792.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	17.424.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	40.116.800
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.116.800
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.116.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.284.733.244
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.284.733.244
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.284.733.244
Puskesmas Sumedang Selatan	3.915.291.554
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	823.450.400
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	823.450.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.826.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.510.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.068.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.305.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	225.931.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.910.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.633.200
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.008.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.128.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	151.553.200
Operasional Pelayanan Puskesmas	160.253.600
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	92.006.400
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	712.800
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.603.200
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	26.049.600
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.049.600
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	26.049.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.065.791.554

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Peningkatan Pelayanan BLUD	3.065.791.554
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.065.791.554
Puskesmas Sukagalih	2.194.549.878
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	664.400.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.640.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.480.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.680.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.280.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	321.074.560
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.240.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.160.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.324.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.080.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63.092.320
Operasional Pelayanan Puskesmas	129.577.120
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.360.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	27.440.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	692.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	17.280.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.200.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.200.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.200.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.514.949.878
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.514.949.878
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.514.949.878
Puskesmas Kotakaler	4.356.235.294
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	489.746.600
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	489.746.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	78.336.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.057.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.732.400

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.257.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	130.886.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.188.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.489.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.376.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.505.600
Operasional Pelayanan Puskesmas	99.209.600
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.685.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	38.390.400
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	950.400
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.682.800
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	0
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.590.400
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.590.400
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.590.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.863.898.294
Peningkatan Pelayanan BLUD	3.863.898.294
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.863.898.294
Puskesmas Situ	4.277.705.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	743.663.400
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	743.663.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	140.083.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.987.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.940.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.078.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	202.895.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.178.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.948.800
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.553.600

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	792.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121.413.600
Operasional Pelayanan Puskesmas	184.064.800
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.202.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.348.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.900.800
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.276.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	34.041.600
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.041.600
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34.041.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.500.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	3.500.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.500.000.000
Puskesmas Ganeas	2.405.529.138
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	719.007.800
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	719.007.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	109.209.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.561.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.603.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.355.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200.745.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.256.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.712.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.225.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.088.800
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	118.407.200
Operasional Pelayanan Puskesmas	148.732.800
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.975.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	38.851.200
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.680.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.603.200

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.167.200
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.167.200
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.167.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.681.354.138
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.681.354.138
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.681.354.138
Puskesmas Situraja	3.783.034.657
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	983.965.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	983.965.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	198.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.468.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	275.420.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.440.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.952.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	204.853.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	191.452.000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.380.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	1.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.238.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.238.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.238.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.774.831.657
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.774.831.657
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.774.831.657
Puskesmas Cisitu	3.644.479.500
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	860.860.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	860.860.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	164.952.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.859.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.128.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.780.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	241.440.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.672.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.026.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.385.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.236.800
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	168.507.600
Operasional Pelayanan Puskesmas	185.360.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	28.808.800
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	950.400
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.752.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.540.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.540.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.540.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.776.079.500
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.776.079.500
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.776.079.500
Puskesmas Darmaraja	4.676.827.558
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	783.372.800
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	783.372.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.824.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.969.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.772.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.260.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	268.602.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.069.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.811.600
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.356.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.890.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	102.640.800
Operasional Pelayanan Puskesmas	261.170.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	43.384.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	118.800
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.504.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	218.427.200
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	218.427.200
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	218.427.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.675.027.558
Peningkatan Pelayanan BLUD	3.675.027.558
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.675.027.558
Puskesmas Cibugel	3.101.626.913
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	721.162.800
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	721.162.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.705.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.354.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.761.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	186.834.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.574.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.316.400
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.623.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.584.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	207.987.600
Operasional Pelayanan Puskesmas	152.038.400
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	39.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	61.017.600
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	396.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	10.929.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	44.600.400
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.600.400
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	44.600.400

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.335.863.713
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.335.863.713
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.335.863.713
Puskesmas Wado	4.671.637.102
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	865.500.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	865.500.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	189.158.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.318.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.184.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.972.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	235.492.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.445.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.388.800
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.227.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.672.800
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	179.211.200
Operasional Pelayanan Puskesmas	168.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	38.613.600
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.149.200
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.065.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	30.300.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.300.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30.300.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.775.837.102
Peningkatan Pelayanan BLUD	3.775.837.102
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.775.837.102
Puskesmas Jatinunggal	4.883.624.796
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	896.899.200
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	896.899.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	133.753.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.184.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.969.600

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.595.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	281.091.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	831.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.702.400
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.086.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.851.200
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	170.057.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	176.299.200
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	158.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	38.815.200
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	950.400
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	8.553.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	29.400.800
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.400.800
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	29.400.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.957.324.796
Peningkatan Pelayanan BLUD	3.957.324.796
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.957.324.796
Puskesmas Jatigede	2.666.165.867
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	915.648.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	915.648.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	274.348.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.622.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.206.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.681.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	238.945.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.900.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.909.600
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.086.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.108.800
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.787.200
Operasional Pelayanan Puskesmas	187.316.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.510.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	316.800
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	20.908.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.152.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.152.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.152.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.740.365.867
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.740.365.867
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.740.365.867
Puskesmas Tomo	2.638.134.419
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	777.404.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	777.404.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	147.859.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.295.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.504.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.256.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	213.828.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.940.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.810.400
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.454.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.168.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	133.679.200
Operasional Pelayanan Puskesmas	170.362.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.584.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	158.400
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.504.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.196.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.196.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.196.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.857.534.419
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.857.534.419
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.857.534.419

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Puskesmas Ujungjaya	4.180.320.239
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	739.432.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	739.432.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.840.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.913.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.970.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.260.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	198.460.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	495.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.600.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.478.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.508.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79.424.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	241.108.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	87.984.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	264.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.128.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.668.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.668.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22.668.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.418.220.239
Peningkatan Pelayanan BLUD	3.418.220.239
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.418.220.239
Puskesmas Conggeang	3.687.949.816
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	872.714.800
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	872.714.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.222.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.689.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.809.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.702.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	302.788.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26.136.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.176.400
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.622.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	19.008.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	157.498.400
Operasional Pelayanan Puskesmas	190.421.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.924.400
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.188.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	15.527.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.885.200
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.885.200
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23.885.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.791.349.816
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.791.349.816
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.791.349.816
Puskesmas Paseh	3.063.187.190
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	896.280.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	896.280.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	143.040.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.320.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	235.460.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.520.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.600.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.720.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.680.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	173.180.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	198.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	56.000.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	760.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.600.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.100.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.100.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.100.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.160.807.190
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.160.807.190
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.160.807.190
Puskesmas Cimalaka	6.517.821.452
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	917.447.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	917.447.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	143.270.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.912.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.168.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.206.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	254.570.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.019.200
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.870.400
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	175.304.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	191.292.000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.255.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.369.200
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	87.210.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.008.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.008.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.008.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.592.366.452
Peningkatan Pelayanan BLUD	5.592.366.452
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.592.366.452
Puskesmas Cisarua	2.120.022.340
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	672.907.200
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	672.907.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.905.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.958.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.919.200

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.305.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	304.451.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.851.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.920.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	26.611.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.652.800
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.004.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	134.823.200
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.593.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.526.400
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	79.200
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	13.305.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.652.800
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.652.800
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.652.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.440.462.340
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.440.462.340
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.440.462.340
Puskesmas Tanjungkerta	1.680.649.684
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	664.800.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	132.720.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.120.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.360.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	174.440.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.600.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.280.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	160.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	125.120.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	136.200.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	50.350.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	240.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.810.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.800.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.800.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.800.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.001.049.684
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.001.049.684
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.001.049.684
Puskesmas Sukamantri	4.105.083.926
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	593.040.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	593.040.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.560.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	196.720.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.120.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.280.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.280.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.480.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	106.440.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	128.300.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	56.700.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	160.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.660.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.660.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.660.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.507.383.926
Peningkatan Pelayanan BLUD	3.507.383.926

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.507.383.926
Puskesmas Tanjungmedar	2.142.803.829
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	920.730.400
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	920.730.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	142.430.700
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.563.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.128.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.464.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	273.018.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.227.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.276.800
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.830.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.454.400
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	174.928.800
Operasional Pelayanan Puskesmas	200.530.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	35.251.200
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.114.900
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	28.512.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.069.600
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.069.600
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.069.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.217.003.829
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.217.003.829
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.217.003.829
Puskesmas Buahdua	2.920.790.593
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	794.360.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	794.360.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	105.840.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.640.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.240.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	234.540.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.080.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.920.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.560.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.960.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	165.900.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	152.560.000
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	480.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	47.070.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.050.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	25.920.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	30.740.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.740.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30.740.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.095.690.593
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.095.690.593
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.095.690.593
Puskesmas Hariang	1.458.497.786
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	718.125.600
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	718.125.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	135.504.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.592.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.088.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.336.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	213.204.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.613.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.534.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.326.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	792.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.529.600
Operasional Pelayanan Puskesmas	167.854.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	37.584.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.663.200

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.504.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.074.400
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.074.400
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.074.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	725.297.786
Peningkatan Pelayanan BLUD	725.297.786
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	725.297.786
Puskesmas Surian	1.565.135.329
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	830.808.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	830.808.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	166.740.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.435.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.276.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.958.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	236.290.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.019.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.236.800
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.970.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.920.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	155.834.800
Operasional Pelayanan Puskesmas	175.704.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	38.858.400
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.564.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.892.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.892.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.892.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	722.435.329
Peningkatan Pelayanan BLUD	722.435.329
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	722.435.329
Puskesmas Cisempur	1.907.440.102
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	634.730.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	634.730.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.920.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.360.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	194.850.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.200.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.880.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	166.580.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	139.420.000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	39.200.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	320.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.850.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.850.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.850.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.252.860.102
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.252.860.102
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.252.860.102
Puskesmas Sawahdadap	1.887.048.405
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	595.064.400
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	595.064.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93.945.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.078.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.801.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.603.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	202.475.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	475.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.086.400
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.504.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.108.800
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	108.406.400
Operasional Pelayanan Puskesmas	121.914.400
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.950.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.894.800
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	316.800
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.504.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.885.600
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.885.600
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.885.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.285.098.405
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.285.098.405
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.285.098.405
Puskesmas Padasuka	2.078.211.090
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAT MASYARAKAT	591.996.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	591.996.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.403.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.374.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.801.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.809.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	176.227.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.138.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.950.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.206.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.969.600
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	90.434.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	124.296.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	79.603.200
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.882.000
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	1.900.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.304.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.304.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.304.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.476.911.090
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.476.911.090
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.476.911.090
Laboratorium Kesehatan Daerah	1.885.182.915
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.885.182.915
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	199.190.929.405
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	199.190.929.405
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21.043.629.500
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.043.629.500
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	7.999.784.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.602.687.200
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.496.943.800
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.944.214.500
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.072.121.300
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	14.072.121.300
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	399.100.000
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000.000.000
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	30.000.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	11.043.021.300
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200.000.000
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.400.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.945.259.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.945.259.000
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	100.000.000
Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	30.000.000
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	9.425.259.000
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	30.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	360.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.169.591.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.169.591.000
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.199.400.000
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	970.191.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	35.154.775.300
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	35.154.775.300
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	34.554.775.300
Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	79.298.522.757
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	79.298.522.757
Pengelolaan Leger Jalan	0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.403.608.500
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	0
Penggantian Jembatan	0
Pembangunan Jalan	0
Rekonstruksi Jalan	16.967.750.500
Pemeliharaan Berkala Jalan	9.978.216.700
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	0
Rehabilitasi Jembatan	400.000.000
Pembangunan Jembatan	0
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	934.013.500
Rehabilitasi Jalan	38.418.255.696
Pemeliharaan Rutin Jalan	11.196.677.861
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.515.223.000
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	727.258.000
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	100.858.000
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	626.400.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	137.965.000
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	93.650.000
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	44.315.000
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	650.000.000
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	150.000.000
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	500.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.900.212.300
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	533.899.900
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	503.899.900
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	30.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.018.432.700
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1.018.432.700
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	347.879.700
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	135.502.900
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	212.376.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.091.595.248
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.823.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.684.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.742.500
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.128.200
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.617.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.650.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.201.695.148
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.166.825.148
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.540.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.330.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.561.700
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.561.700

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	387.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.000.000
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	0
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0
Pemindahan Tugas ASN	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.325.787.300
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.641.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343.643.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79.713.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	236.125.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	207.233.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	132.432.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.910.490.100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.800.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.589.550.000
Pengadaan Alat Besar	3.300.000.000
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	20.000.000
Pengadaan Mebel	200.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.444.290.100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.850.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.194.437.100

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	286.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.853.437.100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.925.800.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	547.100.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	250.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.700.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.000.000
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	73.764.140.291
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	45.764.140.291
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.180.000.000
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	355.000.000
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	75.000.000
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	80.000.000
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	175.000.000
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	50.000.000
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	75.000.000
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	50.000.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	650.000.000
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	650.000.000
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	0
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	0
Pembangunan Rumah Khusus	0
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi	0

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Secara Elektronik	
Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	0
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	0
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.054.218.000
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	400.000.000
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	400.000.000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.654.218.000
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	0
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	4.654.218.000
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	25.191.856.350
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	25.191.856.350
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	583.096.350
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	24.608.760.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.168.212.000
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.168.212.000
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	70.000.000
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.098.212.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	0
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.169.853.941
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.026.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.293.300

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.415.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.963.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.213.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.481.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.660.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.013.021.441
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.004.721.441
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.950.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.350.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.302.200
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.906.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.642.300
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.753.900
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.650.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.650.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	0
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.399.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.002.200

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.814.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.989.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.924.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.794.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.416.000
Penyediaan Bahan/Material	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.458.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.061.300
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.800.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
Pengadaan Mebel	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.261.300
Pengadaan Aset Tak Berwujud	0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.237.476.600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.728.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.160.748.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.916.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.200.000
Pemeliharaan Mebel	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.200.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.516.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0

Uraian	APBD Perubahan
1	2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	28.000.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	28.000.000.000
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	28.000.000.000
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000.000
Satuan Polisi Pamong Praja	22.699.032.179
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.699.032.179
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.699.032.179
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.342.609.700
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.742.424.700
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	150.964.400
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	300.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	800.000.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.053.640.200
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	21.669.500
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	669.322.000
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	746.828.600
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	480.000.000
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	400.000.000
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80.000.000
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	120.185.000
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	120.185.000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.894.529.900
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.894.529.900
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.410.925.900
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	50.000.000
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	352.654.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	80.950.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.461.892.579
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.215.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.239.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.328.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.050.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.575.300
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.819.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.202.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.713.894.229
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.632.894.229
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.967.500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.967.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279.263.400
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	249.265.400
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.998.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	912.937.750
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.465.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.037.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.898.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	358.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.761.550
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.272.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.003.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	585.558.900
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.800.000
Pengadaan Mebel	243.564.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.194.900

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.045.052.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.369.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.946.683.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	783.003.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	582.453.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.550.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.828.374.988
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.338.228.088
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	266.850.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	100.000.000
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	166.850.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.352.877.400
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	29.363.200
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.749.143.000
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	26.023.300
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	36.406.800
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	282.288.800
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	95.418.300
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	0
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.641.234.000
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	343.000.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	540.669.688
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	39.847.400
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.117.588
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	318.103.900
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	82.600.800
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	177.831.000
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	19.350.300
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	16.015.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	0
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14.961.200
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	50.000.300
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	77.504.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.490.146.900
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.885.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.245.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.603.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.992.300
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.521.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.958.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.564.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.676.041.250
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.672.071.050
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	953.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.016.900
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.783.400
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.209.700
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.953.700
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	620.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.371.600
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	78.371.600
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.024.850
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.254.900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.716.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.277.650
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.792.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.505.700
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.478.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.370.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.370.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.860.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.742.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.115.200
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.003.300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.810.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.960.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.850.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Dinas Sosial	13.560.687.170
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.560.687.170
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.648.935.800
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.648.935.800
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	186.125.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	133.111.400
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.158.754.800
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	170.944.600
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.076.692.700
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.930.416.200
Penyediaan Permakanan	2.067.407.400
Penyediaan Sandang	115.172.500
Penyediaan Alat Bantu	267.570.100
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	53.362.500
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.020.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	36.101.900
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	295.597.300
Pemberian Layanan Kedaruratan	14.539.300
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	41.645.200
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	146.276.500
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0
Pemberian Layanan Kedaruratan	0

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Permakanan	38.126.500
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.058.100
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	34.682.000
Pemberian Layanan Rujukan	34.409.900
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.244.364.500
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.244.364.500
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	94.704.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	230.270.900
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	511.861.400
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	407.528.200
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	856.618.800
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	447.728.100
Penyediaan Makanan	330.084.000
Penyediaan Sandang	117.644.100
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	408.890.700
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	43.897.200
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	364.993.500
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	156.119.200
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	156.119.200
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	120.119.200
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.577.956.170
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.540.350
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.085.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.819.600
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.005.200
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.195.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.434.650
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.386.878.770
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.378.587.270
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.360.600

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.930.900
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.500.200
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.576.200
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.924.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.326.200
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.326.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.428.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.313.900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.845.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.378.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.937.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.020.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.935.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	483.462.500
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.850.000
Pengadaan Mebel	42.102.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.510.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.171.250
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.988.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.183.250
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	762.648.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	435.154.400

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.494.000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.282.547.490
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.584.940.390
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.584.940.390
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.130.000.000
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.100.000.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.100.000.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30.000.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30.000.000
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	0
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.000.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	982.500.000
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000
Pelayanan antar Kerja	150.000.000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	0
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	250.000.000
Perluasan Kesempatan Kerja	250.000.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	332.500.000
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	0
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	82.500.000
Job Fair/Bursa Kerja	250.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.836.715.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.390.415.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	40.415.000
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	0
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.350.000.000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	446.300.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.300.000
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	100.000.000
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.635.725.390
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.711.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.715.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.813.100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.265.500
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.741.500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.045.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.131.200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.381.345.990
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.376.105.490
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.625.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.615.500
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.167.200
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.462.400
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.704.800
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.096.800
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.096.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.387.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.207.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.840.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.340.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.800.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.800.000
Pengadaan Mebel	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	929.544.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.844.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	839.700.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	977.672.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.080.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.820.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.920.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	388.852.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	697.607.100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	697.607.100
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	577.607.100
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	577.607.100
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.726.200
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	163.929.600
Penyuluhan Transmigrasi	142.239.000
Pelatihan Transmigrasi	152.712.300
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	120.000.000
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	120.000.000
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	120.000.000
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38.302.734.256
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	550.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	550.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	550.000.000
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	350.000.000
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	200.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37.180.197.356
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	37.180.197.356
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	727.324.100
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	727.324.100
Pemantauan dan Evaluasi KLHS	0
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	727.324.100

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	311.408.000
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	311.408.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100.000.000
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	80.000.000
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	50.000.000
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	31.408.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	800.000.000
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	800.000.000
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	700.000.000
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	50.000.000
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	50.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	330.000.000
Penyimpanan sementara Limbah B3	65.000.000
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	65.000.000
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	265.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	480.918.800
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	480.918.800
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	433.753.400
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	11.590.100
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35.575.300
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	120.700.000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.700.000
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	20.700.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	17.822.200
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.822.200

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17.822.200
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	18.761.800
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	18.761.800
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	18.761.800
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.275.000.000
Pengelolaan Sampah	11.275.000.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	150.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.890.000.000
Penanganan sampah melalui pengangkutan	6.025.000.000
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	150.000.000
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	150.000.000
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	25.000.000
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	885.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.098.262.456
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.388.050
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.841.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.376.450
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.378.800
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.286.100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.635.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.869.900
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.849.105.306
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.839.605.306
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.500.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.500.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	18.500.000
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.500.000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	295.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.981.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.023.900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.492.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.465.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.800.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.800.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.000.000
Pengadaan Mebel	100.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.384.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	588.384.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.231.104.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.633.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.330.517.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	185.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	50.000.000
Pemeliharaan Mebel	0

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399.953.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	572.536.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	572.536.900
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	572.536.900
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	572.536.900
Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	0
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	48.363.300
Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota	50.000.000
Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	474.173.600
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.795.192.624
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.795.192.624
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.795.192.624
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.952.565.000
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.730.001.000
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	30.001.000
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.700.000.000
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	222.564.000
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	122.564.000
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	50.000.000
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	50.000.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	550.000.000
Pelayanan Pencatatan Sipil	200.000.000
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	50.000.000
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	150.000.000
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	325.000.000
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	200.000.000
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	75.000.000
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	50.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	25.000.000
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	25.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	412.204.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	93.176.200
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	93.176.200
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	0
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	319.027.800
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	148.029.600
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	70.998.200
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.000.000
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	25.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.880.423.624
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.916.922.174
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.886.922.174
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.093.463.300
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.120.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.815.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.646.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	300.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.656.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.792.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	69.553.700
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	424.293.100
Pengadaan Mebel	74.966.900
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.451.200
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.875.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.262.266.250
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	175.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.768.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	969.498.250
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.478.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.998.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	298.480.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.237.851.399
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.237.851.399
PROGRAM PENATAAN DESA	162.567.900
Penyelenggaraan Penataan Desa	162.567.900
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	162.567.900
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	21.861.200
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	21.861.200
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	21.861.200
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.918.154.656

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8.918.154.656
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	232.552.800
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	72.234.800
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	6.801.062.756
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	847.290.000
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	949.647.100
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.367.200
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.566.212.850
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.566.212.850
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	85.904.550
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	425.000.000
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.252.713.600
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	227.744.000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	47.139.600
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	27.711.100
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.569.054.793
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.215.700
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.946.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.975.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.958.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.420.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.916.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.251.002.372
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.245.256.172
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.386.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.360.100

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.804.600
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.804.600
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.040.200
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.040.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.869.321
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.125.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.402.200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.344.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.945.900
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.382.721
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.732.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.937.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.800.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.800.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.055.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.736.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.319.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.267.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.160.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.107.000
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.106.138.661
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.718.232.661
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.082.263.000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.218.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	0

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	25.318.000
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	24.900.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	755.270.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	60.000.000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	695.270.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	276.775.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.239.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	205.786.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.750.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	70.084.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	51.667.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.667.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.417.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.417.000
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	492.499.000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	492.499.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	192.499.000
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	14.753.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.753.000
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	14.753.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	326.907.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	326.907.000
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	292.753.000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.154.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	718.502.000
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	613.304.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	613.304.000
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.198.000
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	0
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	105.198.000
Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.013.224.661
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.785.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.412.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.376.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.170.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.365.200
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.775.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.685.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.838.772.661
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.827.195.611
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.386.250
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.190.800
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.212.800
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.212.800

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.489.400
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.489.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.048.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.600.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.451.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.725.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.433.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.556.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.283.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.254.700
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
Pengadaan Mebel	73.323.900
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.930.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.796.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.700.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.180.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	371.916.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.865.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.865.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.387.906.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	769.541.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	50.000.000
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	50.000.000
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	0
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	719.541.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	111.141.000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	296.400.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	312.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	0
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.701.553.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.128.400.000
Pengendalian Program KKBPK	53.600.000
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	0
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1.274.000.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	520.000.000
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	130.800.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	0
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	150.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.813.600.000
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.449.000.000
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.600.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	764.600.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.343.073.000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	105.400.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.023.673.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	105.800.000
Peningkatan Kesertaan KB Pria	75.000.000
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	33.200.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.416.480.000
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	138.800.000
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1.174.480.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.103.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.916.812.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	304.633.200
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	169.000.000
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	33.971.000
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25.776.200
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	56.686.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.612.178.800
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17.778.800
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.664.000.000
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.930.400.000
Dinas Perhubungan	39.901.616.846
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	39.901.616.846
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	26.348.193.055
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	208.528.100
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	208.528.100
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.844.365.655
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.835.964.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.346.713.769
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	344.087.700
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	12.317.600.186
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	83.448.000
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	83.448.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.369.760.900

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.369.760.900
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	493.717.900
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	370.000.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	57.750.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65.967.900
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.072.605.100
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.351.422.000
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	150.000.000
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	571.183.100
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	21.361.000
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	21.361.000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	177.879.900
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	177.879.900
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.526.500
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	76.526.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.553.423.791
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.808.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.656.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.895.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.724.400
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.783.800
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.180.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.567.900
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.286.390.391
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.278.505.391
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.752.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.132.500
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.399.300
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.399.300

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.354.200
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.924.200
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	10.430.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.136.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.932.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.918.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.476.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.836.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.584.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.388.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.289.849.200
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.200.000.000
Pengadaan Mebel	38.152.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.697.200
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.338.010.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.348.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.532.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.181.130.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.475.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.295.600
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.180.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	21.229.642.146
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.040.477.946
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.890.765.800
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.890.765.800
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	153.516.900
Pelayanan Informasi Publik	414.631.700

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	254.645.000
Diseminasi Informasi	698.879.000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.369.093.200
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	0
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9.682.099.800
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.163.500
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	27.163.500
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.654.936.300
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	480.000.000
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1.341.154.300
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	584.086.700
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	7.249.695.300
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.467.612.346
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.482.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.529.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.137.700
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.047.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.369.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.398.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.888.517.746
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.885.344.146
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.432.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.741.200
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.923.300
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.607.800
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.367.400
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.948.100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.749.200
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.749.200
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.110.800

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.635.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.068.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.381.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.633.700
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.712.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.681.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.640.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.640.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.532.100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.032.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.478.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.022.100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.656.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.616.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.320.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	388.720.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	331.745.700
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	331.745.700
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	331.745.700
Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	134.195.800
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	197.549.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	857.418.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	857.418.500
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	837.323.000
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.915.200
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	76.162.300
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	552.468.100
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	184.777.400
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20.095.500
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.095.500

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	19.438.281.679
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.133.094.179
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	28.773.500
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	28.773.500
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	28.773.500
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	47.262.300
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.262.300
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	47.262.300
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.819.195.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.819.195.000
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.819.195.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	372.928.300
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	372.928.300
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	372.928.300
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.744.230.609
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.744.230.609
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.744.230.609
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.120.704.470
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.711.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.119.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.101.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.459.600
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.860.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.337.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.832.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.193.316.430
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.179.074.430
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.650.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.592.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89.613.500

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.098.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	75.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.305.500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.210.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.608.700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.691.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.691.200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.841.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.369.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	250.150.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.316.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.548.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241.150.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.150.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.518.630.840
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.546.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.375.084.840
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.442.673.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	278.501.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.260.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.149.912.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.305.187.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.905.187.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.454.846.200
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.454.846.200
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.454.846.200
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	226.355.700
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	76.712.900
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	15.016.300
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8.570.100

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	53.126.500
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	131.192.900
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.322.300
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	73.608.400
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	27.262.200
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.449.900
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4.893.900
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	13.556.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	92.599.400
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	92.599.400
Pameran Dagang Lokal	92.599.400
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	24.616.300
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	24.616.300
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	24.616.300
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	106.769.900
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	106.769.900
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	89.231.600
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	17.538.300
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	400.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	400.000.000
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	400.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	200.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	200.000.000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.793.125.017
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.793.125.017
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.793.125.017
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	105.000.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	105.000.000
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	105.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	140.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	299.999.800
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	299.999.800
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	141.703.800
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	37.773.800
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	120.522.200
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	79.162.000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	79.162.000
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	23.700.000
Pengawasan Penanaman Modal	55.462.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	25.838.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.838.000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.838.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.143.125.217
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.383.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.723.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.950.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.300.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.760.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.297.856.217
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.291.006.217
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.600.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.564.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.750.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.464.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.350.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	480.635.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.421.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.200.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.812.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.063.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.137.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.389.400
Pengadaan Mebel	49.389.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.808.464.300
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361.153.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.447.311.300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.832.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.432.400
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.900.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.500.000
Dinas Arsip dan Perpustakaan	11.152.091.093
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.366.473.000
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.336.473.000
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	735.685.800
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.439.600
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	160.018.400
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	33.294.200
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	52.130.000
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	15.800.100
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	217.578.800
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	118.424.700
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.787.200
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.797.200
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	33.700.000
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	87.200.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	310.140.000
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	152.950.000
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	30.000.000
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	30.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	9.785.618.093
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	146.859.900
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	131.793.600
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	33.709.800
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	23.133.800
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	74.950.000
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	15.066.300
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	15.066.300
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	40.985.800
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	40.985.800
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	40.985.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.597.772.393
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.213.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.676.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.670.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.113.900
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.079.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.273.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.399.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.497.715.143
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.492.579.643
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.358.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.776.900
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.430.900
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.614.600
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.896.600
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.919.700

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.764.600
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.764.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.247.650
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.486.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.651.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.516.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.013.150
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.951.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.014.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.615.200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	883.480.500
Pengadaan Mebel	249.657.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.967.300
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	430.856.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.843.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.104.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	678.739.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.198.077.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.960.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.660.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.092.457.000
Dinas Perikanan dan Peternakan	24.748.545.247
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.748.545.247
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.097.352.447
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	317.839.800
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	232.483.800
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	10.735.100
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	221.748.700
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	62.600.800
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	50.000.000
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12.600.800

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.044.600
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	15.044.600
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.710.600
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	7.710.600
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.236.352.600
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	62.831.900
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12.831.900
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.173.520.700
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.008.200
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	905.512.500
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	36.406.800
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	36.406.800
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	36.406.800
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	23.281.500
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	23.281.500
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	23.281.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.483.471.747
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.272.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.046.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.272.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.997.300
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.307.200
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.766.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.883.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.610.948.997
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.605.512.897

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.576.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.860.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.559.500
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.351.200
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.408.300
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.800.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.694.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.151.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.173.300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.157.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.518.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.694.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.208.300
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.208.300
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.128.904.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.996.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.053.908.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.883.050
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.450.400
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.594.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	216.838.250
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8.651.192.800
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.011.255.600
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	57.474.900
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	17.718.100
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	39.756.800
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100.895.500
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100.895.500
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	7.852.885.200
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	7.820.906.300

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	31.978.900
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	520.762.700
Pembangunan Prasarana Pertanian	500.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	500.000.000
Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	20.762.700
Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	20.762.700
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	107.860.300
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.938.100
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	31.938.100
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	25.922.200
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	9.905.800
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	8.899.100
Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	7.117.300
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	7.830.600
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	7.830.600
Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	7.830.600
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.483.600
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.483.600
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	3.483.600
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	17.327.521.168
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.177.226.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.536.814.900
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	294.892.600
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	159.892.600
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	64.384.100
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	47.102.900
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	48.405.600
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	135.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.578.674.300
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	74.460.000
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	74.460.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.086.132.300
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.086.132.300
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.800.000.000
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	1.800.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	618.082.000
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	500.000.000
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	118.082.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	550.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	550.000.000
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	550.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	113.248.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.248.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.248.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.640.412.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.149.068.500
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	626.062.100
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	532.207.300
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	93.854.800
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	523.006.400
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	523.006.400
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	491.343.500
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	262.818.000
Penetapan Cagar Budaya	262.818.000
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	228.525.500
Pengembangan Cagar Budaya	228.525.500
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	11.150.294.268
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	11.150.294.268
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	659.817.000
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	41.270.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	15.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	26.270.000
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	411.011.000
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	411.011.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	207.536.000
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	207.536.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	763.523.800
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	763.523.800
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	63.377.800
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	150.000.000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	486.226.000
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	63.920.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	325.300.000
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	300.000.000
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	25.300.000
Perlindungan Hasil Kreativitas	25.300.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.060.850.000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.060.850.000
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1.000.000.000
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	60.850.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.340.803.468
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.919.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.260.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.950.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.299.900
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.760.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.791.403.251
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.784.553.251

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.600.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.564.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.750.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.464.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.350.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.011.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.770.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.286.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.492.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.898.700
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.064.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.500.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.447.560
Pengadaan Mebel	99.422.320
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.657.100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.368.140
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.185.455.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.780.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	989.675.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.002.457
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.631.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.150.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	494.221.457
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.791.051.328
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.419.032.100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.419.032.100
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	491.266.700
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	491.266.700
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	491.266.700
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.163.006.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	607.089.100
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	87.261.800
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	497.095.200
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	15.782.100
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	6.950.000
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3.062.707.100
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3.062.707.100
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	493.209.800
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	493.209.800
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	510.097.600
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	510.097.600
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	491.931.000
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	18.166.600
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	254.661.800
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	254.661.800
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	28.243.200
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	211.833.400
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	14.585.200
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	58.372.019.228
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	58.372.019.228
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.758.189.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	7.389.782.600
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.742.396.500
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	455.380.000
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	590.013.200
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	85.000.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	345.415.300
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	171.577.600
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	368.406.400
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	368.406.400
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.036.071.003

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengembangan Prasarana Pertanian	1.245.263.300
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	470.263.300
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	600.000.000
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	175.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	7.790.807.703
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.887.913.500
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	499.551.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.196.057.100
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.207.286.103
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	272.180.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	272.180.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	122.180.000
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150.000.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.990.511.800
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.990.511.800
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	890.257.300
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	727.832.200
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	212.422.300
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	160.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.315.067.425
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.724.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.536.100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.065.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.640.200
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.406.900
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.298.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.777.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.693.110.635
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.686.216.135
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.347.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.547.200
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.009.400

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.296.900
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.867.400
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.845.100
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13.872.300
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.872.300
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.582.600
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37.932.600
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.650.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	849.596.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.726.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.702.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.290.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.920.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.845.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.020.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.092.900
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.535.512.300
Pengadaan Mebel	199.781.300
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.385.046.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	950.685.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.094.838.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.690.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.878.148.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.889.820.590
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	571.716.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.320.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.379.009.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	850.774.990
Sekretariat Daerah	110.159.995.610
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	110.159.995.610
SEKRETARIAT DAERAH	110.159.995.610

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	30.884.925.250
Administrasi Tata Pemerintahan	1.286.865.200
Penataan Administrasi Pemerintahan	644.474.950
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	331.588.500
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	310.801.750
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	27.700.660.400
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.752.000.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	25.659.935.200
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	288.725.200
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.075.769.750
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	387.877.500
Fasilitasi Bantuan Hukum	358.951.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	328.941.250
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	821.629.900
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	264.761.700
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	269.593.000
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	287.275.200
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.192.454.100
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	893.535.800
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	489.559.400
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	403.976.400
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	865.534.200
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	216.371.200
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	220.163.000
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	429.000.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.858.394.100
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	825.000.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	742.500.000
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	290.894.100
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	574.990.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	574.990.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.082.616.260
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.100.486

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.345.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.521.186
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.645.550
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.163.550
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.424.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.040.044.826
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.000.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.421.897
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.622.929
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	360.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.965.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.650.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.300.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	440.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	220.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	550.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.750.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	55.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.250.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.700.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.290.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.650.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.640.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.881.730.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.450.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	2.030.930.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Lapangan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.180.800.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.777.808.548
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.494.853.588
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	825.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	446.834.960
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.011.120.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.567.500.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	770.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	357.500.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	440.000.000
Penataan Organisasi	1.100.432.400
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	266.466.600
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	109.148.900
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	261.076.500
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	337.951.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	125.789.200
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9.625.000.000
Fasilitasi Keprotokolan	6.297.500.000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.090.000.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.237.500.000
Sekretariat DPRD	89.304.904.829
SEKRETARIAT DPRD	89.304.904.829
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.278.670.700
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.150.160.000
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	252.839.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.698.851.000
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	452.770.000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	80.130.000
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	665.570.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.087.323.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pembahasan KUA dan PPAS	377.709.000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	377.709.000
Pembahasan APBD	606.669.000
Pembahasan APBD Perubahan	437.627.000
Pembahasan Laporan Semester	70.480.000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	217.129.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.059.983.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	106.220.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	53.860.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	106.220.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	106.220.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	54.370.000
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	13.945.000
Pengawasan Penggunaan Anggaran	212.040.000
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	407.108.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	4.166.144.900
Pendalaman Tugas DPRD	1.987.859.900
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	350.750.000
Penyusunan Program Kerja DPRD	352.886.000
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.264.649.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.485.723.000
Kunjungan Kerja dalam Daerah	510.880.000
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	9.600.000
Pelaksanaan Reses	1.965.243.000
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	67.145.000
Pengawasan Kode Etik DPRD	67.145.000
Fasilitasi Tugas DPRD	18.262.191.800
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15.373.482.800
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	194.787.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	633.799.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.060.123.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.026.234.129

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.868.100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.553.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.821.700
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.367.900
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.762.900
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.375.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.986.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.056.088.068
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.047.927.968
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.782.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.377.600
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.203.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.589.900
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.409.200
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.203.900
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.125.500
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.725.500
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	257.400.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.009.174.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.417.700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	235.814.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.061.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	389.435.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	98.892.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	319.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424.034.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	41.870.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.850.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	788.164.800
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.800.000
Pengadaan Mebel	330.571.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	401.793.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.978.632.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	346.028.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.657.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.536.947.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.026.419.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	464.221.000
Pemeliharaan Mebel	52.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.372.198.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	44.173.759.561
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	43.639.799.561
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	453.960.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	80.000.000
Layanan Administrasi DPRD	580.800.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	580.800.000
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.225.855.484
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	19.225.855.484
PERENCANAAN	17.989.757.484
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.376.878.450
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.140.221.450
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	71.586.400
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	7.234.600
Pelaksanaan Konsultasi Publik	24.672.500
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	29.935.100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	246.467.500
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	19.811.900
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	740.513.450
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70.325.700
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12.308.400
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	57.424.500
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	592.800
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	166.331.300

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	166.331.300
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.786.467.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	902.727.700
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.879.800
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.039.800
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	45.599.600
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	128.785.300
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.879.800
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24.039.800
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	311.636.200
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	302.867.400
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	664.739.700
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	170.852.400
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.505.300
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.791.500
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	248.505.600
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.502.400
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	29.505.300
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16.298.400
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	125.778.800
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.218.999.600
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	467.788.100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.807.700
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	337.677.300
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	334.726.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.826.412.034

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.696.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.764.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.950.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.300.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.032.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.478.903.034
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.472.053.034
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.600.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.745.900
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.769.100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.591.200
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.385.600
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.906.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.478.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.128.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.300.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	903.077.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.386.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.178.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	265.336.100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.493.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.124.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.368.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.192.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	361.751.800
Pengadaan Mebel	98.262.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	263.489.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.257.982.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.989.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.114.993.500

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	649.348.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.450.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.300.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.708.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.890.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.236.098.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.236.098.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	285.000.000
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	285.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	548.002.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	488.860.000
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	59.142.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	167.700.000
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	167.700.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	235.396.000
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	235.396.000
Badan Keuangan dan Aset Daerah	605.564.090.911
KEUANGAN	605.564.090.911
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	515.487.862.751
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.166.855.400
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	214.488.600
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150.706.400
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	169.390.100
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	92.317.400
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	105.182.200
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	156.318.200
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	211.167.700
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	422.761.500
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	480.433.900
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	124.930.800
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	39.158.600

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.350.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	533.530.000
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	80.000.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	463.900.000
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	80.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	539.300.000
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	72.570.000
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	580.700.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.500.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	150.000.000
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	150.000.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	150.000.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	250.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	150.000.000
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50.000.000
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50.000.000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	150.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	300.000.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	509.471.007.351
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.400.000.000
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	412.682.008.400
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	60.250.132.951
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	35.138.866.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.700.000.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.700.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyusunan Standar Harga	450.000.000
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	100.000.000
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	150.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	250.000.000
Inventarisasi Barang Milik Daerah	750.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	3.500.000.000
Penilaian Barang Milik Daerah	350.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.000.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	450.000.000
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	250.000.000
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.376.228.160
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.055.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.802.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.609.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.084.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.501.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.319.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.740.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78.020.727.610
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.011.977.610
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.750.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	278.410.700
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.746.700
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	255.850.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.664.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.150.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270.779.200
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.329.200
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	202.450.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.467.345.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	367.898.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	281.720.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	250.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426.832.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.895.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	540.519.400
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.400.000
Pengadaan Mebel	144.805.600
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.313.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.680.156.750
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.400.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.394.756.750
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	981.234.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.434.200
Pemeliharaan Mebel	15.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.400.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	398.400.000
Badan Pendapatan Daerah	30.768.126.456
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.974.920.265
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.974.920.265
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	600.000.000
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	500.000.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	575.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	750.000.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	900.000.000
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.419.382.000
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.050.000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	60.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	501.486.600
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	150.000.000
Penagihan Pajak Daerah	3.000.000.000
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150.000.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.000.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	150.000.000
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	119.001.665
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.793.206.191
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.995.793
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.256.100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.002.100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.154.400
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.477.600
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.509.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.596.593
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.244.792.814
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.239.351.064
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.745.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.696.750
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	417.106.200
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	92.106.200
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	325.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.478.531.984
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	519.073.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	163.353.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	378.158.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	569.229.489
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	795.597.495

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.719.200
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.840.818.500
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000
Pengadaan Mebel	450.642.300
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	536.094.800
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	454.081.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.496.206.900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.063.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.262.143.900
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.203.754.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.714.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.790.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.850.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	465.400.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.213.685.306
KEPEGAWAIAN	15.213.685.306
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.054.655.900
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	749.828.600
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	457.951.600
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	66.863.200
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.000.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	50.013.800
Mutasi dan Promosi ASN	926.397.400
Pengelolaan Mutasi ASN	101.266.200
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	385.097.600
Pengelolaan Promosi ASN	440.033.600
Pengembangan Kompetensi ASN	2.835.700.500
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	547.609.100

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.903.798.400
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	261.561.500
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	19.613.700
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	103.117.800
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	542.729.400
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16.407.200
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	504.309.100
Pembinaan Disiplin ASN	12.828.800
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9.184.300
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.159.029.406
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.970.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.610.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.950.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.300.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.460.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.979.008.766
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.972.158.766
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.600.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.608.400
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.746.900
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.524.500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.337.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.073.700
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.999.900
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	169.073.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.519.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.199.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.166.700

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.544.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.805.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.440.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.363.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	370.102.540
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.600.000
Pengadaan Mebel	131.610.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.892.540
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.726.100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.804.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468.922.100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.020.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	255.120.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.900.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
Inspektorat	32.695.767.925
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	32.695.767.925
INSPEKTORAT DAERAH	32.695.767.925
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.572.240.000
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.872.240.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	379.950.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	176.500.000
Reviu Laporan Kinerja	385.150.000
Reviu Laporan Keuangan	269.680.000
Pengawasan Desa	444.510.000
Kerja Sama Pengawasan Internal	600.000.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	616.450.000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	700.000.000
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	250.000.000
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	450.000.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.154.021.200

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.538.450.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	859.920.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	678.530.000
Pendampingan dan Asistensi	1.615.571.200
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	697.250.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	168.321.200
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	550.000.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	200.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.969.506.725
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.896.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.337.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.331.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.800.100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.059.900
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.595.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.770.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.834.394.055
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.793.615.055
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.064.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.714.900
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.324.200
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.324.200
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.959.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43.959.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.175.733.450
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	276.921.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.600.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	231.516.050
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.096.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.600.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.527.224.820

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.250.850.000
Pengadaan Mebel	545.031.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	922.883.620
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	808.460.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	858.785.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.904.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	738.881.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.417.190.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.560.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.780.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	378.850.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	403.000.000
Kecamatan Wado	3.158.085.211
UNSUR KEWILAYAHAN	3.158.085.211
KECAMATAN	3.158.085.211
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	483.343.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28.175.500
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.175.500
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	455.167.500
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	455.167.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.405.200
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.405.200
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.405.200
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	36.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.826.400

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.826.400
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.204.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.622.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.608.510.611
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.501.250
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.594.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.118.350
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.788.900
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.880.668.361
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.876.668.361
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.085.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.585.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.650.500
Pengadaan Mebel	30.650.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.395.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.410.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.851.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	444.134.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.710.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.710.000
Kecamatan Jatinunggal	3.542.337.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	489.731.900
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30.371.900
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.371.900
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	459.360.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	459.360.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.373.800
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	33.373.800
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	33.373.800
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.950.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.950.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.950.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.360.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.360.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.360.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.700.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.700.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.700.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.983.221.800
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.225.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.825.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.390.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	731.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	733.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	746.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.800.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.122.877.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.122.089.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	788.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.276.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.276.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.821.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.895.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.926.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.884.000
Pengadaan Mebel	23.252.800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.631.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519.138.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.402.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	497.736.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000
Kecamatan Darmaraja	3.722.981.403
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	479.539.200
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.400.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.400.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.990.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.990.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	454.149.200
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	454.149.200
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.640.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	34.640.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	31.400.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.240.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.230.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.230.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.230.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.500.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.500.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.881.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.881.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.881.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.186.191.203
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.527.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.377.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.850.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.320.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.479.500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.039.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.461.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.449.818.503
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.432.788.503
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.100.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.930.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.185.600
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.240.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.245.600
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.700.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.400.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.400.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.562.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.179.900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.996.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.200.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.683.700

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.502.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.085.800
Pengadaan Mebel	22.085.800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.211.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.184.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.027.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.400.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.990.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.710.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.700.300
Kecamatan Cibugel	3.280.872.164
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	438.141.600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	418.141.600
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	418.141.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.374.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	61.374.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	57.901.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.473.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.280.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.280.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.280.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.241.600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.241.600
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.241.600
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.272.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.272.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	462.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.810.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.751.562.964
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.273.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.665.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.348.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.380.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.540.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.540.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.800.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.155.470.364
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.148.000.864
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.100.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.369.500
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.702.400
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	700.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.444.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.558.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.328.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.675.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.800.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.853.200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.815.900
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.815.900
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.972.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.960.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	369.012.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000
Kecamatan Cisitu	3.355.749.802
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	484.560.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.520.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.520.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	450.040.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	450.040.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62.263.200
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	62.263.200
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	56.620.500
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.642.700
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.500.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.500.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.123.900
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.123.900
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.123.900
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.873.900
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.873.900
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.000.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.873.900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.764.428.802
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.433.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.646.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.290.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.140.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.170.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.170.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.017.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.707.432.502
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.702.102.502
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.330.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.154.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	770.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.784.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.331.200
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.123.200
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.208.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.198.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.830.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.905.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.470.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.992.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.387.400
Pengadaan Mebel	23.646.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.741.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.384.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.408.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	497.976.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.108.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.408.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.700.000
Kecamatan Situraja	3.913.053.287
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	456.629.700
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.395.200
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.395.200
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	431.234.500
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	431.234.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.483.500
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.483.500
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	25.293.600
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.040.500
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.149.400
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.610.500
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.610.500

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.610.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.024.700
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.024.700
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.024.700
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.715.400
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.715.400
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.412.500
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.457.400
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.845.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.374.589.487
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.277.700
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.646.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.754.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.540.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.540.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.796.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.678.021.987
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.670.391.187
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.100.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.530.800
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.121.900
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	521.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.629.200
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.971.700
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.712.600
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.712.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.073.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.599.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.700.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.797.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.976.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.632.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.896.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.736.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.750.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.700.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.970.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.080.000
Kecamatan Conggeang	4.077.867.342
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	498.689.100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.800.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.800.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	26.365.200
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.365.200
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	463.523.900
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	463.523.900
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.571.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	42.571.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	38.565.800
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.005.200
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.488.800
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.488.800
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.488.800
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.400.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.400.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.400.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.665.200
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.665.200
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.665.200

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.512.053.242
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.193.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.710.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.373.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.537.500
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.105.500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.070.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.395.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.591.740.142
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.587.840.142
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.400.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.964.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.900.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.064.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.272.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.634.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.458.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.425.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.179.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.576.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000
Pengadaan Mebel	40.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.743.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.868.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.875.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.140.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.500.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.640.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Kecamatan Paseh	3.558.687.053
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	505.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	35.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	470.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	470.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.441.100
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	64.441.100
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	64.441.100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.529.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.529.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.529.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.800.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.800.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.800.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.400.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.400.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.800.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.600.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.931.516.953
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.003.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.639.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.269.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.850.500
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.553.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.553.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.139.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.199.368.353
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.195.895.853
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	426.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.046.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.212.100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	890.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.322.100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.898.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.396.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.502.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000
Pengadaan Mebel	30.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.034.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.784.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.250.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000
Kecamatan Surian	3.336.088.598
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	559.056.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	539.056.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	539.056.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.822.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	55.822.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	52.872.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.950.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.620.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.620.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.620.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.800.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.800.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.800.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.225.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.225.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.275.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.950.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.703.565.598
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.911.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.031.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.999.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.575.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.179.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.179.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.947.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.030.022.298
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.025.893.798
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	370.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.758.200
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.776.500
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	610.800
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.086.800
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.078.900
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.499.900
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.499.900
Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.007.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.902.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.299.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.100.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.206.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.850.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.850.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.498.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.994.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.504.000
Kecamatan Buahdua	3.600.810.453
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	474.727.100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.210.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.210.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	27.083.100
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.083.100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	437.434.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	437.434.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.696.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60.696.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	60.696.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.600.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.600.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.600.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.800.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.800.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.800.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.904.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.904.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.452.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.452.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.019.083.353
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.596.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.828.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.336.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.792.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.540.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.540.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.560.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.251.280.953
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.243.780.953
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.600.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.500.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.624.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.823.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.053.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.585.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.585.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.953.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.248.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.963.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.962.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.336.700
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.444.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.806.700
Pengadaan Mebel	11.867.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.939.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.643.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.768.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	426.875.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.718.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.188.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000
Kecamatan Tanjungsari	3.837.682.172
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	569.655.900
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	29.873.300
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.873.300
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	539.782.600
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	539.782.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.065.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	49.065.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	49.065.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.500.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.500.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.000.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.122.461.272
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.590.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.590.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.379.122.672

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.367.522.672
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.100.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.816.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.016.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.397.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.251.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.099.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.012.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.040.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.133.400
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000
Pengadaan Mebel	10.968.300
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.865.100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.259.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.624.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.635.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.540.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.320.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.370.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.850.000
Kecamatan Sukasari	4.118.056.383
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	485.666.900
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.620.500
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.620.500
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	32.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	444.046.400
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	444.046.400
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	105.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.451.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.451.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.451.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20.000.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.398.938.483
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.451.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.430.100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.900.100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.120.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.387.367.133
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.377.751.733
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.615.400
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.110.500
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.925.500

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.192.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.993.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.365.050
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.530.750
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.834.300
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000
Pengadaan Mebel	40.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.644.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.804.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415.840.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000
Kecamatan Pamulihan	3.541.918.476
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	465.841.400
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.342.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.342.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23.004.400
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.004.400
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	440.495.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	440.495.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.873.300
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.079.500

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.079.500
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	28.793.800
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	28.793.800
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.259.600
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.259.600
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.259.600
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.600.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.600.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.600.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.553.600
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.553.600
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	980.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.600.900
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.972.700
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.022.790.576
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.980.250
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.915.250
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.184.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.670.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.959.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.959.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.291.900
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.278.105.126
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.274.341.026
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	895.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.868.800
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.725.900
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.327.300
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.910.500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.488.100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.803.300
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.803.300

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.470.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.069.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.800.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.128.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.473.300
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.574.500
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.388.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.186.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.582.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.582.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.548.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.526.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141.322.000
Kecamatan Cimanggung	3.995.771.006
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	519.890.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.580.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.580.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.180.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.180.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	494.130.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	494.130.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.680.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	47.680.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	43.030.200
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.649.800
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.800.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.800.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.800.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.410.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.410.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.830.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.580.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.385.991.006
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.602.700
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.206.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.870.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.161.400
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.285.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.536.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.543.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.459.711.806
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.455.447.406
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.192.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.071.600
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.802.200
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.374.500
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.804.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.623.700
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.005.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.005.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.466.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.713.700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.084.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.050.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.116.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.502.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.163.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.128.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.035.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.240.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.400.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
Kecamatan Jatinangor	3.790.173.410
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	489.412.200
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.000.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	27.231.800
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.231.800
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	453.180.400
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	453.180.400
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71.532.800
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	71.532.800
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	66.732.800
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.352.800
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.352.800
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.352.800
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.358.300
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.358.300
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.358.300
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.529.200
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.529.200
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.529.200
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.177.988.110
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.336.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.411.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.627.800

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.525.100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.060.700
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.309.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.402.100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.472.423.410
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.459.154.510
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.415.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.853.600
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.338.100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.354.500
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.443.600
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.540.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.649.200
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.649.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.663.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.474.800
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.070.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.750.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.929.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.872.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.567.200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.000.000
Pengadaan Mebel	50.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.939.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.892.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.047.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.638.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.118.400
Pemeliharaan Mebel	5.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.520.000
Kecamatan Rancakalong	3.204.846.352

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	495.805.100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.737.200
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.737.200
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	29.929.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.929.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	461.138.900
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	461.138.900
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.020.500
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	49.020.500
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	43.873.600
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.146.900
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.554.800
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.554.800
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.554.800
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.200.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.200.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.200.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.034.500
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.034.500
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.720.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.414.500
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.900.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.628.231.452
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.972.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.663.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.333.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.960.900
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.687.800
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.687.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.638.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.109.716.552
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.107.276.552

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	710.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.730.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.927.300
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.185.600
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	741.700
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.363.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.406.000
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	3.957.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.911.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.155.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.756.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.039.600
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.039.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.092.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.832.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.260.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.210.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.210.000
Kecamatan Sumedang Selatan	7.276.151.906
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	500.695.800
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.000.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	26.269.500
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.269.500
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	465.426.300
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	465.426.300
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	113.999.500
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	113.999.500

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	89.267.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.515.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11.637.500
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.580.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.353.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.353.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.353.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.607.700
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.607.700
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.607.700
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.627.900
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.627.900
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.664.500
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.175.400
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.788.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.603.868.006
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.206.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.407.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.640.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.978.300
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.888.500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.745.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.547.100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.246.412.556
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.241.069.656
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	850.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.492.900
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.495.800
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.286.800
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.089.800
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.119.200
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.738.400

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.738.400
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.074.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.054.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.773.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.403.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.482.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.772.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.589.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.501.700
Pengadaan Mebel	49.501.700
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528.794.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.260.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.846.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.688.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.643.850
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.700.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.650.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	143.293.850
Kelurahan Pasanggrahan Baru	1.073.582.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	652.582.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	652.582.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.084.400
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	326.521.850
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	316.975.750
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	421.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.710.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.210.300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.672.700

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengadaan Mebel	8.313.800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.358.900
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.117.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.492.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.625.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.500.000
Kelurahan Kotakulon	1.015.998.750
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	693.471.450
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	693.471.450
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	232.090.050
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	449.881.400
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	322.527.300
Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.483.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.483.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.099.100
Pengadaan Mebel	50.394.600
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.704.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.444.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.812.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.632.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000
Kelurahan Regol Wetan	915.232.100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	613.754.900
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	613.754.900
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.750.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	244.727.250

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	362.277.650
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	301.477.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.310.800
Pengadaan Mebel	47.486.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.824.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.416.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.784.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.632.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000
Kelurahan Cipameungpeuk	1.003.342.850
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	585.456.050
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	585.456.050
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.141.600
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	308.573.650
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	266.740.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	417.886.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.756.200
Pengadaan Mebel	18.470.100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.286.100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.484.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.180.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.304.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.646.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.646.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Kecamatan Sumedang Utara	6.280.947.201
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	507.331.700
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.744.100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.744.100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	45.573.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.573.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	443.014.600
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	443.014.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.611.700
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	73.611.700
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	56.673.400
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12.350.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.588.300
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.314.400
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.314.400
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.314.400
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.947.900
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.947.900
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.947.900
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.398.300
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.398.300
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.838.600
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.013.200
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.546.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.624.343.201
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.913.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.181.400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.700.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.550.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.795.500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.798.500

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.887.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.471.019.351
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.459.327.751
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.180.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.511.600
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.719.500
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.486.900
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.721.100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.511.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.943.300
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.943.300
Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.208.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.150.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.964.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.363.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.118.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.148.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.500.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.964.400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.905.900
Pengadaan Mebel	32.183.300
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.722.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.238.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.940.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.446.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.852.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.395.050
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.176.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.960.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.518.050
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.741.000
Kelurahan Kotakaler	864.190.200

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	582.495.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	582.495.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.700.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	212.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	358.795.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.695.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.072.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.830.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.595.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.147.300
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.487.700
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.487.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.134.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.820.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.314.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000
Kelurahan Situ	943.506.150
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	650.900.900
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	650.900.900
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	208.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	430.900.900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	292.605.250
Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.788.550
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.443.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.905.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.731.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.708.150
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.564.900

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengadaan Mebel	4.156.900
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.408.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.501.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.880.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.621.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000
Kelurahan Talun	805.561.350
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	514.899.250
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	514.899.250
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	205.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	298.399.250
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	290.662.100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.077.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.502.200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.159.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.092.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	924.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.063.300
Pengadaan Mebel	25.906.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.156.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.521.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.428.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	201.093.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.000.000
Kecamatan Ganeas	3.883.636.039
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	526.210.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	450.210.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	450.210.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	173.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	173.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	123.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.096.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.096.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.096.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45.000.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.080.330.039
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.072.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.832.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.280.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.580.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.490.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.490.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.400.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.135.578.989
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.972.989

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.006.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.826.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.540.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.086.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.200.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.800.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.800.000
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	10.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.146.150
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.856.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.354.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.143.650
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.792.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.690.900
Pengadaan Mebel	40.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.750.900
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.940.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.016.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.768.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.248.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.200.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.200.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
Kecamatan Tanjungkerta	3.259.501.516
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	508.020.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.370.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.370.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	35.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	454.650.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	454.650.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.490.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.490.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	29.490.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.240.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.240.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.240.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.693.800
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.693.800
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.693.800
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.600.200
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.600.200
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.600.200
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.660.457.516
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.897.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.213.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.233.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.642.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.009.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	933.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.865.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.122.765.516
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.120.062.216
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.703.300
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.044.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.044.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.360.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.151.300

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.523.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.761.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	924.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.182.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.408.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.524.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.250.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.208.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.208.400
Kecamatan Tanjungmedar	3.029.329.600
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	459.150.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	16.510.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.510.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	442.640.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	442.640.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.942.050
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.942.050
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.942.050
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.200.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.200.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.200.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.400.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.400.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.900.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.500.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.502.637.550
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.585.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.853.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.820.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.253.600
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.751.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.754.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.152.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.733.801.150
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.730.784.450
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.016.700
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.085.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.888.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	197.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.901.500
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.901.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.253.700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.024.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.205.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.763.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.260.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.148.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.208.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	355.940.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.863.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.583.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.280.000
Kecamatan Cimalaka	3.819.555.759
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	470.293.200
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.215.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.215.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	23.980.600
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.980.600
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	433.097.600
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	433.097.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.653.300
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	55.653.300
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	55.653.300
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.200.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.200.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11.200.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.076.800
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.076.800
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.076.800
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.718.800
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.718.800
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.500.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.600.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.618.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.252.613.659
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.812.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.367.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.341.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.444.900
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	786.900
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	786.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.085.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.431.079.239
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.427.270.039
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	145.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.663.900

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.655.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	394.200
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.970.200
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	290.600
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290.600
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	290.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.304.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.033.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.442.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.737.100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.433.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.368.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	290.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.766.520
Pengadaan Mebel	18.489.700
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.276.820
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.457.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.352.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.355.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.750.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.248.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.958.000
Pemeliharaan Mebel	5.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.290.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000
Kecamatan Cisarua	3.225.601.098
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	471.036.400
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.056.900
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.056.900
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	437.979.500
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	437.979.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.232.900

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.232.900
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	21.232.900
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.400.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.400.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.400.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.600.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.909.900
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.909.900
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.589.900
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.320.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.692.421.898
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.891.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.515.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.304.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.592.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	648.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	648.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.184.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.942.093.998
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.939.343.998
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.750.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.210.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.240.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.970.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.020.500
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.512.000
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	4.508.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.119.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.055.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.064.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.068.200
Pengadaan Mebel	53.123.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.945.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.018.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.992.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	369.026.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.400
Kecamatan Tomo	3.273.681.256
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	510.040.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	450.040.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	450.040.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.820.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	66.820.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	66.820.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.910.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.910.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.910.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.400.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.400.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32.400.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.810.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.810.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.810.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.588.701.256
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.274.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.631.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.473.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.537.800
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.185.800
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	885.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.560.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.597.460.856
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.591.684.856
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.776.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.192.600
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.471.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.197.900
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.523.700
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.240.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.240.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.570.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.835.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.549.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.919.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.266.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000
Pengadaan Mebel	25.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.507.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.632.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.875.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.456.600

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.451.600
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.005.000
Kecamatan Ujungjaya	4.331.033.598
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	452.600.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.600.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.600.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	411.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	411.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	91.361.200
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	91.361.200
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	91.361.200
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45.840.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.840.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.840.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.033.100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.033.100
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.033.100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.671.199.298
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.963.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.611.600
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.922.300
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.941.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.487.900
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.562.673.298

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.558.723.298
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.950.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.002.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.002.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.694.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.660.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.200.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.834.300
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.588.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.588.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.277.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.996.400
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.281.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
Kecamatan Jatigede	3.233.129.274
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	461.326.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.800.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.800.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	432.526.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	432.526.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.000.000
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.301.200
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.301.200
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.301.200
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.700.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.700.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	17.700.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.940.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.940.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.940.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.625.862.074
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.725.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.415.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.771.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.976.400
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.200.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.370.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.992.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.018.162.824
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.015.460.424
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.702.400
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.864.600
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.864.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.895.950
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.224.650
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.671.300
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.945.400
Pengadaan Mebel	53.945.400
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.968.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.468.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.500.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.300.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.300.000
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.831.471.716
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	12.831.471.716
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.831.471.716
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.050.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.050.000.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250.000.000
Pembentukan Paskibraka	800.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.422.119.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.422.119.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.347.119.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	425.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	425.000.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25.000.000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	249.160.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	249.160.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200.000.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.160.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.985.535.350
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3.985.535.350

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Sosial	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.390.093.450
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	165.394.900
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.430.047.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.699.657.366
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.368.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.204.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.424.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.320.400
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.945.800
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.855.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.617.900
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.523.684.296
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.506.006.196
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.884.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.793.300
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.097.400
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.097.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.696.200
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36.696.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.282.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.395.900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.272.600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.103.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.165.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.252.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.939.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.154.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	396.815.000

Uraian	APBD Perubahan
1	2
Pengadaan Mebel	98.729.300
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.085.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	655.786.650
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.544.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.438.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.804.650
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.926.820
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	329.250.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.760.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148.916.820
	3.378.813.690.943,8 7

Sumber data BKAD APBD Perubahan Tahun 2025

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Kebijakan umum pemerintah daerah kabupaten sumedang dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun pada tahun 2025 dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran 2025.

a. Rencana Program dan Pendanaan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

Rencana Program dan Pendanaan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 tercantum di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

b. Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumedang Tahun 2025, dengan tabel 1.18 di bawah ini :

Tabel 1.25

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumedang Tahun 2025

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
Urusan Pendidikan						
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.560.436.000,00
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	11.427.237.100,00
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	9.904.913.200,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	275.000.000,00
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	75.000.000,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	500.000.000,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93.382.230.000,00
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	75.025.000,00
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000,00
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000,00
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	125.000.000,00
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	125.000.000,00
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	752.609.000,00
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	400.000.000,00
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.815.000.000,00
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.300.000.000,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	103.725.000,00
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	300.000.000,00
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000,00
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	50.000.000,00
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.264.805.000,00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.096.489.480,00
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000,00
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	161.360.000,00
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	321.673.000,00
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	236.224.000,00
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	150.000.000,00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	52.139.980.000,00
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100.000.000,00
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah / TU	150.000.000,00
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50.000.000,00
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	200.000.000,00
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	300.000.000,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	480.000.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100.000.000,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.000.000,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	17.010.860.000,00
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	783.640.000,00
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	5.616.975.000,00
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	1.999.999.775,00
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	300.000.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	11.554.180.000,00
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.000.000.000,00
Total Anggaran SPM urusan Pendidikan						234,809,684,555,00
Urusan Kesehatan						
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.300.000.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	58.396.800,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	109.670.400,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.358.400,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	137.188.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	109.670.400,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	105.129.600,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	101.836.800,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	139.008.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.826.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.640.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	78.336.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	140.083.200,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	109.209.600,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	198.600.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	164.952.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.824.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.705.600,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	189.158.400,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	133.753.200,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	274.348.800,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	147.859.200,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.840.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.222.400,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	143.040.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	143.270.400,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.905.600,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	132.720.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.600.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	142.430.700,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	105.840.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	135.504.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	166.740.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.800.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93.945.600,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.403.200,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	300.000.000,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200.000.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	288.200.000,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Puskesmas	3.564.219.800,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	200.000.000,00
			2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif puskesmas	1.572.336.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	217.850.000,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut puskesmas	355.699.200,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	200.000.000,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi puskesmas	512.485.600,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	200.000.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Puskesmas	325.684.800,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	200.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.504.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.336.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.652.800,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.476.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.564.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.128.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.326.400,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.376.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.068.800,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.680.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.732.400,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.940.000,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.603.200,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.400.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.128.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.772.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.184.400,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.969.600,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.206.400,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.504.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.970.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.809.600,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.168.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.919.200,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.360.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.800.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.128.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.640.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.088.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.276.800,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.360.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.801.600,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.801.600,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	200.000.000,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.940.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.722.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.107.200,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.852.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.830.400,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.048.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.504.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.355.200,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.305.600,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.280.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.257.200,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.078.400,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.355.200,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.780.800,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.260.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.761.600,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.972.800,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.595.800,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.681.600,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.256.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.260.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.702.400,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.400.000,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.206.400,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.305.600,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.800.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.200.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.464.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.240.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.336.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.958.400,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.400.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.603.200,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.809.600,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	500.000.000,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV puskesmas	85.107.400,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	200.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.699.200,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.372.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.364.800,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.375.200,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.888.800,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.819.200,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.988.400,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.529.600,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.510.400,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.480.000,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.057.600,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.987.200,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.561.600,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.468.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.859.200,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.969.600,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.354.400,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.318.400,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.184.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.622.400,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.295.200,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.913.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.689.600,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.320.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.912.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.958.400,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.120.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.560.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.563.200,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.600.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.592.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.435.200,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.920.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.078.000,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.374.400,00
Total Anggaran SPM urusan Kesehatan						17.093.169.200,00
Urusan PUTR						
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	199.100.000
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150.000.000
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10.843.021.300
1	03	05	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150.000.000
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.625.259.000
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000
Total Anggaran SPM urusan PUTR						17.067.380.300
Urusan Perumahan Rakyat						
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000,00
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	75.000.000,00
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	80.000.000,00
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000,00
1	04	02	2.03	0003	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	320.000.000,00
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	650.000.000,00
Total Anggaran SPM urusan Perumahan Rakyat						1.325.000.000,00
Urusan Trantibumlinmas						
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	93.598.400,00
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	153.552.000,00
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk	800.000.000,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
					dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.053.640.200,00
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	412.379.200,00
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	451.448.600,00
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.309.200,00
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	330.674.200,00
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	855.000,00
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	29.743.000,00
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	166.850.000,00
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	343.000.000,00
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	29.363.200,00
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.749.143.000,00
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	26.023.300,00
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	36.406.800,00
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	31.620.850,00
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	95.418.300,00
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.641.234.000,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	40.321.700,00
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.117.588,00
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	218.103.900,00
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	37.337.800,00
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	19.350.300,00
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	16.015.000,00
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	14.961.200,00
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	20.230.300,00
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	77.504.200,00
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.556.383.700,00
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	24.990.000,00
Total Anggaran SPM urusan Trantibumlinmas						11,658,168,338
Urusan Sosial						
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	2,097,262,800,00
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	115.228.500,00
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	67.644.100,00
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	274.827.300,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	46.992.500,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.020.000,00
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	36.101.900,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	324.502.700,00
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	14.595.300,00

KODE					URAIAN	APBD PERUBAHAN
1					2	3
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	19.903.400,00
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	431,524,000,00
Total Anggaran SPM urusan Sosial						3.467.602.500,00

Sumber data BKAD APBD Perubahan Tahun 2025

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Laporan Capaian kinerja makro Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026 merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2025 secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional

Capaian Makro Kabupaten sumedang untuk Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 besumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2025 di dalam Dokumen Sumedang Dalam Angka Tahun 2026.

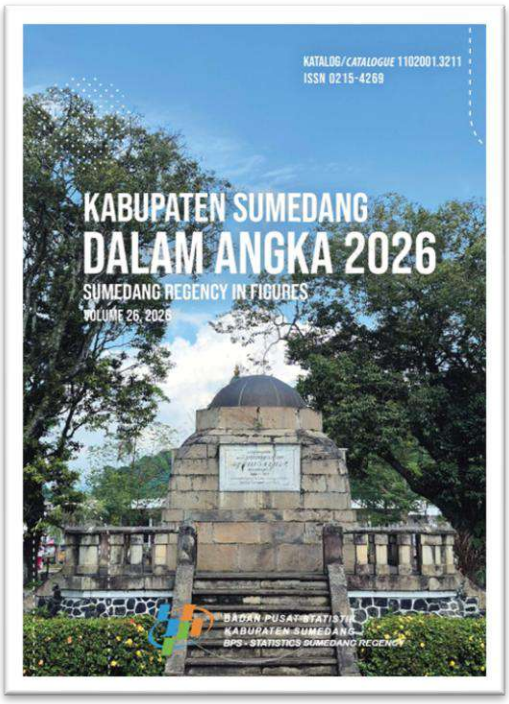

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah, indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup, dan indeks daya beli dilihat dari paritas daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat.

Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang 2025

Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka, BPS 2025

Raihan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 konsisten meningkat setiap tahun Namun di tahun 2025 mampu kembali meningkat cukup tinggi hingga mencapai 75,50 poin dari nilai IPM pada Tahun 2024 yaitu 74,57 poin.

Pencapaian IPM Kab. Sumedang pada 2025 berada pada Kategori Tinggi pertumbuhan mencapai 0,75, dengan laju kinerja sebesar 1,25 poin dibandingkan 2024 yaitu 0,74%, tren positif pertumbuhan IPM ini masih perlu di Akselerasi karena masih berada dibawah capaian Jawa Barat dan Nasionalonal.

Kabupaten Sumedang Unggul pada Indikator Usia Harapan Hidup yang menunjukkan kualitas pelayanan Kesehatan yang Relatif lebih baik, Harapan Lama Sekolah juga cukup tinggi dan Rata-Rata lama Sekolah lebih cukup baik dan pengeluaran perkapita yang mencerminkan indikator pendapatan, pengeluaran perkapita dan paritas daya beli perkapita setahun cukup baik dan meningkat

2. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang sebelum pandemi Covid-19 sudah mencapai 1 digit dengan rata-rata persentase penurunan sekitar 3% dari capaian tahun sebelumnya. Dampak pandemi telah menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali bertambah selama 2020-2021, pada 2024 kembali dapat diturunkan menjadi 9,10% atau mampu menurun 2,78% dan pada tahun 2025 dapat diturunkan kembali menjadi 8,81 % atau mampu menurun -0,29 dengan Laju Kinerja mencapai -3,19 %. Berikut Tabel Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumedang :

Grafik 2.2
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumedang 2025

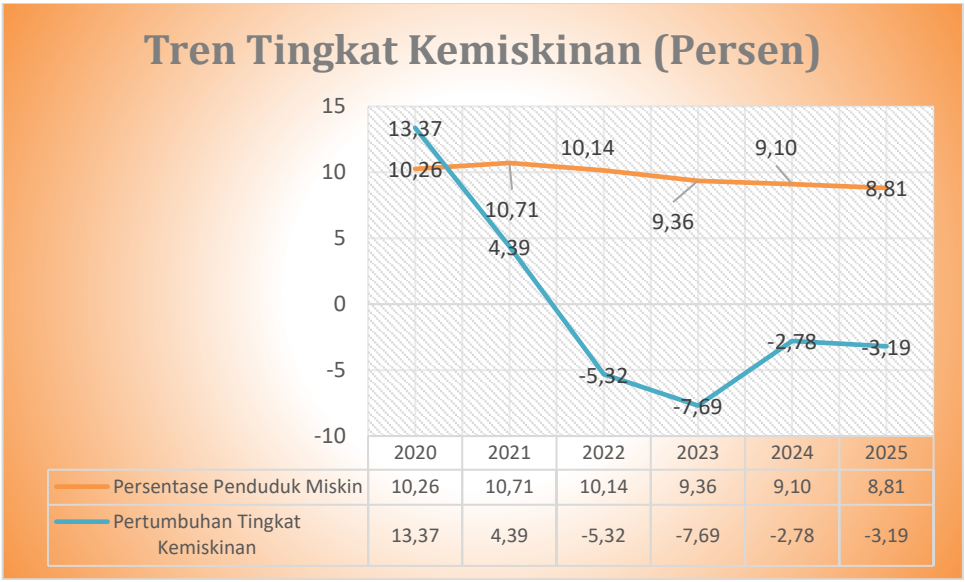

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penduduk Miskin	10,26	10,71	10,14	9,36	9,10	8,81
Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan	13,37	4,39	-5,32	-7,69	-2,78	-3,19

Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka, BPS 2025

3. Ketenagakerjaan

Tahun 2025, kondisi ketenagakerjaan lebih baik, ditandai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang disertai penurunan pengangguran, artinya sudah banyak Angkatan kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan setelah sebelumnya terdampak pandemi Covid-19, bahkan TPT jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Berikut grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumedang :

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang 2025

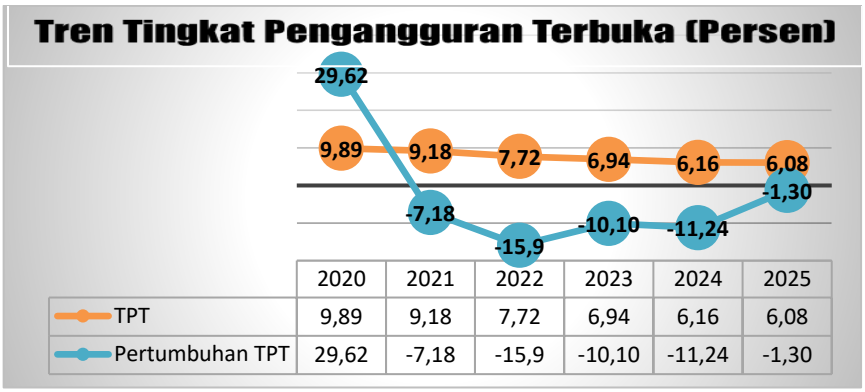

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TPT	9,89	9,18	7,72	6,94	6,16	6,08
Pertumbuhan TPT	29,62	-7,18	-15,9	-10,10	-11,24	-1,30

Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka, BPS 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumedang juga dipengaruhi oleh banyaknya penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya di tahun 2020. Setelah itu, TPT kembali menurun lebih cepat, bahkan di tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang (6,08%) lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 (6,16%), dan terus mengalami penurunan dengan selisih 0,08, dengan laju kinerja mencapai -1,30%. di Tahun 2025.

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dipandang penting untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang akan tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama pembangunan ekonomi daerah diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Sumedang selama masa pandemi covid 19 mengalami penurunan, namun Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2025 yaitu 5,48% atau peningkatan pertumbuhan ekonomi 1,43 % jika dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,05 % capaian tahun 2025 ini mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yaitu 5,20%. sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PRDB Kabupaten Sumedang, sektor yang tumbuh positif yaitu :

1. sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh **20,27**%.
2. sektor industri pengolahan tumbuh **18,56**%.
3. sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor **15,74**%.
4. sektor kontruksi **10,17**%.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang 2025

Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka, BPS 2025

5. Pendapatan Per Kapita Tahun 2025

Pendapatan Per kapita mengalami kenaikan dari Tahun 2024, pada tahun 2024 mencapai 39,7 Juta Rupiah untuk tahun 2025 mengalami kemajuan menjadi 42,65 Juta Rupiah dengan laju kinerja sebesar 7,43 Juta Rupiah.

Grafik 2.5

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita 2021-2025

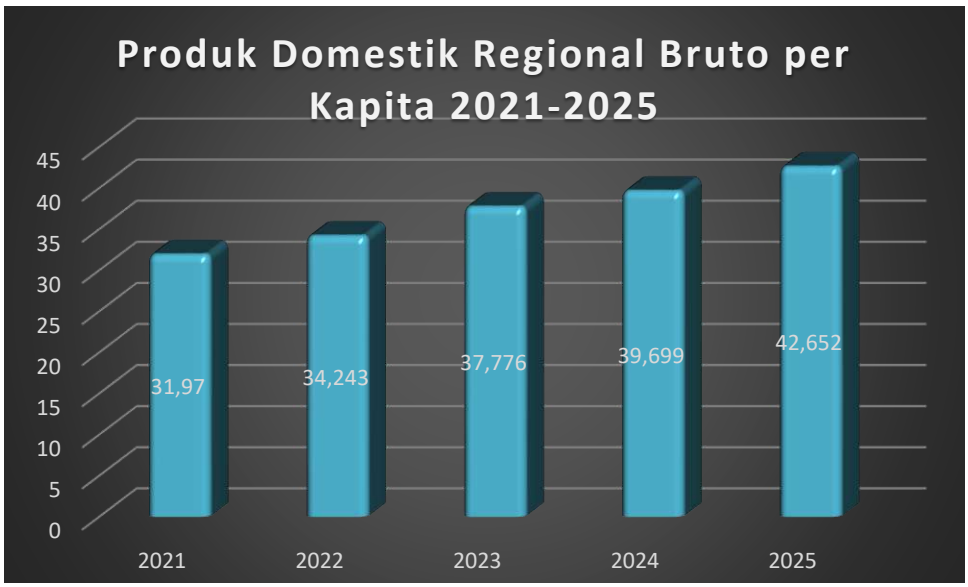

BPS Kabupaten Sumedang 2025

6. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Realisasi Gini Ratio Kabupaten Sumedang pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesat 0,04 poin capaian pada Tahun 2025 sebesar 0,377 poin dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 0,337 poin. capaian ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di masyaraakaat kabupaten sumedang mengalami kenaikan.

Grafik 2.6
Gini Ratio Kabupaten Sumedang 2025

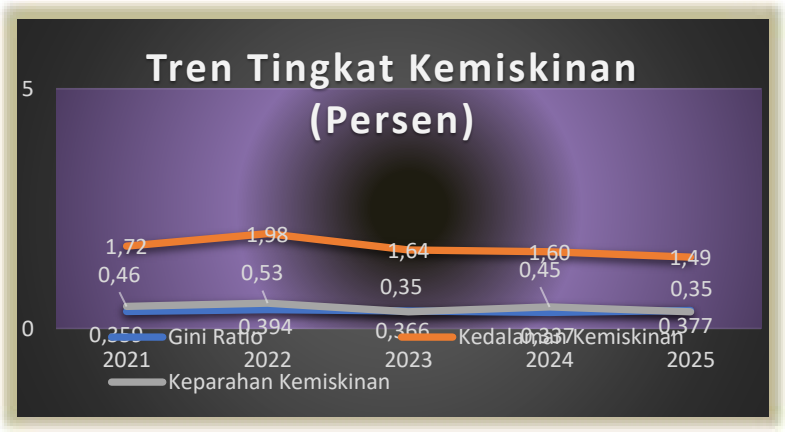

Sumber : Kabupaten Sumedang Dalam Angka, BPS 2025

Kesimpulan untuk Capaian laju kinerja makro kabupaten sumedang pada tahun 2024 ke tahun 202 mengalami peningkatan ke arah positif.

Tabel 2.1

Capaian kinerja makro Kabupaten Sumedang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2025	Laju Kinerja 2025
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	74,58	75,50	1,25
2	Angka Kemiskinan	9,1	8,81	-3,19
3	Angka Pengangguran	6,16	6,08	-0.33
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,05	5,48	35,51
5	Pendapatan Per kapita	39,70	42,65	7,43
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,337	0,377	11,87

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Ada 6 indikator capaian kinerja makro untuk Kabupaten Sumedang Tahun 2025 terdiri dari :

1. Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2024 mencapai 74,58 poin untuk

tahun 2025 mengalami kenaikan 75,50 poin laju kinerja 1,25 poin.

2. Angka Kemiskinan pada tahun 2024 mencapai 9,16 % untuk tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 8,81% dengan Laju kinerja sebesar -3,19 %
3. Angka Pengangguran pada tahun 2024 mencapai 6,16 % untuk tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 6,08 % dengan laju kinerja sebesar -0.33%.
4. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 mencapai 4,05% untuk tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 5,48 % dengan laju kinerja sebesar 35,51 %.
5. Pendapatan Per kapita pada tahun 2024 mencapai 39,7 untuk tahun 2025 menjadi 42,65 dengan laju kinerja sebesar 7,43%
6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) pada tahun 2024 mencapai 0,337 poin untuk tahun 2025 menjadi 0,377 poin mengalami kenaikan dengan laju kinerja sebesar 11,87 poin..

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator pada masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secaralengkap.

a. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Pendidikan**	1. Persentase Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	**79,61**	**Dinas Pebdidikan**	
		2. Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	**96,47**	**Dinas Pebdidikan**	
		3. Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	**94,24**	**Dinas Pebdidikan**	
		4. Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	**60,45**	**Dinas Pebdidikan**	
		5. Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah	**49,24**	**Dinas**	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Menengah Pertama dalam Kondisi Baik		**Pebdidikan**	
2	**Kesehatan**	1. Persentase kematian ibu	**0,084**	**Dinas Kesehatan**	
		2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**6,74**	**Dinas Kesehatan**	
		3. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	**83,43**	**Dinas Kesehatan**	
		4. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	**88,97**	**Dinas Kesehatan**	
		5. Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	**85,92**	**Dinas Kesehatan**	
		6. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	**99,05**	**Dinas Kesehatan**	
		7. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	**87,47**	**Dinas Kesehatan**	
		8. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	**68,20**	**Dinas Kesehatan**	
		9. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	**83,79**	**Dinas Kesehatan**	
		10. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	**100**	**Dinas Kesehatan**	
		11. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	**100**	**Dinas Kesehatan**	
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	**100**	**Dinas Kesehatan**	
		13. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	**100**	**Dinas Kesehatan**	
		14. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	**100**	**Dinas Kesehatan**	
3	**Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	1. Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	**31,02**	**Dinas PUTR**	
		2. Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	**87,28**	**Dinas PUTR**	
		3. Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan	**95,43**	**Dinas PUTR**	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota			
		4. Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	**83,65**	**Dinas PUTR**	
		5. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	**99,70**	**Dinas PUTR**	
		6. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	**0**	**Dinas PUTR**	
		7. Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	**100**	**Dinas PUTR**	
		8. Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	**70,83**	**Dinas PUTR**	
		9. Persentase Tenaga Operator /Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	**76,93**	**Dinas PUTR**	
		10. Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	**35,71**	**Dinas PUTR**	
4	**Perumahan Rakyat**	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten / Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	**100**	**Dinas DPKPP**	
		2. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	**100**	**Dinas DPKPP**	
		3. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	**0,56**	**Dinas DPKPP**	
		4. Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	**100**	**Dinas DPKPP**	
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	1. Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	**100**	**Sat Pol PP**	
		2. Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	**100**	**Sat Pol PP**	
		3. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	**100**	**BPBD**	
		4. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh	**100**	**BPBD**	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
		5. Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**100**	**BPBD**	
		6. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	**88,46**	**Damkar**	
6	**Sosial**	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	**100**	**Dinas Sosial**	
		2. Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	**100**	**Dinas Sosial**	
		3. Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	**100**	**Dinas Sosial**	
		4. Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	**100**	**Dinas Sosial**	
		5. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten /Kota	**100**	**Dinas Sosial**	
		6. Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	**0,29**	**Dinas Sosial**	
7	**Tenaga Kerja**	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	**0**	**Disnaker trans**	
		2. Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	**5**	**Disnaker trans**	
		3. Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	**99,69**	**Disnaker trans**	
8	**Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak**	1. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	**100**	**DPPKBP3A**	
		2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	**100**	**DPPKBP3A**	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3.		**DPPKBP3A**	
9	**Pangan (2.c)**	1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	**128,97**	**Dinas DPKP**	
10	**Pertanahan (2.d.1)**	1. Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	**3,16**	**Dinas DPKPP**	
		2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	**99,37**	**Dinas DPKPP**	
		3. Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	**27,27**	**Dinas DPKPP**	
11	**Lingkungan Hidup (2.e.1)**	1. Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**72,22**	**DLHK**	
		2. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	**43.03**	**DLHK**	
12	**Administrasi kependudukan (2.f.1)**	1. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	**96,11**	**DISDUKCAPIL**	
		2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	**60,69**	**DISDUKCAPIL**	
		3. Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	**100**	**DISDUKCAPIL**	
		4. Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	**98.50**	**DISDUKCAPIL**	
		5. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	**100**	**DISDUKCAPIL**	
		6. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	**99,24**	**DISDUKCAPIL**	
		7. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	**100**	**DISDUKCAPIL**	
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2.g.1)**	1. Persentase pengentasan desa tertinggal	**0**	**Dinas PMD**	
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	**0**	**Dinas PMD**	
		3. Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	**78,15**	**Dinas PMD**	
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.(2.h.1)**	TFR (Angka Kelahiran Total)		**DPPKBP3A**	
		1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	**101**	**DPPKBP3A**	
		2. Angka Prevalensi Kontrasepsi	**74**	**DPPKBP3A**	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)			
		3. Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	**80,17**	**DPPKBP3A**	
15	**Perhubungan (2.i.1)**	1. Konektivitas kabupaten	**0,55**	**Dinas Perhubungan**	
		2. V/C Ratio di jalan kab/kota	**0,10**	**Dinas Perhubungan**	
		3. Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	**0**	**Dinas Perhubungan**	
16	**Komunikasi dan Informatika (2.j.1)**	1. Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	**100**	**Diskominfo Sanditik**	
		2. Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	**100**	**Diskominfo Sanditik**	
		3. Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**97,44**	**Diskominfo Sanditik**	
17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.(2.k.1)**	1. Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	**38,13**	**DKPP**	
		2. Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	**23,07**	**DKPP**	
18	**Penanaman Modal (2.l.1)**	1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	**48,32**	**DPMPTSP**	
		2. Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	**137,99**	**DPMPTSP**	
19	**Kepemudaan dan Olah Raga (2.m.1)**	1. Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	**134,8**	**Disparbud pora**	
		2. Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	**23,37**	**Disparbud pora**	
		3. Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	**38,16**	**Disparbud pora**	
		4. Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	**77,72**	**Disparbud pora**	
20	**Statistik 2.n.**	1. Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan	**100**	**Diskominfo Sanditik**	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kesepakatan Forum Satu Data Daerah			
21	**Persandian 2.o**	1. Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	**63,07**	**Diskominfo Sanditik**	
22	**Kebudayaan (2.p.1)**	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	**35,09**	**Disparbud pora**	
		2. Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	**-14,82**	**Disparbud pora**	
23	**Perpustakaan (2.q.1)**	1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	**61,46**	**Dinas Arpus**	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	**8,78**	**Dinas Arpus**	
24	**Kearsipan (2.r)**	1. Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	**77,33**	**Dinas Arpus**	
25	**Perikanan (3.a.1)**	1. Persentase Produksi perikanan tangkap dan budidaya	**100,01**	**Disperta**	
		2. Angka Konsumsi Ikan	**16,00**	**Disperta**	
26	**Pariwisata (3.b.1)**	1. Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	**0,16**	**Disparbud pora**	
		2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	**-17,05**	**Disparbud pora**	
		3. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	**-4,13**	**Disparbud pora**	
27	**Pertanian (3.c.1)**	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	**-3,08**	**DPKP**	
		2. Persentase peningkatan produksi hortikultura	**3,96**	**DPKP**	
		3. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	**4,47**	**Peternakan**	
		4. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	**100**	**Peternakan**	
28	**Perdagangan (3,f,1)**	1. Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	**105,26**	**DKPP**	
29	**Perindustrian (3.g.1)**	1. Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk	**65**	**DKPP**	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota			
		2. Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	**18,99**		
		3. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	**68,18**		
		4. Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	**26,09**		

Sumber data . Pemerintah Daerah Kab Sumedang di olah dalam Aplikasi SI-LPPD Kemendagri RI

b. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 2025

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	**Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) (4.a)**	1. Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	**100**	**Baperivda**	
31	**Pemerintahan Bidang Keuangan (4.b.1)**	1. Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	**33,75**	**BKAD**	
		2. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	**22,69**	**BKAD**	
		3. Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	**61,36**	**BKAD**	
		4. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	**3,23**	**BKAD**	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	**Pemerintahan Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.c**	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	**51,62**	**BKPSDM**	
33	**Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan 4.d**	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	**100**	**Baperivda**	
34	**Pemerintahan Bidang Pengawasan (4.e.1)- (4.e.4)**	1. Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	**3**	**Inspetorat**	
		2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	**3**	**Inspetorat**	
		3. Manajemen Risiko Indeks	**3**	**Inspetorat**	
		4. Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	**82,61**		
35	**Urusan Pemerintahan (Pengadaan) (4.f.1)**	1. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	**40**	**LPBJ Setda**	
		2. Pemanfaatan Sistem Pengadaan	**24,94**	**LPBJ Setda**	
		3. Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	**18**	**LPBJ Setda**	
36	**Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah (4,g,1)**	1. Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	**Tepat waktu**	**BKAD**	
		2. Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	**100**	**DPRD**	
37	**Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik (4.h)**				
		Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	**92,90**	**BKAD**	

Sumber data : Pemerintah Daerah Kab Sumedang di olah dalam Aplikasi SILPPD Kemendagri RI Tahun 2025

2.3 Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah menginformasikan capaian keberhasilan pemeintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur,sebagaimana yang dimuat dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

Informasi capaian akuntabilitas pemerintahan daerah memuat:

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja;
b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari capaian indicator Makro dan 18 Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU), hal tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui strategi, pengambilan kebijakan, program dan kegiatan serta berbagai praktek baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penggunaan sumber daya. Dari 24 Indikator Kinerja Utama terdapat 2 IKU yang belum terdapat rilis data dari instansi yang berwenang mengeluarkan rilis data tersebut sampai dengan terkhir laporan kinerja ini di susun, kedua IKU tersebut yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2025 sebanyak 15 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 7 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Realisasi dan Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Kepala Daerah Tahun 2025

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdayasaing yang didukung Teknologi Informasi Komunikasi	1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,00-9,10	8,92	98,56%
		2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,07-13,17	13,21	100,69%
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,40	75,70	100,40%
3	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlndungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	4	Indeks Pembangunan Gender	Poin	95,29-96,16	96,19	100,49%
		5	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	71,77-73,43	-	Belum rilis
4	Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat	6	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	77,78	78,06	100,36%
5	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	47	-	Belum rilis
6	Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwasta, perindustrian dan perdagangan	8	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	8,04-9,23	8,07	100%
		9	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	Persen	6,37-8,28	7,34	100%
		10	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	Persen	3,48-5,15	4,88	100%
		11	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	Persen	9,44-10,13	9,27	94,74%
7	Meningkatnya infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah	12	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin	83,17	81,98	98,57%
8	Meningkatnya iklim investasi daerah	13	Persentase Peningkatan Penanaman Modal Di Kabupaten Sumedang	Persen	12	48,32	402,67%
9	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	14	Nilai komposit FSVA	Persen	67,21	62,85	93,51%
10	Meningkatnya kesejahteraan sosial	15	PDRB Per Kapita (ADHB)	(Juta Rupiah)	38,18-40,24	42,65	108,77%
11	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing	16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,75-5,94	6,08	100%
12	Meningkatnya perekonomian perdesaan	17	Indeks Desa Membangun	Poin	0,80	0,8389	104,86%
13	Meningkatnya ketahanan daerah	18	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,54	0,53	98,15%
14	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	66,96	72,34	108,03%
15	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN	20	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	71	85,76	120,78%
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	21	Nilai Sakip Kabupaten (Kategori	Skor	A (82)	BB(78,79)	96,08%
		22	Nilai LPPD Kabupaten	Skor	3,78	3,6466	96,47%
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan public	23	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,72	4,72	100%
18	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	24	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,35	4,63	106,44%

Dari perjanjian kinerja Kepala Daerah diatas terdapat penentuan target yang menggunakan metode Rentang Target sehingga rumus perhitungan yang digunakan perlu disesuaikan kerangka pengukuran capaian kinerja Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \; x \; 100\%$$

c. Rumus Capaian Realisasi dengan menggunakan Rentang Target

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja dengan realisasi di bawah rentang minimum atau di atas rentang maximum maka harus menghitung terlebih dahulu target tengah yang akan digunakan sebagai pembagi terhadap realisasi, sebagai berikut :

$$\text{Target Tengah} = \frac{\text{Rentang Maximum} + \text{Rentang Minimum}}{2}$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Tengah}} \text{ X } 100\%$$

dan bila realisasi berada diantara rentang target minimum dan rentang target maximum, maka realisasi langsung di hitung 100%.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

SASARAN 1

Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing yang didukung Teknologi Informasi Komunikasi

INDIKATOR

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Menurut Badan Pusat Statistik Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata tahun yang dihabiskan penduduk (usia 15+ atau 25+ tergantung survei) dalam pendidikan formal untuk Kabupaten Sumedang sendiri data yg digunakan dari usia 15+. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Tahun 2025 capaian kinerja Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sumedang yaitu 98,56% dengan kriteria sangat tinggi dari rentang target 9,00 – 9,10 tahun dengan realisasi kinerja 8,92 tahun, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 0,18 tahun dari target 8,74, begitupun dengan capaian kinerja terdapat kenaikan dari tahun 2024 sebesar 0,25%.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPD dengan target 9,06 tahun, capaian kinerjanya sudah mencapai 98,45%, kemudian Rata-rata Lama Sekolah Nasional terealisasi 9,07 tahun dan provinsi terealisasi 9,14 tahun, sehingga perbandingan realisasi dengan skala nasional RLS Kabupaten Sumedang lebih rendah -0,15 tahun, serta lebih rendah -0,22 tahun bila dibandingkan dengan realisasi provinsi.

Grafik 2.7
Tren Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang

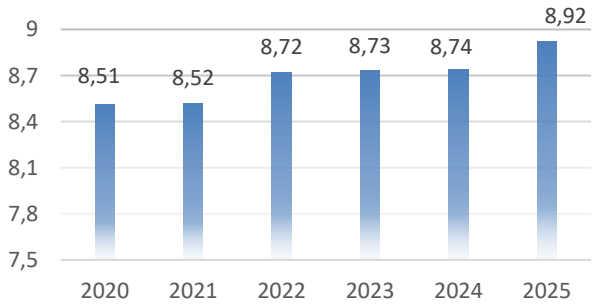

Dari grafik tersebut dapat diketahui realisasi kinerja Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun menunjukan tren yang positif, dimana dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 terus menerus mengalami kenaikan, hal ini menjadi pendorong untuk Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di tahun berikutnya, capaian kinerja ini dipengaruhi oleh tingkat partisipasi warga negara dalam menyelesaikan dan melanjutkan pendidikan, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tingkat partisipasi warga negara Usia 7-12 tahun dalam pendidikan SD untuk Kabupaten Sumedang mencapai 99,87%, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan SMP 97,66%, tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun sebesar 86,28%, tingkat partisipasi warga negara usia 19-23 tahun sebesar 24,18%. Adapun permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan tingkat partisipasi warga negara dalam menyelesaikan dan

melanjutkan pendidikan antara lain :

1. Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Pendidikan, belum maksimalnya akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat seperti Masih terdapat sekolah yang belum terdata pada sistem Dapodik, terutama sekolah baru sehingga layanan pendidikan belum terjangkau dengan baik
2. Biaya Pendidikan dan Dukungan Finansial, Walaupun ada program bantuan pendidikan, biaya pendidikan masih menjadi hambatan khususnya untuk keluarga kurang mampu dan untuk warga berusia 22 tahun ke atas yang ingin melanjutkan pendidikan. Ketidakhadiran bantuan pendidikan untuk kelompok usia ini dapat menyebabkan banyak orang dewasa tidak dapat kembali ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hal ini terlihat dari hasil yang dirilis BPS untuk tingkat partisipasi warga negara usia 19-23 tahun yang hanya sebesar 24,18%.
3. Ketimpangan Pembangunan Wilayah, Tantangan seperti disparitas antara daerah kota dan pedesaan**,** termasuk akses layanan pendidikan yang merata, tetap menjadi penghambat bagi partisipasi warga. Wilayah yang kurang berkembang cenderung memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik
4. Partisipasi Pendidikan Kesetaraan Masih Perlu Ditingkatkan, Walaupun tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan (kejar paket) relatif tinggi, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sumedang masih di bawah target nasional dan provinsi. Ini mengindikasikan bahwa masih ada sejumlah anak atau remaja yang tidak mampu bertahan sampai selesai jenjang pendidikan formal/alternatif.
5. Faktor Sosial-Ekonomi dan Motivasi Individu, Faktor ekonomi keluarga yang rendah masih menjadi salah satu pendorong rendahnya motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan, selain motivasi belajar dan dukungan lingkungan.

Selain faktor yang mempengaruhi yang terkait dengan tingkat partisipasi warga negara dalam pendidikan, rata-rata lama sekolah juga ditunjang oleh pengembangan layanan perpustakaan elektronik dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Managemen) dan jejaring perpustakaan, pengembangan perpustakaan standar nasional, terkelolanya dan pengembangan bahan perpustakaan, tersusunnya data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan, keterlibatan satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi, pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi walaupun langkah –

langkah ini belum bisa sepenuhnya menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, berikut langkah-langkah alternative/solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, antara lain :

1. Peningkatan Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong pendataan sekolah yang belum terdata di Dapodik, termasuk pemberdayaan pengawas dan penilik agar semua sekolah di Sumedang tersentuh program perencanaan dan anggaran pendidikan.
2. Kebijakan Zonasi dan Akses Sekolah, seperti halnya kabupaten/kota lain Pemerintah Kabupaten Sumedang juga menerapkan sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) bertujuan untuk memudahkan anak masuk sekolah lebih dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga dapat mengurangi hambatan akses pendidikan.
3. Bantuan Pendidikan dan Dukungan Operasional, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyediakan berbagai bantuan pendidikan, seperti: Bantuan insentif untuk guru PAUD, bantuan untuk pendidikan kesetaraan berupa perlengkapan sekolah, serta bantuan TIK smart boot.
4. Meningkatkan Partisipasi, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah merumuskan strategi jangka panjang untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama pada pendidikan non-formal dan kesetaraan, termasuk pendataan siswa yang belum sekolah, sosialisasi pentingnya pendidikan, dan peningkatan layanan.
5. Kebijakan Pencegahan Putus Sekolah, Melalui Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan (No. 7 Tahun 2019), pemerintah melakukan:
    a. Pendataan anak putus sekolah;
    b. Sosialisasi dan motivasi kepada keluarga;
    c. Monitoring dan evaluasi pendidikan;
    d. Perbaikan lingkungan sekolah dan fasilitas;
    e. Kerja sama dengan lembaga pendidikan lain.
6. Pembangunan Sekolah Rakyat (Bagi Warga Tidak Mampu), Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan pembiayaan yang cukup besar program pembangunan “Sekolah Rakyat” di Desa Mekarasih, Jatigede, dengan kapasitas besar dan fasilitas lengkap juga direncanakan untuk memperluas peluang pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
7. Program **Bebas SPP** untuk siswa tidak mampu dengan total anggaran yang tersedia untuk program bebas SPP sebesar Rp.145.522.210.000,- yang dibagi menjadi Rp.93.382.230.000,- untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dengan sasaran 100.411 peserta

didik, dan Rp. 52.139.980.000,- untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan sasaran 47.280 peserta didik.

Dalam upaya pencapaian kinerja tidak lepas dari pelaksanaan program-program kinerja, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor, antara lain :

Gambar 2.1

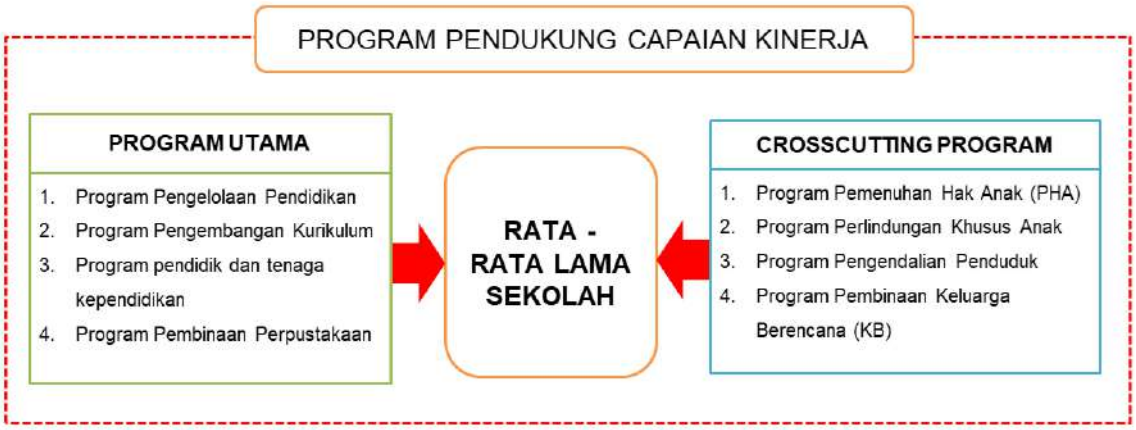

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah antara lain program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan dan program pembinaan perpustakaan dengan total pagu anggaran Rp.234,787,361,555.00 terealisasi Rp.215,541,835,489.00 atau 91,76%. Sementara untuk efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat dihitung karena capaian kinerja dibawah 100 persen. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	234,787,361,555.00	215,541,835,489.00	91.80
Program Pengembangan Kurikulum	250,000,000.00	172,345,400.00	68.94
Program pendidik dan tenaga kependidikan	100,000,000.00	46,300,000.00	46.30
Program Pembinaan Perpustakaan	33,294,200.00	33,094,200.00	99.40
Jumlah	**235,170,655,755.00**	**215,793,575,089.00**	**91.76**

Sumber : Laporan Realsiasi Anggaran (LRA) Tahun 2025

SASARAN 1

Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing yang didukung Teknologi Informasi Komunikasi

INDIKATOR

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah perkiraan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu (biasanya usia 7 tahun), Harapan Lama Sekolah menggambarkan berapa lama rata-rata anak yang baru masuk sekolah akan bersekolah di masa depan, mulai dari SD hingga jenjang pendidikan tertinggi yang mungkin dicapai.

Dari info grafis diatas diketahui bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistikuntuk angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 sebesar 13,21 tahun dengan capaian kinerja 100,69% (melebihi target) dengan kriteria kinerja sangat tinggi dari yang ditetapkan 13,07–13,17 tahun, bila dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi tahun 2025 lebih tinggi 0,19 tahun begitupun dengan capaian kinerja tahun 2025 lebih tinggi 1,00% dibanding tahun 2024.

Grafik 2.8
Tren Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Sumedang

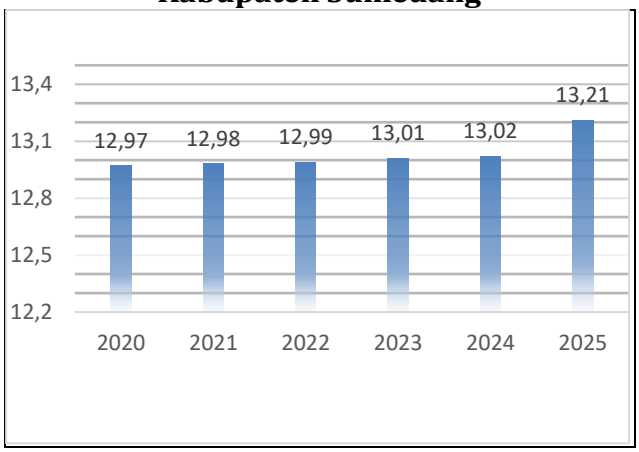

Dari tabel 3.2 Tren HLS dapat diketahui realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun menunjukan tren yang positif, dimana dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 berada pada tren positif. Dilihat dari perspektif Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dimana target akhir pada tahun 2026 ditetapkan target Harapan Lama Sekolah sebesar 13,08 Tahun, realisasi ditahun 2025 sudah melebihi target tahun 2026 dengan capaian kinerja terhadap target akhir RPD mencapai 100,99%, sehingga harus terdapat penyesuaian target untuk tahun 2026.

Gambar 2.2

Selanjutnya dari data yang di rilis BPS didapat realisasi HLS untuk tingkat nasional sebesar 13,30 tahun, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang lebih rendah -0,09 Tahun sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan realisasi 13,02 Tahun, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumedang lebih tinggi 0,19 Tahun.

Capaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 tidak terlepas dari faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan, beberapa faktor pendorong tercapainya Harapan Lama Sekolah ini antara lain :

1. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah dimana pada tahun 2025 RLS Kabupaten Sumedang sebesar 8,92 tahun meningkat dari tahun sebelumnya dari 8,74 tahun yang

ditandai dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok umur tertentu di Kabupaten Sumedang sebesar 99,87% dan 97,66%.

2. Perluasan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan melalui Kebijakan zonasi yang memudahkan akses sekolah, Peningkatan sarana dan prasarana, Pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah tertentu.
3. Bantuan Pendidikan dan Dukungan Operasional, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyediakan berbagai bantuan pendidikan, seperti: Bantuan insentif untuk guru PAUD, bantuan untuk pendidikan kesetaraan berupa perlengkapan sekolah, serta bantuan TIK smart boot.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memperluas akses, meningkatkan partisipasi, serta menekan angka putus sekolah telah berjalan efektif. Keberhasilan ini mencerminkan penguatan fondasi pembangunan sumber daya manusia dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan IPM daerah. Walaupun capaian kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) sudah tercapai terdapat hal-hal yang harus dipertahankan atau bahkan terus menerus ditingkatkan antara lain :

1. Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan, mendorong pendataan sekolah yang belum terdata di Dapodik, termasuk pemberdayaan pengawas dan penilik agar semua sekolah di Sumedang tersentuh program perencanaan dan anggaran pendidikan.
2. Kebijakan Zonasi dan Akses Sekolah, zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) bertujuan untuk memudahkan anak masuk sekolah lebih dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga dapat mengurangi hambatan akses pendidikan.
3. Bantuan Pendidikan dan Dukungan Operasional, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyediakan berbagai bantuan pendidikan, seperti: Bantuan insentif untuk guru PAUD, bantuan untuk pendidikan kesetaraan
4. Meningkatkan Partisipasi, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama pada pendidikan non-formal dan kesetaraan, termasuk pendataan siswa yang belum sekolah, sosialisasi pentingnya pendidikan, dan peningkatan layanan.
5. Penerapani Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan (No. 7 Tahun 2019), pemerintah melakukan : pendataan anak putus sekolah, Sosialisasi dan motivasi kepada keluarga, monitoring dan evaluasi pendidikan, perbaikan lingkungan sekolah dan fasilitas, Kerja sama dengan lembaga pendidikan lain.
6. Pembangunan Sekolah Rakyat (Bagi Warga Tidak Mampu), untuk memperluas peluang pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam upaya pencapaian kinerja tidak lepas dari pelaksanaan program-program kinerja, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program

Utama dan Program Lintas Sektor, antara lain:

Gambar 2.3

Adapun program yang mendukung pencapaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah antara lain program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan dan program pembinaan perpustakaan dengan total pagu anggaran Rp. 235,170,655,755.00 yang terealisasi Rp. 215,793,575,089.00 atau 91,76%. Terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya sebesar 8,24% atau Rp.19,377,080,666.00, dengan rincian penyerapan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Harapan Lama Sekolah Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Pendidikan	234,787,361,555.00	215,541,835,489.00	91,80
Program Pengembangan Kurikulum	250,000,000.00	172,345,400.00	68,94
Program pendidik dan tenaga kependidikan	100,000,000.00	46,300,000.00	46,30
Program Pembinaan Perpustakaan	33,294,200.00	33,094,200.00	99,40
Jumlah	**235,170,655,755.00**	**215,793,575,089.00**	**91.76**

Sumber : Laporan Realsiasi Anggaran (LRA) Tahun 2025

SASARAN 2

Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

INDIKATOR

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir. Angka Harapan Hidup Saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH juga sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara atau wilayah. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang tahun 2025 berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik adalah sebesar 75,70 tahun dengan capaian 100,40% dari target 75,40 tahun. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,11 tahun dari realsiasi tahun 2024 sebesar 75,29, sementara untuk capaian lebih rendah 2,29% dari capaian tahun 2024 sebesar 102,69%.

Grafik 2.9
Tren Angka Harapan Hidup
Kabupaten Sumedang

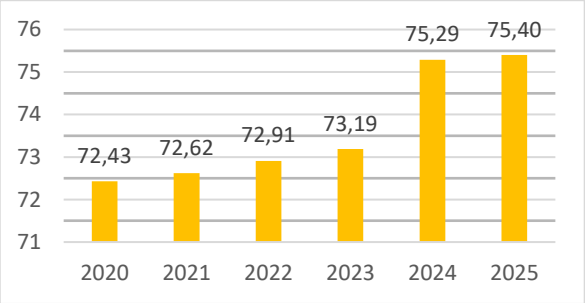

Dari grafik tren IKU diketahui bahwasannya realisasi kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun menunjukan tren yang positif, dimana dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 mengalami kenaikan secara terus menerus, hal ini mengidikasikan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPD dengan target 73,33-73,69 tahun yang sudah di sesuaikan pada RPJMD 2025-2029 menjadi 75,62 Tahun, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 99,71%. Dari data yang dirilis BPS untuk Angka Harapan Hidup untuk skala nasional sebesar 74,47 tahun dan untuk Provinsi Jawa Barat sebesar 75,53 tahun, dengan begitu Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sumedang lebih tinggi 1,23 Tahun dari AHH Nasional dan lebih rendah 0,17 tahun dari AHH Provinsi Jawa Barat.

Angka Harapan Hidup (AHH) tidak berdiri sendiri akan tetapi terdapat beberapa komponen pembentuk Angka Harapan Hidup tersebut, AHH dihitung berdasarkan tabel mortalitas (life table). Secara teknis, komponen utamanya adalah sebagai berikut:

1. Angka Kematian Menurut Kelompok Umur (Age Specific Mortality Rate). Risiko kematian pada kelompok umur tertentu (0–1 tahun, 1–4 tahun, 5–9 tahun, dst. Semakin rendah angka kematian pada setiap kelompok umur maka semakin tinggi AHH.
2. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka kematian bayi usia 0–11 bulan per 1.000 kelahiran hidup.
3. Angka Kematian Balita (AKABA), merupakan angka kematian anak usia di bawah 5 tahun, angka ini berkaitan dengan gizi, imunisasi, sanitasi dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
4. Angka Kematian Ibu (AKI), merupakan angka kematian ibu saat hamil, melahirkan, dan nifas.
5. Angka Kematian Dewasa, merupakan angka kematian terutama usia produktif (15–59 tahun).
6. Angka Kematian Lansia, dimana semakin baik pelayanan kesehatan lansia, maka semakin panjang usia hidup sehingga AHH akan naik.

AHH Kabupaten Sumedang Terus Naik hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan Pembangunan di bidang Kesehatan AHH Kabupaten Sumedang Tahun 2025

adalah 75,70 Tahun, upaya yang mendukung peningkatan AHH diantaranya tidak lepas dari capaian rata-rata tingkat capaian SPM bidang kesehatan yang berada di angka 96,45% pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Masyarakat yang sudah mencapai 94,11% prevelensi Stunting pada balita yang menurun ke angka 6,74%.

Kualitas penanganan kesehatan di Kabupaten Sumedang yang semakin meningkat juga tidak terlepas dari adanya ketersediaan program dan kegiatan yang tersedia baik di Dinas Kesehatan, maupun di Perangkat Daerah lainnya yang mendukung tercapainya pelaksanaan penanganan kesehatan dan ketersediaan sarana parasarana kesehatan di Kabupaten Sumedang, Penanganan Kesehatan didukung dengan sarana prasarana yang terdiri dari rumah sakit baik swasta maupun milik pemerintah, puskesmas, pelayanan klinik kesehatan dan sarana Kesehatan lainnya. Pada tabel 1.32 dapat dilihat fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang pada tahun 2025, sedangkan Tabel 1.33 menunjukkan jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2025.

Tabel 2.8
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumedang

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
RUMAH SAKIT		
1	RUMAH SAKIT UMUM	5
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	0
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA		
1	PUSKESMAS RAWAT INAP	17
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	18
3	PUSKESMAS PEMBANTU	65
SARANA PELAYANAN LAIN		
1	KLINIK PRATAMA	84
2	KLINIK UTAMA	14
3	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER	58
4	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI	18
5	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS	6
6	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN	235
7	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT	9
8	LABORATORIUM KESEHATAN	4
9	UNIT TRANSFUSI DARAH	1
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN		

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
1	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	0
2	PEDAGANG BESAR FARMASI	0
3	APOTEK	177
4	TOKO OBAT	2
5	TOKO ALKES	1

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tabel 2.9
Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang

NO	SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	ANGKA/NILAI			SATUAN
		L	P	L + P	
1	Jumlah Dokter Spesialis	122	113	235	Orang
2	Jumlah Dokter Umum	196	317	513	Orang
3	Rasio Dokter (spesialis+umum)			2,8	per 100.000 penduduk
4	Jumlah Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis	43	113	156	Orang
5	Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis)			**3,0**	per 100.000 penduduk
6	Jumlah Bidan		1122		Orang
7	Rasio Bidan per 100.000 penduduk		63,8		per 100.000 penduduk
8	Jumlah Perawat	437	1180	1617	Orang
9	Rasio Perawat per 100.000 penduduk			79,1	per 100.000 penduduk
10	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	46	62	108	Orang
11	Jumlah Tenaga Sanitasi	10	35	45	Orang
12	Jumlah Tenaga Gizi	4	60	64	Orang
13	Jumlah Tenaga Kefarmasian	111	462	573	Orang

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2025

Selain pelaksanaan penanganan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Kabupaten Sumedang juga berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan Pemerintah Pusat untuk berupaya mempercepat penurunan *stunting*. Mengacu pada *World Health Organization* (WHO), stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak di bawah umur 5 tahun (Balita) akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak yang terkena stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada di bawah standar, dan adanya gangguan terhadap keseluruhan tumbuh kembang anak seperti mudah sakit, gangguan pertumbuhan fisik dan metabolisme pada tubuh, serta di masa yang akan datang akan

mengalami kesulitan dalam kemampuan kognitif dan prestasi belajar.

Upaya kolaboratif untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Sumedang dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang mengamanatkan bahwa percepatan penurunan *stunting* harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, hingga desa. Angka Balita *stunting* di Kabupaten Sumedang sendiri, berdasarkan hasil bulan penimbangan balita tahun 2020 - 2025 balita Stunting di Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan pada bulan penimbangan Agustus 2025 dari 64,984 balita di ukur balita Stunting 4.621 balita atau 6,74 % ditahun 2025 dibanding tahun 2024 balita Stunting 7,32 %. Penurunan angka Stuting di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari hasil Kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah Pengampuh yang bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kader Posyandu serta Inovasi yang di kembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui teknologi digital yaitu menggunakan *Aplikasi E - Simpati* yang dapat memantau dan mecegah terjadinya balita Stunting di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan analisa masalah yang di input oleh kader posyandu melalui *Aplikasi E - Simpati* disamping itu sebagai implementasi dari hasil kajian *E - Simpati* dilaksanakan berbagai program, yaitu yang salah satu indikator kunci adalah *Zero New Stunting* dan pemberian *Smart Watch* untuk mengontrol kondisi kesehatan ibu hamil yang terhubung dengan *Aplikasi Sinurmi* (Sistem Informasi Kesehatan Remaja Putri dan Ibu Hamil) serta pemasangan *wiffi* gratis pada posyandu di setiap desa. Berikut tabel Proporsi Balita Sunting di Kabupaten Sumedang :

Grafik 2.9
Indeks Jumlah Balita Stunting 2025

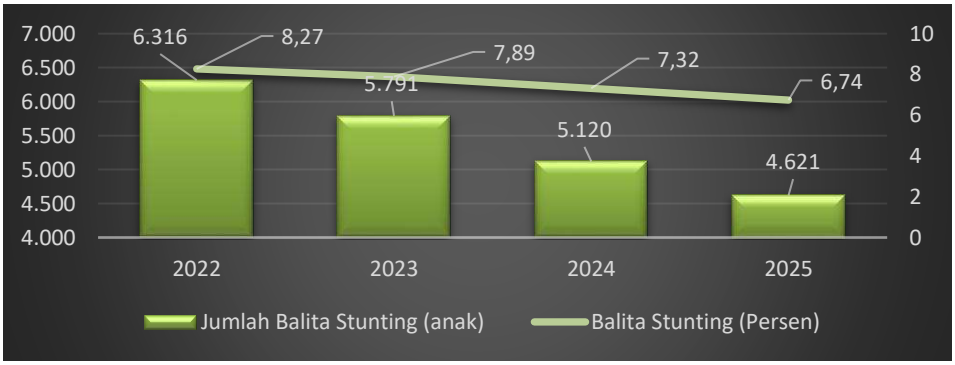

Sumber : Dinas Kesehatan Bulan Penimbangan Balita Tahun 2022-2025

Untuk meningkatkan pencegahan stunting di Kabupaten Sumedang, maka peran Posyandu yang didukung juga dengan peran PKK menjadi sangat penting. Pada Tahun 2025 Kabupaten Sumedang memiliki total 1.721 posyandu aktif yang tersebar di setiap

Desa/Kelurahan. Posyandu aktif adalah penambahan dari posyandu purnama dan mandiri.

Dengan penangana stunting yang baik dapat menekan kondisi anak bayi/balita, ibu hamil, ibu menyusui dengan kondisi gizi buruk sehingg dapat meningkatkan kondisi kesehatan anak dan ibu.

Selain itu terdapat upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menjadi faktor pendukung ketercapaian meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sumedang antara lain :

1. Optimalisasi akses Mutu Layanan Kesehatan yang meliputi Pelayanan Antenatal (ANC) Terpadu, optimalisasi Sistem Rujukan Terencana, optimalisasi Pelayanan Kegawatdaruratan (PONED/PONEK) yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terdapat keterlambatan penanganan gawat darurat di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rujukan (keterlambatan diagnosis, keterlambatan transportasi, atau keterlambatan penanganan di RS).
2. Memaksimalkan ketersediaan farmasi untuk stok obat-obatan esensial (seperti uterotonika untuk mencegah perdarahan) atau ketersediaan darah (bank darah).
3. Optimalisasi peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta khususnya untuk daerah terpencil.
4. Peningkatan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2025 yang sudah tercapai 74% dimana Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif sebanyak 1.722.195 PUS dari total jumlah Pasangan Usia Subur di Kabupaten Sumedang sebanyak 2.268.685 PUS.

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Kesehatan dan Dinas terkait lainnya telah melaksanakan berbagai alternatif pencegahan kematian ibu melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan sistem rujukan secara terintegrasi, diantaranya:

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin Sesuai Standar.
2. Penguatan Deteksi Dini Risiko Kehamilan dan Kegawatdaruratan Persalinan.
3. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP).
4. Penguatan Sistem Informasi Cegah Kematian Persalinan (SICAKEP).
5. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan.
6. Penguatan Koordinasi dan Manajemen Program Kesehatan Ibu.
7. Peningkatan Kesiapsiagaan Pelayanan Persalinan dan Rujukan.
8. Penguatan Kualitas Pelayanan Neonatal Esensial.
9. Penajaman Deteksi Dini Bayi Risiko Tinggi.

10. Optimalisasi Sistem Rujukan Neonatal yang Lebih Responsif.
11. Penguatan Edukasi Keluarga dan Masyarakat.
12. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Bayi.
13. Penguatan Kewaspadaan Dini dan Surveilans Kasus DBD.
14. Peningkatan Kualitas Penatalaksanaan Kasus DBD di Fasilitas Kesehatan.
15. Optimalisasi Sistem Rujukan Kasus DBD.
16. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penanganan DBD.
17. Penguatan Edukasi dan Kewaspadaan Masyarakat terhadap DBD.
18. Pemanfaatan Data sebagai Dasar Evaluasi dan Penajaman Intervensi DBD.
19. Peningkatan pemahaman Anak Sekolah Tingkat SLTP terhadap Kebijakan Pembangunan Kependudukan.
20. Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa dengan pendataan keluarga sebanyak 73.596 KK dari 440.057 KK.
21. Mendorong Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif.

Dalam upaya pencapaian kinerja tidak lepas dari pelaksanaan program-program kinerja, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor, antara lain:

Gambar 2.4

Program yang mendukung capaian kinerja AHH tahun 2025 terdiri dari 6 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 141,905,752,557.00, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 138,494,455,603.00 dengan capaian realisasi anggaran 97,60 % dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Angka Harapan

Hidup tahun 2025 sebesar 2,77% atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 3,411,296,954.00

Tabel 2.10
Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Angka Harapan Hidup Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	127,487,867,557.00	124,463,023,817.00	97.63
Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	1,669,016,000.00	1,642,883,600.00	98.43
Program Sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman	824,775,000.00	699,241,750.00	84.78
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	453,000,000.00	445,063,350.00	98.25
Program Pengendalian Penduduk	769,541,000.00	724,340,242.00	94.13
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10,701,553,000.00	10,519,902,844.00	98.30
Program Sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman	824,775,000.00	699,241,750.00	84.78
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	453,000,000.00	445,063,350.00	98.25
Jumlah	**141,905,752,557.00**	**138,494,455,603.00**	**97.60**

Sumber : Laporan Realsiasi Anggaran (LRA) Tahun 2025

SASARAN 8

Meningkatnya Akses dan Kualitas Hidup, Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Kesetaraan Gender

INDIKATOR

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, yang dilihat dari tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

IPG merupakan pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disesuaikan untuk membandingkan capaian antara penduduk laki-laki dan perempuan,

sehingga dapat menggambarkan sejauh mana kesetaraan gender dalam pembangunan suatu wilayah.

IPG dihitung berdasarkan perbandingan capaian laki-laki dan perempuan pada:

1. Dimensi Kesehatan, diukur melalui angka harapan hidup
2. Dimensi Pendidikan, diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
3. Dimensi Standar Hidup Layak, diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Target kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2025 berada pada rentang target 95,29-96,16 persen dan berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang terealisasinya 96,19 poin dengan capaian kinerja sebesar 100,49% (kinerja sangat tinggi). Realisasi dan capaian ini naik 0,64 Poin dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2024 realisasinya 95,55 Poin, begitupula dengan capaian kinerjanya naik lebih tinggi 0,49% dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 2.11
Tren Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Sumedang

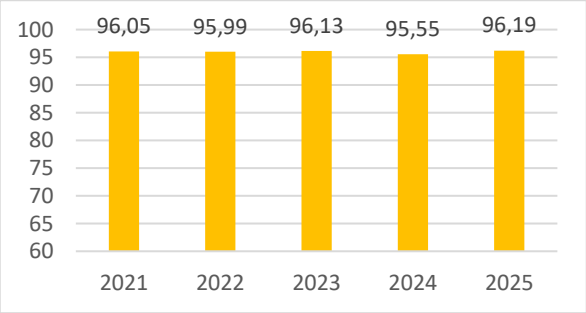

Dari grafik tren IKU diketahui perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumedang selama periode 5 tahun mengalami pertumbuhan yang relative stabil, dimana pada tahun 2021 realisasinya sebesar 96,05 poin, kemudian pada tahun 2022 turun ke 95,99 poin, dan kembali naik pada tahun

2023 sebesar ke 96,13 poin dan kembali turun pada tahun 2024 ke 95,55 poin dan pada tahun 2025 naik menjadi 96,19 poin.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 diketahui target akhir laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yaitu berada pada rentang target 95,38-96,69 poin, sehingga apabila dibandingan dengan realisasi pada tahun 2025, maka capaian terhadap target akhir RPD sudah mencapai 100% karena berada diantara rentang target.

Sementara itu untuk Indeks Pembangunan Gender secara perhitungan nasional belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik sehingga belum bisa dibandingkan, untuk provinsi Jawa Barat sendiri Indeks Pembangunan Gender berdasarkan rilis data dari BPS mencapai 91,26 poin, maka untuk realisasi IPG Kabupaten Sumedang berada lebih tinggi 4,93 poin dari realisasi IPG skala Provinsi Jawa Barat.

Dari keberhasilan Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2025 tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab yang mendukung keberhasilannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Partisipasi Pendidikan Perempuan, meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan formal maupun nonformal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan. Hal ini ditunjukkan meningkatnya rata-rata lama sekolah perempuan, dimana rata-rata lama sekolah untuk perempuan di Kabupaten Sumedang tahun 2025 berdasarkan data dari BPS sebesar 8,76 tahun dan untuk laki-laki 9,08 tahun, sehingga bisa dikatakan perbandingan RLS perempuan dan RLS laki-laki di Kabupaten Sumedang kesenjangan partisipasi pendidikannya cukup seimbang, yang berarti terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Angka tersebut ditunjang melalui program perempuan sekolah perempuan jawa barat (Sekobar) sebanyak 160.000 orang dari jumlah populasi perempuan usia produktif sebanyak 228.028 orang.
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Perempuan, perbaikan layanan kesehatan, khususnya bagi perempuan, turut mendorong peningkatan IPG, antara lain melalui :
    a. Optimalisasi akses Mutu Layanan Kesehatan yang meliputi Pelayanan Antenatal (ANC) Terpadu, optimalisasi Sistem Rujukan Terencana, optimalisasi Pelayanan Kegawatdaruratan (PONED/PONEK) yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terdapat keterlambatan penanganan gawat darurat di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rujukan

(keterlambatan diagnosis, keterlambatan transportasi, atau keterlambatan penanganan di RS).

b. Memaksimalkan ketersediaan farmasi untuk stok obat-obatan esensial (seperti uterotonika untuk mencegah perdarahan) atau ketersediaan darah (bank darah).
c. Optimalisasi peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta khususnya untuk daerah terpencil.
d. Peningkatan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2025 yang sudah tercapai 74% dimana Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif sebanyak 1.722.195 PUS dari total jumlah Pasangan Usia Subur di Kabupaten Sumedang sebanyak 2.268.685 PUS.

3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi memberikan kontribusi terhadap peningkatan standar hidup layak, Pemerintah Kabupaten Sumedang telak mendorong tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi melalui peningkatan Persentase Keluarga Pra Sejahtera hal ini dimana pada tahun 2025 persentase keluarga pra sejahtera meningkat 2,78% yang di tunjang melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga diantaranya :
   a. Sosialisasi pelayanan PPKS/Sayagatra dan evaluasi pelayanan PPKS/Sayagatra sebanyak 20 orang dari 2 Kecamatan.
   b. Tersedianya Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Melalui Pengadaan BKB Kit Stunting sebanyak 13 Paket Untuk 13 UPTD.
   c. Terbinanya kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Grand Final Apresiasi Duta Genre Sebanyak 25 orang.
   d. Terlatihnya pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui workshop peningkatan keluarga sejahtera sebanyak 32 orang.
   e. Tersedianya biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) melalui pertemuan kelompok Tribina dan UPPKA sebanyak 30 orang 6 kali Pertemuan 3 Kelompok UPPKA.

f. Terbinanya mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS melalui peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan kelompok ketahanan TRIBINA (BKB,BKR,BKL dan PIKR) Sebanyak 26 orang.
g. Terpantaunya data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) melalui pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran beresiko stunting oleh tenaga pendamping keluarga sebanyak 2664 Orang.
h. Terdampinginya keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) oleh tim pendamping keluarga sebanyak 888 tim.

4. Implementasi kebijakan dan pengarusutamaan Gender (PUG), komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan menjadi faktor kunci, antara lain:
   a. Implementasi kebijakan responsif gender melalui advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG melalui bimtek PUG dan PPRG Sebanyak 35 Orang;
   b. Rakor Forum Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sebanyak 70 Orang.
   c. Peningkatan Kapasitas Pengelola Puspaga dan Sayagatra Sebanyak 50 Orang.
5. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, adanya kebijakan dan program perlindungan sosial memberikan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, antara lain:
   a. Terlayaninya Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban kekerasan Melalui Pelayanan Klien PPA Sebanyak 6 Orang.
   b. Terbinanya Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Melalui Peningkatan Kapasitas Pengurus Satgas dan Tim Paredi Cekas Sebanyak 55 Orang.
   c. Teradvokasinya Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Melalui Peningkatan Kapasitas Tim Peri Langit Sebanyak 355 Orang.
   d. Terlayaninya Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Melalui Pembinaan Forum Anak Sebanyak 40 Orang dan

Penyebarluasan Informasi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak (PATBM) Sebanyak 30 Orang.

Keberhasilan peningkatan Indeks Pembangunan Gender dipengaruhi oleh sinergi berbagai faktor, terutama peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta dukungan kebijakan yang responsif gender. Upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan.

Dalam upaya pembangunan gender tidak luput dari pelaksanaan program-program yang menjadi alat dalam pencapaian target kinerja tersebut, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 2.5

Program utama yang mendukung Indeks Pembangunan Gender terdiri dari 6 program dengan total pagu anggaran Rp.1,945,008,000.00 terealisasi Rp.1,690,423,700.00 atau 86,91%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber sebesar 13,58% atau Rp. 254,584,300.00.

Tabel 2.11
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian KinerjaIndeks Pembangunan Gender Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	682,263,000.00	646,134,500.00	94.70
Program Perlindungan Perempuan	70,084,000.00	68,208,000.00	97.32

Program Peningkatan Kualitas Keluarga	487,559,000.00	277,721,000.00	56.96
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	131,847,000.00	129,273,000.00	98.05
Program Perlindungan Khusus Anak	558,502,000.00	554,344,200.00	99.26
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	14,753,000.00	14,743,000.00	99.93
JUMLAH	**1,945,008,000.00**	**1,690,423,700.00**	**86.91**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sumedang (diolah)

SASARAN 4

Meningkatnya Kualitas Keagamaan, Kebudayaan, dan Demokrasi Masyarakat

INDIKATOR

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/ menghargai perbedaan. Kesataraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktifbergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketiga indikator tadi antara lain adalah; pendidikan keluarga, implementasi kearifan lokal, pendapatan, heteronitas agama dan peran kementerian agama.

Tahun 2025 target kinerja "Indeks Kerukunan Umat Beragama" sebesar 77,78 poin dan teralisasi 78,06 poin atau capaian kinerja sebesar 100,36% (kategori kinerja sangat tinggi) kinerja melebihi target. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi IKUB naik sebesar 0,46 poin sementara untuk capaian kinerja lebih rendah -2,33% dari tahun 2024.

Gambar 2.6
Tren Indeks Kerukunan Umat Beragama

Dari tren IKU diketahui bahwasannya realisasi kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumedang masuk dalam kategori TINGGI dan dari tahun ke tahun menunjukan tren yang positif, dimana dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami kenaikan secara terus menerus, hal ini mengidikasikan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik Indeks Kerukunan Umat Beragama dibagi kedalam 3 (tiga) dimensi utama, yaitu dimensi toleransi, dimensi kesetaraan dan dimensi Kerjasama. Adapun rata-rata dari setiap dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.12
Skor tiap Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama
Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Skor
1	Toleransi	95,04
2	Kesetaraan	92,99
3	Kerjasama	53,72

1. Dimensi Toleransi didefinisikan sebagai sikap kesediaan menerima dan menghargai, pada dimensi toleransi hasil survey mendapatkan skor 95,04 dengan capaian ini menunjukan tingkat toleransi sangat tinggi, masyarakat Kabupaten Sumedang bisa saling mengghargai dan dapat menerima tetangga yang berbeda agama.
2. Dimensi Kesetaraan terkait dengan pandangan dan sikap hidup terhadap pemeluk agama lain dalam urusan hak dan kewajiban. pada dimensi kesetaraan hasil survey mendapatkan skor 92,99, hal ini menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Sumedang beranggapan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
3. Dimensi Kerjasama merupakan bentuk nyata dari hubungan sosial antar pemeluk yang menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan. pada dimensi kerjasama hasil survey mendapatkan 53,72 poin yang semula pada tahun 2024 terealisasi 52,13. Terjadi peningkatan pada dimensi kerjasama yang artinya kerjasama dalam paham keagamaan akan membawa pada rasa peduli dan saling tolong menolong, bahkan kerjasama dalam paham keagamaan akan membawa pada peningkatan dalam taraf pendidikan, dimana taraf pendidikan dapat berpengaruh terhadap sebuah kestaraan yang dilakukan secara kompak, searah dan sejalan.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, target tahun akhir IKUB adalah 76 poin dan realisasi pada tahun 2025 adalah 78,06 poin, sehingga capaian kinerja tahun akhir Rencana Pembangunan Daerah sudah terlampaui 1,60 Poin atau capaian terhadap target akhir RPD sebesar 102,71%. Bila dibandingakan dengan skala nasional, realisasi indeks kerukunan umat beragama Nasional tahun 2025 terealisasi sebesar 77,89 poin, sehingga realisasi IKUB Kabupaten Sumedang lebih tinggi 0,17 Poin, akan tetapi untuk Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi yang bersumber dari kemenag.go.id. sampai dengan laporan ini di susun belum rilis sehingga belum bisa dibandingkan dengan realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumedang.

Adapun faktor-faktor yang mendukung dari keberhasilan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumedang tahun 2025 ditujukan untuk memetakan kerukunan umat

Bergama di Kabupaten Sumedang antara lain :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat yang diukur dengan Tingkat Cipta Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang tercapai 100%, hal ini di tunjang oleh :
   a. meningkatnya kualitas pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat dengan capaian kinerja 100% .
   b. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan capaian kinerja 100%.
   c. Meningkatnya Pemahaman dan Penguatan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan dengan capaian kinerja 100%.
   d. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan capaian kinerja 100%.
2. Tingkat Bina Demokratisasi dengan capaian kinerja sebesar 100% yang di tandai dengan Meningkatnya pemahaman Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah melalui peningkatan peran parpol yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan capaian kinerja 100%.
3. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada target tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 100%, Capaian 100% didukung oleh terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman , tertib, teratur dan tentram ditandai dengan tercapainya presentase pelanggaran perda dan perkada yang ditangani sebesar 100%. Terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, teratur dan tentram dipengaruhi oleh menurunnya tingkat pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 2.6

4. Meningkatnya ketahanan budaya daerah dengan Cakupan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang tercapai 100% melalui Pengelolaan Terintegrasi 10 Unsur OPK dan Cagar Budaya, Kajian dan Revitalisasi Kawasan Sejarah, Sinergi Kelembagaan dan Komunitas Adat dan Pelestarian Berbasis Event.

Beberapa Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama pada tahun 2025 antara lain :

a. Meningkatkan komunikasi dan dialog dengan ormas untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas ormas, mengawasi aktivitas ormas secara bijaksana tanpa mengekang kebebasan berserikat, peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dan mitigasi konflik dengan penguatan kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak dan stakeholder, penguatan ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, pendataan jumlah penduduk pemeluk agama dan pendataan tempat ibadah, pemantauan orang asing beserta keluraganya sehingga memaksimalkan daya guna keberadaan Tenaga Kerja Asing dan memudahkan upaya deteksi dan antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Orang Asing di Kabupaten Sumedang, pengelolaan cagar budaya yang telah ditetapkan dengan adanya kegiatan penataan situs cagar budaya dan peningkatan peran partai politik.
b. Penyelesaian Tibumtranmas untuk penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksaan patroli, pengamanan dan pengawalan dan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan strategi pencegahan yang efektif dengan patroli rutin sebanyak 117 kali selama setahun, pengawasan dan pengendalian sebanyak 365 kali selama setahun dan penertiban (Media luar, ODMK, Anjal dan PKL) sebanyak 202 kali selama setahun.
c. Memfasilitasi berbagai ritual adat dan tradisi budaya sebagai upaya menjaga keberlangsungan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat melalui Upacara Adat dan Ritual dan Tradisi Kawasan.

d. Peningkatan kapasitas pelaku budaya dilakukan melalui pembinaan dan penguatan kelembagaan.
e. Pengamanan dan pengelolaan aset-aset sejarah daerah.

Dilihat dari realisasi dan capaian kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 yang telah melapui target akhir RPD sehingga diperlukan perbaikan target untuk tahun 2026 yaitu :

Gambar 2.7

Program yang mendukung ketercapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan realisasi Rp.13,129,074,366.00 dari pagu Rp.13,476,609,350.00 atau 97,42% dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar Rp.347,534,984.00,- atau 2,94% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.13
Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja IKUB Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	948,984,100	938,942,400.00	98.94
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,378,358,900	2,372,718,900.00	99.76

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	332,311,700	331,543,200.00	99.77
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	200,000,000	199,866,900.00	99.93
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3,441,085,850	3,168,438,658.00	92.08
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,320,456,800	4,267,882,908.00	98.78
Program Pengembangan Kebudayaan	1,364,068,500	1,360,187,900.00	99.72
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	491,343,500	489,493,500.00	99.62
Jumlah	**13,476,609,350.00**	**13,129,074,366.00**	**97.42**

Sumber : Laporan Realsiasi Anggaran (LRA) Tahun 2025

SASARAN 8

Meningkatnya Pengembangan Sektor Pertanian, Pariwasta, Perindustrian dan Perdagangan

INDIKATOR

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekatkepada pemakai akhir. Tingkat industri pengolahan dihitung dengan menggunakan indikator laju pertumbuhan sektor industri pengolahan, berikut capaian atas indikator laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dengan rumus perhitungan sebagai berikut PDRB Industri t-1 PDRB Industri t-1 x 100 %.

Target kinerja Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan tahun 2025 berada pada rentang target 8,04-9,03 persen dan berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Kabupaten Sumedang terealisasinya 8,07% dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kinerja sangat tinggi). Realisasi dan capaian ini melonjak naik 9,20% dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2024 realisasinya -1,13%, begitupula dengan capaian kinerjanya naik 100% dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 2.12
Tren Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Sumedang

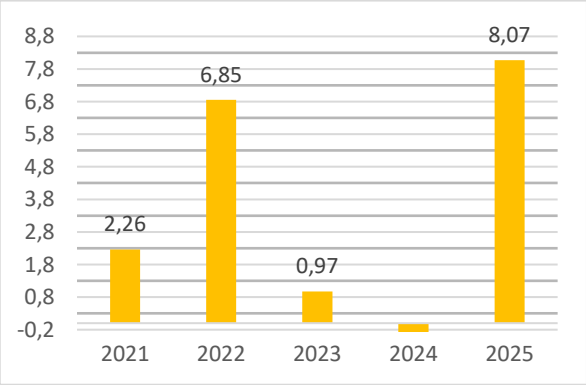

Dari grafik tren IKU diketahui perkembangan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Sumedang selama periode 5 tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dimana pasca pandemic covid-19 pada tahun 2021 berangsur tumbuh 2,26%, kemudian pada Tahun 2022 mengalami pertumbuhan 6,85%, akan tetapi pada tahun 2023 laju pertumbuhannya hanya sebesar 0,97% dan pada tahun 2024 terkoreksi minus 1,13%. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan berbagai upaya untuk kembali mendongkrak Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2025 dan berhasil menumbuhkan 8,07% laju pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 diketahui target akhir laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yaitu berada pada rentang target 8,23-10,61 persen, sehingga apabila dibandingan dengan realisasi pada tahun 2025, maka capaian terhadap target akhr RPD sudah mencapai 85,67%.

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Kabupaten Sumedang lebih tinggi 2,77% dari realisasi nasional dan telah berkontribusi terhadap industri pengolahan nasional maupun Jawa Barat dimana laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Indonesia pada tahun 2025 berdasarkan data dari BPS tumbuh 5,30%. Untuk provinsi Jawa Barat sendiri laju pertumbuhan sektor industri pengolahan data yang didapat dari BPS baru data untuk quartal III 2025 dengan realisasi 5,27%.

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan merupakan hasil interaksi berbagai faktor, menurut para pakar ekonomi pembangunan dan ekonomi industri, laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan ekonomi terutama ketersediaan bahan baku, investasi, teknologi, tenaga kerja, infrastruktur, permintaan pasar, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi secara umum. Apabila faktor-faktor tersebut dikelola dengan baik, maka sektor industri pengolahan dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Dari keberhasilan Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2025 sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri Nasional maupun Jawa Barat, tidak lepas dari faktor-faktor penyebab yang mendukung keberhasilnya di Kabupaten Sumedang, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam hal memastikan ketersediaan bahan baku telah berupaya sebaik mungkin dalam memastikan ketersediaan bahan baku untuk keperluan industri pengolahan baik itu untuk industri pengolahan pangan, maupun insdustri pengolahan barang. Untuk industri pengolahan pangan konsumsi melalui pengawasan bahan pangan kebutuhan pokok dan penting, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Peridustrian melakukan pegawasan ketersedian bahan baku dan juga harga. Dari laporan yang disampaikan oleh Dinas Koperasi UKMPP ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditunjang dengan kemudahan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat dimana masyarakat pelaku ekonomi mikro dan kecil dapat dengan mudah mendapatkan barang kebutuhan industrinya.

Keterjangkauan harga bahan baku yang relative stabil walaupun dibeberapa komoditas terjadi kenaikan tapi tidak terlalu signifikan akan tetapi masih pada batas normal. Untuk memastikan kemudahan aksesibilitas dan pengendalian harga tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan kegiatan oprasi pasar regular dan pasar khusus secara rutin.

2. Investasi menjadi faktor keberhasilan peningkatan laju pertumbuhan sektor industri pengoilahan dimana realisasi investasi pada tahun pada tahun 2025 berdasarkan pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) realisasi investasi di Kabupaten Sumedang mencapai Rp.5.630.137.589.895,-, terdapat peningkatan nilai investasi sebesar Rp.1.834.101.726.947,7,- dengan tingkat kenaikan sebesar 48,32% dari tahun sebelumnya, sehingga ini menjadikan faktor pendorong bagi laju pertumbuhan industri pengolahan yang ada di Kabupaten Sumedang.
3. Peningkatan unit usaha industri baru di Kabupaten Sumedang telah mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan jumlah Persentase pertumbuhan industri kecil 21,56%, hal ini menjadi penunjang meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2025.
4. Dari sisi teknologi, belajar dari tahun tahun sebelumnya bahwa penerpan teknologi industri baik berupa teknologi digital maupun mesin modern menjadi salah satu kendala yang dihadapi para pelaku usaha industri pengolahan di Kabupaten Sumedang, maka pada tahun 2025 Pmerintah Kabupaten Sumedang telah mendorong para pelaku usaha industri pengolahan untuk mau memanfaatkan teknologi dalam praktek usahanya, salah satu bentuknya melalui penyediaan sarana mesin pengemasan, sosialisasi pemasaran melalui market digital.
5. Tenaga kerja yang kompeten menjadi salah satu faktor pendukung lainnya dalam peningkatan laju industri pengolahan, oleh karena itu dalam upayanya Pemerintah Kabupaten Sumedang telah berupaya meningkatkan kompetensi warga masyarakat Kabupaten Sumedang untuk menjadi tenaga kerja yang kompenten, hal ini dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Sebanyak 340 Orang, meningkatkan kerjasama dengan sektor industri yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang, kerjasama dengan LPKS, Pemerataan pendidikan hingga ke daerah terpencil dan peningkatan kualitas sekolah vokasi.

6. Faktor pendukung ketersediaan insfrastruktur tidak kalah penting dari faktor-faktor lainya, sebagaimana diketahui pasca selesainya pembangunan jalan tol CISUMDAWU sangat membantu kelancaran transfortasi sebagai sarana pendukung bagi para pelaku industri dalam hal pendistribusian barang dan bahan industri, memudahkan menjadikan Kabupaten Sumedang, pasokan listrik dari waduk Jatigede Sumedang sejak September 2024 yang diresmikan oleh Presiden Prabowo pada Januari 2025, PLTA ini berkapasitas 2 x 55 Megawatt (MW), yang secara signifikan memperkuat pasokan listrik di wilayah Sumedang bahkan untuk wilayah Jawa-Bali menjadi pendukung utama bagi sektor industri pengolahan serta sumber daya air yang melimpah dengan begitu banyaknya sumber mata air baik sumber mata air tanah maupun permukaan di wilayah Kabupaten Sumedang menjadi aset penting bagi Kabupaten Sumedang untuk mendukung penigkatan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan.
7. Bertambahnya pelaku usaha yang menjadi eksportir untuk ekspor produk unggulan pada tahun 2025 terdapat 3 pelaku usaha, meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri terealisasi 80 persen dari target 80 persen yang ditunjang melalui pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri kepada 48 UMKM, serta terfasilitasinya UMKM yang memerlukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi sebanyak 48 UMKM.
8. Faktor pendukung selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah, dimana Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan penyusunan peta potensi investasi berdasarkan kondisi geografis serta pola ruang yang mengacu pada RTRW atau RDTR Kabupaten Sumedang. Upaya ini mencakup program pemberian insentif kepada pelaku usaha untuk mendorong peningkatan gairah investasi di wilayah Kabupaten Sumedang. Seluruh kegiatan tersebut didukung oleh berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum berinvestasi di Kabupaten Sumedang, antara lain Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2023, serta Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023. Serta pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha

Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dari faktor-faktor pendukung keberhasilan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan pada tahun berikutnya bisa dilaksanakan lebih baik lagi walaupun dengan segala keterbatasan dan kendala yang dihadapi.

Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan tidak luput dari pelaksanaan program-program yang menjadi alat dalam pencapaian target kinerja tersebut, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 2.9

Program utama yang mendukung Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terdiri dari 5 program dengan total pagu anggaran Rp. 2,649,347,859.00 terealisasi Rp. 2,536,959,959.00 atau 85.29%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber sebesar 4,24% atau Rp.112,387,900,-.

Tabel 2.14
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian KinerjaLaju Pertubuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	400,000,000	351,646,000.00	87.91
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50,000,000	34,560,000.00	69.12
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	122,285,500	120,646,300.00	98.66
Program Pengembangan UMKM	651,867,359	626,067,359.00	96.04
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1,425,195,000	1,404,040,300.00	98.52
JUMLAH	**2,649,347,859.00**	**2,536,959,959.00**	**95.76**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sumedang (diolah)

SASARAN 8

Meningkatnya Pengembangan Sektor Pertanian, Pariwasta, Perindustrian dan Perdagangan

INDIKATOR

Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor

Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor adalah ukuran yang menunjukkan persentase perubahan nilai tambah (output ekonomi) yang dihasilkan oleh sektor tersebut dalam suatu periode (biasanya tahunan atau triwulanan).

Laju pertumbuhan ini menggambarkan:

- Seberapa cepat aktivitas perdagangan (grosir & eceran) berkembang
- Perkembangan usaha perbaikan/servis kendaraan bermotor
- Dinamika konsumsi masyarakat dan distribusi barang

Secara konsep laju pertumbuhan dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ini, umumnya menggunakan harga konstan agar mencerminkan pertumbuhan riil (bukan karena inflasi).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian laju pertumbuhan sektor ini menunjukkan kondisi yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini

mengindikasikan bahwa aktivitas perdagangan dan jasa reparasi kendaraan mengalami penguatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Berikut gambaran rinci terkait Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor.

Target kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor tahun 2025 berada pada rentang target 6,37-8,28 persen dengan realisasinya 5.76% atau capaian kinerja sebesar 100% (kategori kinerja sangat tinggi). Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terdapat kenaikan lebih tinggi 1,58% sementara itu untuk capaian kinerja masih tetap tercapai 100%.

Grafik 2.13
Tren Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Kabupaten Sumedang

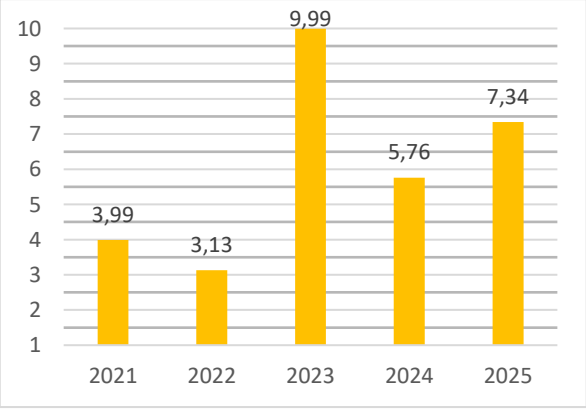

Dari grafik tren IKU diketahui perkembangan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor di Kabupaten Sumedang selama periode 5 tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dimana pasca pandemik covid-19 pada tahun 2021 berangsur tumbuh 3,99%, kemudian pada tahun 2022 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 ke 3,13%, kemudian pada tahun 2023 laju pertumbuhannya melonjak naik ke 9,99% dan terkoreksi kembali pada tahun 2024 ke

5,76%. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan berbagai upaya untuk kembali mendongkrak laju pertumbuhan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2025 dan berhasil menumbuhkan 7,34%.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 diketahui target akhir laju pertumbuhan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu berada pada rentang target 7,18-9,09 persen, sehingga apabila dibandingan dengan realisasi pada tahun 2025, maka capaian terhadap target akhir RPD sudah mencapai 100%.

Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Kabupaten Sumedang lebih tinggi 1,85% dari realisasi Nasional yang mana berdasarkan data dari BPS tumbuh 5,49%. Untuk provinsi Jawa Barat sendiri laju pertumbuhan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor belum di dapat data rilis dari BPS.

Beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatnya daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi daerah dan terkendalinya inflasi mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, yang berdampak langsung pada aktivitas perdagangan eceran. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan upaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi daerah dan terkendalinya inflasi mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga diantaranya yaitu :
    a. Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sebanyak 9 unit sarana distribusi perdagangan.
    b. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui pelaksanaan operasi pasar secara rutin untuk memastikan ketersediaan barang, memonitoring harga yang terintegrasi juga dengan Sistem Informasi Perdagangan.
    c. Melaksanakan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi.
2. Perkembangan sektor UMKM dan perdagangan lokal, bertumbuhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya di sektor ritel dan distribusi barang, turut memperkuat struktur perdagangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang menigkatkan pertumbuhan UMKM telah melakukan upaya antara lain :

a. Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi terhadap 15.312 unit usaha.
b. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil sebanyak 160 unit usaha.
c. Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri melalui pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri terhadap 48 UMKM.
d. Memfasilitasi UMKM yang memerlukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi sebanyak 48 UMKM.
e. Menyusun regulasi perencanaan dan pembangunan industri sebanyak 1 dokumen yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan arah pembangunan, mewujudkan perencanaan industri yang terarah dan terintegrasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing industri, mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah, menjamin keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan investasi dan iklim usaha, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan.

3. Kelancaran distribusi barang dan jasa, dukungan infrastruktur dan sistem logistik yang semakin baik mendorong efisiensi distribusi barang, baik antar wilayah maupun dalam daerah, hal ini dipengaruhi oleh kualitas dan ketersediaan infrastruktur transportasi, dimana kondisi jalan dan jembatan yang memadai akan memperlancar mobilitas barang antar wilayah. Sebaliknya, kerusakan infrastruktur dapat menyebabkan keterlambatan distribusi dan peningkatan biaya logistik. Maka untuk menjamin kualitas dan ketersediaan infrastruktur transfortasi Pemerintah Kabupaten Sumedang telah berupaya melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten dimana realisasi pada tahun 2025 untuk Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Sumedang sebesar 87,28% dari 811,318 KM terdapat 597,307 KM (73,62%) dalam kondisi “Baik”, 110,829KM (13,66%) dalam kondisi “Sedang”, 21,635 KM (2,67%) dalam kondisi “Rusak Ringan”, 81,548 KM (10,05%) dalam kondisi “Rusak Berat”.
4. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, peningkatan kepemilikan kendaraan berdampak pada meningkatnya kebutuhan jasa reparasi dan perawatan kendaraan. Dimana berdasarkan data yang dirilis oleh BPS jumlah kendaraan

bermotor di Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 berjumlah 329.851 unit meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 328.692 unit, hal ini seiring dengan peningkatan PDRB di Kabupaten Sumedang.

Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tidak luput dari pelaksanaan program-program yang menjadi alat dalam pencapaian target kinerja tersebut, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 2.10

Program utama yang mendukung Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terdiri dari 5 program dengan total pagu anggaran Rp.1,380,187,500,- yang terealisasi Rp.1,365,767,200,- atau 98,96%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber sebesar 1,04% atau sebesar Rp. 14,420,300,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.15
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian KinerjaLaju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	729,356,200.00	729,005,400.00	99.95
Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	226,355,700.00	216,199,200.00	95.51
Program Pengembangan Ekspor	292,599,400.00	289,673,400.00	99.00

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	24,616,300.00	24,616,300	100.00
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	107,259,900.00	106,272,900.00	99.08
JUMLAH	**1.728.409.000,00**	**1.684.325.415,00**	**97.45**

Sumber : LRA DKUKMPP (diolah)

SASARAN 8

Meningkatnya Pengembangan Sektor Pertanian, Pariwasta, Perindustrian dan Perdagangan

INDIKATOR

Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah indikator yang menunjukkan persentase perubahan nilai tambah (output ekonomi) yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam suatu periode tertentu (umumnya tahunan), yang diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Indikator ini mencerminkan tingkat perkembangan aktivitas ekonomi pada sektor primer yang meliputi:

1. Subsektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)
2. Subsektor kehutanan (pengelolaan hasil hutan dan jasa lingkungan)
3. Subsektor perikanan (perikanan tangkap dan budidaya).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut gambaran rinci terkait laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Target kinerja laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2025 berada pada rentang target 3,48-5,15 persen dengan realisasinya 4,88% atau capaian kinerja sebesar 100% (kategori kinerja sangat tinggi). Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terdapat penurunan -1,67% sementara itu untuk capaian kinerja masih tetap tercapai 100%.

Grafik 2.14
Tren Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan
Kabupaten Sumedang

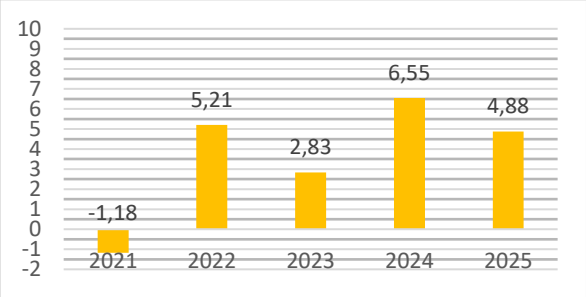

Dari grafik tren IKU diketahui perkembangan laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Sumedang selama periode 5 tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dimana pasca pandemik covid-19 pada tahun 2021 terkoreksi ke minus 1,18% untuk kemudian pada tahun 2022 tumbuh kembali ke 5,21% akan tetapi terkoreksi kembali pada tahun 2023 laju pertumbuhannya turun ke 2,83%, selanjutnya naik pada tahun 2024 ke 6,55%. Pada tahun 2025 laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kembali turun ke 4,88.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 diketahui target akhir laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu berada pada rentang target 3,69-5,35 persen, sehingga apabila dibandingan dengan realisasi pada

tahun 2025, maka capaian terhadap target akhir RPD sudah mencapai 100% karena berada pada rentang target 3,69-5,35 persen. Bila dibandingkan realisasi Nasional yang mana berdasarkan data dari BPS tumbuh 5,33% realisasi Kabupaten Sumedang lebih rendah 1,55%.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja ini antara lain:

1. Produksi komoditas pertanian Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan upaya dalam Peningkatan produksi komoditas pertanian dimana pada tahun 2025 peningkatan komoditas pertanian sebesar 0,80%, hal ini dipengaruhi oleh :
   a. Pelaksanaan pengawasan terhadap mekanisme distribusi dan pemanfaatan pupuk bersubsidi, benih unggul, dan alat mesin pertanian secara berkala.
   b. Penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) dilakukan secara selektif, berbasis data dan hasil verifikasi lapangan, sehingga intervensi sarana produksi tepat sasaran.
   c. Koordinasi yang efektif antara perangkat daerah, penyuluh pertanian lapangan (PPL), kecamatan, serta kelembagaan petani (poktan dan gapoktan) untuk memastikan bahwa sarana produksi dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
   d. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, hal ini dipengaruhi oleh :
      - Penyediaan benih bersertifikat tanaman pangan sebanyak 2 ton.
      - Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan, pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan, pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura.
      - Peningkatan produksi benih komoditas pertanian dengan persentase peningkatan produksi sebesar 5,67%, yang di dukung melalui penguatan kapasitas kelembagaan UPT dalam produksi, pemurnian, dan pengawasan mutu benih.
      - Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) yaitu sebesar 2,92 kali/tahun dan telah tercapai sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan. Hal ini tunjang oleh optimalisasi fungsi jaringan irigasi tersier, kuarter, dan sumber air permukaan maupun air tanah, perbaikan aksesibilitas lahan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani sebanyak 23 unit, rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani sebanyak 71 unit, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan mitigasi dampak perubahan

iklim dilakukan secara preventif dan responsive dengan persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sebesar 96,16% dengan jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan seluas 3755 Ha.

e. Pengembangan Kapasitas SDM dan kelembagaan yang di laksanakan melalui :
   - Peningkatan kapasitras kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa sebanyak 1.015 kelembagaan petani.
   - Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa dengan jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnyasebanyak 87 unit.
   - Pembentukan dan pengoperasian Sekolah Lapang Kelompok Tani yang sebanyak 305 unit.
   - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani sebanyak 1 unit.

2. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2025 dengan capaian kinerja 102,32% dari target skor 94,7 tercapai skor 96,90 yang ditunjang dengan ketersediaan Pangan Pokok sebesar 235,78 kg/kapita/tahun, penyediaan infrastrktur pendukung kemandirian pangan sebanyak 2 unit, peningkatan pola konsumsi pangan lokal non beras non terigu sebesar 29,18 kg/kapita/tahun, peningkatan pelaksanaan pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) sebesar 21,66 %, serta ditunjang oleh kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Daerah dan peningkatan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Teregistrasi.
3. Produksi Perikanan dan peternakan, produksi perikanan di Kabupaten Sumedang berdasarkan laporan dari Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2025 mencapai 10.746,01 ton sementara untuk produksi peternakan peningkatannya sebesar 4,38%. Capaian tersebut di tunjang oleh :
   a. Terbinanya nelayan kecil sebanyak 50 orang.
   b. Pengawasan terhadap 11 wiyah sumber daya kelautan dan perikanan diperairan umum.
   c. Terlatihnya kelompok pembudi daya ikan kecil sebanyak 10 kelompok.
   d. Tersedianya sarana pembudidayaan ikan sebanyak 20 unit.
   e. Pengawasan dan pengujian kualitas air di 26 kecamatan. serta
   f. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran

skala mikro dan kecil yang dilaksanakan melalui bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil terhadap 10 unit usaha.

g. Pengendalian dari Penyakit Menular Strategis, Pada Tahun 2025 telah terjadi wabah PMK, LSD dan sedikit Flu Burung di beberapa kecamatan yang menjangkit terhadap ternak sapi potong, dan unggas. Dari kejadian tersebut telah dilakukan upaya pengendalian PMK dan LSD dan Flu Brung dengan capaian kinerja 96,15%. wilayah yang telah dikendalikan yang di tunjang dengan tersedianya bahan-bahan berupa obat-obatan dan penunjang lainnya serta operasional untuk melakukan tindakan pengobatan terhadap ternak yang terjangkit PMK, pengawasan lalu lintas hewan yang masuk ke Kabupaten Sumedang, pengawasan dan pengendalian serta pencegahan di Pasar Hewan untuk mencegah masuknya ternak yang terjangkit PMK dan LSD, optimalisasi layanan kesehatan hewan penambahan tenaga teknis dokter hewan untuk melakukan tindakan pengendalian PMK serta pelaskanaan sosialisasi kepada peternak dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit.

Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak luput dari pelaksanaan program-program yang menjadi alat dalam pencapaian target kinerja tersebut, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 2.11

Program utama yang mendukung laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terdiri dari 9 program dengan total pagu anggaran Rp.22,919,947,067,-

yang terealisasi Rp. 22,028,970,460,- atau 96,11%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber sebesar 3,89% atau sebesar Rp. 890,976,607,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.16
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	220,000,000.00	213,008,770.00	96.82
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7,766,291,000.00	7,681,081,157.00	98.90
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	270,800,000.00	253,229,000.00	93.51
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	196,500,000.00	178,412,850.00	90.80
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,691,767,500.00	1,660,261,500.00	98.14
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	97,151,200.00	92,595,500.00	95.31
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6,347,603,900.00	5,788,387,242.00	91.19
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4,879,956,667.00	4,812,497,841.00	98.62
Program Penyuluhan Pertanian	1,449,876,800.00	1,349,496,600.00	93.08
JUMLAH	**22,919,947,067.00**	**22,028,970,460.00**	**96.11**

Sumber : LRA Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan (diolah)

SASARAN 8

Meningkatnya Pengembangan Sektor Pertanian, Pariwasta, Perindustrian dan Perdagangan

INDIKATOR

Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum

Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah indikator yang menunjukkan persentase perubahan nilai tambah (output ekonomi) yang dihasilkan oleh sektor penyediaan jasa akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman dalam suatu periode tertentu (umumnya tahunan), yang diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh sektor akomodasi dan makan minum terhadap perekonomian suatu daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan penduduk sekitar tempat objek wisata, peningkatan sektor pajak perhotelan/penginapan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sebagai berikut :

Target kinerja laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2025 berada pada rentang target 9,44-10,13 persen dengan realisasinya 9,27% atau capaian kinerja sebesar 94,74% (kategori kinerja sangat tinggi). Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terdapat kenaikan lebih tinggi 0,59% akan tetapi untuk capaian kinerja menurun atau lebih rendah -3,26 dibanding dengan tahun 2024.

Dari grafik tren IKU diketahui perkembangan laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Sumedang selama periode 5 tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dimana pasca pandemik covid-19 pada tahun 2021 yang hanya terealisasi sebesar 2,08% kembali naik signifikanpada tahun 2022 ke 15,06%, akan tetapi terkoreksi kembali pada tahun 2023 laju pertumbuhannya

Grafik 2.15
Tren Laju Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum
Kabupaten Sumedang

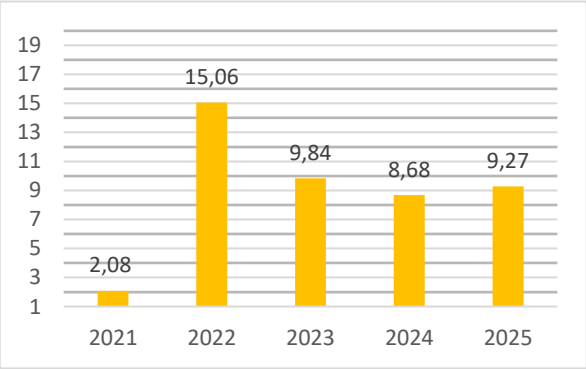

terkoreksi menjadi 9,84% dan tahun 2024 ke 8,68%, baru pada tahun 2025 laju pertumbuhan sektor ini naik kembali ke 9,27%.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 diketahui target akhir laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu berada pada rentang target 9,82, - 10,86 persen, sehingga apabila dibandingan dengan realisasi tahun 2025, maka capaian terhadap target akhir RPD tercapai 94,74%. Untuk perbandingan dengan skala Nasional maupun skala Provinsi Jawa Barat belum bisa dibandingkan karena belum didapat data nasional maupun provinsi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun berjalan, laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Sumedang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas usaha pada sektor perhotelan, penginapan, serta jasa makan dan minum mengalami perlambatan dibandingkan dengan yang direncanakan. Ketidakcapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah kunjungan wisata dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisata sebanyak 1.762.906 orang dan pada tahun 2025 terdapat 1.753.200 orang, hal ini dipengaruhi oleh :
    a. Daya tarik destinasi yang belum kompetitif, sebagian destinasi wisata di Kabupaten Sumedang belum memiliki keunikan (unique selling point) yang kuat dan belum dikemas secara terpadu, sehingga kurang mampu menarik wisatawan dalam jumlah besar maupun kunjungan berulang.
    b. Promosi pariwisata yang belum masif dan tersegmentasi, strategi promosi masih terbatas pada metode konvensional dan belum optimal memanfaatkan digital marketing, influencer, serta platform pariwisata nasional.
    c. Minimnya event berskala regional/nasional, keterbatasan penyelenggaraan event unggulan berdampak pada rendahnya lonjakan kunjungan wisatawan (seasonal boost) yang seharusnya dapat mendorong okupansi akomodasi dan konsumsi kuliner.

d. Rendahnya lama tinggal (length of stay) wisatawan
Pola kunjungan yang cenderung singkat (one day trip) menyebabkan rendahnya permintaan terhadap jasa penginapan dan terbatasnya pengeluaran wisatawan pada sektor makan minum.

2. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Keterbatasan infrastruktur menjadi faktor krusial yang menghambat perkembangan sektor ini, antara lain:
   a. Aksesibilitas menuju destinasi wisata belum optimal, beberapa lokasi wisata masih memiliki keterbatasan akses jalan yang kurang memadai, transportasi umum yang terbatas, serta petunjuk arah yang belum representatif.
   b. Fasilitas penunjang wisata yang belum lengkap, ketersediaan fasilitas dasar seperti area parkir, sanitasi, pusat informasi, dan fasilitas umum lainnya masih belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan.
   c. Keterbatasan kapasitas dan kualitas akomodasi, jumlah dan kualitas hotel, penginapan, serta homestay masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan wisatawan, khususnya pada periode kunjungan tinggi.
   d. Penataan kawasan wisata yang belum terintegrasi, pengelolaan kawasan wisata yang belum berbasis tata kelola terpadu mengakibatkan kurang optimalnya pengalaman wisata secara keseluruhan (tourism experience).
3. Faktor Eksternal yang Tidak Terkendali, selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang turut mempengaruhi ketidakcapaian kinerja, antara lain:
   a. Perlambatan ekonomi dan tekanan daya beli masyarakat, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil menyebabkan masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran untuk kegiatan rekreasi dan konsumsi di luar rumah.
   b. Fluktuasi harga bahan baku, kenaikan harga bahan pangan berdampak pada peningkatan biaya operasional usaha makan minum, yang berpotensi menekan margin usaha dan daya beli konsumen.
   c. Perubahan tren dan preferensi wisatawan, pergeseran preferensi wisatawan ke destinasi yang lebih populer, berbasis pengalaman (experience-based tourism), atau yang lebih “instagramable”, menyebabkan daya tarik destinasi lokal menjadi relatif menurun.
   d. Persaingan antar daerah tujuan wisata, daerah lain yang memiliki infrastruktur lebih baik dan promosi yang lebih agresif menjadi kompetitor langsung dalam menarik wisatawan.

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat dampak terhadap ketidakcapaian kinerja. Rendahnya kunjungan wisatawan yang tidak didukung oleh infrastruktur memadai serta faktor eksternal menyebabkan sektor akomodasi dan makan minum tidak mampu tumbuh sesuai target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum melalui berbagai program-program yang dilaksanakan oleh dinas teknis dan kolaborasi dengan dinas/instansi lainnya, diantaranya :

1. Monitoring dan evaluasi usaha sektor pariwisata secara rutin.
2. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) sebagai landasan hukum dan panduan strategis pengembangan kawasan pariwisata jangka panjang.
3. Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata seperti Mushola dan Aula di destinasi wisata Gunung Lingga.
4. Pemberdayaan Masyarakat melalui sosialisasi pengelolaan wisata alam kepada masyarakat lokal untuk menumbuhkan kesadaran wisata dan pelestarian lingkungan.
5. Penyediaan Data dan Informasi Wisata mulai dari pembaharuan data akomodasi yang mencakup hotel, restoran, rumah makan, hingga kafe untuk memudahkan akses informasi bagi wisatawan.
6. Pemasaran Pariwisata melalui Promosi Digital salah satunya mengembangkan teknologi Virtual Tour pariwisata Sumedang yang mencakup destinasi ikonik seperti Cipadayungan, Keraton Sumedang Larang, Geotheater Rancakalong, hingga Menara Kujang Sapasang.
7. Fasilitasi Event Pariwisata (Calender of Event) seperti Festival Pesona Jatigede, West Java Paragliding, Festival Pesona Tampomas (Offroad Sumedang #Part2), dan Pekan Wisata Budaya & Duta Pariwisata. Dan
8. Melaksanakan kegiatan *Table Top* Pariwisata di Yogyakarta untuk menjalin kemitraan dengan agen perjalanan (travel agent) luar daerah guna mendorong paket wisata ke Kabupaten Sumedang.

Adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 2.12

Program utama yang mendukung laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum terdiri dari 4 program dengan total pagu anggaran Rp.22,919,947,067,- yang terealisasi Rp. 22,028,970,460,- atau 96,11%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber sebesar 3,89% atau sebesar Rp. 890,976,607,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.17
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	691,396,100.00	678,960,700.00	98.20
Program Pemasaran Pariwisata	535,149,700.00	534,549,700.00	99.89
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfataan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	195,300,000.00	191,812,250.00	98.21
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	943,672,000.00	841,706,600.00	89.19
JUMLAH	**2,365,517,800.00**	**2,247,029,250.00**	**94.99**

Sumber : LRA Disparbudpora (diolah)

SASARAN 7

Meningkatnya Infrastruktur dan Sarana Prasarana Dalam Pengembangan Wilayah

INDIKATOR

Indeks Kualitas Infrastruktur

Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks ini dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan, harapan, dan persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Berikut penjelasan tentang indeks kualitas insfrastruktur Kabupaten Sumedang tahun 2025.

Realisasi Indeks Kualitas Infrastruktur tahun 2025 berdasarkan hasil perhitunagn Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang terealisasi 81,98 poin dengan capaian 98,57% dari target 83,17 poin hanya naik 0,9 poin dari realisasi tahun 2024 yang terealisasi sebesar 81,89 poin. Terdapat penurunan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yang tercapai 100,60% terkoreksi -2,03% di tahun 2025 dengan capaian kinerja 98,57%.

Grafik 2.16
Tren Indeks Kualitas Infrastruktur
Kabupaten Sumedang

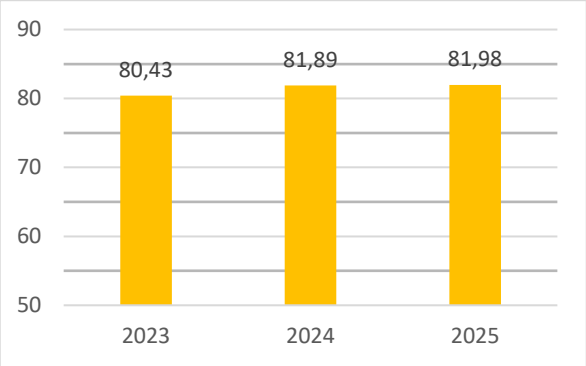

Dari grafik tren IKU diketahui bahwasannya realisasi kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Sumedang selama periode 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan walapun belum secara signifikan. Pada tahun 2023 realisasi Indeks Kualitas Infrastruktur 80,43 poin naik 1,46 poin ke tahun 2024 menjadi 81,89 poin, dan pada tahun 2025 terdapat kenaikan 0,9 poin menjadi 81,98 poin. Dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 target akhir RPD sebesar 84,62 Poin sehingga capaian kinerja tahun 2025 sudah mencapai 96,88% terhadap target akhir periode RPD 2024-2026. Sementara untuk perbandingan baik dengan skala nasional maupun skala provinsi belum bisa di bandingkan karena sampai dengan di susunnya laporan kinerja ini data nasional dan provinsi belum didapatkan.

Indeks Kualitas Infrastruktur Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh :

1. Pada tahun 2025 terjadi penurunan anggaran sebesar ±40% yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, yang selama ini menjadi faktor utama peningkatan kemantapan jalan. Keterbatasan tersebut menyebabkan sejumlah ruas jalan dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat belum dapat ditangani secara struktural, sehingga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemantapan jalan kabupaten. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2025 terealisasi 87,28%. Total panjang Jalan Kondisi Mantap (Kondisi Baik dan Sedang) pada tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2025

NO	Kondisi Jalan	Realisasi Tahun 2025		
		KM	%	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
1	Kondisi Baik	597,307	73,62	**87,28%**
2	Kondisi Sedang	110,829	13,66	
3	Kondisi Rusak Ringan	21,635	2,67	
4	Kondisi Rusak Berat	81,547	10,05	
	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	**811,318**		

2. Banyaknya kejadian longsor yang mengakibatkan terkikis dan amblasnya badan jalan di beberapa ruas, sehingga terjadi degradasi kondisi jalan yang lebih cepat.
3. Dengan adanya kejadian bencana, menjadi faktor penyebab yang mempengaruhi persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik, dimana skala prioritas di fokuskan pada wilayah yang terkena dampak bencana. Adapun langkah yang telah di lakukan untuk peningkatan daerah irigasi antara lain :
   - Peningkatan Jaringan Irigasi permukaan sepanjang 3,7 km
   - Merehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sepanjang, 4,34 km
   - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan sepanjang 6,57 km
   - Menyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
4. Ratio Rumah Layak Huni.

   Dalam upaya mewujudkan pelayanan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah berupaya semaksimal mungkin berkinerja, hal ini di tandai dengan capaian Ratio Rumah Layak Huni tahun 2025 terealisasi 80,58%. Beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain.

   a. Keterbatasan Anggaran, alokasi pendanaan yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga pelaksanaan program dilakukan secara bertahap.
   b. Pendataan Perumahan yang belum terstruktur dan terintegrasi
   c. Masih Tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni
   d. Faktor ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah belum bisa membangun dan memperbaiki rumah sesuai standar kelayakan huni.
   e. Tingginya harga lahan dan bahan material bangunan.
   f. Rendahnya akses masyarakat yang bekerja di sektor informal terhadap pembiayaan perumahan, baik kredit kepemilikan maupun pembiayaan rehabilitasi rumah.
   g. Belum optimalnya basis data RTLH, yang berdampak pada ketepatan sasaran program perumahan.

Pogram yang mendukung capaian kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Sumedang tahun 2024 terdiri dari 11 program dengan pagu anggaran sebesar Rp.142,950,419,106.00 yang terdiri dari 11 program, sedangkan realisiasinya sebesar Rp.138,686,566,292.00 penyerapan anggaran sebesar 97,02%. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya tidak dapat dihitung karena capaian kurang dari 100%.

Tabel 2.19
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Indeks Kualitas Infrastruktur Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12,704,369,500.00	12,584,771,800.00	99.06
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11,342,121,300.00	11,075,191,363.00	97.65
Program Penataan Bangunan Gedung	3,419,591,000.00	3,398,337,270.00	99.38
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	15,729,775,300.00	15,502,235,225.00	98.55
Program Penyelenggaraan Jalan	55,998,522,757.00	53,399,505,675.00	95.36
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5,725,259,999.00	5,711,968,550.00	99.77
Program Pengembangan Perumahan	1,180,000,000.00	1,125,960,751.00	95.42
Program Kawasan Permukiman	1,339,218,000.00	1,334,686,561.00	99.66
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	7,745,856,350.00	7,724,662,131.00	99.73
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	3,418,212,000.00	3,307,824,900.00	96.77
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	24,347,492,900.00	23,521,422,066.00	96.61
Jumlah Total	**142,950,419,106.00**	**138,686,566,292.00**	**97.02**

Sumber : LRA Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

SASARAN 8

Meningkatnya Iklim Investasi Daerah

INDIKATOR

Persentase Peningkatan Penanaman Modal Di Kabupaten Sumedang

Penanaman Modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Data realisasi investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM) yang disampaikan investor secara berkala.

Realisasi investasi pada tahun 2024 sebesar Rp.3.796.035.862.947,34 pada tahun 2025 berdasarkan pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) realisasi investasi di Kabupaten Sumedang terealisasi sebesar Rp.5.630.137.589.895,-, terdapat peningkatan nilai investasi sebesar Rp.1.834.101.726.947,7,- dengan tingkat kenaikan sebesar 48,32%. Maka realisasi investasi di Kabupaten Sumedang telah melampaui target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan target peningkatan investasi sebesar 12 % pada tahun 2025 dengan capai kinerja 402,67%.

Grafik 2.17
Tren Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang

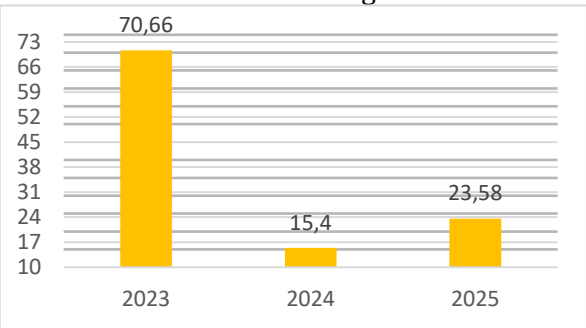

Dari grafik tren IKU diketahui bahwasannya realisasi kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2023 terealisasi 70,66% yang merupakan peningkatan tertinggi dalam sejarah investasi di Kabupaten Sumedang, hal ini dikarenakan adanya proyek jalan TOL CISUMDAWU menyumbangkan nilai investasi terbesar. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan ke 15,4% dan pada tahun 2025 kembali mengalami kenaikan yang

cukup besar ke-48,32%. apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realiasi pada tahun 2025 lebih tinggi 32,92% begitupun dengan capaiannya mencapai 402,67% menjadikan capaian kinerja lebih tinggi 248,67% dari tahun 2024 yang mencapai 154%.
Di dalam dokumen RPD 2024-2026, target pada tahun akhir Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang ditetapkan 13% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025 sudah jauh terlampaui sehingga perlu dilakukan prubahan target kinerja untuk tahun 2026.

Gambar 2.13

Sementara itu, diketahui bahwa realisasi peningkatan penanaman modal/investasi Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2025 mencapai 18,21% dan untuk nasional tercapai 12,7%, sehingga bila melihat dari sisi realisasi peningkatan untuk Kabupaten Sumedang realisasi penanaman modal/investasinya lebih tinggi 30,11% dari Provinsi Jawa Barat dan lebih tinggi 35,62% dari Nasional.

Capaian kinerja ini tentu saja di dukung oleh faktor –faktor yang menyebabkan keberhasil tercapainya target kinerja, berikut analisis faktor-faktor keberhasilan atas capaian kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Peta Potensi Investasi yang berbasis data spasial (RTRW/RDTR) dikombinasikan dengan kebijakan insentif menciptakan ekosistem investasi yang "sehat" dan teruku memberikan kepastian hukum atas lahan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang, dimana Peta Potensi bukan sekadar peta geografis, melainkan data spasial yang memberikan kepastian bagi investor yang didalamnya memuat informasi :
   a. Akurasi Data Geospasial (GIS): Keberhasilan diukur dari sejauh mana peta tersebut terintegrasi dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) digital.

Investor bisa langsung tahu apakah lahan yang mereka incar masuk zona industri, hijau, atau pemukiman.

b. Identifikasi Sektor Unggulan: Peta yang berhasil adalah yang mampu memetakan potensi berdasarkan *comparative advantage* daerah. Di Sumedang, ini terlihat pada pemetaan kawasan Butom (Buahdua, Ujungjaya, Tomo) yang fokus pada industri manufaktur dan logistik.
c. Ketersediaan Infrastruktur Penunjang: Peta yang berkualitas mencantumkan jarak lokasi potensi ke gerbang Tol Cisumdawu, akses listrik (PLN), sumber air, dan jaringan serat optik.
d. Mitigasi Risiko: Dengan mengacu pada RTRW, pemerintah daerah meminimalisir risiko konflik sosial atau hambatan lingkungan di masa depan yang seringkali menjadi penyebab investasi mangkrak.
e. Peta Potensi juga mencakup program pemberian insentif kepada pelaku usaha untuk mendorong peningkatan gairah investasi di wilayah Kabupaten Sumedang. Seluruh kegiatan tersebut didukung oleh berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum berinvestasi di Kabupaten Sumedang

2. Tersusunnya Dokumen IPRO, IPRO adalah dokumen profil proyek yang sudah dikaji secara mendalam (*praFeasibility Study/FS*) sehingga investor tinggal memutuskan untuk mendanainya. Keutamaan dokumen IPRO antara lain :
   a. Skema Bisnis yang Jelas: IPRO yang berhasil mencantumkan analisis finansial seperti IRR (*Internal Rate of Return*), NPV (*Net Present Value*), dan Payback Period. Investor tidak perlu menghitung dari nol.
   b. Status Lahan "*Clean and Clear*": Faktor keberhasilan utama IPRO adalah kepastian hukum lahan. Jika IPRO ditawarkan, artinya masalah pembebasan lahan atau sengketa sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah.
   c. Dukungan Perizinan (Insentif): Dokumen IPRO yang kuat menyertakan komitmen daerah mengenai kemudahan perizinan khusus atau insentif pajak daerah bagi proyek tersebut.
   d. Kesesuaian dengan Hilirisasi: Pada 2025, IPRO di Sumedang yang sukses adalah yang mengusung tema hilirisasi (misal: Pabrik Pengolahan Mangga Gedong Gincu), karena sesuai dengan arah kebijakan Kemeninvesthil.
3. Keberhasilan promosi tahun 2025 tidak lagi bergantung pada brosur fisik, melainkan pada ekosistem digital, yang meliputi :
   a. Platform Invest.sumedangkab.go.id dan sipetis merupakan Ketersediaan informasi peluang investasi yang dapat diakses 24/7 oleh investor global.

b. Pemanfaatan Big Data: Kemampuan daerah dalam menyasar investor spesifik (target marketing) berdasarkan minat sektor (misal: investor Korea untuk tekstil/manufaktur, atau investor domestik untuk pengolahan pangan).

4. Partisipasi dalam *Investment Summit* (*WJIS & National Events*)Keikutsertaan Sumedang dalam ajang seperti *West Java Investment Summit (WJIS)* menjadi faktor kunci:
   a. Penandatanganan MoU/LoI: Keberhasilan promosi diukur dari jumlah *Letter of Intent* (surat ketertarikan) yang berhasil dikonversi menjadi NIB (Nomor Induk Berusaha).
   b. Networking Strategy: Membangun hubungan langsung dengan *Chief Executive Officers* (CEO) dan atase perdagangan luar negeri untuk mengenalkan kawasan strategis seperti Butom dan Jatigede.
5. Penyelenggaraan *Market Sounding* untuk Proyek IPRO, Promosi yang paling efektif adalah yang menawarkan proyek yang sudah matang (*Ready to Offer*):
   a. Transparansi Analisis Bisnis: Memaparkan secara terbuka potensi keuntungan, masa balik modal (*payback period*), dan dukungan pemerintah kepada calon investor.
   b. One-on-One Meeting: Melakukan pertemuan intensif dengan calon investor yang potensial untuk menjawab keraguan teknis secara langsung.
6. ***City Branding* (*Sumedang: The Heart of Rebana*)** Keberhasilan promosi sangat dipengaruhi oleh citra daerah yang dibangun:
   a. Narasi Konektivitas: Mempromosikan Sumedang sebagai "pintu masuk"utama Jawa Barat melalui Tol Cisumdawu.
   b. Kondusivitas Wilayah: Mempromosikan stabilitas keamanan dan kemudahan hubungan industrial (harmonisasi antara pengusaha, buruh, dan pemerintah daerah).

   Keberhasilan Kabupaten Sumedang masuk dalam **10 besar penilaian tertinggi** pada ajang *West Java Investment Challenge* (WJIC) adalah bukti otentik bahwa kualitas dokumen perencanaan investasi daerah sudah diakui di tingkat provinsi.
7. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) yang meliputi :
   a. Integrasi Sistem Lokal dengan OSS RBA (Integrasi Data), Faktor utama adalah kemampuan daerah dalam menyelaraskan data lokal dengan sistem nasional. Sinkronisasi RDTR Digital dimana Sumedang menjadi salah satu

daerah terdepan yang berhasil mengintegrasikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem OSS., sehingga berdampak pada Penerbitan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) menjadi otomatis (self-assessment untuk usaha risiko rendah), yang secara drastis memangkas waktu tunggu investor dari hitungan minggu menjadi hitungan jam.

b. Transformasi Peran DPMPTSP Dari "Administrator" ke "Fasilitator", keberhasilan sistem elektronik sangat bergantung pada dukungan sumber daya manusia (SDM), Klinik LKPM & OSS contohnya menjadi penyedia layanan pendampingan (coaching clinic) bagi pelaku usaha yang gagap teknologi. Hal ini memastikan kendala teknis dalam sistem elektronik tidak menghambat proses perizinan. Kemudian pembentukan tim khusus yang mengawal izin-izin investasi besar (PMA/PMDN) agar tidak tertahan di tahap verifikasi teknis pada OPD teknis lainnya.
c. Implementasi Perizinan Berbasis Risiko (Kepastian Hukum), sistem ini membagi perizinan berdasarkan tingkat risiko (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi). Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui DPMPTSP melakukan Penyederhanaan NIB yang diperuntukan untuk usaha risiko rendah (khususnya UMKM di Sumedang), NIB berlaku sebagai legalitas tunggal (termasuk sertifikasi halal dan SNI binaan). Ini memicu lonjakan jumlah izin yang terbit secara legal di sistem. Sementara itu untuk risiko tinggi, keberhasilan diukur dari ketepatan waktu OPD teknis dalam memberikan rekomendasi (seperti PBG/SLF) melalui sistem SIMBG yang sudah terhubung.
d. Inovasi "Jemput Bola" (Mobil Perizinan Keliling), Meskipun sistemnya elektronik, aksesibilitas di wilayah geografis Sumedang tetap diperhatikan, seperti Pelayanan Literasi Digital yang bertujuan mengedukasi pelaku usaha di kecamatan- kecamatan seperti yang sudah dilaksanakan di kecamatan Buahdua dan kecamatan Ujungjaya tentang cara menggunakan aplikasi OSS yang berdampak pada Peningkatan signifikan pada kepatuhan pelaporan LKPM, karena pelaku usaha merasa dibantu dalam mengoperasikan sistem yang dianggap kompleks.

8. Fasilitas "Klinik Investasi" (Pendampingan Aktif), Sumedang sukses dengan strategi pendampingan yang tidak pasif. Layanan Self-Service Terpadu, Penyediaan loket mandiri di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dilengkapi petugas pendamping, ini sangat membantu pelaku usaha menengah-kecil yang

belum familiar dengan sistem digital.

9. Integrasi Layanan Konsultasi Online & Offline, Keberhasilan pengelolaan layanan ini dilihat dari kemudahan akses bagi investor yang tidak bisa datang fisik melalui Helpdesk Digital (WhatsApp/Live Chat): Respons cepat (fast response) terhadap kendala teknis sistem OSS dan Konsultasi Virtual: Penggunaan video conference untuk mediasi antara investor dengan OPD teknis (seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Pekerjaan Umum) tanpa harus berpindah-pindah kantor.
10. Validasi Data Realisasi Investasi (Akurasi LKPM), valiasi data investasi ini dilakukan melalui Melakukan analisis terhadap laporan yang masuk. Jika ada ketidakwajaran data (misal: modal besar tapi tenaga kerja sedikit), tim pemantauan melakukan klarifikasi dan melaksanakan pendampingan pelaporan yakni keberhasilan pemantauan dinilai dari seberapa banyak pelaku usaha yang "diingatkan" dan akhirnya patuh melapor tepat waktu, sehingga target investasi daerah tercapai secara administratif.
11. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, ini sering disebut sebagai fungsi "Debottlenecking". Di Kabupaten Sumedang, faktor keberhasilan dalam penyelesaian hambatan investasi menjadi penentu apakah sebuah komitmen investasi (yang baru di atas kertas) benar-benar berubah menjadi bangunan fisik dan lapangan kerja. Berikut bentuk-bentuk dalam penyelesaian hambatan investasi yang dilakukan antara lain :
    a. Pemberian kemudahan mekanisme pengaduan/ Mekanisme Pengaduan yang Responsif (Fast Response), menydiakan format helpdesk khusus atau aplikasi pengaduan (seperti melalui WhatsApp khusus investor atau fitur pengaduan di sistem OSS) yang direspon secara real-time.
    b. Pengklasifikasian masalah dimana tim mampu untuk segera memetakan apakah hambatan bersifat administratif (perizinan), teknis (infrastruktur), atau sosial (konflik lahan/masyarakat).
    c. Efektivitas Mediasi Lintas Sektoral melalui fasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dengan OPD terkait hingga dengan pihak eksternal.
12. Pendampingan Intensif Proyek Strategis, untuk investasi skala besar (seperti di Kawasan Dwipapuri atau proyek hijau di Buahdua), diperlukan perlakuan khusus (*handholding*).
    a. Case Management: Menunjuk petugas pendamping (account officer) untuk satu proyek besar guna memastikan setiap kendala di lapangan (misal: akses

jalan rusak atau gangguan keamanan) segera dilaporkan ke pimpinan daerah.

b. Kepastian Hukum dan Keamanan: Keberhasilan menjamin keamanan berinvestasi melalui sinergi dengan aparat penegak hukum (insentif jaminan keamanan).

13. Transformasi Hambatan Menjadi Inovasi Kebijakan, faktor keberhasilan jangka panjang adalah ketika satu masalah yang diselesaikan menjadi dasar perubahan aturan yang mempermudah semua orang. Trnasformasi hambatan menjadi inovasi kebijakan diantaranya :
    a. Penyederhanaan Aturan Daerah, jika banyak pelaku usaha terhambat oleh Peraturan Bupati tertentu, keberhasilan diukur dari kemampuan DPMPTSP mendorong revisi aturan tersebut agar lebih pro-investasi.
    b. Rekomendasi Infrastruktur**,** engusulkan pembangunan infrastruktur spesifik (seperti jembatan atau penguatan sinyal internet) kepada dinas terkait berdasarkan keluhan terbanyak dari investor di suatu wilayah.
14. Pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi (Inspeksi Lapangan), ini dilakukan meliputi :
    a. Kolaborasi Lintas OPD: Keberhasilan koordinasi antara DPMPTSP dengan dinas teknis (DLH untuk lingkungan, Disnakertrans untuk tenaga kerja, dan PUPR untuk bangunan). Ini mencegah tumpang tindih pengawasan dan memberikan kenyamanan bagi investor.
    b. Pengawasan Berbasis Risiko: Fokus pengawasan diarahkan pada perusahaan dengan profil risiko Menengah Tinggi dan Tinggi, sesuai mandat sistem OSS RBA.

Demikian beberapa faktor-faktor yang menjadi penentu utama keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Peningkatan Penanaman Modal Di Kabupaten Sumedang, akan tetapi dalam upaya pencapaian kinerjatersebut tidak lepas dari pelaksanaan program-program kinerja, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor, antara lain :

Gambar 2.14

Program utama yang mendukung ketercapaian Persentase Peningkatan Penanaman Modal Di Kabupaten Sumedang terdiri dari 2 program dengan pagu anggaran total Rp.173,045,500.00 dan realisasi anggarannya Rp.168,935,900.00, tingkat penyerapan anggaran 97,63%. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 305,04% atau Rp. 4.109.600,00.

Tabel 2.20
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	93,322,800.00	92,862,800.00	**99.51**
Program Promosi Penanaman Modal	79,722,700.00	76,073,100.00	**95.42**
Jumlah	173,045,500.00	168,935,900.00	97.63

Sumber : LRA Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

SASARAN 9

Meningkatnya Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan

INDIKATOR

Nilai komposit FSVA

Nilai Komposit FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang merupakan

nilai ketahanan dan kerentanan pangan pada suatu daerah adalah hasil penggabungan (agregasi) dari beberapa indikator yang mewakili 3 aspek utama ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan.

Berdasarkan laporan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan secara komposit ditentukan oleh 6 indikator yaitu :

A. Aspek Ketersediaan Pangan
   1. Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa
   2. Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga

B. Aspek Akses terhadap Pangan
   3. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa
   4. Desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai melalui darat, air atau udara.

C. Aspek Pemanfaatan Pangan
   5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
   6. Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah Penduduk desa.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai komposit FSVA Kabupaten Sumedang tahun 2025 berdasarkan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah sebesar 62,85% dengan capaian 93,51% dari target 67,21%. Realisasi kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan

sebesar 1,24% dari realisasi tahun 2024 sebesar 61,61%, sementara untuk capaian lebih rendah -1,70% dari capaian tahun 2024 sebesar 95,21%.

Grafik 2.18
Tren Nilai komposit FSVA
Kabupaten Sumedang

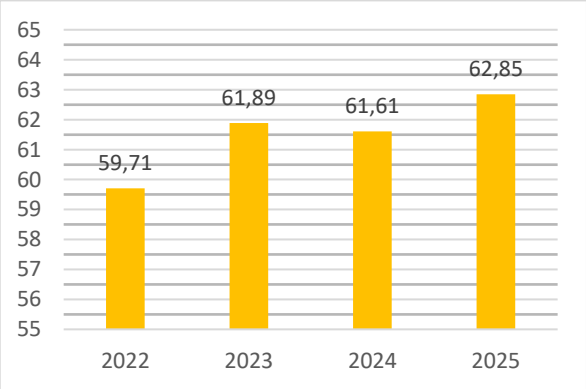

Dari grafik tren IKU diketahui bahwasannya realisasi kinerja Nilai komposit FSVA Kabupaten Sumedang mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2023 naik ke 61,89% dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan ke 61,61% dan pada tahun 2025 naik kembali ke 62,85%, walaupun secara tren terjadi fluktuatif akan tetapi masih dalam batas wajar.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPD dengan target 69,71, maka capaian kinerja tahun 2025 mencapai 90,15%. Sementara untuk Nilai komposit FSVA Nasional dan Provinsi Jawa Barat datanya belum kami terima.

Capaian kinerja nilai komposit FSVA dipengaruhi oleh Skor Pola Pangan Harapan dimana pada tahun 2025 terealisasi sebesar 96,90 yang ditunjang oleh :

a. Ketersediaan pangan pokok, berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2025 ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Sumedang mencapai 235,78 kg/kapita/tahun hal ini menunjukan ketahanan pangan yang kuat dan bisa memenuhi kebutuhan atas ketersediaan pangan apabila terjadi bencana kerawanan pangan.
b. Peningkatan pola konsumsi pangan lokal non beras non terigu, pada tahun 2025 peningkatan pola konsumsi pangan lokal non beras non terigu sebesar 29,18 kg/kapita/tahun, dengan peningkatan ini masyarakat Sumedang sebagian sudah bisa mengalihkan konsumsi pangan lokal beras dan terigu ke pangan lokal lainnya, sehingga hal ii dapat menurunkan ketergantungan terhadap pangan lokal beras dan terigu.
c. Tertanganinya daerah kerawanan pangan, penanganan daerah rawan pangan dilakukan melalui pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan
d. Terawasinya keamanan pangan, pengawasan kemanan pangan dilakukan untuk memastikan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melalui pemberian rekomendasi kemanan PSAT, penyediaan sarana pengujian keamanan PSAT, serta pengawasan dan pembinaan langsung kepada para pelaku usaha PSAT.

Untuk mengetahui wilayah rentan pangan di Kabupaten Sumedang maka Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas). Dari hasil penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan didapat klasifikasi desa/kelurahan di Kabupaten Sumedang yang terbagi menjadi 6 kelompok prioritas, di mana Prioritas 1-3 merupakan wilayah rentan pangan dan Prioritas 4-6 adalah wilayah tahan pangan dengan rincian hasil analisis sebagai berikut :

1. Terdapat peningkatan jumlah desa yang tergolong rawan pangan (Prioritas 1-3), yaitu dari 32 desa (11,55%) pada tahun 2024 menjadi 36 desa (12,99%) pada tahun 2025.
2. Sebaran Prioritas Utama:
    a. Prioritas 1 (Sangat Rentan): 2 desa (0,72%) yang keduanya berada di Kecamatan Wado.
    b. Prioritas 2 (Rentan): 12 desa (4,33%) yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Cimanggung, Sukasari, Sumedang Selatan, Situraja, Cisitu, Darmaraja, dan Wado.
    c. Prioritas 3 (Cukup Rentan): 22 desa (7,94%) tersebar di 13 kecamatan berbeda.
3. Mayoritas wilayah Sumedang masuk dalam kategori tahan pangan dengan rincian Prioritas 4 (75 desa), Prioritas 5 (111 desa), dan Prioritas 6 (55 desa).

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kerentanan pangan di Kabupaten Sumedang secara komposit ditentukan oleh 6 indikator utama yang mencakup tiga aspek ketahanan pangan antara lain :

A. Aspek Ketersediaan Pangan

1. Rasio Luas Lahan Sawah yaitu Perbandingan luas baku lahan sawah terhadap total luas wilayah desa dimana data rata-rata kepemilikan lahan petani hanya 0,24 ha, dan rasio lahan pertanian dibanding total lahan adalah 18,15%. Produksi padi juga cenderung menurun setiap tahun.
2. Sarana dan Prasarana Ekonomi merupakan rasio jumlah pasar, minimarket, toko, atau warung terhadap jumlah rumah tangga. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada wilayah prioritas 1-3 hanya mencapai 41,52%, yang menjadi tantangan besar bagi pemenuhan pangan.

B. Aspek Akses terhadap Pangan

1. Penduduk Sejahtera Rendah merupakan rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total penduduk desa. Rendahnya daya beli akibat kemiskinan menjadi faktor dominan di desa-desa Prioritas 1-3.

2. Akses Transportasi merupakan ketersediaan penghubung yang memadai (darat/air) untuk distribusi pangan. Meskipun secara umum semua desa di Sumedang dapat dilalui kendaraan roda 4, tingginya biaya transportasi di daerah terpencil tetap menjadi hambatan bagi pendapatan petani dan distribusi pangan.

C. Aspek Pemanfaatan Pangan

1. Akses Air Bersih merupakan rasio rumah tangga tanpa akses air bersih yang terlindung. Ini berdampak langsung pada risiko penyakit yang mempengaruhi status gizi.
2. Tenaga Kesehatan merupakan rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Salah satu karakteristik utama desa rentan pangan di Sumedang adalah rendahnya bobot rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk desa.
3. Status Gizi (Outcome) merupakan masalah gizi kronis (stunting) masih menjadi perhatian serius. Selama periode 2021-2024, tercatat sebanyak 229 balita mengalami gizi buruk di Kabupaten Sumedang, dengan angka tertinggi di Kecamatan Cimanggung (20 balita).

Dalam upaya pencapaian kinerja tidak lepas dari pelaksanaan program-program kinerja, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor, antara lain:

Gambar 2.15

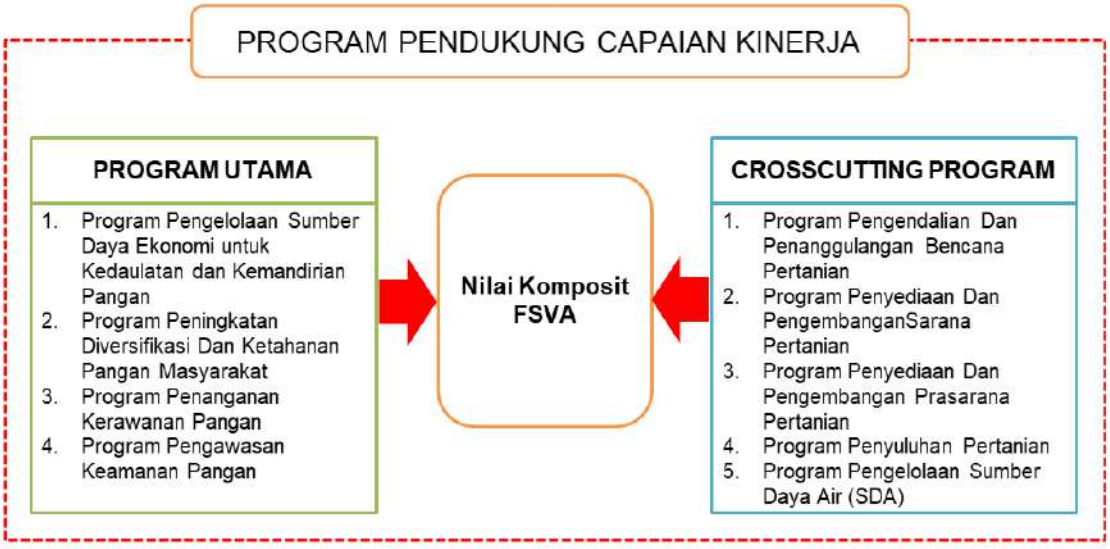

Program yang mendukung ketercapaian Nilai komposit FSVA yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan realisasi Rp. 5,148,851,541.00 dari pagu Rp. 5,297,667,100.00 atau 97,19%, untuk tingkat efisiensi

tidak dapat dihitung dikarenakan capaian kinerja kurang dari 100%.

Tabel 2.21
Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja Nilai komposit FSVA
Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	491,266,700.00	450,531,101.00	91.71
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4,163,006,000.00	4,070,804,640.00	97.79
Program Penanganan Kerawanan Pangan	505,732,600.00	501,785,400.00	99.22
Program Pengawasan Keamanan Pangan	137,661,800.00	125,730,400.00	91.33
Jumlah	**5,297,667,100.00**	**5,148,851,541.00**	**97.19**

Sumber : Laporan Realsiasi Anggaran (LRA) Tahun 2025

SASARAN 10

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

INDIKATOR

PDRB Per Kapita (ADHB)

PDRB Per Kapita (ADHB) adalah indikator yang menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk di suatu daerah dalam satu tahun**,** dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB)**. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)** adalah total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah (kabupaten/kota/provinsi) dalam periode tertentu (biasanya 1 tahun), **ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)** artinya perhitungan menggunakan harga pada tahun berjalan (belum disesuaikan dengan inflasi).

Capaian PDRB Per Kapita (ADHB) Kbaupaten Sumedang Tahun 2025 berdasarkan data yang dirilis oleh BPS adalah sebagai berikut :

Realisasi Indikator Kinerja Utama PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Sumedang tahun 2025 berdasarkan Rilis dari BPS terealisasi 42,65 Juta/Rp dengan capaian 108,77% dari target yang ditetapkan 38,18-40,24 Juta/Rp. Realisasi kinerja tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,95 Juta/Rp dari realisasi tahun 2024 sebesar 39,70 Juta/Rp, begitupun dengan capaian kinerja lebih lebih tinggi 5,17% dari capaian tahun 2024 sebesar 103,60%.

Grafik 2.19
Tren Nilai komposit FSVA
Kabupaten Sumedang

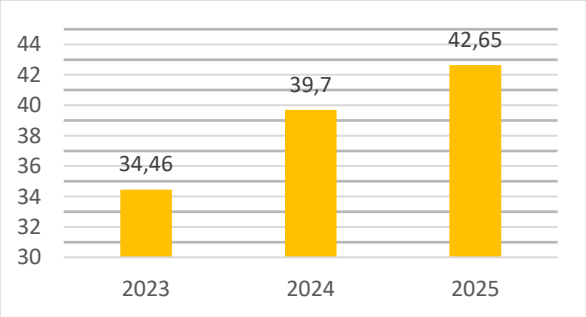

Dari grafik tren IKU diketahui bahwasannya realisasi PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, tahun 2024 naik 5,24 Jta/Rp menjadi 39,7Juta/Rp dari tahun 2023 dan pada tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar 2,95Juta/Rp dari tahun 2024 menjadi 42,65 Juta/Rp.

Dilihat dari perspektif Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 target akhir Indikator Kinerja PDRB Per Kapita (ADHB) pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 40,15-42,72 Juta/Rp, maka capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir RPD telah mencapai 102,93% (telah melibih target).

Gambar 2.16

PDRB per kapita Indonesia tahun 2025 (atas dasar harga berlaku/ADHB) tercatat mencapai Rp.83,7 juta, bila dibandingkan dengan Kabupaten Sumedang yang tercapai 42,65 Juta maka realisasi PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Sumedang lebih rendah 41,05 Juta dari realisasi Nasional. Sementara itu untuk realisasi Provinsi Jawa Barat PDRB Per Kapita (ADHB) tahun 2025 tercapai 59,86 Juta/Rp, bila dibandingkan dengan PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Sumedang lebih rendah 17,21 Juta/Rp.

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun pada suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan kapasitas ekonomi daerah secara nominal serta menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara agregat.

Pada Tahun 2025, PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten Sumedang terealisasi sebesar Rp 42,65 juta. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan kinerja perekonomian daerah yang tumbuh secara positif. Peningkatan PDRB Per Kapita Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Produktif.

   Peningkatan aktivitas pada sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, jasa pendidikan, konstruksi, serta sektor jasa lainnya memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah regional. Berdasarkan laporan capaian akhir tahun 2025, peningkatan aktivitas pada sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa lainnya memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai tambah regional (PDRB) Kabupaten Sumedang, didorong oleh realisasi investasi yang menembus angka Rp5,6 triliun dan berhasil menyerap 5.876 tenaga kerja.

a. Sektor Industri Pengolahan, sektor ini tetap menjadi salah satu kontributor utama bagi struktur ekonomi Sumedang, didorong oleh peningkatan investasi dan optimalisasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).
b. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor ini mengalami peningkatan aktivitas seiring dengan tumbuhnya daya beli masyarakat dan kemudahan akses ekonomi.
c. Sektor Konstruksi, Pembangunan infrastruktur strategis, terutama yang terhubung dengan Tol Cisumdawu, menjadi penggerak utama peningkatan nilai tambah sektor ini.
d. Sektor Jasa Pendidikan dan Jasa Lainnya, aktivitas di sektor jasa, termasuk jasa pendidikan, mengalami tren positif sejalan dengan peningkatan investasi regional.

2. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa serta memperkuat daya tarik investasi daerah.
3. Stabilitas Sosial dan Daya Beli Masyarakat, pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pengembangan usaha mikro dan kelompok usaha bersama turut menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. Hal ini di dukung dengan :
   a. Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Penguatan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang berdampak pada meningkatnya kapasitas masyarakat produktif serta menekan kerentanan sosial yang menghambat produktivitas ekonomi.
   b. Pemenuhan jaminan bantuan sosial kebutuhan dasar bagi fakir miskin melalui program perlindungan dan jaminan social melalui pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berdampak pada meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong usaha mikro untuk tumbuh dan berkembang serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sehingga perputaran ekonomi lokal berjalan dengan baik.
   c. Peningkatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan Teraksesnya Pelayanan Keluarga Sejahtera oleh masyarakat melalui sosialisasi pelayanan PPKS/Sayagatra dan evaluasi pelayanan PPKS/Sayagatra sebanyak 20 orang

dari 2 Kecamatan, tersedianya sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) melalui pengadaan BKB Kit Stunting sebanyak 13 Paket Untuk 13 UPTD, terbinanya Kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Grand Final Apresiasi Duta Genre sebanyak 25 orang, terlatihnya pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Workshop Peningkatan Keluarga Sejahtera sebanyak 32 orang, tersedianya biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) melalui pertemuan kelompok Tribina dan UPPKA sebanyak 30 orang, terbinanya mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS melalui peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan kelompok ketahanan TRIBINA (BKB,BKR,BKL dan PIKR) sebanyak 26 orang, terpantaunya data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) melalui pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran beresiko stunting oleh Tenaga Pendamping Keluarga sebanyak 2664 orang, terdampinginya keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) oleh tim pendamping keluarga sebanyak 888 tim. Hal tersebut berdampak pada meningkatkan kualitas sdm jangka panjang, mendorong produktivitas ekonomi keluarga. mengurangi beban kesehatan yang berdampak pada produktivitas tenaga kerja.

4. Faktor Inflasi (Harga Berlaku), karena dihitung berdasarkan harga berlaku, peningkatan nilai PDRB per kapita juga dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa selama tahun berjalan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan proyeksi ekonomi, peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Sumedang tahun 2025 dipengaruhi oleh inflasi tahunan (year-on-year) yang diproyeksikan berada dalam kisaran 2,5% ± 1% (atau sekitar 1,5% hingga 3,5%). Pengaruh pada PDRB Harga Berlaku, karena PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mencakup kenaikan harga (inflasi) selama tahun berjalan, peningkatan nilai PDRB per kapita di Sumedang pada 2025 tidak hanya mencerminkan kenaikan volume produksi (pertumbuhan riil), tetapi juga

kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) yang terjadi sepanjang tahun berjalan maka Pemerintah Kabupaten Sumedang menerapkan rumus 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali.

Dalam upaya pencapaian kinerja Indeks Ketahan Daerah tidak lepas dari pelaksanaan program-program kinerja, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor, antara lain :

Gambar 2.17

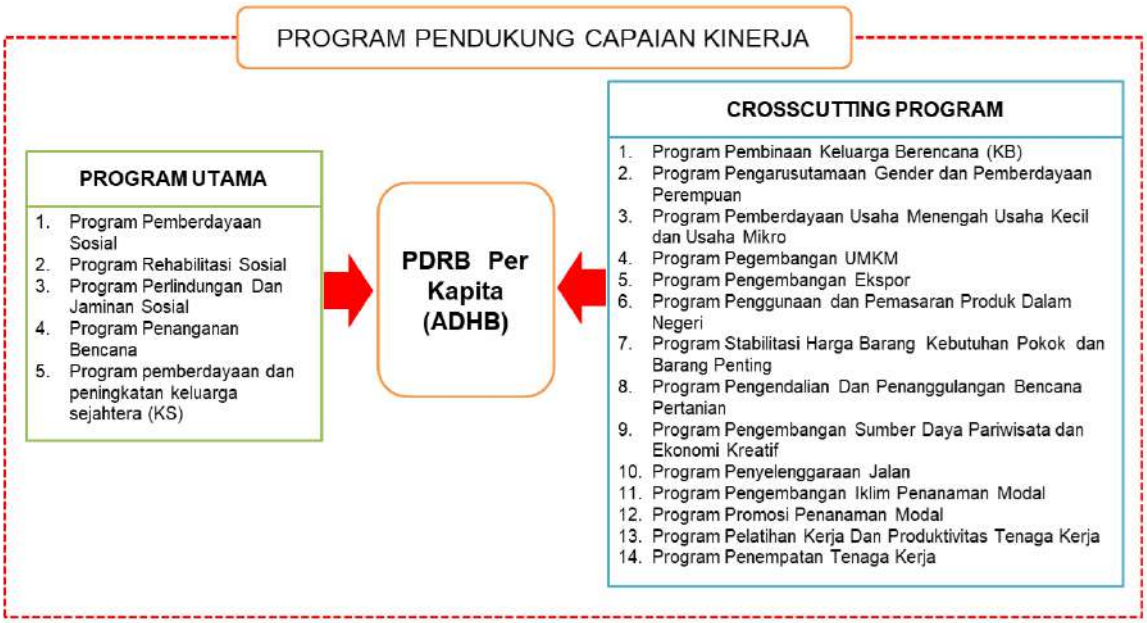

Program yang mendukung Capaian Kinerja PDRB Per Kapita (ADHB) terdiri dari 4 program utama dengan realisasi anggaran Rp. 11,931,927,955.00 dari pagu Rp. 12,386,850,300.00 atau 96,33% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 454,922,345.00 dengan tingkat efisiensi sebesar 12,44%, selain program utama, juga di dukung dengan program lintas sector (crosscutting program) sebanyak 14 program.

Tabel 2.22
Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja
PDRB Per Kapita (ADHB) Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Sosial	1,686,935,800.00	1,525,882,800.00	90.45
Program Rehabilitasi Sosial	3,114,810,900.00	3,047,966,142.00	97.85
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	761,323,000.00	701,683,800.00	92.17
Program Penanganan Bencana	906,968,600.00	746,446,211.00	82.30
Jumlah	**12,386,850,300.00**	**11,931,927,955.00**	**96.33**

Sumber : Laporan Realsiasi Anggaran (LRA) Tahun 2025

SASARAN 11

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Berkompetensi dan Berdaya Saing

INDIKATOR

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Target kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang tahun 2025 sebesar 6,75-5,94 Persen dan realisasinya 6,08% atau capaian kinerja sebesar 100% (kategori kinerja sangat tinggi) Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar 6 orang tidak mendapatkan pekerjaan pada periode tersebut. Dibandingkan dengan tahun 2024 dengan realisasinya 6,16%, realisasi kinerja tahun 2025 lebih tinggi 0,08% dan untuk capaian kinerjanya lebih rendah 4,79% dari capaian tahun 2024 sebesar 104,79%, kemudian apabila dibandingkan dengan target akhir RPD pada tahun 2026 capaian kinerja sebesar 83,66%.

Pada tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional sebesar 4,85% dan Provinsi Jawa Barat 6,77%, bila dibandingkan dengan Kabupaten Sumedang yang terealisasi sebesar 6,08% maka realisasi Kabupaten Sumedang lebih rendah -1,23% dari

TPT Nasional dan lebih tinggi 0,69% terhadap realisasi TPT Provinsi Jawa Barat.

Grafik 2.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia

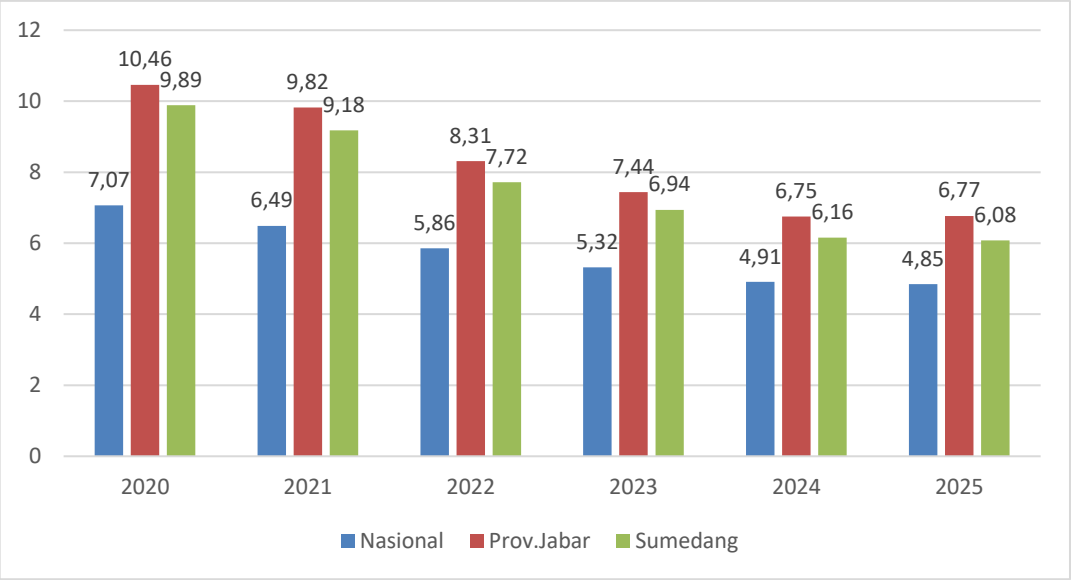

Sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2025 (diolah)

Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang dapat dijelaskan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk mengetahui besarnya persentase Angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Diharapkan dengan mengetahui angka TPT dapat menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap *supply* tenaga kerja yang ada.

Berdasarkan hasil rilis resmi Badan Pusat Statistik melalui publikasi BPS Kabupaten Sumedang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 tercatat sebesar ±6,08%, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar ±6,16%. Penurunan sebesar 0,08 poin persentase tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar kerja dan efektivitas kebijakan pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

   Kondisi perekonomian daerah yang relatif stabil pada Tahun 2025 mendorong peningkatan aktivitas produksi dan jasa. Pertumbuhan pada sektor perdagangan,

jasa, konstruksi, serta industri pengolahan skala kecil dan menengah telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

2. Meningkatnya Realisasi Investasi dan Pengembangan Wilayah

   Realisasi investasi daerah, termasuk pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur pendukung, memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung (multiplier effect).

   Investasi yang berkembang turut mendorong tumbuhnya usaha penunjang, perdagangan lokal, dan sektor jasa, sehingga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dari data realisasi investasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, bahwa realisasi investasi daerah tahun 2025 mencapai Rp.5,63 triliun. Capaian ini menempatkan Sumedang di dua besar di Kawasan Metropolitan Rebana dengan kontribusi 15,35%. Investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta berhasil menyerap 5.876 tenaga kerja.

3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Penempatan Pencari Kerja

   Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan peningkatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sebanyak 340 orang. Pada tahun 2025 jumlah pencari kerja di kabupaten sumedang terdata sebanyak 9.293 orang dan yang telah ditempatkan sebanyak 5.013 orang, hal ini juga ditunjang oleh :

   a. Pelayanan antar Kerja dengan capaian
   b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja sebanyak 20 orang
   c. Pelatihan ketenagakerjan untuk penyandang disabilitas sebanyak 20 orang
   d. Perluasan Kesempatan Kerja melalui pelatihan prosesing makanan Sebanyak 20 orang
   e. Pemanfaatan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
   f. Job Fair/Bursa Kerja sebanyak 212 orang

4. Pemberdayaan dan Penguatan UMKM

   Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja lokal. Dukungan dalam bentuk akses permodalan, pendampingan usaha, serta kemudahan perizinan telah mendorong bertahannya usaha mikro dan kecil terciptanya wirausaha baru, penyerapan tenaga kerja berbasis ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKMPP bahwa jumlah usaha mikro yang berkembang di Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 terealisasi 15.312 unit usaha.

Meskipun terjadi penurunan TPT pada Tahun 2025 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik melalui BPS Kabupaten Sumedang, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi penurunan angka pengangguran, antara lain:

1. Kesenjangan Kompetensi (Mismatch) Tenaga Kerja

   Sebagian pencari kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Lulusan pendidikan menengah masih mendominasi angkatan kerja, sementara kebutuhan industri cenderung mensyaratkan kompetensi teknis dan sertifikasi tertentu.
2. Struktur Ekonomi yang Belum Sepenuhnya Padat Karya

   Sebagian investasi yang masuk masih bersifat padat modal, sehingga daya serap tenaga kerja relatif terbatas. Transformasi struktur ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh perluasan kesempatan kerja dalam jumlah besar.
3. Pertumbuhan Angkatan Kerja yang Terus Meningkat

   Setiap tahun terjadi penambahan angkatan kerja baru, baik dari lulusan pendidikan maupun migrasi masuk wilayah. Peningkatan ini menuntut penciptaan lapangan kerja yang lebih cepat dan berkelanjutan.
4. Dominasi Sektor Informal

   Sebagian tenaga kerja masih terserap pada sektor informal dengan tingkat produktivitas dan kepastian kerja yang rendah. Kondisi ini berpotensi kembali meningkatkan angka pengangguran apabila terjadi perlambatan ekonomi.

Dalam rangka menurunkan TPT secara lebih signifikan dan berkelanjutan pada Tahun 2026, Sumedang langkah-langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten antara lain:

1. Penguatan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri melalui penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan riil dunia usaha, peningkatan program pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan kawasan industri.
2. Mendorong Investasi Padat Karya melalui fasilitasi investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberian kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur pendukung usaha.

3. Pengembangan Kewirausahaan dan UMKM melalui penguatan akses permodalan dan inkubasi bisnis, pendampingan usaha berbasis inovasi dan digitalisasi, dan penciptaan wirausaha baru produktif.
4. Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja melalui optimalisasi layanan informasi lowongan kerja, peningkatan fungsi bursa kerja dan job matching berbasis digital.
5. Sinergi Lintas Perangkat Daerah dan Stakeholder melalui integrasi kebijakan pendidikan, investasi, dan ketenagakerjaan. kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja.

Program yang mendukung capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka terdiri dari 5 program utama dengan realisasi anggaran Rp. 5,287,789,830.00 dari pagu Rp. 5,459,761,400.00 atau tingkat penyerapan anggran sebesar 96,85%. Terdapat efisiensi penggunaan sember daya sebesar Rp. 171,971,570.00 dengan tingkat efisiensi sebesar 3,15%, selain program utama, juga di dukung dengan program lintas Perangkat Daerah (crosscutting program) sebanyak 4 program yang paling mendukung.

Gambar 2.18

Tabel 2.23
Realisasi Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3,180,000,000.00	3,164,039,830.00	99.50
Program Penempatan Tenaga Kerja	391,246,500.00	365,788,200.00	93.49
Program Hubungan Industrial	1,638,150,000.00	1,522,028,700.00	92.91
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	238,749,900.00	224,798,100.00	94.16
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	11,615,000.00	11,135,000.00	95.87
Jumlah	**5,459,761,400.00**	**5,287,789,830.00**	**96.85**

Sumber : Laporan Realsiasi Anggaran (LRA) Tahun 2025

SASARAN 12

Meningkatnya Perekonomian Perdesaan

INDIKATOR

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Pada tahun 2025 terdapat perubahan Nomenklatur Indeks Desa Membangun menjadi Indeks Desa serta perubahan pada komponen-komponen pembentuk Indeks Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa antara lain :

Tabel 2.24
Perubahan Indikator Indeks Desa Membangun dan Indeks Desa

Indeks Desa Membangun	Indeks Desa
1. Indikator Ketahanan Sosial 2. Indikator Ketahanan Ekonomi 3. Ketahanan Lingkungan	1. Dimensi Sosial 2. Dimensi Ekonomi 3. Dimensi Lingkungan 4. Dimensi Layanan Dasar 5. Dimensi Aksesibilitas 6. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Indeks Desa mengklasifikasi Desa dalam enam (6) status, yakni: (i) Desa Tidak Memenuhi Kriteria; (ii) Desa Sangat Tertinggal; (iii) Desa Tertinggal; (iv) Desa Berkembang; (v) Desa Maju; dan (vi) Desa Mandiri.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 343 Tahun 2025 bahwa di Kabupaten Sumedang dari total 270 desa tidak terdapat desa yang berstatus desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dan sudah tidak ada desa yang berstatus berkembang sebagai berikut :

1. Desa Mandiri sebanyak 251 desa atau 92,96%
2. Desa Maju sebanyak 19 desa atau 7,03%
3. Desa Berkembang 0 Desa
4. Desa Tertinggal 0 Desa
5. Desa Sangat Tertinggal 0 Desa

Dari Info Grafis diatas Indeks Desa Kabupaten Sumedang tahun 2025 terealisasi 0,8389 poin dari target 0,8 poin atau capaian kinerja sebesar 104,86% (kategori kinerja sangat tinggi). Terdapat penurunan -0,0311poin bila dibandingkan dengan realisasi 0,87 poin pada tahun 2024 dan penurunan capaian kinerja Indeks Desa Tahun 2025 terhadap capaian tahun 2024 sebesar -19,43 Poin. apabila dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 capaian kinerja sebesar 103,57% (melampaui target akhir RPD). Sehingga perlu dilakukan perbaikan target tahun 2026.

Gambar 2.19

Selanjutnya perbandingan perkembangan status desa skala Nasional dan skala Provinsi Jawa Barat tahun 2025 bila dibandingkan dengan kondisi di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.25
Perbandingan Status Desa di Kabupaten Sumedang dengan Nasional

No	KLASIFIKASI	NASIONAL	%	SUMEDANG	%
1.	Desa Mandiri	20.503 Desa	27,24	251 Desa	92,96
2.	Desa Maju	23.579 Desa	31,33	19 Desa	7,04
3.	Desa Berkembang	21.813 Desa	28,99	-	
4.	Desa Tertinggal	4.672 Desa	6,21	-	
5.	Desa Sangat Tertinggal	4.684 Desa	6,22	-	
6.	Desa tidak memenuhi kriteria	4 Desa	0,01	-	
	JUMLAH	**75.255 Desa**	**100**	**270 Desa**	**100**

Sumber : Kepmendes PDT Nomor 434 Tahun 2025

Tabel 2.26
Indeks Desa se- Jawa Barat Tahun 2025

No	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten /Kota	Nama Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Desa	satuan
1	32	Jawa Barat	3201	Kabupaten Bogor	81,47	Persen
2	32	Jawa Barat	3202	Kabupaten Sukabumi	80,65	Persen
3	32	Jawa Barat	3203	Kabupaten Cianjur	77,48	Persen
4	32	Jawa Barat	3204	Kabupaten Bandung	83,63	Persen
5	32	Jawa Barat	3205	Kabupaten Garut	78,03	Persen
6	32	Jawa Barat	3206	Kabupaten Tasikmalaya	78,28	Persen
7	32	Jawa Barat	3207	Kabupaten Ciamis	85,39	Persen
8	32	Jawa Barat	3208	Kabupaten Kuningan	82,41	Persen
9	32	Jawa Barat	3209	Kabupaten Cirebon	80,54	Persen
10	32	Jawa Barat	3210	Kabupaten Majalengka	82,37	Persen
11	32	Jawa Barat	3211	Kabupaten Sumedang	84,92	Persen
12	32	Jawa Barat	3212	Kabupaten Indramayu	80,13	Persen
13	32	Jawa Barat	3213	Kabupaten Subang	80,07	Persen
14	32	Jawa Barat	3214	Kabupaten Purwakarta	81,88	Persen
15	32	Jawa Barat	3215	Kabupaten Karawang	79,21	Persen
16	32	Jawa Barat	3216	Kabupaten Bekasi	77,68	Persen
17	32	Jawa Barat	3217	Kabupaten Bandung Barat	81,69	Persen
18	32	Jawa Barat	3218	Kabupaten Pangandaran	85,19	Persen
19	32	Jawa Barat	3279	Kota Banjar	85,91	Persen

Sumber : Open Data Jawa Barat Tahun 2025

Capaian Indeks Desa Kabupaten Sumedang apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se-Jawa Barat Berada pada pertengahan diantara Kabupaten Cianjur dengan capaian 77,48 dan Kota Banjar dengan capaian 85,91%.

Capaian indicator Indeks Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program pembangunan desa yang dilakukan secara terintegrasi oleh Pemerintah Daerah bersama pemerintah desa serta dukungan lintas perangkat daerah.

Keberhasilan capaian Indeks Desa Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

   Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa telah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat.

2. Peningkatan Akses Layanan Dasar

   Pelaksanaan program di bidang pendidikan, kesehatan, air minum, dan permukiman telah meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan dasar. Perbaikan fasilitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta penyediaan sarana air bersih dan sanitasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

3. Pengembangan Ekonomi Desa

   Berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penguatan koperasi, serta pengembangan potensi ekonomi lokal dan desa wisata telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa dan memperkuat ketahanan ekonomi desa.

4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

   Partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa semakin meningkat, baik dalam kegiatan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan, maupun pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Sinergi Program Lintas Perangkat Daerah

   Keberhasilan pembangunan desa juga didukung oleh sinergi program lintas perangkat daerah yang berkontribusi pada peningkatan berbagai indikator pembangunan desa secara terpadu.

Meskipun menunjukkan capaian yang positif, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan Indeks Desa, antara lain:

1. Kapasitas aparatur desa yang belum merata, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, serta pengelolaan keuangan desa.
2. Keterbatasan infrastruktur dasar di beberapa desa, terutama terkait akses jalan desa, sarana air bersih, dan fasilitas pelayanan dasar.

3. Ketimpangan perkembangan antar desa, dimana masih terdapat beberapa desa dengan tingkat perkembangan yang relatif tertinggal dibandingkan desa lainnya.
4. Keterbatasan pengembangan potensi ekonomi desa, khususnya dalam pemanfaatan potensi lokal yang belum optimal serta keterbatasan akses pemasaran produk desa.
5. Kualitas data desa yang belum sepenuhnya optimal, yang berpengaruh terhadap proses pengukuran indikator pembangunan desa.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan Indeks Desa di Kabupaten Sumedang antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal desa dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat desa.
2. Masih terdapat desa dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
3. Belum meratanya kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Keterbatasan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat.
5. Masih terbatasnya inovasi desa dalam mendukung pembangunan desa berbasis potensi lokal.

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Desa pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang harus mengambil beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

   Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi aparatur desa dalam bidang tata kelola pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, serta pengelolaan keuangan desa.
2. Penguatan Pembangunan Infrastruktur Desa

   Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar desa seperti jalan desa, sarana air bersih, sanitasi, dan fasilitas pelayanan masyarakat.
3. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Desa

   Mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal melalui penguatan UMKM desa, pengembangan desa wisata, serta peningkatan akses pemasaran produk desa.

4. Penguatan Kelembagaan Desa

   Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

5. Penguatan Integrasi Program Pembangunan Desa

   Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan desa guna mempercepat peningkatan status dan kemandirian desa.

Dalam upaya pencapaian kinerja Indeks Desa tidak lepas dari pelaksanaan program-program kinerja, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor.

Gambar 2.20

Program utama terdiri dari 4 program yaitu program Penataan Desa, Program Kerjasama Antar Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkat Hukum Adat, adapun realisasi anggaran program tersebut adalah Rp. 10,204,659,016.00 dari pagu Rp. 10,294,151,070.00 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,13,%. Terdapat efisiensi penggunaan sember daya sebesar Rp. 89,492,054.00 dengan tingkat efisiensi sebesar 7,40%,

Tabel 2.27
Realisasi Anggaran Program Penunjang Capaian Kinerja
Indeks Desa Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penataan Desa	162,567,900.00	161,039,400.00	99.06
Program Kerjasama Antar Desa	21,861,200.00	21,861,200.00	100.00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	7,818,509,120.00	7,742,974,906.00	99.03
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	2,291,212,850.00	2,278,783,510.00	99.46
Jumlah	**10,294,151,070.00**	**10,204,659,016.00**	**99.13**

SASARAN 13

Meningkatnya Ketahanan Daerah

INDIKATOR

Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menghadapi, menanggulangi, dan memulihkan diri dari bencana. IKD berfokus pada evaluasi 71 indikator penanggulangan bencana, seperti kelembagaan, regulasi, anggaran, dan mitigasi, guna meningkatkan resiliensi daerah

Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRBI. Semakin tinggi nilai IKD, makin tinggi pula kapasitas yang dimiliki sebuah daerah dan otomatis menekan skor IRBI.

Berdasarkan kepentingan tersebut maka Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

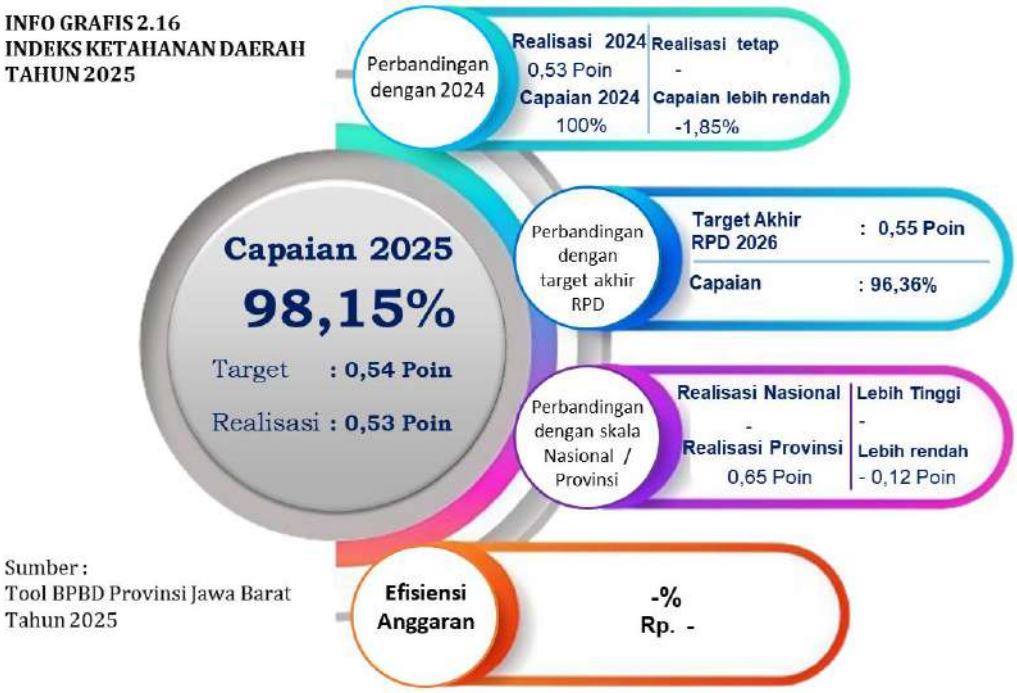

Target kinerja "Indeks Ketahanan Daerah" tahun 2025 sebesar 0,54 poin dan realisasinya berdasarkan data dari Tool BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sumedang terealisasi 0,53 poin dengan capaian kinerja sebesar 98,15% (Kategori kinerja sangat tinggi), realisasi Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025 sama dengan realisasi pada tahun 2024 akan tetapi untuk capaian kinerja lebih rendah -1,85% dari capaian tahun tahun 2024.

Grafik 2.21
Tren Indeks Ketahanan Daerah
Kabupaten Sumedang

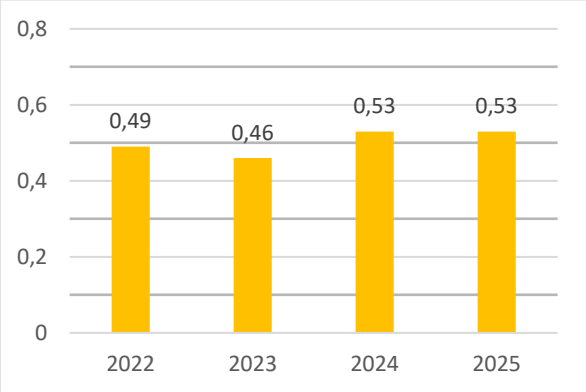

Dari grafik tren IKU diketahui bahwasannya realisasi IKD Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, tahun 2022 IKD terealisasi 0,49 poin dan pada tahun 2023 mengalami penurun ke 0,46 poin, kemudian naik 0,07 poin menjadi 0,53 poin pada tahun 2024. Pada tahun 2025 tidak terdapat kenaikan ataupun Penurunan sehingga masih tetapi pada 0,53 poin. Dilihat dari perspektif RPD 2024-2026 target akhir jangka menengah Indeks Ketahanan Daerah adalah 0,55 poin pada tahun 2026 maka capaian kinerja tercapai 96,36%.

Yang menjadi dasar perhitungan Indeks Ketahanan Daerah yaitu capaian atas Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana,

dan Persentase Penanganan Bencana, yang di laporkan ke BPBD Provinsi Jawa Barat. Dari ketiga capaian tersebut maka akan dijadikan Analisa Indikator Kinerja Daerah.

Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kab. Sumedang Tahun 2025 sebesar 0.53 poin dengan **TINGKAT KAPASITAS DAERAH SEDANG** yang diukur melalui 7 Indeks Prioritas, sebagai berikut :

1) Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan sebesar 0,67 poin;
2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu sebesar 0,57 poin;
3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik sebesar 0,50 poin;
4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana sebesar 0,54 poin;
5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0,53 poin;
6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0,48 poin;
7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sebesar 0,57 poin;

Keberhasilan capaian kinerja Indeks Ketahanan Daerah di pengaruhi oleh beberapa faktor berikut, antara lain :

1) Penanganan Pra Bencana

   Capaian Penanganan Pra Bencana tercapai 100% yang di tunjang oleh :

   a. Pemberian Layanan Informasi Rawan Bencana yaitu kondisi warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Sumedang. Layanan informasi rawan bencana bertujuan untuk peningkatan pemahaman masyarakat terkait pengetahuan, wawasan dan informasi kebencanaan pada tahap pra bencana. Layanan informasi rawan bencana diberikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang, penyebaran layanan informasi rawan bencana dilakukan di 26 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 270 Desa serta Peningkatan pelayanan infomasi rawan bencana lainnya adalah pemasangan rambu-rambu rawan bencana di 113 titik.
   b. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yaitu kondisi warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko/dampak bencana yang terjadi di lingkungannya pada tahap pra bencana. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Sumedang dilakukan melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (Destana), pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara melalui simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

c. Kajian Risiko Bencana (KRB) tentang bagian wilayah rawan bencana di Kabupaten Sumedang secara terperinci berbasis kajian risiko bencana berdasarkan 3 (tiga) komponen risiko yang telah ditentukan. Komponen-komponen tersebut dikaji berdasarkan indeks pendukung masing-masing komponen yang dituang kan dalam dokumen kajian Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi. komponen Bahaya dikaji berdasarkan indeks bahaya, komponen Kerentanan dikaji berdasarkan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian, serta komponen Kapasitas dikaji berdasarkan indeks kapasitas.

Sebagai bentuk penerapan hasil kajian risiko bencana (KRB) pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi bencana yang tinggi telah dipasang EWS Pemntauan Tinggi Air (Pantir), dibeberapa titik di wilayah Kabupaten Sumedang.

Jembatan Cikuda Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor

Jembatan Cikandang Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung

Jembatan Ciitengah 1 Desa Citengah Kec. Sumedang Selatan

Jembatan Cibodas Desa Wanasari Kec. Surian

Jembatan Ciitengah 2 Desa Citengah Kec. Sumedang Selatan

Jembatan Cisaar lanang Desa Jembarwangi Kec. Tomo

Jembatan Cibitung Desa Girimukti Kec. Sumedang Utara

Jembatan Jamban (Bungsu Bandung) Desa Pasanggrahan Kec. Sumedang Selatan

Jembatan Kodim Desa Pasanggrahan Baru Kec. Sumedang Selatan

Jembatan Cikandung Desa Cipanas Kec. Tanjungkerta

2) Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Capaian penanganan tanggap darurat bencana pada tahun 2025 berjalan sangat baik dengan capaian kinerja 100%. capaian penanganan tanggap darurat bencana di tunjang oleh capaian rata-rata penyebaran layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dimana pada tahun 2025 berdasarkan laporan kinerja BPBD Kabupaten Sumedang layanan penyelamatan dan evakuasi korban

dilakukan terhadap 2.924 jiwa dan tercapai 100%. Keberhasilan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditunjang oleh optimalnya respon cepat darurat bencana yang dilaksanakan melalui penetapan Status Darurat Bencana dan Status Keadaan Darurat Bencana (SKPDB), kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan secara terpadu yang didukung kesiapsiagaan personel, ketersediaan peralatan SAR, penerapan SOP yang jelas, serta koordinasi yang lancar dengan berbagai unsur TNI/Polri, tenaga kesehatan, relawan kebencanaan dan unsur lain, optimalnya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar korban bencana pada fase tanggap darurat, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang memastikan pengendalian operasi penanganan darurat terkoordinir secara baik sehingga terciptanya kejelasan struktur komando, peran dan fungsi masing-masing unsur, serta dukungan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) dalam pengumpulan dan penyajian data serta informasi kebencanaan.

3) Penanganan Pasca Bencana

   Penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tercapai 100 persen. Pelayanan pasca bencana dilakukan melalui upaya-upaya seperti memberikan layanan pengelolaan penanganan pengungsi, layanan penanganan kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana pada tahap pasca bencana melalui pengalokasian bantuan stimulan pasca bencana untuk pemulihan sosial ekonomi bagi korban bencana.

4) Dukungan Kesiapan Kelembagaan dan Operasional

   Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi personel lintas sektor, sehingga mampu melaksanakan penanganan awal darurat bencana secara cepat dan tepat.

5) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)

   Ketaatan terhadap RTR merupakan bagian penting dalam upaya mitigasi risiko bencana dimana melalui RTR dapat diketahui kawasan-kawasan mana saja yang boleh dilakukan pembangunan atau pemanfaatan alih fungsi lahan. Pada tahun 2025 ketersediaan RTR tercapai 46,2 persen, capaian kinerja ini di tunjang dengan terssusunnya rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR sebanyak 5 Dokumen.

Dalam upaya pencapaian kinerja Indeks Ketahan Daerah tidak lepas dari pelaksanaan program-program kinerja, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor, antara lain :

Gambar 2.21

Program utama terdiri dari 2 program yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan total pagu anggaran Rp. 6,187,956,738.00 dengan realisasi sebesar Rp. 6,045,877,033.00 dengan tingkat penyerapan anggaran atau 97,70%. Dan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat dihitung karena capain kinerja kurang dari 100 persen.

Tabel 2.28
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penanggulangan Bencana	4,792,744,438.00	4,712,784,883.00	98.33
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,395,212,300.00	1,333,092,150.00	95.55
Jumlah	**6,187,956,738.00**	**6,045,877,033.00**	**97.70**

Sumber : LRA Kabupaten Sumedang Tahun 2025

SASARAN 14

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

INDIKATOR

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah ndikator komposit yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengukur kondisi lingkungan air, udara, dan tutupan lahan di suatu wilayah pada waktu tertentu.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar termasuk kriteria "SEDANG". Poin tersebut merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air Sungai (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) IKTL. Perhitungan dengan rumus baru sebagaimana Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian LH Nomor : S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH untuk tahun 2020-2024, dengan rumus sebagai berikut :

IKLH = (0,367 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL)

Dengan kriteria Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Kriteria IKLH

No	Nilai/Skor	Kriteria
1	90-100	Sangat Baik
2	70 – 89,9	Baik
3	50 – 69,9	Sedang
4	25 – 49,9	Buruk
5	0 – 24,9	Sangat Buruk

Dari infografis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025, target kinerja IKLH tahun 2025 sebesar 66,96 poin dan realisasinya berdasarkan data hasil pengujian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang yang bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan Hidup yang berakreditasi terhadap tingkat pencemaran air sungai dan udara ambient serta data tutupan lahan hasil pencitraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didapatkan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang sebesar 72,34 poin dengan capaian kinerja sebesar 108,03% dengan kategori kinerja sangat tinggi dan melebihi target. Dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi IKLH mengalami kenaikan 5,38 Poin dari realisasi tahun 2024 sebesar 62,47 Poin begitupun capaian kinerja naik 12,73% dari 90,55% pada tahun 2024 menjadi 108,03% pada tahun 2025.

Grafik 2.22
Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Sumedang

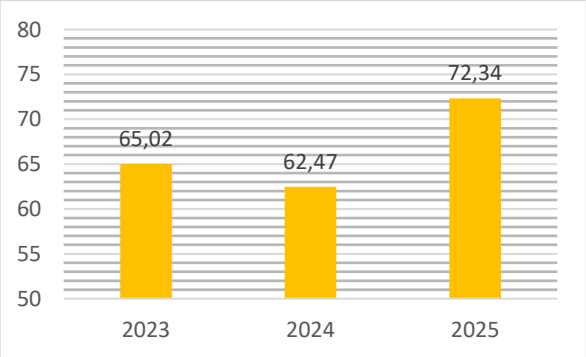

Dari grafik tren IKU diketahui bahwasannya realisasi IKLH Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun sempat turun pada tahun dari tahun 2023 dari 65,02 poin ke 62,47 poin pada tahun 2024. Dilihat dari perspektif RPD 2024-2026 target akhir jangka menengah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 70,53 poin dengan demikian

capaian kinerja tercapai IKLH tahun 2025 telah dapat melampaui target tahun akhir RPD, hal ini menjadi dasar untuk perubahan target pada tahun 2026 harus lebih besar dari realisasi tahun 2025.

Gambar 2.22

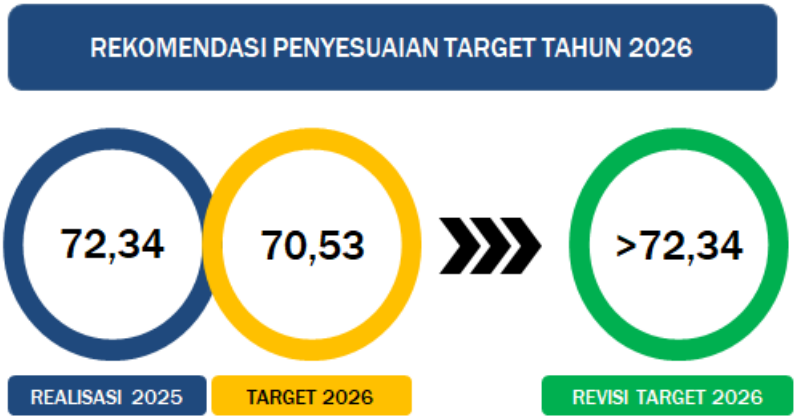

Untuk perbandingan dengan realisasi nasional dan provinsi sampai dengan waktu terakhir penyusunan laporan ini dibuat belum diketahui sehingga belum bisa dibandingkan.

Adapun keberhasilan capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini di pengaruhi oleh beberapa faktor berikut, antara lain :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

   Dari uji sampel air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat serta Kementrian Lingkungan Hidup diperoleh Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) Kabupaten Sumedang yaitu 70,71 Poin.

Tabel 2.30
Indeks Kualitas Air Sungai
Kabupaten Sumedang Tahun 2025

No	Kabupaten /Kota	Kategori IKA Setiap Titik Pantau			Jumlah Data Pemantauan	Jumlah IKA Pemantauan	IKA
		Sangat Baik	Sedang	Buruk			
1	Kabupaten Sumedang	0	26	2	28	1980	70.71

Dari 28 sampel yang dianalisis, didapat hasil 26 sampel berada pada kategori sedang dan 2 sampel berada pada kategori buruk. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas air sungai di Kabupaten Sumedang masih dalam kondisi sedang, namun telah terdapat beberapa titik yang mengalami penurunan kualitas dan memerlukan perhatian khusus.Parameter pencemar yang dominan

melebihi baku mutu adalah *Biochemical Oxygen Demand (BOD), Fecal Coliform, Total Suspended Solid (TSS), dan Total Fosfat.*

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

   Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sumedang yaitu 76,09 Poin dengan kategori "Sedang".

Tabel 2.31
Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)

No	Kabupaten /Kota	Perhitungan Indeks							IKU
		Rataan Per Parameter			Indeks dibagi baku Mutu			Rataan	
		NO2 (µg/m3)	SO2 (µg/m3)	PM 2,5	NO2 (µg/m3)	SO2 (µg/m3)	PM 2,5	INDEKS	
1	Kabupaten Sumedang	9.81	6.75	16.56	0.20	0.15	1.10	0.48	76.09

Nilai IKU tersebut merupakan hasil pengolahan data konsentrasi rata-rata parameter NO_2, SO_2, dan $PM_{2,5}$ yang dibandingkan terhadap baku mutu udara ambien sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi NO_2 sebesar 9,81 µg/m^3 dan SO_2 sebesar 6,75 µg/m^3 masih berada jauh di bawah baku mutu, yang tercermin dari nilai indeks masing-masing sebesar 0,20 untuk NO_2 dan 0,15 untuk SO_2. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pencemaran udara yang bersumber dari emisi pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas industri, dan lalu lintas kendaraan bermotor masih relatif terkendali.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)

   Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Sumedang yaitu 68.20 Poin, secara lebih rinci seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Indeks Kualitas Lahan

Luas Wilayah (Ha)	Luas Hutan	Luas belukar	Kebun Raya (data LIPI)	RTH (data Cipta Karya + DLH Prov)	Taman Kehati	RHL	ITH	IKL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
156.852	53.358,9	1537,03	0	108,08	15,0	123,5	0	68,20

Peningkatan kinerja **Indeks Kualitas Air (IKA)**, **Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)** pada Tahun 2025 ditunjang dengan :

a. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin dan berkelanjutan, yang didukung oleh ketersediaan regulasi serta komitmen pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air dan udara.
b. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan**,** serta koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah.
c. Pengendalian beban pencemaran pada beberapa segmen sungai melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan limbah usaha dalam pengelolaan lingkungan.
d. Relatif terbatasnya aktivitas industri berat, serta kondisi geografis dan sirkulasi udara yang mendukung dispersi polutan, berperan dalam menjaga konsentrasi pencemar udara, khususnya parameter NO_2 dan SO_2, tetap berada di bawah baku mutu.
e. Penguatan pemantauan kualitas air dan udara, pembinaan dan pengawasan terhadap sumber pencemar, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup.
f. Pengembangan generasi lingkungan diantaranya melalui keberhasilan sekolah-sekolah menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten/provinsi/nasional/mandiri yang mana sekolah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain :

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan Luas areal diluar kawsan hutan yang menjaga kelestarian keanekaragaman hayati seluas 32 Ha.
2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan dengan Luas taman Kehati diluar kawasan hutan yang dikelola seluas 10 Ha.
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas (RTH) yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten seluas 12 Ha.
4. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya dengan Luas taman Kehati lainnya kawasan hutan yang dikelola seluas 10 Ha.
5. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) seluas 34,80 Ha.
6. Pengamanan Kawasan TAHURA dengan Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura sebanyak 12 kali.
7. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tahura sebanyak 4 Desa.

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 12 (duabelas) program dengan pagu total anggaran Rp. 13,622,928,400.00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 13,295,476,831.00 atau tingkat

penyerapan anggaran 97,60%. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya 10,43% atau Rp.327,451,569.00.

Tabel 3.33
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja IKLH
Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	275,000,000.00	273,824,000.00	99.57
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	727,324,100.00	689,671,600.00	94.82
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	230,843,200.00	223,535,900.00	96.83
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	925,500,000.00	905,303,060.00	97.82
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	130,000,000.00	94,690,000.00	72.84
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	480,918,800.00	466,838,660.00	97.07
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	275,000,000.00	273,824,000.00	99.57
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	42,550,000.00	39,260,400.00	92.27
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	17,822,200.00	17,822,200.00	100.00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	18,761,800.00	7,901,800.00	42.12
Program Pengelolaan Persampahan	10,446,671,400.00	10,249,858,711.00	98.12
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	327,536,900.00	326,770,500.00	99.77
Jumlah	**13,622,928,400.00**	**13,295,476,831.00**	**97.60**

SASARAN 15

Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN

INDIKATOR

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN dalam melaksanakan tugasnya. IP ASN diukur berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi pendidikan, dan kedisiplinan. Dimensi IP ASN Dimensi kualifikasi, Dimensi kompetensi, Dimensi kinerja, Dimensi disiplin.

Capaian kinerja indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sumedang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Target kinerja Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sumedang tahun 2025 sebesar 71 Poin dan realisasinya 85,76 Poin dengan capaian kinerja sebesar 120,79% (kategori kinerja sangat tinggi). Realisasi IPASN tahun 2025 lebih tinggi 2,01 poin bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 akan tetapi untuk capaian kinerja lebih rendah -2,37% dari capaian pada tahun 2024. Bila dilihat dari target akhir RPD pada tahun 2026 dengan target 85 poin, capaian kinerja IPASN tahun 2025 sudah melebihi target akhir RPD dengan capaian kinerja 100,89% Poin sehingga perlu dilakukan perubahan target pada tahun 2026.

Gambar 2.23

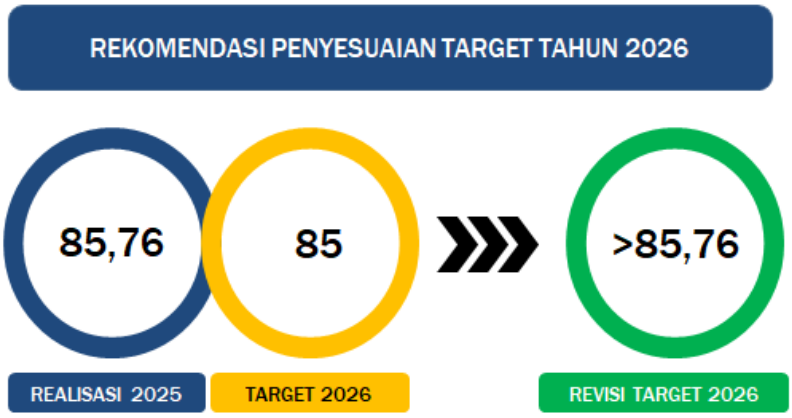

Grafik 2.23
Tren Indeks Profesionalitas ASN
Kabupaten Sumedang

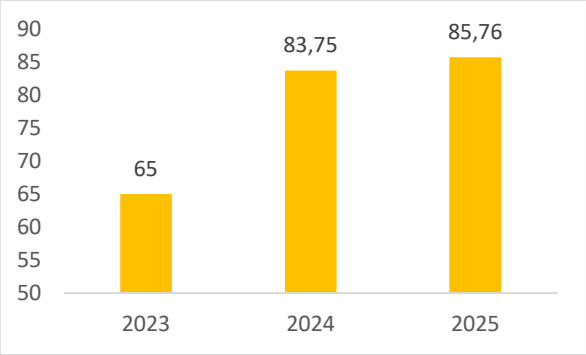

Dari grafik tren IKU diketahui bahwasannya realisasi IPASN Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 realisasi sebsar 65 poin, kemudian naik secara signifikan 18,75 poin pada tahun 2024 menjadi 83,75 poin dan pada Tahun 2025 naik kembali 2,01 poin menjadi 85,76 poin, sehingga bisa di katakan kondisi kompetensi, kinerja, kualifikasi pendidikan, dan kedisiplinan ASN di Kabupaten Sumedang berada pada jalur yang positif.

Diketahui Indeks Profesionalitas ASN Nasional tahun 2025 sebesar 81 poin dan IPASN Provinsi Jawa Barat terealisasi 92,78 poin, perbandingan IPASN Kabupaten Sumedang dilihat dari realisasi berada lebih tinggi 4,76 poin dari IPASN Nasional dan lebih rendah -17,02 Poin dari realisasi IPASN Provinsi Jawa Barat.

Dari keberhasilan atas capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab keberhasilannya, berikut analisis faktor-faktor penyebab keberhasilan antara lain :

1. Meningkatnya Indeks Sistem Merit yang di tunjang dengan terpenuhinya Layanan Pengadaan, Layanan Pemberhentian ASN, dan Layanan Informasi Kepegawaian ASN dengan capaian kinerja sebesar 100% yang meliputi Pengadaan PNS, pengelolaan Administrasi Pemberhentian Pegawai yang pensiun, Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, Pengelolaan Data Kepegawaian.
2. Promosi dan Mutasi Berdasarkan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja dengan

Tersusunnya Jumlah Dokumen Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah

3. Peningkatnya Kompetensi ASN melalui pelatihan, program pendidikan, diklat, bimtek e-kinerja, uji Kompetensi/Asesmen Kompetensi/Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator, pendampingan peserta uji kompetensi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, koordinasi dan Konsultasi terkait evaluasi pasca pelatihan dan analisis kebutuhan pelatihan tahun 2025.
4. Evaluasi Kinerja telah dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, pemberian penghargaan bagi PNS (Employee Of The Month), Satya lencana Satya 30/20/10 tahun, monitoring Pasca Idul Fitri Tahun 2025 sebanyak 55 SKPD, rakor kepegawaian pembinaan Disiplin ASN, Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN,

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN yaitu Program Kepegawaian Daerah dengan pagu total anggaran Rp. 14.314.723.768,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 13.758.719.323,00 dengan tingkat penyerapan anggaran 96,12% dan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya 24,67% atau senilai dengan Rp. 556,004,445.00.

Tabel 2.34
Realsiasi Anggaran Program Penunjang Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Kepegawaian Daerah	14.314.723.768,00	13.758.719.323,00	96,12
Jumlah	**14.314.723.768,00**	**13.758.719.323,00**	**96,12**

SASARAN 16

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR

Nilai SAKIP Kabupaten

SAKIP adalah singkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini merupakan sistem integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan, bertujuan menciptakan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien. SAKIP memastikan instansi pemerintah menggunakan anggaran tepat sasaran. Penilaian SAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Berikut kami sajikan hasil evaluasi AKIP Kabupaten Sumedang Tahun 2025 atas implemntasi AKIP tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kemenpan RB.

Target kinerja "Nilai SAKIP Kabupaten" tahun 2025 adalah Kategori A (82 poin) sedangkan realisasinya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi yang tersaji pada Aplikasi Portal RB Kementerian PANRB tahun 2026 terealiasi dalam Kategori BB (78,79 poin) atau capaian kinerja sebesar 96,08% (kategori kinerja sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 secara kategori masih tetap berada pada kategori BB namun terdapat kenaikan 1,35 poin dari 77,44 poin ke 78,79 poin pada tahun 2025 begitupun dari sisi capaian kinerja terdapat kenaikan 1,64% dari tahun 2024 dengan capaian 94,44% menjadi 96,08% pada tahun 2025.

Grafik 2.24

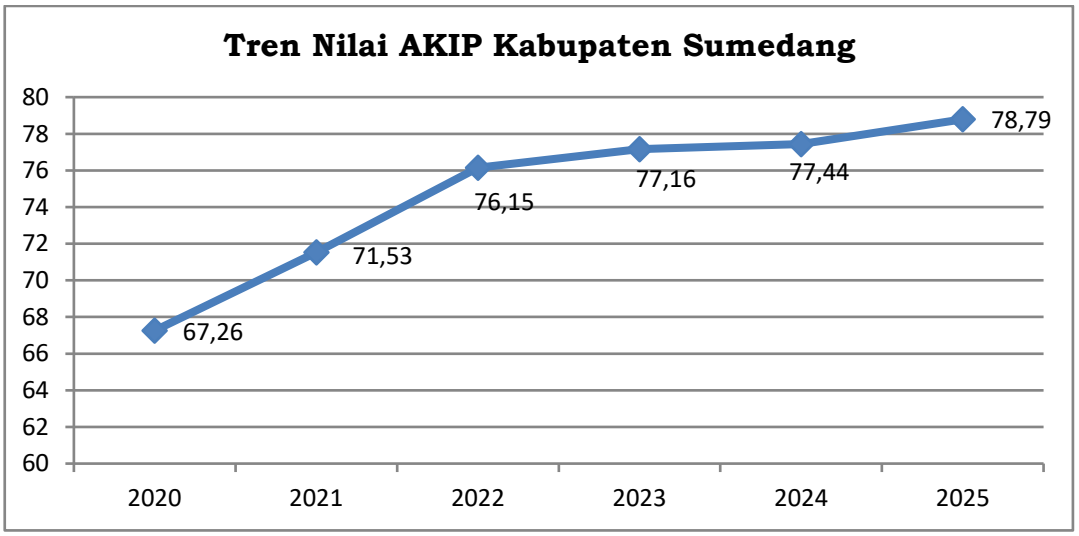

Dilihat dari tren Nilai AKIP Kabupaten Sumedang dari tahun 2020 sampai dengan 2025 menunjukan tren yang terus meningkat dimana pada tahun 2020 dengan nilai 67,26 poin sampai dengan tahun 2025 menjadi 78,79 poin didapat peningkatan sebesar 11,53 poin dalam kurun waktu 5 tahun.

Dalam RPD 2024-2026, target jangka menengah Nilai Sakip Kabupaten adalah kategori A (86 Poin) sehingga capaian kinerja jangka menengah Nilai Sakip Kabupaten pada tahun akhir RPD baru tercapai 91,62%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terealisasi sebesar 89,98poin, realiasasi Sakip Kabupaten Sumedang lebih rendah -11,19 Poin.

Dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang di dapat faktor-faktor ketidakberhasilan yang menjadi kendala atau permasalahan pencapaian target Nilai SAKIP Kabupaten Sumedang sehingga menjadi rekomendasi perbaikan , sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Masih ditemukan Penjenjangan kinerja yang disusun pada sebagian PD belum mempertimbangkan logical framework dan CSF atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat. Hal ini terlihat dari penetapan CSF yang tidak memiliki korelasi pada setiap levelnya, sehingga tidak dapat dipastikan CSF yang dibangun berpengaruh terhadap kinerja dilevel atasnya. Seperti pada Dinas Kesehatan terdapat CSF mengenai produk makanan yang diperiksa memenuhi syarat, namun faktor pembentuk dibawahnya terkait promosi kesehatan dengan output dokumen.

2. Sebagian PD tidak memanfaatkan Penjenjangan kinerja yang disusun sebagai dasar dalam penetapan kinerja tahunan. Seperti pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan.
3. Penjenjangan kinerja sebagian PD masih belum mempertimbangkan cross-cutting kinerja dengan unit/instansi lain;
4. Rencana aksi pada sebagian besar PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK. Seperti pada :
5. Terdapat rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi outcome atau bersifat kegiatan/output, dan indikator kinerja PD yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound) dan belum sesuai pada levelnya.

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran yang dilakukan masih terbatas pada realisasi Progam hingga sub kegiatan pada masing masing perangkat daerah, belum mengukur secara indikator kinerja yang ditetapkan, atau rencana aksi yang lain yang mendukung kinerja.
2. Capaian berkala triwulanan tidak dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian rencana. Hal ini ditandai dengan penetapan target triwulanan yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya.
3. Beberapa PD belum memanfaatkan aplikasi secara optimal sebagai alat pengukuran kinerja berkala. Hal ini ditandai dengan pengisian capaian kinerja triwulanan PD masih kosong pada aplikasi e-office.sumedangkab.go.id tepatnya pada fitur MAK SITI

C. Pelaporan Kinerja

1. Masih ditemukan sebagian kecil perangkat daerah yang belum memberikan analisa yang memadai atas keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja. Seperti pada Laporan Kinerja dinas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. LKjIP dan laporan kinerja PD belum seluruhnya dipublikasikan melalui laman resmi website Pemda untuk dapat diakses oleh masyarakat;
3. Laporan kinerja tidak dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya. Hal ini terlihat dari penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, seperti pada Dinas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada penetapan indikator jumlah wisatawan, yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

D. Evaluasi Internal

1. Fitur Evaluasi SAKIP internal menggunakan aplikasi terkadang tidak dapat diakses secara lancar, sehingga dikhawatirkan pelaksanaan evaluasi menggunakan aplikasi tidak berjalan secara optimal.
2. Pelaksanaan evaluasi pada komponen perencanaan masih menggunakan tahun sebelumnya, sehingga belum memberikan gambaran sesungguhnya atas kualitas pada perencanaan tahun berjalan.
3. Belum seluruh PD melakukan Tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh APIP. d) Hasil pengukuran evaluasi AKIP belum dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment bagi PD.

Adapun rekomendasi perbaikan kinerja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang kedepan antara lain :

1) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
2) Memastikan PD telah memanfaatkan penjenjangan kinerja yang disusun, sebagai dasar dalam penetapan kinerja dari level kepala dinas hingga level operasional;
3) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada penjabaran kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
4) Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
5) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran
6) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
7) Memastikan seluruh PD memanfaatkan aplikasi yang sudah dibangun sebagai alat dalam monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

8) Memanfaatkan hasil pengukuran berkala sebagai dasar dalam perencanaan pada triwulan berikutnya. Selanjutnya memastikan hasil pengukuran sebagai dasar dalam pemberian reward and punishment
9) Meningkatkan kualitas LPPD hingga laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
10) Menginformasikan laporan kinerja baik dari level Pemda maupun PD dalam laman resmi sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
11) Memastikan seluruh PD memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai dasar dalam penentuan target pada perencanaan tahun berikutnya.
12) Mengoptimalkan fitur Evaluasi SAKIP pada aplikasi eofficesumedangkab sehingga dapat digunakan oleh APIP dan PD secara optimal dalam pelaksanaan evaluasi internal.
13) Meningkatkan kualitas LHE AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
14) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
15) Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
16) Menyusun kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap PD untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Dalam upaya pencapaian kinerja tidak lepas dari pelaksanaan program-program kinerja, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor, antara lain :

Gambar 2.24

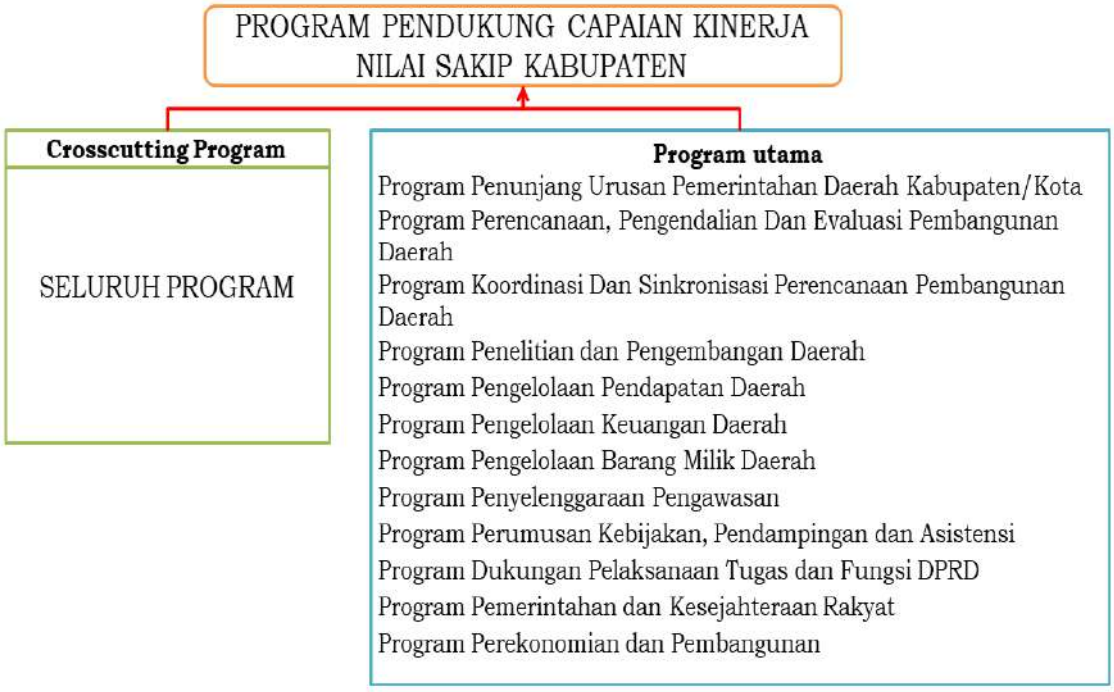

Program utama terdiri dari 12 program dengan total pagu anggaran Rp.1,698,126,401,640.00 dengan realisasi sebesar Rp.1,655,112,206,991.00 dengan tingkat penyerapan anggaran atau 97,47%. Dan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat dihitung karena capain kinerja kurang dari 100 persen.

Tabel 2.35
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,629,155,969,464.00	1,590,282,588,982.00	97.61
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,887,099,300.00	1,832,185,300.00	97.09
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,693,244,000.00	2,577,332,449.00	95.70
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,192,500,000.00	916,162,000.00	76.83
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7,250,537,237.00	7,138,327,079.00	98.45
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5,022,299,700.00	4,673,668,019.00	93.06
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,670,495,600.00	2,303,293,313.00	86.25
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,693,570,000.00	1,304,911,000.00	77.05

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1,882,461,200.00	414,434,000.00	22.02
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	24,204,025,500.00	23,742,528,014.00	98.09
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18,364,641,700.00	18,074,682,190.00	98.42
Program Perekonomian dan Pembangunan	2,109,557,939.00	1,852,094,645.00	87.80
Jumlah Total	**1,698,126,401,640.00**	**1,655,112,206,991.00**	**97.47**

SASARAN 16

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR

Nilai LPPD Kabupaten

Nilai LPPD adalah nilai penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu nilai dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD). LPPD adalah laporan yang dibuat pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan dan pencapaian kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. LPPD merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, hasil evaluasi LPPD Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Seperti hal nya Nilai SAKIP, nilai LPPD diambil dari hasil peilaian tahun 2024 yang di evaluasi pada tahun 2025 karena untuk nilai LPPD tahun 2025 yang di evaluasi pada tahun 2026 masih dalam proses pelaksanaan evaluasi. pada tahun 2025 Target kinerja “Nilai LPPD Kabupaten” adalah 3,78 poin terealisasi 3,6466 poin atau capaian kinerja sebesar 96,47% (kategori kinerja sangat tinggi). Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 0,12 poin begitupun dengan capaiannya naik 2,59%.

Grafik 2.25

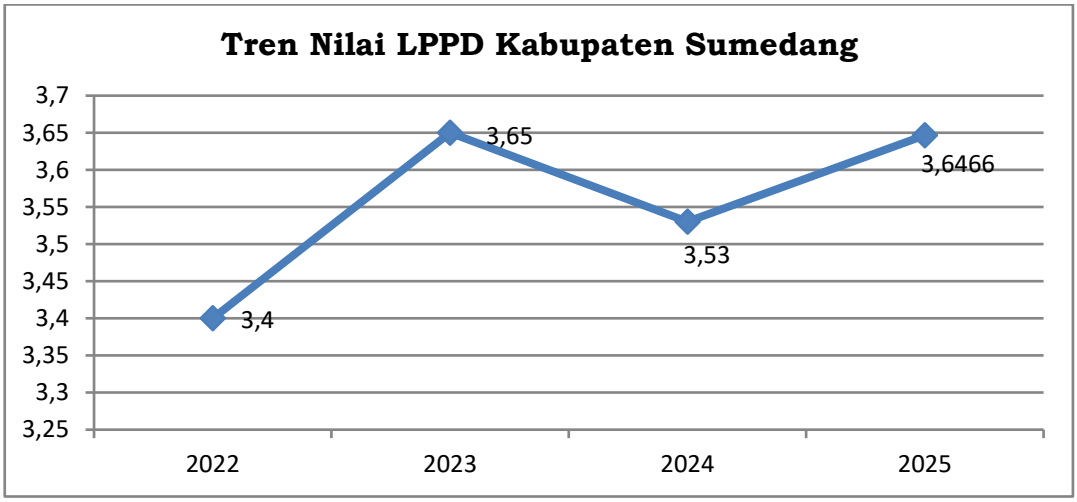

Dilihat dari tren realisasi nilai LPPD mengalami fluktutif dimana pada tahun 2022 realisasinya 3,4 poin kemudian naik pada tahun 2023 dengan realisasi 3,65 poin dan pada tahun 2024 mengalami penurun dengan realisasi 3,53 poin dan pada tahun 2025 naik kembali dengan realisasi 3,6466 poin.

Dalam RPD 2024-2026, target jangka menengah Nilai LPPD Kabupaten 3,8 poin sehingga capaian kinerja jangka menengah Nilai LPPD Kabupaten pada tahun akhir RPD sebesar 92,89%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Nilai LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terealisasi sebesar 3,6672 , nilai LPPD Kabupaten Sumedang lebih rendah -0,0206 Poin.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumedang Tahun 2024, capaian nilai LPPD belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pelaksanaan program, kualitas data kinerja, serta koordinasi antar perangkat daerah.

1. Keterbatasan Kualitas dan Konsistensi Data Kinerja

   Salah satu faktor utama yang mempengaruhi capaian nilai LPPD adalah belum optimalnya kualitas dan konsistensi data kinerja yang dilaporkan oleh perangkat daerah. Dalam beberapa indikator, data pendukung yang disampaikan belum sepenuhnya memenuhi standar kelengkapan dan validitas yang dipersyaratkan dalam evaluasi LPPD. Hal ini menyebabkan sebagian indikator tidak dapat dinilai secara maksimal atau memperoleh nilai yang rendah.

2. Belum Optimalnya Pencapaian Beberapa Indikator Kinerja Daerah

   Capaian nilai LPPD juga dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi beberapa indikator kinerja daerah yang menjadi komponen penilaian. Beberapa indikator pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, baik yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kondisi wilayah, maupun faktor eksternal lainnya.

   Ketidaktercapaian indikator tersebut berimplikasi langsung terhadap nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah karena indikator-indikator tersebut menjadi bagian dari parameter utama dalam penilaian LPPD.

3. Koordinasi Antar Perangkat Daerah yang Belum Optimal

   Proses penyusunan dan pelaporan LPPD memerlukan koordinasi yang intensif antara berbagai perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal sehingga terdapat keterlambatan dalam penyampaian data, perbedaan pemahaman terhadap indikator penilaian, serta kurangnya sinkronisasi informasi yang disampaikan. Kondisi ini berpengaruh terhadap kelengkapan dokumen pendukung yang menjadi dasar penilaian oleh pemerintah pusat.

4. Keterbatasan Kapasitas Pengelolaan Pelaporan Kinerja

Faktor lain yang mempengaruhi capaian nilai LPPD adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pelaporan kinerja pemerintahan. Proses penyusunan LPPD membutuhkan pemahaman yang baik terhadap metodologi pengukuran kinerja, indikator penilaian, serta tata cara penyusunan dokumen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, masih terdapat perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan kinerja tersebut sehingga berdampak pada kualitas penyajian data dan informasi dalam laporan.

5. Keterbatasan Integrasi Sistem Informasi Kinerja

   Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara optimal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi capaian nilai LPPD. Kondisi ini menyebabkan proses pengumpulan data kinerja menjadi kurang efisien serta berpotensi menimbulkan perbedaan data antar dokumen perencanaan dan pelaporan.

6. Adanya perubahan pedoman umum cara perhitungan capaian Indikator Kinerja Kunci pada waktu yang mendekati akhir dalam penyusunan, dengan format yang berbeda, Perangkat Daerah mengalami kesulitan dalam menyajikan data rekapan yang diminta.

Dalam upaya pencapaian kinerja tidak lepas dari pelaksanaan program-program kinerja, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor, antara lain :

Gambar 2.25

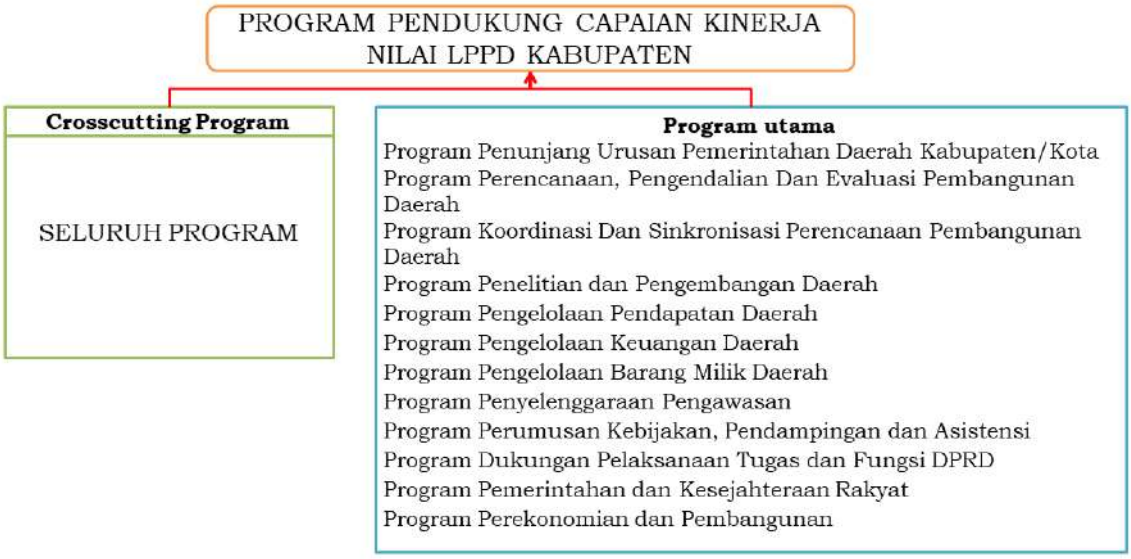

Program yang mendukung pencapaian Nilai LPPD Kabupaten Sumedang tahun 2024 terdiri dari dengan pagu anggaran total Rp. 1,698,126,401,640.00 yang terdiri dari 12 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1,655,112,206,991.00 atau 97,47%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

Tabel 2.36
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Nilai LPPDP Kabupaten Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,629,155,969,464.00	1,590,282,588,982.00	97.61
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,887,099,300.00	1,832,185,300.00	97.09
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,693,244,000.00	2,577,332,449.00	95.70
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,192,500,000.00	916,162,000.00	76.83
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7,250,537,237.00	7,138,327,079.00	98.45
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5,022,299,700.00	4,673,668,019.00	93.06
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,670,495,600.00	2,303,293,313.00	86.25
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,693,570,000.00	1,304,911,000.00	77.05
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1,882,461,200.00	414,434,000.00	22.02
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	24,204,025,500.00	23,742,528,014.00	98.09
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18,364,641,700.00	18,074,682,190.00	98.42
Program Perekonomian dan Pembangunan	2,109,557,939.00	1,852,094,645.00	87.80
Jumlah Total	**1,698,126,401,640.00**	**1,655,112,206,991.00**	**97.47**

SASARAN 17

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

INDIKATOR

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia, yang mencakup aspek kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi, pengaduan, dan inovasi. IPP diperoleh dari pengukuran melalui Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Selanjutnya Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 menetapkan beberapa komponen utama dalam penyusunan IPP, yang mencakup berbagai aspek pelayanan publik, antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan : Kebijakan pelayanan mencakup regulasi, Standar Pelayanan, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Maklumat Pelayanan dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan baik. Aspek ini menilai sejauh mana kebijakan yang ada mendukung tercapainya layanan yang efisien dan tepat sasaran.
2. Profesionalisme SDM : Kompetensi dan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelayanan publik sangat menentukan kualitas layanan. Penilaian dalam aspek ini mencakup ketersediaan pelatihan, profesionalisme, dan etika dalam melayani masyarakat.
3. Sarana dan Prasarana Pelayanan : Fasilitas fisik dan teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga menjadi salah satu faktor yang dinilai. Ketersediaan sarana yang memadai, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan layanan adalah elemen penting dalam komponen ini.
4. Sistem Imformasi Pelayanan Publik (SIPP) : mengukur ketersediaan Sistem Informasi yang digunakan untuk mempermudah pengguna layanan dalam mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, murah, tepat dan cepat
5. Pengelolaan Pengaduan : Pengelolaan pengaduan ini meliputi sarana prasarana, SDM,

media, akuntabilitas dan kecepatan tindaklanjut, yang disertai regulasi sebagai pedoman pelaksanaannya.

6. Inovasi Pelayanan : Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan, inovasi di bidang teknologi dan prosedur sangat diperlukan. Penilaian pada aspek ini menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu menciptakan atau mengadopsi inovasi untuk memperbaiki proses pelayanan publik.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPP) pada layanan, layanan bidang administrasi kependudukan, layanan bidang barang/jasa. berikut penjelasan capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sumedang tahun 2025, sebagai berikut :

Target kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten" tahun 2025 sebesar 4,72 Poin terealisasi sebesar 4,72 Poin kategori Pelayanan Prima dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori kinerja sangat tinggi) dan capaian ini telah memposisikan Kabupaten Sumedang berada pada peringkat pertama secara nasional pada kelompok Pemerintah Kabupaten.

Dibandingkan dengan tahun 2024 pada hasil PEKPPP tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar 0,14 poin dan dari sisi capaian kinerja naik 2,59% dari tahun 2024.

Garfik 2.26
Tren Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang

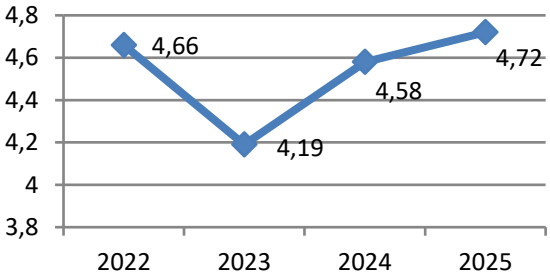

Dilihat dari tren Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan hal ini dikarenakan terdapat perubahan sistematika dan metode penilaian pada tahun 2023, akan tetapi pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 dapat menunjukan kembali tren positifnya.

Realisasi IPP tahun 2025 bila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026, dimana pada tahun 2026 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten ditargetkan mencapai 4,75 Poin sehingga realisasi IPP tahun 2025 terhadap target akhir RPD sudah tercapai 99,37%. Sementara itu diketahui untuk realisasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat terealisasi sebesar 4,63 poin, maka realiasasi IPP Kabupaten Sumedang berada lebih tinggi 0,90 Poin dari realisasi Provinsi Jawa Barat.

Dari keberhasilan atas capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab keberhasilannya, berikut analisis faktor-faktor penyebab keberhasilan antara lain :

1. **Aspek Kebijakan Pelayanan**

   Keberhasilan pelayanan publik didukung oleh adanya kebijakan pelayanan yang jelas dan terstruktur. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan berbagai regulasi dan standar pelayanan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

   Beberapa faktor yang mendukung pada aspek ini antara lain:

   - Penetapan standar pelayanan pada setiap unit layanan yang mencakup persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, serta mekanisme pengaduan.
   - Meningkatnya kesadaran penyelenggaran layanan untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik secara rutin sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan public.
   - Implemntasi maklumat pelayanan sebagai komitmen penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan yang transparan dan akuntabel.
   - Integrasi kebijakan pelayanan dengan sistem reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

   Kebijakan pelayanan yang jelas telah memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.

2. Aspek Profesionalisme Petugas Layanan

Profesionalisme aparatur merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif dan berkualitas.

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan publik walaupun dari sisi kuantitas penyelenggaraan peningkatan kualitas petugas layanan belum dapat dilakukan secara maksimal.
- Penerapan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
- Peningkatan disiplin dan etika pelayanan aparatur.
- Penerapan prinsip pelayanan prima (service excellence) dalam setiap unit layanan.

3. Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan berbagai upaya peningkatan fasilitas pelayanan guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Upaya tersebut antara lain:

- Penyediaan ruang pelayanan yang nyaman dan ramah bagi masyarakat.
- Penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, sistem antrean, dan fasilitas bagi kelompok rentan.
- Penataan area pelayanan agar lebih tertib dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan efektivitas proses pelayanan serta memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.

Beberapa bentuk implementasi sistem informasi pelayanan antara lain:

- Pengembangan aplikasi pelayanan berbasis digital.
- Penyediaan informasi pelayanan secara online melalui website dan media digital.
- Integrasi sistem pelayanan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai jenis layanan.

Pemanfaatan sistem informasi ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi pelayanan secara lebih cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

5. Aspek Pengelolaan Pengaduan

Pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun aspirasi.

Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

- Optimalisasi kanal pengaduan masyarakat melalui berbagai media.
- Tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat.
- Monitoring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Pengelolaan pengaduan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan pelayanan.

6. Aspek Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendorong perangkat daerah untuk mengembangkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa bentuk inovasi pelayanan antara lain:

- Pengembangan layanan berbasis digital untuk mempercepat proses pelayanan.
- Penyederhanaan prosedur pelayanan agar lebih efektif dan efisien.
- Penciptaan model pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Inovasi pelayanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam upaya pencapaian kinerja tidak lepas dari pelaksanaan program-program kinerja, adapun program yang mendukung kinerja dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Program Utama dan Program Lintas Sektor, antara lain :

Gambar 2.26

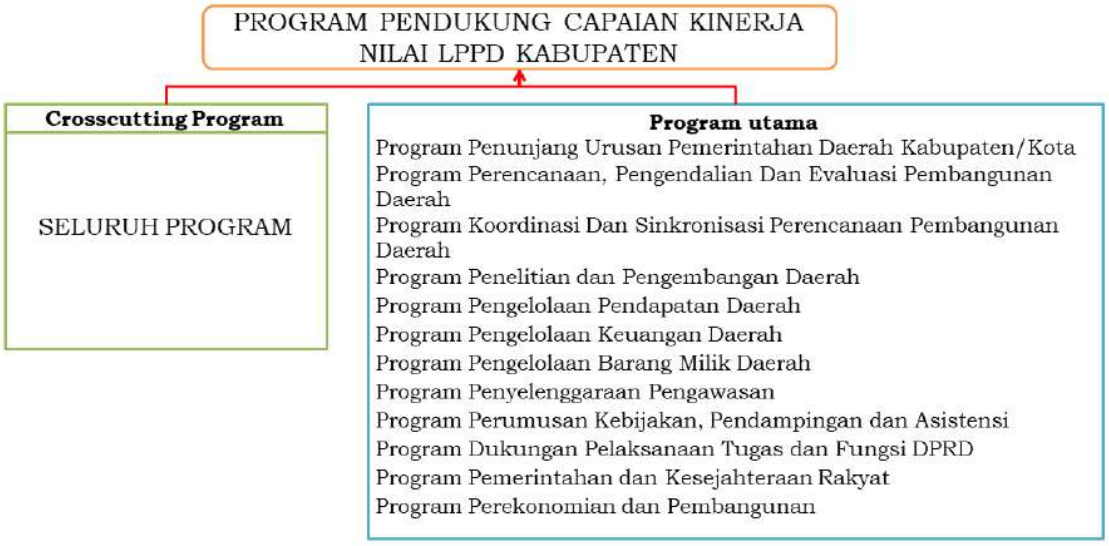

Program yang mendukung pencapaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang tahun 2025 terdiri terdiri dari 12 program dari dengan pagu anggaran total Rp. 3,449,638,100,748,-. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3,362,410,199,077,- atau penyerapan anggaran 97,47%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 2,53% atau senilai Rp. 87,227,901,671,-.

Tabel 2.37
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pendaftaran Penduduk	1,286,814,700.00	1,258,053,229.00	97.76
Program Pencatatan Sipil	248,436,900.00	242,270,300.00	97.52
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	257,372,000.00	254,083,997.00	98.72
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,581,373,700.00	2,537,704,810.00	98.31
Program Pelayanan Penanaman Modal	133,739,900.00	132,441,400.00	99.03
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	50,187,000.00	47,378,000.00	94.40
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	22,645,500.00	20,845,500.00	92.05

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	12,154,443,200.00	12,000,897,800.00	98.74
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,927,788,350.00	1,890,846,050.00	98.08
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	256,382,200.00	249,368,000.00	97.26
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	616,103,400.00	579,643,800.00	94.08
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	351,706,350.00	339,646,450.00	97.47
Jumlah Total	**3,449,638,100,748.00**	**3,362,410,199,077.00**	**97.47**

Sumber : (BKAD) LRA Kabupaten Sumedang Tahun 2025

SASARAN 18

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

INDIKATOR

Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna secara terintegrasi. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik mencakup beberapa domain aspek penilaian dengan pembobotan sebagai berikut :

Tabel 2.38
Domain dan Aspek Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%

Predikat Indeks SPBE		
NO	**NILAI INDEKS**	**PREDIKAT**
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Aspek 8 - Layanan Publik	18%	*) Target penilaian: Predikat Baik(indeks minimal 2,6)

Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3.23	4.09	3.95	3.34	3.55	2.99	3.52
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Tata Kelola	2.76	3.96	3.83	3.08	3.24	2.39	3.13
Perencanaan	2.56	3.84	3.88	2.96	3.11	2.20	2.83
TIK	2.87	4.02	3.85	3.10	3.33	2.51	3.30
Penyelenggara	2.92	4.07	3.70	3.31	3.36	2.55	3.41
Manajemen	2.00	2.91	2.85	2.28	2.38	1.73	2.24
Manajemen	2.06	2.99	2.91	2.37	2.43	1.78	2.32
Audit	1.84	2.70	2.68	2.05	2.22	1.60	2.04
Layanan SPBE	3.87	4.50	4.34	3.81	4.07	3.70	4.13
Layanan Adm. Pemerintahan	3.85	4.42	4.29	3.87	4.02	3.70	4.07
Layanan Publik	3.90	4.63	4.43	3.71	4.16	3.69	4.23

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. SUMEDANG

4,63
(Memuaskan)

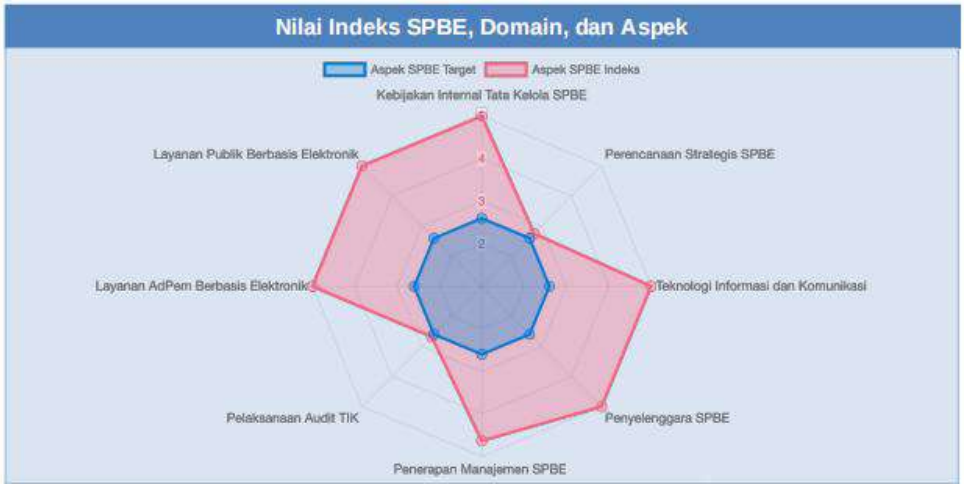

Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	**4,63**
Domain Kebijakan SPBE	5,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*5,00*
Domain Tata Kelola SPBE	4,10
Perencanaan Strategis SPBE	*2,75*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*5,00*
Penyelenggara SPBE	*5,00*
Domain Manajemen SPBE	4,09
Penerapan Manajemen SPBE	*4,63*
Audit TIK	*2,67*
Domain Layanan SPBE	5,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*5,00*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*5,00*

Sumber : Laporan Hasil Pemantau SPBE Tahun 2025

Target kinerja "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis ELektronik" tahun 2025 sebesar 4,3 poin dan realisasinya berdasarkan data hasil evaluasi untuk Indeks SPBE Kabupaten Sumedang adalah 4,63 poin atau capaian kinerja sebesar 106,44% (kriteria kinerja sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat kenaikan 0,12 poin dan capaian kinerjanya meningkat sebesar 1,56%.

Grafik 2.27
Tren Sistem SPBE
Kabupaten Sumedang

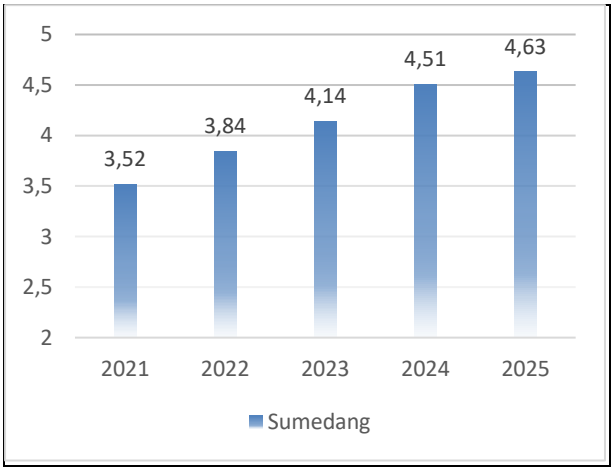

Dilihat dari tren Indeks SPBE Kabupaten Sumedang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami tren yang positif, selama periode 5 tahun loncatan Indeks SPBE tahun 2021 ke tahun 2025 naik 1,11 Poin. Tren positif ini harus dipertahankan bahkan harus terus ditingkatkan. Dalam RPD 2024-2026 target akhir RPD untuk Indeks SPBE adalah 4,4 Poin, sehingga capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir RPD sudah mencapai 105,23% (target terlampaui),dikarenakan target sampai dengan akhir tahun RPD sudah terlampaui maka harus dilakukan revisi target untuk tahun 2026 sebagai berikut.

Gambar. 2.27

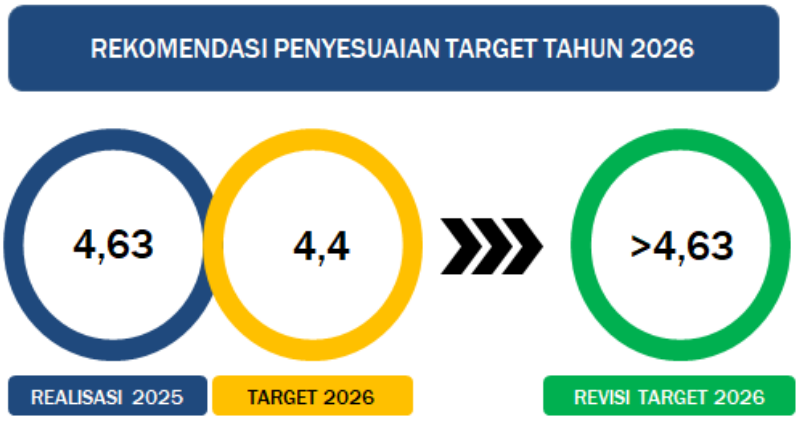

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang menunjukan peningkatan, hal ini merupakan kerja keras Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan Indeks SPBE Nasional. Berikut kami sajikan grafik perbandingan Indeks SPBE Pemda Kabupaten Sumedang tingkat Provinsi dan Nasional. Apabila dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Barat yang terealisasi sebesar 4,73 Poin realiasasi Indeks SPBE Kabupaten Sumedang lebih rendah -0,10 Poin, dan lebih tinggi 1,40 Poin apabila dibandingkan dengan Indeks SPBE Nasional.

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapain target ini antara lain :

1. Terlayaninya masayarakat untuk mendapatkan informasi publik melalui *pengelolaan*

konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publikyang berdampak pada terlaksananya keterbukaan informasi publik sesuai amanat keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sesuai hasil keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat nomor : 006/SK/KI-JBR/XI/2025 Tentang Hasil monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada badan Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan, Kabupaten Sumedang melalui Dinas komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik memperoleh predikat Terbaik ke-2 Jawa Barat dengan nilai 100 kategori Kabupaten Informatif.

2. Meningkatnya layanan SPBE yang ditandai dengan tercapainya target kinerja Indeks Layanan SPBE dimana pada tahun 2024 indeks layanan SPBE terealisasi 4,69 poin dan meningkat menjadi 5 poin pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 125%. Peningkatan capaian tersebut didukung oleh beberapa upaya strategis, antara lain pengembangan dan optimalisasi aplikasi layanan pemerintahan, peningkatan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan implementasi layanan publik berbasis elektronik. Selain itu, upaya integrasi layanan melalui pengembangan portal layanan publik juga mulai menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
3. Penyelenggaraan statistik sektoral, pembangunan metadata statistic sektoral, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral dan pengembangan insfrastruktur statistik, berdasarkan hasil evaluasi diperoleh bahwa indeks statistic Kabupaten Sumedang berda pada kategori Terdefinisi dengan Indeks Pembangunan Statistik 3,24 Poin. Kabupaten Sumedang menempati posisi peringkat kedua nasional serta terbaik di Provinsi Jawa Barat**,** yang mencerminkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang tinggi.
4. Meningkatnya Indeks Kemanan Informasi (KAMI) dimana pada tahun 2024 yang mendapatkan score 549 poin, meningkat pada tahun 2025 menjadi 579 poin. Kinerja pencapaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kabupaten Sumedang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik menunjukkan tren peningkatan yang dipengaruhi oleh penguatan kebijakan, komitmen kelembagaan, serta implementasi SPBE. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah diantaranya sebagai berikut :

a. Tata kelola yang kuat dalam penerapan keamanan informasi, tersedianya kebijakan keamanan informasi.
b. Penerapan pengendalian keamanan informasi diantaranya pengamanan akses sistem dan data, pengamanan jaringan dan aplikasi.
c. Peningkatan kesadaran SDM (peningkatan awareness pegawai).

5. Meningkatkan Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip secara Baku. Hal ini ditandai dengan tercapainya Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip secara Baku tahun 2025 sebesar 122,51%, dari terget 65% terealisasi 79,63%. Pengelolaan arsip baku ini meliputi pembuatan daftar arsip untuk arsif aktif dan inaktif, pengelolaan arsip statis melalui pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis, perlindungan dan penyelamatan arsip didukung oleh meningkatnya autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media (digitalisasi).

Program yang mendukung capaian kinerja Indeks SPBE tahun 2025 terdiri dari 6 (enam) program dengan total pagu anggaran Rp. 12,010,601,600.00. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 10.111.497.950,00 tingkat penyerapan anggaran 93,20% dan tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya yaitu 13,24% atau Rp. 817,021,159.00.

Tabel 2.39
Realisasi Anggaran Program Penunjang Pencapaian Kinerja
Indeks SPBE Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2,736,498,800.00	2,699,965,650.00	98.66
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	8,482,092,900.00	8,157,578,391.00	96.17
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	342,418,500.00	336,036,400.00	98.14
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	261,745,700.00	257,386,660.00	98.33
Program Pengelolaan Arsip	146,859,900.00	141,325,900.00	96.23
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40,985,800.00	40,269,800.00	98.25
Jumlah	**12,010,601,600.00**	**11,193,580,441.00**	**93.20**

Sumber : LRA Kabupaten Sumedang Tahun 2025

1.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

PEMERINTAHAN KAB. SUMEDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI) TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
4	PENDAPATAN DAERAH	2.943.318.459.991,00	2.904.851.845.803,08	98,69
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	698.437.352.527,00	659.239.630.761,08	94,38
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.244.881.107.464,00	2.245.612.215.042,00	100,03
	JUMLAH PENDAPATAN	2.943.318.459.991,00	2.904.851.845.803,08	98,69
5	BELANJA DAERAH	3.007.990.996.807,34	2.913.267.643.941,00	96,85
5.1	BELANJA OPERASI	2.339.974.706.318,00	2.285.234.081.300,00	97,66
5.2	BELANJA MODAL	192.239.246.288,00	182.135.665.627,00	94,74
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.956.169.801,34	664.976.500,00	2,21
5.4	BELANJA TRANSFER	445.820.874.400,00	445.232.920.514,00	99,86
	SURPLUS/DEFISIT	(64.672.536.816,34)	(8.415.798.137,92)	13,01
6	PEMBIAYAAN DAERAH	64.672.536.816,34	64.672.536.816,34	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.672.536.816,34	68.672.536.816,34	100,00

Realisasi anggaran program dalam menunjang capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.40
Realisasi Anggaran Program
Penunjang Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Tahun 2025

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdayasaing yang didukung Teknologi Informasi	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	235,170,655,755.00	215,793,575,089.00	91.76
	Harapan Lama Sekolah (HLS)			

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Komunikasi				
Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	141,905,752,557.00	138,494,455,603.00	97.60
Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlndungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	1,945,008,000.00	1,690,423,700.00	86.91
	Indeks Pemberdayaan Gender			
Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan, dan demokrasi masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	13,476,609,350.00	13,129,074,366.00	97.42
Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwasta, perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	2,649,347,859.00	2,536,959,959.00	95.76
	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	1,380,187,500	1,365,767,200	98.96
	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	22,919,947,067	22,028,970,460	96.11
	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	2,365,517,800.00	2,247,029,250.00	94.99
Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasaran dalam pengembangan wilayah	Indeks Kualitas Infrastruktur	142,950,419,106.00	138,686,566,292.00	97.02
Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Penanaman Modal Di Kabupaten Sumedang	173,045,500.00	168,935,900.00	97.63
Meningkatnya ketahanan pangan	Nilai komposit FSVA	5,297,667,100.00	5,148,851,541.00	97.19

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
menuju kemandirian pangan				
Meningkatnya kesejahteraan social	PDRB Per Kapita (ADHB)	12,386,850,300.00	11,931,927,955.00	96.33
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,459,761,400.00	5,287,789,830.00	96.85
Meningkatnya Perekonomian Perdesaan	Indeks Desa Membangun	10,294,151,070.00	10,204,659,016.00	99.13
Meningkatnya Ketahan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	6,187,956,738.00	6,045,877,033.00	97.70
Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	13,622,928,400.00	13,295,476,831.00	97.60
Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme AS	Indeks Profesionalitas ASN	14,314,723,768.00	13,758,719,323.00	96.12
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Kabupaten (Kategori Nilai LPPD Kabupaten	1,698,126,401,640.00	1,655,112,206,991.00	97.47
Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,449,638,100,748.00	3,362,410,199,077.00	97.47
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	12,010,601,600.00	11,193,580,441.00	93.20

Sumber data : BKAD 2025 (diolah)

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa,dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi:

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

   Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

   Gambaran umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Provinsi, meliputi jumlah Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, jumlah kegiatan dan anggaran tugas pembantuan, dan lain- lain pelaksanaan tugas pembantuan.
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

   Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan tindak lanjut serta laporan realisasi anggaran berupa neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang dari para kepala SKPD yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dana tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan (medebewind) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah.

1.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tugas pembantuan daeri kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

1.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

1.1.2 Realisasi

Realiasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Sumedang yang disampaikan kepada perangkat daerah tahun 2025

Matriks Sistematika Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	PD Pelaksana Tp	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan		%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
1	Kementerian/LPNK...	Peraturan Menteri/LPNK No... Tahun...	Program... Kegiatan.... Keluaran (Output)... Rincian Kegiatan....									
2	dst											

Sumber Data : hasilkoordinasi dengan Perangkat Daerah Tahun 2025 tidak ada Tugas Pembantuan

Setelah tahun anggaran berakhir tahun 2025 bagian Tapem sebagai Tim penyusun LPPD berkoordinasi dengan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sumedang berkaitan dengan pengalokasian dana tugas pembantuan pada tahun 2025.

Hasil berkoordinasi dengan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025 Kabupaten Sumedang tidak mendapatkan pengalokasian dana tugas pembantuan.

Permasalahan secara umum pada penyelenggaraan tugas pembantuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk tahun 2025 diantaranya :

❖ Permasalahan

- Belum semua Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dapat menyampaikan informasi awal terkait pagu indikatif Tugas Pembantuan yang akan diberikan ke daerah sehingga keselarasan dalam perencanaan sulit terbangun.

Solusi secara umum pada penyelenggaraan tugas pembantuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk tahun 2025 diantaranya :

❖ Solusi

- Proaktif dengan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi terkait potensi tugas pembantuan yang akan diberikan.
- Mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan dan pedoman terkait lainnya.
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan pengalokasian dana tugas pembantuan pada tahun 2025.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan seperti di bawah ini :

Tabel 4.1.1

JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**0**	**0**	**0.00 %**
	1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**						**0**	**0**	**0.00 %**
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	0.00 %
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0003	0	0	0.00 %
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0004	0	0	0.00 %
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0005	0	0	0.00 %
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0006	0	0	0.00 %
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0007	0	0	0.00 %
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0009	0	0	0.00 %
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0010	0	0	0.00 %
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0011	0	0	0.00 %
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0013	0	0	0.00 %
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0014	0	0	0.00 %
		12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0015	0	0	0.00 %
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0016	0	0	0.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0019	0	0	0.00 %
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0021	0	0	0.00 %
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0022	0	0	0.00 %
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0025	0	0	0.00 %
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	0	0	0.00 %
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	0	0	0.00 %
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	0	0	0.00 %
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0029	0	0	0.00 %
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0030	0	0	0.00 %
		23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0031	0	0	0.00 %
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0032	0	0	0.00 %
		25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0033	0	0	0.00 %
		26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0034	0	0	0.00 %
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	0.00 %
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	0.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	0	0	0.00 %
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0039	0	0	0.00 %
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00 %
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0042	0	0	0.00 %
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0044	0	0	0.00 %
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00 %
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	0	0	0.00 %
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	0	0	0.00 %
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0048	0	0	0.00 %
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	0	0	0.00 %
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	0	0	0.00 %
	2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**						**0**	**0**	**0.00 %**
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	0	0	0.00 %
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0003	0	0	0.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0004	0	0	0.00 %
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0005	0	0	0.00 %
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0006	0	0	0.00 %
		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0007	0	0	0.00 %
		7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0008	0	0	0.00 %
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0009	0	0	0.00 %
		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0010	0	0	0.00 %
		10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0011	0	0	0.00 %
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0012	0	0	0.00 %
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	0	0	0.00 %
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0016	0	0	0.00 %
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0017	0	0	0.00 %
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0018	0	0	0.00 %
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0019	0	0	0.00 %
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0021	0	0	0.00 %
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0022	0	0	0.00 %
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0023	0	0	0.00 %
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0024	0	0	0.00 %
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0025	0	0	0.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0026	0	0	0.00 %
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0027	0	0	0.00 %
		24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0030	0	0	0.00 %
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	0	0	0.00 %
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0034	0	0	0.00 %
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0035	0	0	0.00 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0038	0	0	0.00 %
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	0	0	0.00 %
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	0	0	0.00 %
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	0	0	0.00 %
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0042	0	0	0.00 %
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0043	0	0	0.00 %
		34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0044	0	0	0.00 %
		35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0045	0	0	0.00 %
		36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0046	0	0	0.00 %
		37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0047	0	0	0.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	0	0	0.00 %
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	0.00 %
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051	0	0	0.00 %
		42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0052	0	0	0.00 %
		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00 %
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00 %
		45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0056	0	0	0.00 %
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0057	0	0	0.00 %
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	0	0	0.00 %
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	0	0	0.00 %
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00 %
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062	0	0	0.00 %
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0063	0	0	0.00 %
		53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0064	0	0	0.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**						**0**	**0**	**0.00 %**
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0002	0	0	0.00 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0003	0	0	0.00 %
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0004	0	0	0.00 %
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0007	0	0	0.00 %
		5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0008	0	0	0.00 %
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0009	0	0	0.00 %
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	0	0	0.00 %
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0012	0	0	0.00 %
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0013	0	0	0.00 %
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	0	0	0.00 %
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	0	0	0.00 %
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	0	0	0.00 %
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0018	0	0	0.00 %
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0019	0	0	0.00 %
		15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0020	0	0	0.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0021	0	0	0.00 %
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0022	0	0	0.00 %
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	0	0	0.00 %
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	0	0	0.00 %
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	0	0	0.00 %
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026	0	0	0.00 %
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0028	0	0	0.00 %
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	0	0	0.00 %
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030	0	0	0.00 %
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0031	0	0	0.00 %
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0032	0	0	0.00 %
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0033	0	0	0.00 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0034	0	0	0.00 %
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0035	0	0	0.00 %
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0036	0	0	0.00 %
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0037	0	0	0.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0038	0	0	0.00 %
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	0	0	0.00 %
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040	0	0	0.00 %
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	0	0	0.00 %
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0042	0	0	0.00 %
	4	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**						**0**	**0**	**0.00 %**
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0001	0	0	0.00 %
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0010	0	0	0.00 %
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0011	0	0	0.00 %
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0012	0	0	0.00 %
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0015	0	0	0.00 %
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0016	0	0	0.00 %
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0017	0	0	0.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0018	0	0	0.00 %
		9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0021	0	0	0.00 %
		10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0023	0	0	0.00 %
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0024	0	0	0.00 %
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0025	0	0	0.00 %
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0026	0	0	0.00 %
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0027	0	0	0.00 %
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0028	0	0	0.00 %
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0030	0	0	0.00 %
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0031	0	0	0.00 %
		18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0032	0	0	0.00 %
		19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0033	0	0	0.00 %
		20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0034	0	0	0.00 %
		21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0035	0	0	0.00 %
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0036	0	0	0.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0037	0	0	0.00 %
		24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0038	0	0	0.00 %
		25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0039	0	0	0.00 %
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0040	0	0	0.00 %
		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0041	0	0	0.00 %
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0042	0	0	0.00 %
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0043	0	0	0.00 %
		30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0044	0	0	0.00 %
		31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0045	0	0	0.00 %
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0046	0	0	0.00 %
		33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0047	0	0	0.00 %
		34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0048	0	0	0.00 %
		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0049	0	0	0.00 %
		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0050	0	0	0.00 %
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**							**0**	**0**	**0.00 %**
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA										

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NAMA KEGIATAN									

Sumber data Dinas Pendidikan 2025

4.1.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri dengan Tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.2
Indikator Urusan Pendidikan Target Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100 %
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	100 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Persen	100 %

4.1.3 Realisasi

Realiasi adalah Realisasi Jenis Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 selama 1 (satu) tahun anggaran.

Tabel 4.1.3
Realisasi Jenis Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumedang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					93.94 %	
1.	**Pendidikan Dasar Usia Dini**					88.12 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	97	3.00	97.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**78.25 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	38033	37200	**833**	**97.81 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**9.88 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					49.38 %	
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	972	618	**3.540.000**	**63.58 %**	
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	1933	680	**1,253.0000**	**35.18 %**	
2 .	**Pendidikan Dasar**					95.20 %	
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	97	**3.00**	**97.00 %**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	94	**6.00**	**94.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**75.83 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	173843	164772	**9071**	**94.78 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**19.37 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.85 %	
	SD (2025)					96.35 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	53	70	**-170.000**	**100.00 %**	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	65	70	**-50.000**	**100.00 %**	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	78	70	**80.000**	**89.74 %**	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75	69	**60.000**	**92.00 %**	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60	69	**-90.000**	**100.00 %**	
	SMP (2025)					97.36 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	53	46	**70.000**	**86.79 %**	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	65	70	**-50.000**	**100.00 %**	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	71	72	**-10.000**	**100.00 %**	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72	72	**0.0000**	**100.00 %**	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57	72	**-150.000**	**100.00 %**	
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**					98.49 %	
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	0	0	**0.00**	**0.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	197603	197603	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.49 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					92.43 %	
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	213793	197603	**16,190.0000**	**92.43 %**	

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

1. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun sebanyak 38033 jiwa, jumlah yang terlayani sebanyak 37200 jiwa, sehingga warga negara yang belum terlayani sebanyak 833 jiwa. Dengan demikian total pencapaiannya adalah 97.81 %
2. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs).Jumlah warga negara usia 7-15 tahun sebanyak 173843 jiwa, jumlah yang terlayani sebanyak 164772 jiwa, sehingga warga negara yang belum terlayani sebanyak 9071 jiwa. Dengan demikian total pencapaiannya adalah 94.78 %.
3. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah sebanyak 197603 jiwa, jumlah yang terlayani sebanyak 197603 ,dengan demikian total pencapaiannya adalah 100 %

4.1.4 Alokasi Anggaran

Pada dasarnya seluruh anggaran dari berbagai sumber yang dialokasikan untuk bidang Pendidikan adalah untuk memenuhi SPM baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi yang secara langsung menembak SPM adalah sebesar Rp. 234,809,684,555 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Dari anggaran pada Dinas Pendididkan sebesar Rp 960,998,570,617 (Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta LimaRatus Tujuh Puluh Ribu Enam Puluh Tujuh Belas Rupiah) dengan Rincian Tabel Dibawah ini :

Tabel 4.1.4
Anggaran Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Pendidikan Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. SUMEDANG	2,929,691,214,462
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	960,998,570,617
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	234,809,684,555
	APBD	234,809,684,555
	A. APBD MURNI	234,809,684,555
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.5
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2025

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	**Kepala Dinas/Badan**	**Pembina Tingkat I, IV/b**	**S3**	**1**	
2	**Sekretariat**				
	Sekretaris	**Pembina Tingkat I, IV/b**	**S2**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Umum &	**Penata Tingkat I, III/d**	**S1**	**1**	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Keuangan				
	Penelaan Teknis Kebijakan		S1	9	
	Pengolah Data dan Informasi		D3	29	
	Pengadiministrasi Perkantoran		SMA	20	
	Operator Layanan Operasional		SMA	30	
	Penata Layanan Operasional		S1	5	
	Pengawas Barang Beredar dan Jasa		S1	1	
	Pengelola Umum Operasional		SD	37	
	Pranata Komputer Ahli Pertama		S1	4	
	Perencana Ahli Pertama		S1	1	
	-				
	-				
3	**Bidang PAUD dan DIKMAS**				
	Kepala Bidang Paud & Dikmas	**Pembina, IV/a**	**S2**	**1**	
	Widyaprada Ahli Pertama		S1	1	
	Kepala Seksi Pendidik & Kependidikan	Penata, III/c	S2	1	
	Penelaah Teknis Kebijakan		S1	1	
	Pengolah Data dan Informasi		D3		
	Pengadministrasi Perkantoran		SMA	1	
	Kepala Seksi Kurikulum & Kesiswaan	Penata Tingkat I, III/d	S1	1	
	Penelaah Teknis Kebijakan		S1	1	
	Pengolah Data dan Informasi		D3		
	Pengadministrasi Perkantoran		SMA		
4.	**Bidang Pendidikan Sekolah Dasar**				
	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Penata Tingkat I, III/d	S1	1	
	Kepala Seksi Pendidik & Kependidikan		S2	1	
	Penelaah Teknis Kebijakan		S1	2	
	Pengolah Data dan Informasi		D3		
	Pengadministrasi Perkantoran		SMA		
	Kepala Seksi Kurikulum & Kesiswaan		S1	1	
	Penelaah Teknis Kebijakan		S1	2	
	Pengolah Data dan Informasi		D3		
	Pengadministrasi Perkantoran		SMA		
5.	**Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				
	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		S2	1	
	Kepala Seksi Pendidik & Kependidikan		S2	1	
	Penelaah Teknis Kebijakan		S1	2	
	Pengolah Data dan Informasi		D3		
	Pengadministrasi Perkantoran		SMA		
	Kepala Seksi Kurikulum & Kesiswaan		S2	**1**	
	Penelaah Teknis Kebijakan		S1	**2**	
	Pengolah Data dan Informasi		D3		
	Pengadministrasi Perkantoran		SMA		
6.	**Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana**				
	Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana		S1	1	

	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar		S1	1	
	Penelaah Teknis Kebijakan		S1	2	
	Pengolah Data dan Informasi		D3		
	Pengadministrasi Perkantoran		SMA		
	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat		S2	1	
	Penelaah Teknis Kebijakan		S1	1	
	Pengolah Data dan Informasi		D3		
	Pengadministrasi Perkantoran		SMA	1	
	Jumlah PNS			**227**	
	Jumlah P3K			**3**	
	Jumlah Total			**230**	

Sumber data Dinas Pendidikan 2025

.

4.1.6 Kendala Permasalahan dan Solusi

Kendala permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM pada urusan Pendidikan di Kabupaten Sumedang.

Permasalahan :

1. Cakupan layanan pendidikan belum menjangkau seluruh sasaran usia sekolah sesuai SPM;
2. Masih terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) yang belum tertangani;
3. Rasio peserta didik terhadap guru belum sesuai standar SPM;
4. Kualifikasi dan kompetensi pendidik belum seluruhnya memenuhi standar;
5. Sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi standar minimal SPM;
6. Akses pendidikan di wilayah terpencil dan sulit dijangkau masih terbatas;
7. Kualitas hasil pembelajaran (literasi dan numerasi) masih di bawah standar;
8. Pemanfaatan data SPM dalam perencanaan belum optimal.

Solusi :

a. Pemetaan kebutuhan layanan pendidikan berbasis data;
b. Penguatan program penanganan ATS;
c. Penataan dan pemerataan pendidik;
d. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik;
e. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
f. Penguatan layanan pendidikan inklusif dan afirmatif;
g. Peningkatan mutu pembelajaran;

h. Penguatan perencanaan berbasis SPM.

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh, adalah sebagai berikut :

Langkah yang harus dilaksanakan :

1. Melakukan pemutakhiran data sasaran layanan pendidikan (usia 7–18 tahun) melalui integrasi Dapodik dan data kependudukan;
2. Melaksanakan pendataan ATS, fasilitasi re-enrollment ke sekolah formal atau pendidikan kesetaraan;
3. Mengusulkan redistribusi guru, pemetaan kebutuhan guru per satuan pendidikan ;
4. Melaksanakan pelatihan, bimtek, dan fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidik;
5. Menyusun prioritas rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan SPM;
6. Menyelenggarakan layanan pendidikan alternatif dan bantuan akses transportasi pendidikan;
7. Melaksanakan program peningkatan kompetensi guru, pendampingan pembelajaran, dan intervensi berbasis Rapor Pendidikan;
8. Mengintegrasikan indikator SPM ke dalam Renstra, Renja, dan RKPD.

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada pasal 2 ayat (3), Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam tabel 3.6 berikut:

Tabel 4.2.1
Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**0**	**0.00 %**	
	1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0001	0	0	0.00 %	
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0002	0	0	0.00 %	
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0003	0	0	0.00 %	
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0004	0	0	0.00 %	
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0005	0	0	0.00 %	
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0006	0	0	0.00 %	
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0007	0	0	0.00 %	
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0008	0	0	0.00 %	
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0009	0	0	0.00 %	
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0010	0	0	0.00 %	
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0011	0	0	0.00 %	
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi	Orang	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0012	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			HIV								

Sumber data Dinas Kesehatan Tahun 2025

4.2.2 Target Pencapaian SPM

1. Target

   Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

2. Perhitungan Pembiayaan

   Pada perhitungan pembiayaan, pemerintah daerah melakukan pemetaan pembiayaan, karena terdapat sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam penerapan SPM, tetapi dalam pola perhitungan SPM perlu diperhatikan untuk tidak *dobel counting* pembiayaan, seperti yang telah dialokasikan JKN maka tidak perlu ada di kebutuhan SPM, contoh : biaya obat program, obat TB, vaksin yang dibiayai oleh pusat tidak perlu diperhitungkan, selain itu untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sama pada kegiatan SPM seperti pendataan, ATK, dll dalam satu penghitungan pembiayaan sehingga alokasi dapat efisien dan efektif.

   Untuk mempermudah penghitungan pembiayaan daerah tersebut telah disiapkan tools costing SPM dalam bentuk sistem informasi yang tersedia. Sistem informasi ini digunakan untuk mempermudah daerah dalam perencanaan pelaksanaan SPM.

Tabel 4.2.2
Target Pencapaian SPM
Data Indikator Urusan Kesehatan Target Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara pada usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan berat (ODGJ) yang terlayani kesehatan	Persen	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%

4.2.3 Realisasi

Realiasi Indikator Kinerja Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang bidang kesehatan tahun anggaran 2025 .

Tabel 4.2.3
Indikator Kinerja Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		PRIORITAS UTAMA			96.84 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**					84.99 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**66.74 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	14673	12241	**2432**	**83.43 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.25 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					91.23 %	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	14673	12241	**2432**	**83.43** %	
	2 . Tablet tambah darah **(180 tablet x jumlah ibu hamil)**	Tablet	2641140	2203380	**437760**	**83.43** %	
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	14673	12241	**2432**	**83.43** %	
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	14673	12241	**2432**	**83.43** %	
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	14673	12241	**2432**	**83.43** %	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin **(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)**	Paket	2200	2200	**0**	**100.00** %	
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	14673	12241	**2432**	**83.43** %	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	14673	12241	**2432**	**83.43** %	
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	14673	12241	**2432**	**83.43** %	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG **(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)**	Botol	979	979	**0**	**100.00** %	
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi **(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)**	Orang	14	14	**0**	**100.00** %	
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan **(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)**	Orang	1005	1005	**0**	**100.00** %	
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Orang	1548	1548	**0**	**100.00** %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	225	225	**0**	**100.00** %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	74	74	**0**	**100.00** %	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) **(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)**	Orang	14673	12241	**2432**	**83.43** %	
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**					90.44 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**71.18 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	14673	13055	**1618**	**88.97 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**19.26 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.32 %	
	1 . Formulir partograf	Formulir	14673	13055	**1618**	**88.97** %	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	14673	13055	**1618**	**88.97** %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	14673	13055	**1618**	**88.97** %	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Orang	14	14	**0**	**100.00** %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Orang	1005	1005	**0**	**100.00** %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Orang	1548	1548	**0**	**100.00** %	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	225	225	**0**	**100.00** %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	74	74	**0**	**100.00** %	
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					87.53 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**68.74 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	14680	12613	**2067**	**85.92 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.79 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					93.97 %	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	14680	12613	**2067**	**85.92** %	
	2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	14680	12613	**2067**	**85.92** %	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik **(sesuai standar 12-59 bulan)**	Orang	14680	12613	**2067**	**85.92** %	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	14680	12613	**2067**	**85.92** %	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) **(sesuai standar 12-59 bulan)**	Formulir	14680	12613	**2067**	**85.92** %	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	14680	12613	**2067**	**85.92** %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	12	12	**0**	**100.00** %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1005	1005	**0**	**100.00** %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1548	1548	**0**	**100.00** %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	225	225	**0**	**100.00** %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	51	51	**0**	**100.00** %	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	**0**	**100.00** %	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	9484	9484	**0**	**100.00** %	
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**					99.10 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**79.24 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	61349	60766	**583**	**99.05 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**19.86 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.32 %	
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	4 . Vitamin A Biru **(sesuai standar 6-11 bulan)**	Kapsul	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	5 . Vitamin A Merah **(sesuai standar 12-59 bulan)**	Kapsul	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	61349	60766	**583**	**99.05** %	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	472	472	**0**	**100.00** %	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1005	1005	**0**	**100.00** %	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1548	1548	**0**	**100.00** %	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	**0**	**100.00** %	
	20 . Guru PAUD	Orang	277	277	**0**	**100.00** %	
	21 . Kader kesehatan	Orang	9484	9484	**0**	**100.00** %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	152134	152134	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku **(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)**	Form/Buku	152134	152134	**0**	**100.00** %	
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan **(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)**	Form/Buku	152134	152134	**0**	**100.00** %	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan **(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)**	Dokumen	152134	152134	**0**	**100.00** %	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah **(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)**	Formulir	152134	152134	**0**	**100.00** %	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah **(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)**	Formulir	152134	152134	**0**	**100.00** %	
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah **(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)**	Tablet	152134	152134	**0**	**100.00** %	
	7 . Alat pemeriksaan Hb **(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)**	Alat	152134	152134	**0**	**100.00** %	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 **(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)**	Strip	152134	152134	**0**	**100.00** %	
	9 . Media promosi kesehatan **(Media khusus remaja sehat)**	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) **(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)**	Vaksin	152134	152134	**0**	**100.00** %	
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	117	117	**0**	**100.00** %	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1005	1005	**0**	**100.00** %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1548	1548	**0**	**100.00** %	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	**0**	**100.00** %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	225	225	**0**	**100.00** %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	118	118	**0**	**100.00** %	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	277	277	**0**	**100.00** %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	9484	9484	**0**	**100.00** %	
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	526797	526797	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	105	105	**0**	**100.00** %	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	105	105	**0**	**100.00** %	
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	105	105	**0**	**100.00** %	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	526797	526797	**0**	**100.00** %	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	105	105	**0**	**100.00** %	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	526797	526797	**0**	**100.00** %	
	9 . Kit Opthalmologi komunitas	Unit	105	105	**0**	**100.00** %	
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	526797	526797	**0**	**100.00** %	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	105	105	**0**	**100.00** %	
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	35	35	**0**	**100.00 %**	
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	35	35	**0**	**100.00 %**	
	c. Vasektomi set	Unit	35	35	**0**	**100.00 %**	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	526797	526797	**0**	**100.00** %	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	526797	526797	**0**	**100.00** %	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	472	472	**0**	**100.00** %	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1005	1005	**0**	**100.00** %	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1548	1548	**0**	**100.00** %	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	**0**	**100.00** %	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	118	118	**0**	**100.00** %	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	9484	9484	**0**	**100.00** %	
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah	**Jumlah**	**Yang Belum**		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Yang Harus Dilayani	**Yang Terlayani**	**Terlayani**		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	168598	168598	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	168598	168598	**0**	**100.00** %	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	168598	168598	**0**	**100.00** %	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	168598	168598	**0**	**100.00** %	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	168598	168598	**0**	**100.00** %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	472	472	**0**	**100.00** %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1005	1005	**0**	**100.00** %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1548	1548	**0**	**100.00** %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	**0**	**100.00** %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	118	118	**0**	**100.00** %	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	9484	9484	**0**	**100.00** %	
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	94523	94523	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) **(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)**	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	94523	94523	**0**	**100.00** %	
	3 . Tensimeter **(mengukur tekanan darah)**	Unit	105	105	**0**	**100.00** %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	94523	94523	**0**	**100.00** %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	(peningkatan pengetahuan masyarakat)						
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	472	472	**0**	**100.00** %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1005	1005	**0**	**100.00** %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1548	1548	**0**	**100.00** %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	**0**	**100.00** %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	51	51	**0**	**100.00** %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	225	225	**0**	**100.00** %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	118	118	**0**	**100.00** %	
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	21005	21005	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Obat Diabetes Melitus **(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)**	Paket	21005	21005	**0**	**100.00** %	
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	105	105	**0**	**100.00** %	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	21005	21005	**0**	**100.00** %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	21005	21005	**0**	**100.00** %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	105	105	**0**	**100.00** %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	472	472	**0**	**100.00** %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1005	1005	**0**	**100.00** %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1548	1548	**0**	**100.00** %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	225	225	**0**	**100.00** %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	118	118	**0**	**100.00** %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	**0**	**100.00** %	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	151	151	**0**	**100.00** %	
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	1703	1703	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) **(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)**	Buku	105	105	**0**	**100.00** %	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka **(pengobatan/medikasi)**	Paket	35	35	**0**	**100.00** %	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi **(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)**	Formulir	1703	1703	**0**	**100.00** %	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan **(pencatatan dan pelaporan)**	Formulir	1703	1703	**0**	**100.00** %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	105	105	**0**	**100.00** %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	472	472	**0**	**100.00** %	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa **(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)**	Orang	35	35	**0**	**100.00** %	
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	**0**	**100.00** %	
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	277	277	**0**	**100.00** %	
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	24851	24851	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	105	105	**0**	**100.00** %	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	24851	24851	**0**	**100.00** %	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	24851	24851	**0**	**100.00** %	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	24851	24851	**0**	**100.00** %	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	24851	24851	**0**	**100.00** %	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	105	105	**0**	**100.00** %	
	8 . Tuberkulin	Vial	24851	24851	**0**	**100.00** %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	8	8	**0**	**100.00** %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1548	1548	**0**	**100.00** %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	225	225	**0**	**100.00** %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	118	118	**0**	**100.00** %	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	151	151	**0**	**100.00** %	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	34	34	**0**	**100.00** %	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	9484	9484	**0**	**100.00** %	
12 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	18954	18954	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	105	105	**0**	**100.00** %	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	18954	18954	**0**	**100.00** %	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	18954	18954	**0**	**100.00** %	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	18954	18954	**0**	**100.00** %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	8	8	**0**	**100.00** %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1005	1005	**0**	**100.00** %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1548	1548	**0**	**100.00** %	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	151	151	**0**	**100.00** %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	118	118	**0**	**100.00** %	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	277	277	**0**	**100.00** %	

Sumber data e-spmkemendagri 2025

4.2.4 Alokasi Anggaran

Pada dasarnya seluruh anggaran dari berbagai sumber yang dialokasikan untuk bidang kesehatan adalah untuk memenuhi SPM baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi yang secara langsung menembak SPM adalah sebesar Rp. 17.093.169.200 (Tujuh Belas Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah). Dari Angaran Dinas Kesehatan pada tahun 2025

adalah sebesar Rp. 279.835.954.246 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupah) dengan dengan rincian tabel dibawah ini :

Tabel 4.2.4
Alokasi Anggaran dan Capaian Kinerja Realisasi Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kesehatan Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	2	3
1	APBD KAB. SUMEDANG	2,929,691,214,462
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	279,835,954,246
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	17,093,169,200
	APBD	17,093,169,200
	A. APBD MURNI	5,056,050,000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	12,037,119,200
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.2.5 Dukungan Personil

Seluruh tenaga (personil) di Dinas Kesehatan ikut terlibat dalam upaya pencapaian SPM Bidang Kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Personil di Dinas Kesehatan Berjumlah 1176 Orang, yang terdiri dari: PNS sebanyak 928 Orang, PPPK sebanyak 248 Orang yang tersebar di Kantor Dinas Kesehatan dan di Puskesmas.

Tabel 4.2.5
Daftar Pegawai Asn Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Tahun 2025

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.

1	2	3	4	5	6
	DINAS KESEHATAN			**79**	
1	**Kepala Dinas**	Pembina Utama Muda - IV/c	**S2**	**1**	
2	**Sekretariat**			**24**	
	Sekretaris Dinas	Pembina, IV/a	**S1**	**1**	
	Perencana Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S1	1	
	Perencana Ahli Pertama	Penata Muda, III/a	S1	1	**CPNS**
	Kepala Sub Bagian Umum	Penata Tk I, III/d	**S2**	**1**	
	Pranata Komputer Terampil	Pengatur Tk I, II/d	D3	1	
		Pengatur , II/c	D3	1	CPNS
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Penata Tk.I – III/d	S1	1	
	Penelaah Teknis Kebijakan - Analis Kompetensi	Penata Muda Tk I, III/b	S1	1	
	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penata – III/c	S1	1	
	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Kepegawaian	Penata Muda Tk.I - III/b	S1	1	
	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Sarana dan Prasarana	Penata Muda – III/a	S1	1	
	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Penata Muda Tk.I - III/b	S1	1	
	Pengadministrasi Perkantoran - Pengadministrasi Umum	Penata Muda – III/a	SLTA	1	
		Penata, III/c	S1	1	
		Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTA	1	
	Pengadministrasi Perkantoran - Pengadministrasi Persuratan	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pembina - IV/a	**S2**	**1**	
	Bendahara Pengeluaran	Penata Tk.I – III/d	S1	1	
	Penata Keuangan	Penata Tk.I – III/d	S1	1	
	Analis Keuangan	Penata Muda Tk.I - III/b	S1	2	
	Pengadministrasi Perkantoran - Pengadministrasi Keuangan	Penata Muda Tk.I - III/b	SLTA	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
3	**Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**			**13**	
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	**Pembina, IV/a**	**S2**	**-**	
	Pengelola Keuangan	Penata Tk.I – III/d	S1	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Pembina Tk I, IV.b	S2	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I – III/d	D3	2	
	Bidan Ahli Madya	Pembina - IV/a	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I – III/d	D3	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	PPPK
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	Pembina, IV/a	S2	1	
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S2	1	
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S1	1	
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	PPPK
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	PPPK
4	**Bidang Pelayanan Kesehatan**			**11**	
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan			**0**	PLT
	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S2	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Penata Tk.I – III/d	S1	1	
		IX (PPPK)	S1	1	PPPK
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Penata Tk.I, III/d	D4	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Penata Tk.I, III/d	D4	1	
	Pengelola Keuangan	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S2	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	PPPK
5	**Bidang Kesehatan Masyarakat**			**19**	
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	**Pembina, IV/a**	**S1**	**1**	
	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku - Ahli Pertama	Penata Muda Tk I, III/b	S2	1	
		IX (PPPK)	S1	1	PPPK
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	PPPK

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Penata Muda Tk I, III/b	S1	1	
	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Data	Penata, III/c	S1	1	
	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Madya	Pembina, IV/a	S2	1	
	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Tenaga Sanitasi Lingkungan - Ahli Muda	Penata, III/c	S1	1	
		Penata, III/c	S2	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	PPPK
	Nutrisionis Ahli Madya	Pembina Tk I, IV/b	S2	1	
	Nutrisionis Ahli Muda	Penata Tk I, III/d	S1	1	
	Nutrisionis Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	PPPK
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Penata, III/c	D4	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Penata Tk.I, III/d	S2	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	PPPK
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S2	1	
6	**Bidang Sumber Daya Kesehatan**			**11**	
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	**Pembina, IV/a**	**S1**	**1**	
	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Penata Muda, III/a	SLTA	1	
	Apoteker - Ahli Madya	Pembina Tk. I, IV/b	S1	1	
	Apoteker - Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Asisten Apoteker - Penyelia	Penata, III/c	S1	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	PPPK
	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Keuangan	Penata, III/c	S1	1	
	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	Penata Muda, III/a	S1	1	
	Pengolah Data dan Informasi - Pranata Teknologi Informasi Komputer	Pengatur, II/c	D3	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Penata, III/c	S2	1	
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Penata Tk.I, III/d	S2	1	
	UPTD				

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	UPTD Farmasi			**9**	
	Kepala UPTD Farmasi	**Pembina, IV/a**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Farmasi	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Apoteker Ahli Muda	Penata, III/c	S1	1	
	Apoteker Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	PPPK
	Asisten Apoteker Penyelia	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
		Penata, III/c	S1	1	
	Pengolah Data dan Informasi - Pengelola Data	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Pengadministrasi Perkantoran - Pengadministrasi Umum	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
	Operator Layanan Operasional - Pramu Bakti	Juru Tk I, I/d	SLTA	1	
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah			10	
	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	**Penata TK I / III d**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	**Penata TK I / III d**	**S1**	**1**	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
	Pengadministrasi Perkantoran - Pengadministrasi Keuangan	Penata muda / III a	SLTA	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kotakaler			**43**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kotakaler	**Pembina Tk.I, IV/b**	**S2**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kotakaler			**0**	
	Dokter Ahli Muda	Penata, III/c	S1	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Dokter Gigi Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda, III/a	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D4	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
	Perawat Madya	Pembina Utama Muda - IV/c	S1	1	
	Perawat Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	PPPK
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	PPPK
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Perawat Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	PPPK
	Perawat Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	PPPK
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama (PPPK)	IX (PPPK)	S1	1	PPPK
		IX (PPPK)	S1	1	PPPK
	Nutrisionis Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Nutrisionis Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Apoteker Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	PPPK
	Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Perekam Medis Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Perekam Medis Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Sanitarian Terampil	VII (PPPK)	D3	1	PPPK
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Pengelola data	Penata Muda / III a	S1	1	
	Pengadministrasi Umum	Penata Muda Tk.I, III/b	SLTA	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Situ			**37**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Situ	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Situ	**PenataTk.I, III/d**	**S2**	**1**	
	Dokter Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1		Kapusk
	Dokter Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	
	Dokter Ahli Pertama (PPPK)	X (PPPK)	S1	1	
	Dokter Gigi Ahli Pertama [PPPK]	X (PPPK)	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	D4	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	D4	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	PenataTk.I, III/d	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	PenataTk.I, III/d	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	PenataTk.I, III/d	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	S2	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda, III/a	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Bidan Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	
	Perawat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Perawat Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Perawat Penyelia	PenataTk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil [PPPK].	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Gigi Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Apoteker Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Nutrisionis Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Nutrisionis Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Pengadministrasi Umum	Penata muda / III a	SLTA	1	
	Perekam Medis Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sumedang Selatan			**38**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sumedang Selatan	**Penata Tk.I, III/d**	**D4**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sumedang Selatan	**Penata Muda Tk.I, III/b**	**S1**	**1**	
	Dokter Gigi Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	PPPK
	Bidan Mahir	Penata Muda, III/a	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		Penata Muda, III/a	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Ahli Pertama [PPPK]	X (PPPK)	S1	1	PPPK
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
		VII (PPPK)	D3	1	PPPK
	Prromosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PPPK)	IX (PPPK)	S1	1	PPPK
	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Sanitarian Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Pengadministrasi Umum	Penata Muda Tk.I, III/b	SLTA	1	
	Pengadministrasian Keuangan	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Padasuka			**19**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Padasuka				**Pensiun**

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Padasuka				**Plt**
	Dokter Ahli Madya	Pembina, IV/a	0	0	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk I, III/d	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda, III/a	D3	1	
	Bidan Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	2	
	Perawat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	0	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Gigi Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Sanitarian Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Pengadministrasi Umum	Penata Muda Tk.I, III/b	SLTA	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukagalih			**31**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukagalih	**Pembina Tk.I, IV/b**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukagalih	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Dokter Ahli Pertama [PPPK]	X (PPPK)	S1	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	D4	1	
		Penata, III/c	D4	1	
		Penata, III/c	D4	1	
		Penata, III/c	D4	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D4	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		Penata Muda, III/a	D3	1	
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Perawat Ahli Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
	Perawat Ahli Muda	Penata, III/c	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	SPK	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata Muda, III/a	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Sanitarian Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Asisten Apoteker	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Terapis Gigi Mulut Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Pengadministrasi Umum	Pengatur Tk.I, II/d	SLTA	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	SLTA	1	
		Penata Muda, III/a	S1	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cisarua			**25**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cisarua	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cisarua	**Penata, III/c**	**S1**	**1**	
	Dokter Ahli Pertama	Pengatur Tk.I, II/d	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	D4	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Bidan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	S1	1	
		Penata, III/c	S1	1	
		Penata, III/c	S1	1	
		Penata, III/c	S1	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
		Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda, III/a	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Sanitarian Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	UPTD Puskesmas Cimalaka			**51**	
	Kepala UPTD Puskesmas Cimalaka	**Pembina Tk.I, IV/b**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cimalaka	Penata Tk.I, III/d		**-**	**plt**
	Dokter Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1		kapusk
	Dokter Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Dokter Gigi Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Asisten Apoteker Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
		Penata, III/c	D4	1	
		Penata, III/c	D4	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		Penata Tk.I, III/d	D4	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	S1	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Terampil	PenataTk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Ahli Pertama (PPPK)	X (PPPK)	S1	1	
	Perawat Ahli Pertama [PPPK]	X (PPPK)	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Gigi Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Penata Muda, III/a	S1	1	
		IX (PPPK)	S1	1	
		IX (PPPK)	S1	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		IX (PPPK)	S1	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Penyuluh Kesehatan Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama (PPPK)	IX (PPPK)	S1	1	
		IX (PPPK)	S1	1	
		IX (PPPK)	S1	1	
	Sanitarian Penyelia	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Perawat Gigi Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Nutrisionis Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Pengadministrasi Umum	Penata Muda Tk.I, III/b	SLTA	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ganeas			**26**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ganeas	**Pembina, IV/a**	**S2**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ganeas	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Dokter Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Dokter Gigi Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata Muda Tk.I, III/b	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Perawat Ahli Muda	Penata, III/c	S1	1	
		Penata Tk.I, III/d	S1	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Nutrisionis Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Sanitarian Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengatur Tk.I, II/d	SLTA	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Paseh			**34**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Paseh	**Pembina , IV/a**	**S2**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Paseh	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
		Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D4	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Ahli Madya	Pembina , IV/a	S1	1	
	Perawat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur, II/c	D3	1	
		Pengatur, II/c	D3	1	
		Pengatur, II/c	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Nutrisionis Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Asisten Apoteker Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Pranata laboratorium kesehatan mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Sanitarian Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Sukamantri			**36**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Sukamantri	**Penata Tk.I, III/d**	**S2**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Sukamantri			**-**	
	Dokter Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	D4	1	
		Pembina Tk.I, IV/b	D4	1	
		Pembina Utama Muda, IV/c	S1	1	
		Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	S1	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	Penata, III/c	S1	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Asisten Apoteker Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Nutrisionis Ahli Pertama [PPPK]	IX (PPPK)	S1	1	
	Perekam Medis Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Sanitarian Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama [PPPK]	VII (PPPK)	S1	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungkerta			**32**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungkerta	**Penata Tk.I, III/d**	**S2**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungkerta	**Penata, III/c**	**S2**	**1**	
	Dokter Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	
		X (PPPK)	S1	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Bidan Ahli Madya	Pembina , IV/a	D4	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Nutrisionist Ahli Muda	Pembina , IV/a	S1	1	
	Asisten Apoteker Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Ahli Pertama	Penata Muda, III/a	S1	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Situraja			**39**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Situraja	**Penata Tk.I, III/d**	**S2**	**1**	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Situraja	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Dokter Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Dokter Gigi Madya	Pembina Utama Muda, IV/c	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D3	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Penyelia	PenataTk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Penyelia	PenataTk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Pelaksana	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Penyelia	PenataTk.I, III/d	SPK	1	
	Perawat Penyelia	PenataTk.I, III/d	SPK	1	
	Perawat Penyelia	PenataTk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	PenataTk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Penyelia	PenataTk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil [PPPK].	VII (PPPK)	D3	1	
	Sanitarian Ahli Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
	Perawat Gigi Penyelia	PenataTk.I, III/d	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perekam Medis Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama [PPPK]	IX (PPPK)	S1	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Pengadministrasi Kepegawaian	Penata Muda, III/a	SLTA	1	
	Pengadministrasi Umum	Pengatur Tk.I, II/d	SLTA	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cisitu			**36**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cisitu	**PenataTk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cisitu	**Penata Muda Tk.I, III/b**	**D3**	**1**	
	Dokter Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
		Pembina, IV/a	D4	1	
		PenataTk.I, III/d	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	S1	1	
		PenataTk.I, III/d	D4	1	
		PenataTk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Ahli Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
		Pembina, IV/a	S1	1	
		Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
		PenataTk.I, III/d	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		PenataTk.I, III/d	D3	1	
		PenataTk.I, III/d	D3	1	
		PenataTk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		Pengatur, II/c	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Nutrisionis Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama [PPPK]	IX (PPPK)	S1	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Haurngombong			**21**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Haurngombong	**PenataTk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Haurngombong	**PenataTk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Dokter Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	D4	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Bidan terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Ahli Muda	PenataTk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Perawat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Perawat Penyelia	PenataTk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat gigi Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Asisten Apoteker Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rancakalong			**32**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rancakalong	**Pembina, IV/a**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rancakalong	**PenataTk.I, III/d**	**S2**	**1**	
	Dokter Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
		Penata, III/c	D4	1	
		Penata, III/c	D4	1	
		Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Penyelia	PenataTk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		PenataTk.I, III/d	D3	1	
		PenataTk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Ahli Muda	PenataTk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda, III/a	S1	1	
	Perawat Penyelia	PenataTk.I, III/d	D3	1	
		PenataTk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Perawat Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Nutrisionis Ahli Pertama	Penata Muda, III/a	S1	1	
	Perawat gigi Pelaksana Lanjutan (Mahir)	Penata Muda Tk.I, III/b	S2	1	
	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Pengadministrasi Umum	Penata Muda Tk.I, III/b	SLTA	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	SLTA	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pamulihan			**23**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pamulihan	**Pembina, IV/a**	**S2**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pamulihan	**Penata, III/c**	**S1**	**1**	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Penyelia	PenataTk.I, III/d	D3	1	
		PenataTk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Gigi Penyelia	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama [PPPK]	IX (PPPK)	S1	1	
	Pengadministrasi Umum	Penata Muda Tk.I, III/b	SLTA	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Conggeang			**35**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Conggeang			**-**	**Plt**
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Conggeang	**Penata Muda Tk.I, III/b**	**S1**	**1**	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	D4	1	
	Bidan Pelaksana	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Pelaksana	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Pelaksana	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Pelaksana	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	
	Perawat Ahli Pertama [PPPK]	VII (PPPK)	S1	1	
	Perawat Pelaksana Lanjutan	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Pelaksana Lanjutan	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Perawat Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Apoteker Ahli Muda	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Perawat Gigi Penyelia	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Perekam Medis Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Nutrisionis Ahli Pertama [PPPK]	IX (PPPK)	D4	1	
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama [PPPK]	IX (PPPK)	D4	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Tanjungsari			**35**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Tanjungsari	**Pembina, IV/a**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Tanjungsari	**Penata, III/c**	**D4**	**1**	
	Dokter Ahli Pertama [PPPK]	X (PPPK)	S1	1	
	Dokter Gigi Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata Muda Tk.I, III/b	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata, III/c	D4	1	
		Penata Tk.I, III/d	S1	1	
		Penata, III/c	S1	1	
		Penata Tk.I, III/d	S1	1	
		Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Ahli Pertama [PPPK]	X (PPPK)	S1	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Apoteker Ahli Muda	Penata, III/c	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Sanitarian Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Nutrisionis Penyelia	Penata, III/c	S1	1	
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Perekam Medis Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Pengelola Data	Penata, III/c	S1	1	
		Penata Muda, III/a	S1	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margajaya			**20**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margajaya	**Penata Tk.I, III/d**	**S2**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Margajaya	**Penata Muda Tk.I, III/b**	**D3**	**1**	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D3	**1**	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	**1**	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	**1**	
	Bidan Terampil	VII (PPPK)	D3	**1**	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	**1**	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	**1**	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	**1**	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	**1**	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	**1**	
	Perawat Penyelia	Penata, III/c	S1	**1**	
		Penata Tk.I, III/d	D3	**1**	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	**1**	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	**1**	
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama [PPPK]	IX (PPPK)	S1	**1**	
	Asisten Apoteker Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	**1**	
	Sanitarian Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	**1**	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	**1**	
	Pengadministrasi Umum	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SLTA	**1**	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungmedar			**25**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungmedar	Penata Tk.I, III/d	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungmedar	Penata Muda, III/a	**S1**	**1**	
	Dokter Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Apoteker Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Asisten Apoteker Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cimanggung			**30**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cimanggung			**-**	**Plt**
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cimanggung	Penata Tk.I, III/d	**S2**	**1**	
	Dokter Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Dokter Gigi Madya	Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
		Pembina, IV/a	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	D4	1	
		Penata Tk.I, III/d	D4	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Perawat Ahli Muda	Penata, III/c	S1	1	
	Perawat penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Pelaksana	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Sanitarian Ahli Muda	Penata, III/c	S1	1	
	Apoteker Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Calon Asisten Apoteker	Pengatur, II/c	D3	1	
	Epidemiologi Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sawah Dadap			**20**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sawah Dadap	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sawah Dadap	**Penata Tk.I, III/d**	**D3**	**1**	
	Dokter Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Bidan Ahli Muda	**Penata Tk.I, III/d**	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata Muda Tk.I, III/b	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	S1	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Bidan Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Bidan Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Pelaksana	Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Nutrisionis Ahli Pertama	Penata Muda, III/a	S1	1	
	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Asisten Apoteker	Pengatur, II/c	D3	1	
	Calon Sanitarian	Pengatur, II/c	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Tomo			**33**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Tomo	**Pembina, IV/a**	**D4**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Tomo	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Apoteker Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
		X (PPPK)	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	-	Kapusk
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
			D3	1	
			D3	1	
			D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D4	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Dokter Madya	Pembina Tk. I, IV/b	S1	1	
	Dokter Gigi Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Perawat Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	
		X (PPPK)	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	SPK	1	
		Penata, III/c	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Sanitarian Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukasari			**18**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukasari	**Pembina Utama Muda, IV/c**	**S2**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukasari	**Penata, III/c**	**S2**	**1**	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Ahli Pertama [PPPK]	IX (PPPK)	S1	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Bidan Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Penyelia	VII (PPPK)	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	SPK	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Jatinangor			**50**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Jatinangor			**-**	**Plt**
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Jatinangor	Penata Tk.I, III/d	**S1**	**1**	
	Dokter Gigi Ahli Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
	Dokter Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
		Pembina Tk.I, IV/b	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
	Bidan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Perawat Ahli Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
		Pembina, IV/a	S1	1	
	Perawat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	S1	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Gigi Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Nutrisionis Penyelia	Penata, III/c	S1	1	
	Sanitarian Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Apoteker Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Nutrisionis Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Perekam Medis Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Pengadministrasi Umum	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
	Pengadministrasi Umum	Penata Muda Tk.I, III/b	SLTA	1	
	Pengelola Sarana dan prasarana serta Data	Penata, III/c	S1	1	
	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTP	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cisempur			**21**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cisempur	**Pembina Tk I - IV/b**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cisempur	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Dokter Ahli Madya	Pembina Utama Muda - IV/c	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	S1	1	
	Bidan Penyelia	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Bidan Mahir	Penata Muda , III/a	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk.I, II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur, II/c	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Gigi Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Apoteker Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	
	Nutrisionis Mahir	Penata Muda, III/a	D3	1	
	Sanitarian Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Pengelola Sarana Dan Prasarana (ASET)		S1	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Hariang			**23**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Hariang	Penata, III/c	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Hariang	**Penata Muda Tk.I, III/b**	**D4**	**1**	
	Dokter Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	SPK	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Perawat Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Sanitarian Ahli Pertama	IX (PPPK)	D3	1	
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Asisten Apoteker Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Buahdua			**34**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Buahdua	**Pembina Tk I - IV/b**	**D4**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Buahdua	**Pembina, IV/a**		**-**	**plt**
	Apoteker	Penata, III/c	S1	1	
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk I - IV/b	D4	1	
		Pembina Tk I - IV/b	D4	1	
		Pembina Tk I - IV/b	D4	1	
		Pembina Tk I - IV/b	D4	1	
	Bidan Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil	VII (PPPK)	S1	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Nutrisionis Ahli Pertama	IX (PPPK)	S1	1	
	Perawat Ahli Madya	Pembina Utama Muda - IV/c	S1	1	
	Perawat Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
	Perawat Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	
		X (PPPK)	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Pengelola Data	Penata, III/c	S1	1	
	Penyusunan Laporan Keuangan	Penata Muda, III/a	S1	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Darmaraja			**35**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Darmaraja	Pembina, IV/a	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Darmaraja	Penata, III/c	**S1**	**1**	
	Dokter Gigi Ahli Muda	Penata, III/c	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk I - IV/b	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur, II/c	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Ahli Madya	Pembina, IV/a	S1	1	
		Pembina Utama Muda - IV/c	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Apoteker Ahli Muda	Penata, III/c	D3	1	
	Sanitarian Ahli Pertama	Penata Muda, III/a	D3	1	
	Nutrisionis Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama [PPPK]	IX (PPPK)	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Pengadministrasi Umum	Penata Muda, III/a	SLTA	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wado			**25**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wado	**Pembina Utama Muda - IV/c**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wado	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Dokter Madya	**Pembina Utama Muda - IV/c**	S1		KAPUSK
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
		Pembina Tk I - IV/b	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	D4	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D4	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		Penata Muda Tk.I, III/b	D4	1	
	Bidan Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
		Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
		Pengatur, II/c	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Apoteker Ahli Muda	Penata, III/c	D3	1	
	Nutrisionis Ahli Pertama [PPPK]	IX (PPPK)	S1	1	
	Nutrisionis Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Ahli Pertama [PPPK]	X (PPPK)	S1	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ujungjaya			**31**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ujungjaya	**Penata, III/c**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ujungjaya	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Apoteker Ahli Pertama [PPPK]	X (PPPK)	S1	1	
	Assisten Apoteker Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina, IV/a	D4	1	
		Pembina, IV/a	D4	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D4	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D4	1	
	Bidan Ahli Pertama	IX (PPPK)	D4	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Bidan Penyelia	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata, III/c	D3	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Dokter Ahli Muda	Penata, III/c	S1	-	KAPUSK
	Nutrisionis Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Perawat Ahli Pertama [PPPK]	X (PPPK)	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata Tk.I, III/d	S1	1	
		Penata, III/c	S1	1	
	Perawat Mahir	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
		Penata Muda, III/a	D3	1	
		Penata Muda, III/a	D3	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Gigi Penyelia	Penata Tk.I, III/d	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Sanitarian Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Surian			**24**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Surian	**Penata, III/c**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Surian	**Penata Tk.I, III/d**	**S1**	**1**	
	Dokter Ahli Pertama	**Penata, III/c**	S1		Kapusk
	Bidan Penyelia	Penata, III/c	S1	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Bidan Terampil (PPPK)	VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur, II/c	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	S1	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S2	1	
	Asisten Apoteker Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Nutrisionis Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Sanitarian Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jatinunggal			**36**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jatinunggal	**Pembina Tk I, IV/b**	**S2**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jatinunggal	**PenataTingkat I, III/d**	**D3**	**1**	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk I, IV/b	S1	1	
		Pembina, IV/a	D4	1	
		Pembina, IV/a	D3	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Penyelia	Penata TK 1, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	D4	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
		Penata, III/c	D3	1	
		Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D4	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D4	1	
	Dokter Ahli Madya	Pembina Tk I, IV/b	S2	-	Kapusk
	Dokter Ahli Muda	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Dokter Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Nutrisionis Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Gigi Penyelia	Penata TK 1, III/d	D3	1	
	Perawat Ahli Pertama	X (PPPK)	S1	1	
	Perawat Penyelia	Penata TK 1, III/d	D3	1	
	Perawat Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Pranata Laboratorium kesehatan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	Penata TK 1, III/d	D3	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jatigede			**30**	
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jatigede	**Pembina, IV/a**	**S1**	**1**	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jatigede	**Penata, III/c**		**-**	**Plt**
	Dokter Ahli Muda	Penata TK 1, III/d	S1	1	
	Dokter Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Bidan Ahli Muda	Penata, III/c	D4	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Bidan Penyelia	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Perawat Penyelia	Penata, III/c	S1	1	
		Penata TK 1, III/d	D3	1	
		Penata TK 1, III/d	D3	1	
		Penata Muda, III/a	D3	1	
	Perawat Ahli Pertama [PPPK]	X (PPPK)	S1	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Nutrisionist Penyelia	Penata, III/c	D3	1	
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	D3	1	
	Asisten Apoteker Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Sanitarian Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel			**30**	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel	**Pembina Utama Muda - IV/c**	**S1**	**1**	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel		**S1**	**1**	
	Dokter Ahli Muda	Penata, III/c	S1	1	
	Bidan Ahli Madya	Pembina Tk.I, IV/b	D4	1	
	Bidan Ahli Pertama [PPPK]	VII (PPPK)	S1	1	
	Bidan Penyelia	Penata TK 1, III/d	D3	1	
		Penata, III/c	S1	1	
	Bidan Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
		Pengatur, II/c	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Perawat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
		Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Perawat Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
		VII (PPPK)	D3	1	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	
	Asisten Apoteker Terampil	Pengatur Tk. I – II/d	D3	1	
	Nutrisionis Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Perekam Medis Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	VII (PPPK)	D3	1	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil [PPPK]	VII (PPPK)	D3	1	
	Pengemudi Ambulan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Jumlah PNS			**928**	
	Jumlah PPPK			**248**	
	Jumlah Total			**1176**	

Sumber data Kepegawaian Dinas Kesehatan 2025

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Layanan Primer dan Rujukan

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal;

b. Rendahnya pemenuhan standar antenatal care;

c. Permasalahan akses layanan Kesehatan bagi ibu hamil dan bayi;

2. Pembiayaan Kesehatan

a. Belum terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif;

b. Pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC);

3. SDM Kesehatan

a. Pendayagunaan, pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga Kesehatan berkualitas masih kurang;

b. Kualitas Hasil Pendidikan dan pelatihan tenaga Kesehatan belum memadai;

c. Perencanaan kebutuhan dan pemetaan jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan belum terintegrasi dengan penyediaan dan pemenuhannya.

4. Teknologi Kesehatan

Desakan untuk penggunaan layanan telemedicine meningkat dan menjadi trend terutama di era pandemi namun regulasi khusus pertukaran informasi rekam medis elektronik dokter dengan pasien dalam lingkup layanan yang diberikan startup healthtech dalam negeri belum terfasilitasi.

.

Solusi

a. Dinas Kesehatan telah berupaya menangani permasalahan akses ini dengan transformasi pelayanan primer dalam bentuk program Binwilkes/Posyandu Prima. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan

pemantauan untuk melihat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi binwilkes / Posyandu Prima, sehingga membantu pencapaian target penurunan AKI dan AKB di Indonesia;.

b. Penguatan pembiayaan untuk Upaya Kesehatan Primer (UKM), melalui:
   i. Penyediaan pembiayaan yang memadai untuk kegiatan promosi, skrining dan pencegahan;
   ii. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan.

c. Pengintegrasian berbagai skema pembiayaan publik dan non publik secara efektif dan efisien dalam mencapai UHC.

d. Pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten secara merata baik secara kuantitas dan kualitas di seluruh fasilitas Kesehatan untuk menurunkan disparitas pemenuhan SDM Kesehatan.

e. Peningkatan Mutu /kualitas tenaga kesehatan melalui pengembangan sistem Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan

f. Peningkatan kemajuan teknologi di bidang kesehatan dan pengobatan penyakit diarahkan pada inovasi layanan pengobatan pasien yang presisi

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan SPM pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 Jenis Pelayanan dasar merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

Adapun Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Sumber Daya Air
   a. Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat dengan indikator sebagai berikut :
      - Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.
2. Jenis Pelayanan Jalan

a. Penyediaan Jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator sebagai berikut :
   - Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang;dan
   - Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota

Adapun Jenis Pelayanan SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2025 pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dengan tabel di bawah ini :

Tabel 4.3.1

Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**							**0**	**0**	**0.00 %**	
	1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0001	0	0	0.00 %	
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0002	0	0	0.00 %	
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0003	0	0	0.00 %	
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0004	0	0	0.00 %	
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0005	0	0	0.00 %	
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0006	0	0	0.00 %	
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0007	0	0	0.00 %	
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0008	0	0	0.00 %	
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0009	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0010	0	0	0.00 %	
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0011	0	0	0.00 %	
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0012	0	0	0.00 %	
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0013	0	0	0.00 %	
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0014	0	0	0.00 %	
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0015	0	0	0.00 %	
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0016	0	0	0.00 %	
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0017	0	0	0.00 %	
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0018	0	0	0.00 %	
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0019	0	0	0.00 %	
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0020	0	0	0.00 %	
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0021	0	0	0.00 %	
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0022	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0023	0	0	0.00 %	
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0024	0	0	0.00 %	
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0025	0	0	0.00 %	
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0026	0	0	0.00 %	
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0027	0	0	0.00 %	
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0028	0	0	0.00 %	
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0029	0	0	0.00 %	
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0030	0	0	0.00 %	
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0031	0	0	0.00 %	
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0032	0	0	0.00 %	
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0033	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**							**0**	**0**	**0.00 %**	
	1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/ Kota**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0001	0	0	0.00 %	
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0002	0	0	0.00 %	
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0003	0	0	0.00 %	
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0004	0	0	0.00 %	
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0005	0	0	0.00 %	
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0006	0	0	0.00 %	
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0007	0	0	0.00 %	
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0008	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0009	0	0	0.00 %	
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0010	0	0	0.00 %	
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0011	0	0	0.00 %	
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0012	0	0	0.00 %	
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0013	0	0	0.00 %	
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0014	0	0	0.00 %	
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0015	0	0	0.00 %	
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0016	0	0	0.00 %	
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0017	0	0	0.00 %	
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0018	0	0	0.00 %	
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0019	0	0	0.00 %	
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0020	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0021	0	0	0.00 %	
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0022	0	0	0.00 %	
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0023	0	0	0.00 %	
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0024	0	0	0.00 %	
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0025	0	0	0.00 %	
		26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0026	0	0	0.00 %	
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0027	0	0	0.00 %	
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0028	0	0	0.00 %	
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0029	0	0	0.00 %	
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0030	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0031	0	0	0.00 %	
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0032	0	0	0.00 %	
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0033	0	0	0.00 %	
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0034	0	0	0.00 %	
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0035	0	0	0.00 %	
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M^3/Hari	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0037	0	0	0.00 %	
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0038	0	0	0.00 %	
		39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0039	0	0	0.00 %	
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0040	0	0	0.00 %	
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0041	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA							0	0	0.00 %	
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA											
	NAMA KEGIATAN										

Sumber Data Dinas PUTR Sumedang 2025

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tingkat Pemerintah Kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, Pemenuhan data SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang tidak bisa terdokumentasikan dengan maksimal, dikarenakan kegiatan yang menyangkut urusan tersebut dilaksanakan oleh SKPD yang lain. Adapun SKPD yang melaksanakannya meliputi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Sumedang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang.

Tabel 4.3.2
Data Capaian Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	**Sub Bidang Pekerjaan Umum**			
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persen	100	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persen	100	100%

4.3.3 Realisasi

Realisasi Indikator Kinerja /Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum Tahun Anggaran 2025 yang teridiri dari :

1. **Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**
2. **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**

Tabel 4.3.3

Indikator Kinerja /Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					95.00 %	
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**					100.00 %	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	**Rekap Capaian (Terlayani)**	**Selisih**		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	13488	13488	**0**	**13,488.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3488	3488	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	JARINGAN PERPIPAAN					100.00 %	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	872	872	**0.0000**	**100.00 %**	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	872	872	**0.0000**	**100.00 %**	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					100.00 %	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	**0.0000**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AK SI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	**0.0000**	**100.00 %**	
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					90.00 %	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	**Rekap Capaian (Terlayani)**	**Selisih**		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	1600	1600	**0**	**1,600.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	400	400	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**10.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					50.00 %	
	KUANTITAS SPALD					100.00 %	
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	400	400	**0.0000**	**100.00 %**	
	KUALITAS SPALD					0.00 %	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)							
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual 90angka bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	100	0	**1.000.000**	**100.00 %**	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua							
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi 90angka90kat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan 90angka bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi 90angka septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	100	0	**1.000.000**	**100.00 %**	
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi 90angka90kat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar 90angka bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan 90angka septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	100	0	**1.000.000**	**100.00 %**	

Sumber data e-spm kemendagri 2025

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang dipergunakan untuk mendanai program dan kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumedang pada Tahun

Anggaran 2025 .sebesar Rp. 17.067.380.300. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang sendiri sebesar 129.581.049.209.

Tabel 4.3.4

Anggaran Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. SUMEDANG	2,929,691,214,462
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	129,581,049,209
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	17,067,380,300
	APBD	17,067,380,300
	A. APBD MURNI	2,211,833,300
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	14,855,547,000
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 147 Orang, terdiri dari 142 orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4.3.5 Personil

Adapun personil yang dimiliki lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14

Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2025

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas/Badan	PEMBINA UTAMA MUDA / IV C	S2	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
2	Sekretariat			23	
	Sekretaris	PEMBINA TK.I / IV B	S1	1	
	- FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	- FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S2	1	
	- FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	1	
	- PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PENATA MUDA / III A	S1	1	
	Kepala Sub Bagian Umum	PENATA / III C	S1	1	
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	PENATA / III C	S1	1	
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	1	
	- Pengadministrasi Kepegawaian	PENATA MUDA / III A	SMA	2	
	- Pengadministrasi Persuratan	PENATA MUDA / III A	SMA	1	
	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	PENGATUR TK.I / II D	SMA	1	
	Kepala Sub Bagian Keuangan	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	- Penyusun Laporan Keuangan	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	- Bendahara	PENATA TK.I / IIID	S1	1	
	- Pengelola Gaji	PENATA / III C	D3	1	
	- Pengadministrasi Keuangan	PENATA MUDA / III A	SMA	3	
	- Bendahara	PENATA MUDA / III A	SMA	1	
	- Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	PENATA MUDA / III A	D3	1	
	- Pengadministrasi Umum	PENGATUR MUDA TK.I / II D	SMA	1	
3	Bidang Sumber Daya Air			16	
	Kepala Bidang	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	- Teknik Pengairan Ahli Muda	PENATA TK.I / III D	S2	1	
	- Teknik Pengairan Ahli Muda	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	- Pengawas Irigasi	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	4	
	- Teknik Pengairan Ahli Pertama	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	2	
	- Analis Sumber Daya Air	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	1	
	- Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	PENATA MUDA / III A	SMA	3	
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	PENATA MUDA / III A	S1	1	
	- Pengelola Sumber Daya Air Bidang	PENGATUR TK.I / II D	D3	1	
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	PENGATUR TK.I / II D	D3	1	
4.	Bidang Bina Marga			15	
	Kepala Bidang Bina Marga	PENATA TK.I / III D	S2	1	
	- Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	PENATA TK.I /III D	S1	2	
	- Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	PENATA / III C	D3	1	
	- Pemeriksa Jalan dan Jembatan	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	1	
	- Teknik Jalan dan Jembatan ahli pertama	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	4	
	- Analis Jalan Jembatan	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	1	
	- Pengawas Jalan dan Jembatan	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	1	
	- Pengawas Jalan dan Jembatan	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S2	1	
	- Penilik Jalan	PENATA MUDA / IIIA	SMA	3	
5.	Bidang Tata Ruang			13	
	Kepala Bidang Tata Ruang	PENATA TK.I / III D	S2	1	
	- Penata Ruang Ahli Muda	PENATA TK.I / IIID	S2	1	
	- Analis Pemanfaatan Ruang	PENATA / III C	S2	1	
	- Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	2	
	- Penata ruang ahli pertama	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	1	
	- Penata ruang ahli pertama	PENATA MUDA / III A	S1	2	
	- Ahli Pertama Surveyor Pemetaan	GOLONGAN IX	S1	3	P3K
	- Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PENATA MUDA / III A	D3	1	
	- Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PENGATUR TK.I / II D	D3	1	
6.	Bidang Cipta Karya			21	
	Kepala Bidang Cipta Karya	PEMBINA / IV A	S1	1	
	- Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	- Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman	PENATA / III C	S1	1	
	- Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	PENATA / III C	S1	2	
	- Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	PENGATUR / II C	D3	5	
	- Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	2	
	- Pengawas Bangunan dan Gedung	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	3	
	- Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	2	
	- Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	PENATA MUDA / IIIA	SMA	2	

	- Penata Kelola bangunan Gedung dan Kawasan permukiman ahli pertama	Golongan IX	S1	1	P3K
	- Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	PENGATUR TK.I / II D	D3	1	
7.	Bidang Bina Konstruksi			6	
	Kepala Bidang Bina Konstruksi	PEMBINA / IV A	S2	1	
	- Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	- Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Golongan	S1	1	P3K
	- Penelaah Mutu Konstruksi Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	1	
	- Pengelola Jasa Konstruksi	PENGATUR TK.I / II D	S1	1	
	- Pengelola Jasa Konstruksi	PENGATUR TK.I / II D	D3	1	
8.	UPTD			12	
	Kepala UPTD Pralatan dan Perbengkelan	PENATA TK.I / III D	S2	1	
	Kasubag Tata Usaha	-	-	-	
	- Operator Alat Berat	PENATA MUDA / III A	SMA	9	
	- Operator Alat Berat	PENGATUR TK.I / II D	SMA	2	
	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi			3	
	Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	Kasubag Tata Usaha	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	1	
	- Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton	PENATA / III C	S1	1	
	UPTD WILAYAH CIMALAKA			3	
	Kepala UPTD Wilayah Cimalaka	PEMBINA / IV A	S2	1	
	Kasubag Tata Usaha	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	- Pemelihara Jalan	PENATA MUDA / III A	SMA	1	
	UPTD WILAYAH Wado			4	
	Kepala UPTD Wilayah Wado	PEMBINA / IV A	S2	1	
	Kasubag Tata Usaha	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	1	
	- Pemelihara Jalan	PENATA MUDA / III A	SMA	1	
	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	PENATA MUDA / III A	SMA	1	
	UPTD WILAYAH Pamulihan			2	
	Kepala UPTD Wilayah Pamulihan	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	Kasubag Tata Usaha	-	-	-	
	- Pemelihara jalan	PENATA MUDA / III A	SMA	1	
	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air				
	-				
	UPTD WILAYAH SITURAJA			5	
	Kepala UPTD Wilayah Situraja	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	Kasubag Tata Usaha	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	- Pemelihara Jalan	PENATA MUDA / III A	SMA	1	
	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	PENATA MUDA / III A	SMA	2	
	-				
	UPTD WILAYAH CONGGEANG			4	
	Kepala UPTD Wilayah Conggeang	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	Kasubag Tata Usaha	PENATA / III C	S1	1	
	- Pemelihara Jalan	PENATA MUDA / III A	SMA	1	
	- Pramu Kebersihan	PENGATUR / II C	SMP	1	
	-				
	UPTD WILAYAH TOMO			6	
	Kepala UPTD Wilayah Tomo	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	Kasubag Tata Usaha	PENATA / III C	S1	1	
	- Pemelihara Jalan	PENGATUR TK.I / II D	SMA	2	
	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	PENATA MUDA / III A	SMA	2	
	-				
	UPTD WILAYAH TANJUNGKERTA			4	
	Kepala UPTD Wilayah Tanjungkerta	PENATA TK.I / III D	S2	1	
	Kasubag Tata Usaha	PENATA TK.I / III D	S2	1	
	- Pemelihara Jalan	PENATA MUDA TK.I / IIIB	S1	1	
	- Pemelihara Jalan	PENATA MUDA / III A	SMA	1	
	-				
	UPTD WILAYAH SUMEDANG KOTA			4	
	Kepala UPTD Wilayah Sumedang Kota	PENATA TK.I / III D	S2	1	
	Kasubag Tata Usaha	PENATA TK.I / III D	S2	1	
	- Pemelihara Jalan	PENGATUR TK.I / II D	SMA	1	

	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	PENGATUR MUDA TK.I / II B	SMA	1	
	UPTD WILAYAH TANJUNGSARI			5	
	Kepala UPTD Wilayah Tanjungsari	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	Kasubag Tata Usaha	PENATA TK.I / III D	S1	1	
	- Pemelihara Jalan	PENATA MUDA / III A	SMA	1	
	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	PENATA MUDA TK.I / IIIB	D3	1	
	Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	PENGATUR	SMA	1	
	Jumlah PNS				
	Jumlah P3K				
	Jumlah Total				

Sumber : DUK Per Desember Tahun 2025 Dinas PUPR Kab. Sumedang

Tugas Pokok dan Fungsi

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;

b. menetapkan kebijakan teknis tentang pembangunan perkotaan dan perdesaan yang mengacu kepada kebijakan nasional dan provinsi;

c. mengawasi pengelolaan sumber daya air;

d. menetapkan pengaturan jalan kabupaten meliputi perencanaan umum dan pembiayaan, penetapan status, pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten.

e. menetapkan rekomendasi teknis untuk :

(1) Ijin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kabupaten

(2) Ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air permukaan

(3) Ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air dan penambangan pada wilayah sungai dalam kabupaten

(4) Ijin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder kabupaten.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dibantu oleh :

a. Sekretariat;
b. Bidang Bina Marga;
c. Bidang Sumber Daya Air;
d. Bidang Jasa Kontruksi;
e. Bidang Tata Ruang;
f. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan serta Irigasi;
g. UPT Laboratorium Pemeriksaan Bahan dan Pekerjaan;

4.3.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan :

Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga kegiatan sangat sulit dilaksanakan disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut :

1. Dalam menyusun perencanaan anggaran SPM belum sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. RKA dan KAK belum dibuat oleh OPD pengampu
3. Lambatnya koordinasi dari bidang-bidang yang bersangkutan
4. Keahlian atau kemampuan Sumber daya manusia terbatas.
5. Untuk pencapaian target SPM pada pelayanan jalan tidak ditunjang dengan rencana kegiatan yang optimal.
6. Ketersediaan anggaran tidak optimal sehingga mempengaruhi capaian fisik dilapangan sehingga sangat sulit untuk mencapai target indikator yang ditentukan.

b. Solusi :

Adapun solusi yang ditawarkan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a) Antara SKPD terkait harus ada koordinasi yang baik

b) Diadakan konsultasi dan studi banding kepada daerah lain berkaitan dengan SPM.
c) Perlu dilaksanakan Bintek dalam penyusunan SPM dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi.
d) Harus ada kegiatan penyusunan data base terhadap indikator terkait.
e) Harus ada penambahan alokasi anggaran dari pusat
f) Melakukan koordinasi dengan BAPPEDA.
g) Penerapan SPM Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memerlukan kerjasama semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Serta diperlukan dukungan alokasi anggaran yang baik dari pusat, provinsi maupun Pemerintah Daerah sehingga target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dapat tercapai.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman terdiri dari sebagian Sub Bidang Perumahan kawasan Permukiman, Tata Bangunan dan Pertanahan yaitu:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota ;
b. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Jenis Pelayanan SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024 pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dengan tabel di bawah ini:

Tabel 4.4.1

JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG URUSAN PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**							**0**	**0**	**0.00 %**	
	1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0001	0	0	0.00 %	
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0002	0	0	0.00 %	
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0003	0	0	0.00 %	
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0004	0	0	0.00 %	
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0005	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0006	0	0	0.00 %	
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0007	0	0	0.00 %	
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0008	0	0	0.00 %	
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0009	0	0	0.00 %	
	2	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0001	0	0	0.00 %	
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0002	0	0	0.00 %	
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0003	0	0	0.00 %	
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0004	0	0	0.00 %	
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0005	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0006	0	0	0.00 %	
		7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0007	0	0	0.00 %	
		8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0008	0	0	0.00 %	
		9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0009	0	0	0.00 %	
		10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0010	0	0	0.00 %	
		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0011	0	0	0.00 %	
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0012	0	0	0.00 %	
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**							**0**	**0**	**0.00 %**	
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA											

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NAMA KEGIATAN										

Sumber data Dinas Perkimtan 2025

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksud untuk point a di atas yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang dalam indikator yang menggambarkan sasaran/target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu memerlukan beberapa tahapan dimulai dari :

1. Perencanaan Anggaran.
2. Pencarian dan pengkajian lahan baru yang aman dari bencana.
3. Pembebasan dan perubahan status Lahan.
4. Pembangunan dan penyerahan rumah yang layak huni bagi korban bencana.

Tabel 4.4.2
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025
Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	**Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman**				
1.	Pendataan Penyediaan & Rehabiitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Masyarakat terkena dampak korban bencana di wilayah Kabupaten Sumedang	1. Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana 2. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi 3. Bagi Korban Bencana.	Persen	100 %
2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah di Wilayah Kabupaten Sumedang	1. Subsidi Uang Sewa 2. Penyediaan Rumah Layak Huni	Persen	100%

4.4.3 Realisasi

Realisasi Capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2025 yang terdiri dari :

1. Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.4.3

Indikator Kinerja/Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS BARUBUNA			100.00 %	
1 .	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					100.00 %	
	Bencana Meliputi : **a) Letusan gunung berapi;** **b) Gempa bumi;** **c) Tanah longsor;** **d) Gelombang pasang;** **e) Banjir bandang; dan/atau** **f) Bencana lainnya.**						
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifkasi oleh Sekber Pusat							
	Terjadi (Lampirkan SK Bencana) di Verifkasi oleh Sekber Pusat Download SK yang telah di upload Tidak Masuk Kedalam Perhitungan **3211-20251218073449KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN BENCANA GERTAN CISARUA.pdf**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	12	12	0	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	**0**	**0.00 %**	
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	**0**	**0.00 %**	
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	7	7	**0**	**100.00 %**	
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	5	5	**0**	**100.00 %**	
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					100.00 %	
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi : **a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;** **b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;** **c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;** **d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau** **e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)**						
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah							
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifkasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				**-100%**	**100.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Format Tahapan		**Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)**			100.00 %	
	1.PENDATAAN					100.00 %	
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%	
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA					100%	
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)					100%	
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%	
	2.PERHITUNGAN					100.00 %	
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%	
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :					100%	
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%	
	3.PERENCANAAN					100.00 %	
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%	
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :					100%	

Sumber data e-spmkemendagri 2025

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran untuk pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar RP. 1.325.000.000,00 Dari Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp. 25.303.943.841,00

Tabel 4.4.4
Program Anggaran SPM Urusan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. SUMEDANG	2,929,691,214,462
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	25,303,943,841
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	**1,325,000,000**
	APBD	**1,325,000,000**
	A. APBD MURNI	**1,325,000,000**
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0

4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang terlibat dalam pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 43 orang terdiri dari 34 orang PNS CPNS 7 orang dan 2 orang PPPK.

Tabel 4.4.5
Jumlah Personil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas/Badan	Pembina Utama Muda Tk I, IV/a	S2	1	PNS

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
2	Sekretariat				
	Sekretaris	Pembina, IV/a	S2	1	PNS
	Perencana Ahli Muda	Penata Tk I, III/d	S1	1	PNS
	Analis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	Penata Tk I, III/d	S1	2	PNS
	Arsiparis Ahli Muda	Penata Tk I, III/d	S1	1	PNS
	CPNS	Penata Muda, III/a	S1	1	CPNS
	Kepala Sub Bagian Umum	Penata Tk I, III/d	S1	1	PNS
	Pengadministrasi Kepegawaian	Penata Muda Tk I, III/b	SLTA	1	PNS
	Pengadministrasi Umum	Penata Muda, III/a	SLTA	1	PNS
	Pranata Komputer Trampil	Pengatur, II/c	D3	1	PNS
	Pranata Komputer Trampil PPPK	Penagtur, VII	D3	1	PPPK
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pengatur Muda Tk I, II/b	SLTA	1	PNS
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Penata Tk I, III/d	S1	1	PNS
	Analis Perbendaharaan	Penata, III/c	S1	1	PNS
	Bendahara Pengeluaran	Penata, III/c	S1	1	PNS
	Penata Laporan Keuangan	Penata Muda, III/a	S1	1	PNS
3	Bidang Pertanahan				
	Kepala Bidang Pertanahan	Pembina, IV/a	S2	1	PNS
	Penata Pertanahan Ahli Muda	Pembina, IV/a	S2	1	PNS
	Penata Pertanahan Ahli Muda	Penata Tk I, III/d	S1	1	PNS
	Analis Pertanahan	Penata, III/c	S1	1	PNS
	Analis Pertanahan	Penata Muda, III/a	S1	1	PNS
	Pengadministrasi Pertanahan	Penata Muda, III/a	SLTA	1	PNS
4.	Bidang Permukiman				
	Kepala Bidang Permukiman	Pembina, IV/a	S2	1	PNS
	Penata Kelola Bangunan dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	Penata Tk I, III/d	S2	1	PNS
	Analis Penataan Kawasan	Penata Muda Tk I, III/b	S1	1	PNS
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Penata Muda,III/a	SLTA	2	PNS
	Pengawas Fisik Permukiman	Penata Muda, III/a	SLTA	1	PNS
	CPNS	Penata Muda, III/a	S1	3	CPNS
	Pengelola Layanan Oprasional PPPK	Penatur,VII	D3	1	PPPK
	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Penata Muda Tk I, III/b	D3	1	PNS
5.	Bidang PSU				
	Kepala Bidang PSU	Penata Tk I, III/d	S1	1	
	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	Penata, III/c	D3	1	PNS
	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pratama	Penata Muda Tk I, III/b	S1	1	PNS
	Pengawas Fisik Permukiman	Penata Muda Tk I, III/b	S1	1	PNS
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Pembina Muda, III/a	SLTA	1	PNS
	Pengelola Perumahan dan Permukiman	Pengatur Tk I, II/d	D3	1	PNS
	CPNS	Penata Muda,III/a	S1	3	PNS
	Jumlah PNS			34	
	Jumlah P3K			2	
	CPNS			7	
	Jumlah Total			43	

Sumber data Kepegawaian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu :

a. Status tanah rumah tidak layak huni masih menenpati tanah carik desa dan pemda;
b. Banyak calon penerima baru (CPB) tidak mempunyai swadaya);
c. Jalan lingkungan masih bayak yang rusak berat yang tidak bisa didanai oleh APBD sehingga minta bantuan ke dinas perkim;
d. Minimnya alokasi dana untuk kegiatan penanganan rumah korban bencana alam;
e. Minimnya lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk relokasi dampak bencana;
f. Masih banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak memperhatikan pola tata ruang;
g. Banyak Perumahan yang direncanakan dan dibangun diatas lahan yang rawan bencana;
h. Banyak perumahan yang belum diserahterimakan 81 % perumahan belum menyerahkan PSUnya

b. Solusi

Solusi atas permasalahan tersebut di atas adalah :

a. Harus adanya perhatian serius dari Perintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam hal ini memberikan angaran yang cukup untuk membidik Wilayah Kawasan Kumuh secara berkesinambungan;
b. Pemerintah Daerah dalam setiap tahun anggaran mengalokasikan anggaran khusus ke wilayah Kawasan Kumuh;
c. Melaksanakan kajian-kajian tentang kebencanaan;
d. Memaksimalkan pembangunan rumah korban bencana dengan dana yang terbatas;
e. Pengusulan anggaran dalam penanganan kebencanaan;

f. Koordinasi dengan Bidang Tata Ruang agar pembangunan perumahan bisa sesuai dengan yang diharapkan

4.5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahuan 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota, adalah Bidang Urusan " *Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ".* Dan pada Tahun 2017 terjadi Perubahan SOTK sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dimana salah satunya dengan adanya bidang baru yaitu bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran, dan secara otomatis bertambah pula tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

Adapun Jenis Pelayanan SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2025 pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dengan tabel di bawah ini:

Tabel.4.5.1

JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG URUSAN POL-PP/ BPBD/ DAMKAR

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL REALISASI ANGGARAN TRANTIBUMLINMAS								**0**	**0**	**0.00 %**	
KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG TRANTIBUM											
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**							**0**	**0**	**0.00 %**	
	1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	0	0	0.00 %	
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004	0	0	0.00 %	
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0005	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0006	0	0	0.00 %	
		5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0007	0	0	0.00 %	
		6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0008	0	0	0.00 %	
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0009	0	0	0.00 %	
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0010	0	0	0.00 %	
		9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0011	0	0	0.00 %	
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0012	0	0	0.00 %	
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0013	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0014	0	0	0.00 %	
		13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	0	0	0.00 %	
		14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	0	0	0.00 %	
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	0	0	0.00 %	
		16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0017	0	0	0.00 %	
		18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0018	0	0	0.00 %	
	2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0001	0	0	0.00 %	
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0002	0	0	0.00 %	
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0003	0	0	0.00 %	
		4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0004	0	0	0.00 %	
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	Dokumen		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0005	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0006	0	0	0.00 %	
		7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0007	0	0	0.00 %	
		8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0008	0	0	0.00 %	
		9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0009	0	0	0.00 %	
		10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0010	0	0	0.00 %	
		11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	0	0	0.00 %	
		12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012	0	0	0.00 %	
	3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0002	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0003	0	0	0.00 %	
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0004	0	0	0.00 %	
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0005	0	0	0.00 %	
		5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0006	0	0	0.00 %	
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**							**0**	**0**	**0.00 %**	
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA											
	NAMA KEGIATAN										
KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG KEBENCANAAN											
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**							**0**	**0**	**0.00 %**	
	1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0003	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0004	0	0	0.00 %	
	2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0001	0	0	0.00 %	
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0002	0	0	0.00 %	
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0003	0	0	0.00 %	
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0004	0	0	0.00 %	
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0005	0	0	0.00 %	
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0006	0	0	0.00 %	
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0007	0	0	0.00 %	
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0008	0	0	0.00 %	
		9	Penyusunan rencana	Dokumen		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0009	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kontijensi								
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0010	0	0	0.00 %	
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0011	0	0	0.00 %	
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0012	0	0	0.00 %	
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0013	0	0	0.00 %	
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0014	0	0	0.00 %	
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0015	0	0	0.00 %	
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0016	0	0	0.00 %	
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0017	0	0	0.00 %	
	3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0001	0	0	0.00 %	
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0002	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0003	0	0	0.00 %	
		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0007	0	0	0.00 %	
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0008	0	0	0.00 %	
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0009	0	0	0.00 %	
		7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0010	0	0	0.00 %	
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0011	0	0	0.00 %	
	4	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0001	0	0	0.00 %	
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0002	0	0	0.00 %	
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0003	0	0	0.00 %	
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0004	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0005	0	0	0.00 %	
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0006	0	0	0.00 %	
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0007	0	0	0.00 %	
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0008	0	0	0.00 %	
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0009	0	0	0.00 %	
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0010	0	0	0.00 %	
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0011	0	0	0.00 %	
		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0012	0	0	0.00 %	
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0013	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**							**0**	**0**	**0.00 %**	
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA											
	NAMA KEGIATAN										
KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG DAMKAR											
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)**							**0**	**0**	**0.00 %**	
	1	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0001	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0002	0	0	0.00 %	
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0003	0	0	0.00 %	
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0004	0	0	0.00 %	
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0005	0	0	0.00 %	
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0007	0	0	0.00 %	
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0008	0	0	0.00 %	
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0011	0	0	0.00 %	
		9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0012	0	0	0.00 %	
		10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0013	0	0	0.00 %	
		11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0014	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0015	0	0	0.00 %	
		13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0016	0	0	0.00 %	
		14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0017	0	0	0.00 %	
		15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0018	0	0	0.00 %	
		16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0019	0	0	0.00 %	
	2	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen		1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0001	0	0	0.00 %	
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen		1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0002	0	0	0.00 %	
	3	**Investigasi Kejadian Kebakaran**						**0**	**0**	**0.00 %**	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen		1.05.04.2.03	1.05.04.2.03.0001	0	0	0.00 %	
	4	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang		1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0001	0	0	0.00 %	
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa		1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0002	0	0	0.00 %	
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen		1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0003	0	0	0.00 %	
	5	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0001	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0002	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0004	0	0	0.00 %	
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0005	0	0	0.00 %	
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**							**0**	**0**	**0.00 %**	
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA											
	NAMA KEGIATAN										

Sumber data satpol PP Damkar dan BPBD

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Tabel 4.5.2
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	Setiap Tahun
		2. Jumlah Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat daerah	100	Setiap Tahun
		3. Jumlah Capaian SPM	100	Setiap Tahun

4.5.3 Realisasi

Realisasi capaian Indikator Kinerja/Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) dengan capaian 93,33%
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) dengan capaian 98%
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) dengan capaian 100%
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) dengan capaian 100%
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) dengan capaian 87,05%

Tabel 4.5.3

Indikator Kinerja/Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						93.33 %	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					93.33 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	122	122	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**13.33 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					66.67 %	
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP **(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)**	unit	75	75	**0**	**100.00 %**	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 **(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)**	dokumen	10	10	**0**	**0.00 %**	
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** **(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)**	orang	133	133	**0**	**100.00 %**	
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	**0**	**0.00 %**	
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil **(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)**	orang	1	1	**0**	**100.00 %**	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan **(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)**	orang	1	1	**0**	**100.00 %**	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						99.33 %	
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**					98.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	802377	802377	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**18.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					90.00 %	
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	**0**	**80.00 %**	
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	50	50	**0**	**100.00 %**	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	2	2	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	6	6	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	50	50	**0**	**100.00 %**	
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	4	4	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	6	6	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	8	8	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	**0**	**100.00 %**	
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**40.00 %**	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	55	55	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	19	19	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	380	380	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**20.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	2	2	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	2	2	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	orang	3	3	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	30	30	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	**0**	**100.00 %**	
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	**0**	**100.00 %**	
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	**0**	**0.00 %**	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	0	0	**0**	**0.00 %**	
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00 %**	
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	**0**	**100.00 %**	
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**100.00 %**	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**100.00 %**	
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**100.00 %**	
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**100.00 %**	
	2) . Gladi Lapang ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	**0**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**100.00 %**	
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	0	0	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	0	0	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	0	0	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**100.00 %**	
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**100.00 %**	
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**100.00 %**	
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**100.00 %**	
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**100.00 %**	
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00 %**	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00 %**	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00 %**	
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**0.00 %**	
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					100.00 %	
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
Download SK Yang Telah Di Upload **3211-20250709110219KEPBUP 300.2-KEP.292-BPBD-2025 TTG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA LONGSOR CISARUA.pdf**							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5125	5125	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	2	2	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	35	35	**0**	**100.00 %**	
	2 . Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	**0**	**100.00 %**	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	40	40	**0**	**100.00 %**	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	**0**	**100.00 %**	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	**0**	**100.00 %**	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	**0**	**100.00 %**	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	**0**	**100.00 %**	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	42	42	**0**	**100.00 %**	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	42	42	**0**	**100.00 %**	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						87.05 %	
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**					87.05 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**70.77 %**	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	104	92	**12**	**88.46 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**16.28 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					81.41 %	
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	104	92	**12**	**88.46 %**	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1	1	**0**	**0.00 %**	
	Data Dukung : 3211-20250703103334SOP PEMADAMAN.pdf Status : DITOLAK *Mohon mengupload dokumen yang sudah terupdate yang sudah ditandatangani dan distempel. Trimakasih.* Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	41	41	**0**	**100.00 %**	
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	99	99	**0**	**100.00 %**	
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	1	1	**0**	**100.00 %**	
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	160	160	**0**	**100.00 %**	

Sumber data e-spmkemendagri 2025

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berjumlah Rp. 11.658.168.338,00

Tabel 4.5.4

Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. SUMEDANG	2,929,691,214,462
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	28,822,770,485
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	11.658.168.338
	APBD	9.604.528.138
	A. APBD MURNI	9.604.528.138
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	2,053,640,200

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yaitu :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kompisisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 243 Orang Personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang menurut tingkat pendidikan, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5.5a
Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang menurut tingkat pendidikan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	IV/b	S2	1	
2	Sekretariat				
	Sekretaris	IV/b	S1	1	
	- Kepala Sub Bagian Umum	III/d	S2	1	
	- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	IV/a	S2	1	
	Sub Bagian Umum				
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	III/a	SLTA	1	
	- Pranata komputer ahli pertama	III/a		2	
	- Operator Layanan Operasional		SLTA	5	
	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan				
	- Bendahara	III/b	S1-D.IV	1	
	- Penata Layanan Operasional	IX	S1	1	
	- Pengelola Layanan Operasional	VII	D-III	1	
	- Operator Layanan Operasional	V	SLTA	3	
3	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				
	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	IV/a	S2	1	
	Kepala Seksi Kerjasama	III/d	SLTA	1	
	- Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	III/a	S1	6	
	- Polisi Pamong Praja Penyelia	III/d	SLTA	1	
	- Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan / Mahir	III/b	SLTA	2	
	- Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil	II/d	SLTA	2	
	- Penata Layanan Operasinal	IX	S1	1	
	- Operator Layanan Operasiobal	VII	SLTA	13	
	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	III/d	S1-D.IV	1	
	- Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	III/b	S1	1	
	- Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	III/a	S1	5	
	- Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil	II/c	D-III	3	
	- Pengelola Trantibum	III/a	SLTA	3	
	- Pengelola Trantibum	II/d	SLTA	1	
	- Pengelola Trantibum	II/c	SLTA	1	
	- Pranata Trantibum	V	SLTA	4	
	- Penata Layanan Operasional	IX	S1	2	
	- Operator Layanan Operasional	V	SLTA	17	
4.	Bidang Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah				
	Kepala Bidang Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	III/d	S1-D.IV	1	
	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	III/c	S1-D.IV	1	
	- Pengadministrasi Perkantoran	II/a	Paket C	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	- Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	III/b	S1	1	
	- Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan / Mahir	III/b	SLTA	3	
	- Penata layanan operasional	IX	S1	1	
	- Operator layanan operasional	V	SLTA	4	
	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	III/d	S1-D.IV	1	
	- Penelaah Teknis Kebijakan	III/a	S1	1	
	- Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	III/a	S1	1	
	- Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	III/a	S1	8	
	- Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan / Mahir	III/b	S1	1	
	- Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan / Mahir	III/b	SLTA	1	
	- Penata Layanan Operasional	IX	S1	1	
	- Operator Layanan Operasional	V	SLTA	3	
5.	Bidang Perlindungan Masyarakat				
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	III/d	S2	1	
	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	III/d	S1	1	
	- Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	III/b	S1	1	
	- Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan / Mahir	III/b	SLTA	1	
	- Pengelola Layanan Operasional	VII	D-III	1	
	- Penata Layanan Operasional	IX	S1	2	
	Kepala Seksi Bina Potensi	IV/a	S2	1	
	- Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	III/b	S2	1	
	- Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	III/b	S1	1	
	- Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	III/a	S1	2	
	- Polisi Pamong Praja Pelaksana/ Terampil	II/d	D-III	1	
	- Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan / Mahir	III/b	SLTA	2	
	- Operator Layanan Operasional	V	SLTA	1	
	- Pengelola Layanan Operasional	VII	D-III	1	
6.	Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan				
	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	IV/a	S2	1	
	Kepala Seksi Pencegahan	III/d	S1-D.IV	1	
	- Analis Kebakaran Pertama	III/a	S1	2	
	- Pemadam Kebakaran Pemula	V	SLTA	1	
	- Operator Layanan Operasional	V	SLTA	9	
	- Penata Layanan Operasional	IX	S1	5	
	Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana	III/d	S1-D.IV	1	
	- Analis Kebakaran Pertama	III/a	S1	2	
	- Pemadam Kebakaran Pemula	V	SLTA	2	
	- Operator Layanan Operasional	V	SLTA	10	
	- Penata Layanan Operasional	IX	S1	5	

7.	UPT PEMADAM KEBAKARAN				
	Kepala UPT Pemadam Kebakaran Sumedang Kota	III/d	S1-D.IV	1	
	Kasubag Tata Usaha	III/d	S2	1	
	- Pemadam Kebakaran Pemula	V	SLTA	1	
	- Operator Layanan Operasional	V	SLTA	16	
	Kepala UPT Pemadam Kebakaran Tanjungsari	III/d	S1-D.IV	1	
	Kasubag Tata Usaha	III/c	S2	1	
	- Pemadam Kebakaran Terampil	II/d	SLTA	1	
	- Operator Layanan Operasional	V	SLTA	14	
	Kepala UPT Pemadam Kebakaran Darmaraja	III/d	S1-D.IV	1	
	Kasubag Tata Usaha	III/c	S2	1	
	Pemadam Kebakaran Terampil	II/d	SLTA	2	
	Pemadam Kebakaran Pemula	V	SLTA	1	
	Operator Layanan Operasional	V	SLTA	14	
	Kepala UPT Pemadam Kebakaran Conggeang	III/d	S1-D.IV	1	
	Kasubag Tata Usaha	III/c	SLTA	1	
	Operator Layanan Operasional	V	SLTA	19	

Sumber data kepegawaian Satpol PP 2025

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Faktor Internal
   - Masih Kurangnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
   - Belum Memadainya Sarana dan Prasarana pada Satpol PP..
2. Faktor Eksternal
   a. Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat.
   b. Masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran yang disebabkan kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satpol PP (Bidang Damkar dan Penyelamatan) seringnya keterlambatan dalam penanganan Kejadian Kebakaran karena wilayah Kabupaten Sumedang (26 Kecamatan) tidak sebanding dengan Sarana dan Prasarana yang ada

b. Solusi

1. Mengusukan kepada Pemerintah Daerah terkait Penganggaran Anggota Satpol PP untuk mengikuti Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

2. Mengusulkan kepada Pemerintah daerah terkait penambahan sarana dan prasarana yang memadai, dan untuk saat ini kami menggunakan fasilitas yang ada dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
3. Melakukan Sosialisasi dan Pengawasan kepada Masyarakat terkait Pemahaman akan Perda / Perkada;
4. Mengusulkan kepada Pemerintah daerah terkait penambahan sarana dan prasarana yang memadai, dan untuk saat ini kami menggunakan fasilitas yang ada dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

4.5.1.A BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, yaitu :

Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (*hazards*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (*capacity*) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu :

Serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi

lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu :
Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib (bukan pilihan). Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas. Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayananya, disusunlah Standar Pelayanan Minimalnya, Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau pemenuhan pelayanan dasar harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan dasar ini mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan masing-masing Lembaga. Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya, dengan melaksanakan SPM, maka penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Aspek pembagian urusan pemerintahan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf ‘e’ menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki makna bahwa penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar harus memiliki kriteria, sebagai berikut:

1. Bersifat layanan dasar yang disediakan pemerintah kepada masyarakat.
2. Pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal
3. Merupakan prioritas urusan yang harus dilaksanakan di daerah

4. Memerlukan kelembagaan perangkat daerah yang kuat (struktur, personel, peralatan dan anggaran)
5. Pengarusutamaan PRB dalam perencanaan dan penganggaran secara integrative

2. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sebanyak 63 orang dengan perincian :

Tabel 4.5.5b
Jumlah Pegawai di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Pelaksana	Pembina Utama Muda / IV.c	S-2	1	
2	Sekretariat				
	Sekretariat Badan	Penata TK. I/ III.d	S-2	1	
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penata TK. I/ III.d	S-1	1	
	- Pengelola Barang Milik Daerah	Penata Muda / III.a	SLTA	1	
	- Pengadministrasi Umum Pada Sekretariat	Penata Muda / III.a	SLTA	1	
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda / III.a	S-1	1	
	- Pelaksana	Penata / III.c	D-3	1	
	- Analis Kebencanaan	Penata Muda / III.a	S-1	1	
	- Pengemudi	-	S-1	1	Honorer
	Kepala Sub Bagian Perencana dan Keuangan	Penata TK. I/ III.d	S-2	1	
	- Pengadministrasi Keuangan	Penata Muda / III.a	SLTA	1	
	- Bendahara Pengeluaran	Penata Muda Tk.I/ III.b	S-1	1	
	- Analis Kebencanaan	Penata Muda / III.a	S-1	1	
	- Analis Perencanaan dan Kegiatan	Penata Muda Tk.I/ III.b	S-1	1	
3	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi				
	Kepala Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi	Penata TK. I/ III.d	S-1	1	
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I/ III.b	S-1	1	
	- Pengadministrasi Umum Pada Bidang Rehab & Rekonstruksi	Penata Muda Tk.I/ III.b	SLTA	1	
4.	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan				
	Kepala Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Pembina / IV.a	S-2	1	
	- Penata Penanggulangan Bencana	IX	S-2	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Ahli Pertama				
5.	Bidang Kedaruratan & Logistik				
	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Penata TK. I/ III.d	S-2	1	
	- Pengadministrasi Keuangan	Penata Muda / III.a	SLTA	1	
	- Penata Layanan Operasional	-	S-1	18	P3K PW
	- Operator Layanan Operasional	-	SLTA	24	P3K PW
	Jumlah PNS			19	
	Jumlah P3K			1	
	Jumlah P3K Paruh Waktu			42	
	Pengemudi			1	
	Jumlah Total			63	

Sumber data Kepegawaian BPBD 2025

3. Permasalahan dan Solusi SPM

a. Permasalahan

a. Masih rendahnya kesadaran masayarakat akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana;

b. Terbatasnya sarana prasarana dan mobilitas penanggulangan bencana.

b. Solusi

1. Melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi bencana bagi warga negara yang berada di 277 Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sumedang.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan melakukan sinergitas lintas sektor yang terkait dengan bidang kebencanaan

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Bidang urusan ada beberapa jenis pelayanan dasar yang menjadi pedoman dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permensos No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial pada 136ingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pusat antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 4.6.1

JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG URUSAN SOSIAL

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**							**0**	**0**	**0.00 %**	
	1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Penyediaan permakanan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0001	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan sandang	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0002	0	0	0.00 %	
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0003	0	0	0.00 %	
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0004	0	0	0.00 %	
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0005	0	0	0.00 %	
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0006	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0009	0	0	0.00 %	
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0010	0	0	0.00 %	
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0011	0	0	0.00 %	
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	1.06.04	1.06.04.1.01	1.06.04.2.01.0012	0	0	0.00 %	
	2	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**						**0**	**0**	**0.00 %**	
		1	Penyediaan makanan	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0001	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan sandang	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0002	0	0	0.00 %	
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0003	0	0	0.00 %	
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0004	0	0	0.00 %	
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1.06.04	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0005	0	0	0.00 %	
KEGIATAN LAINNYA											
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**							**0**	**0**	**0.00 %**	
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA											

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NAMA KEGIATAN										

Sumber Data Dinas Sosial Kabupaten Sumedang 2025

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2025 tercantum dalam tabel 3.28 berikut :

Tabel 4.6.2
Target SPM Dinas Sosial Kabupaten Sumedang 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1.	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	100%
2.	Program Perlindungan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%

Dari tabel diatas dapat terlihat jelas target pencapaian SPM setiap Jenis Pelayanan Dasar dan kegiatan beserta indikator nya ditargetkan 100%.

4.6.3 Realisasi

Realisasi Realisasi Indikator Kinerja Jenis Layanan Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2025 terdiri dari :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan capaian 100%
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti dengan capaian 100%
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dengan capaian 100%
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dengan capaian 100%
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan capaian 100%

Realisasi Indikator Kinerja Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2025 dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.6.3
Realisasi Indikator Kinerja Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	549	549	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	110	110	**0.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	81	81	**0.00**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	64	64	**0.00**	**100.00 %**	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	9	9	**0.00**	**100.00 %**	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	51	51	**0.00**	**100.00 %**	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	3	3	**0.00**	**100.00 %**	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	112	112	**0.00**	**100.00 %**	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	92	92	**0.00**	**100.00 %**	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	6	6	**0.00**	**100.00 %**	
	10 . Akses ke layanan 142esehatan142 dan 142esehatan dasar	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	6	6	**0.00**	**100.00 %**	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	**0.00**	**100.00 %**	
	13 . Layanan rujukan	Orang	10	10	**0.00**	**100.00 %**	
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	299	299	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	45	45	**0.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	45	45	**0.00**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	27	27	**0.00**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	4 . Penyediaan sandang	Orang	19	19	**0.00**	**100.00 %**	
	5 . Penyediaan perbekalan 143esehatan di luar Panti	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	117	117	**0.00**	**100.00 %**	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	35	35	**0.00**	**100.00 %**	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	9 . Akses ke layanan 143esehatan143 dan 143esehatan dasar	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	**0.00**	**100.00 %**	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**0.00**	**100.00 %**	
	12 . Layanan rujukan	Orang	3	3	**0.00**	**100.00 %**	
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	621	621	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	133	133	**0.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	103	103	**0.00**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	67	67	**0.00**	**100.00 %**	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	14	14	**0.00**	**100.00 %**	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	46	46	**0.00**	**100.00 %**	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	133	133	**0.00**	**100.00 %**	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	96	96	**0.00**	**100.00 %**	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	**0.00**	**100.00 %**	
	10 . Akses ke layanan 143esehatan143 dan 143esehatan dasar	Orang	2	2	**0.00**	**100.00 %**	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	11	11	**0.00**	**100.00 %**	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8	8	**0.00**	**100.00 %**	
	13 . Layanan rujukan	Orang	3	3	**0.00**	**100.00 %**	
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	349	349	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	81	81	**0.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	80	80	**0.00**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	40	40	**0.00**	**100.00 %**	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	**0.00**	**100.00 %**	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	**0.00**	**100.00 %**	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	65	65	**0.00**	**100.00 %**	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	30	30	**0.00**	**100.00 %**	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	11	11	**0.00**	**100.00 %**	
	9 . Akses ke layanan 144esehatan144 dan 144esehatan dasar	Orang	1	1	**0.00**	**100.00 %**	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	16	16	**0.00**	**100.00 %**	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	**0.00**	**100.00 %**	
	12 . Layanan rujukan	Orang	9	9	**0.00**	**100.00 %**	
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					100.00 %	
	Ya Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00 %**	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	10191	10191	**0**	**100.00 %**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00 %**	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	3547	3547	**0.00**	**100.00 %**	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	471	471	**0.00**	**100.00 %**	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1913	1913	**0.00**	**100.00 %**	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	713	713	**0.00**	**100.00 %**	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	3547	3547	**0.00**	**100.00 %**	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8

Sumber data e-spmkemendagri 2025

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2025 di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial berjumlah 3.277.361.900,00 dengan anggaran Dinas Sosial sebesar Rp. 14.396.965.220,00.

Tabel 4.6.4
Alokasi anggaran di Dinas Sosial tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. SUMEDANG	2,929,691,214,462
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	14,396,965,220
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	3,467,602,500
	APBD	3,467,602,500
	A. APBD MURNI	3,467,602,500
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

4.6.5 Dukungan Personil

Personil pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2025 yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal terdiri dari Aparatur sipil Negeri sebanyak 67 orang dan Non Aparatur sipil Negeri sebanyak 6 orang

Tabel 4.6.5
Jumlah Personil Dinas Sosial

NO.	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Kepala Dinas/Badan**	Pembina Utama Muda, IV/c	S 2	1	JPT Pratama
2	**Sekretariat**				
	Sekretaris	Pembina, IV/a	S1	1	Administrator
	- Perencana Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	JF
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S2	1	JF
	- Analis Sumberdaya Aparatur	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	JF
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda , III/a	S1	1	CPNS / JF
	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penata Tk.I, III/d	S1	1	Pengawas
	- Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda , III/a	SLTA	1	ASN
	- Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda , III/a	SLTA	1	ASN
	- Penelaah Teknis Kebijakan	Pengatur , II/c	D.III	1	ASN
	- Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur Muda, II/a	SLTA	1	ASN
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda , III/a	D.III	1	PPPK
	- Penata Layanan Operasional	Penata Muda , III/a	S1	1	PPPK
	- Penata Layanan Operasional	-	S 1	5	PPPKPW
	- Pengelola Layanan Operasional	-	D.III	2	PPPKPW
	- Operator Layanan Operasional	-	SLTA	4	PPPKPW
3	**Bidang Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**				
	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pembina, IV/a	S 2	1	Administrator
	- Pekerja Sosial Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	ASN
	- Penelaaah Teknis Kebijakan	Penata Tk.I, III/d	S1	1	ASN
	- Pengadministrasi Perkantoran	Penata Muda , III/a	SLTA	1	ASN
	- Pekerja Sosial Ahli Pertama	Penata Muda , III/a	S1	2	CPNS / JF
	- Penata Layanan Operasional	-	S1	2	PPPKPW
	- Operator Layanan Operasional	-	SLTA	4	PPPKPW
	- Non Data Base	-	SLTA	2	Non Data Base
4.	**Bidang Pemberdayaan Sosial**				
	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Pembina, IV/a	S2	1	Administrator
	- Penelaaah Teknis Kebijakan	Pembina Tingkat.I, IV/b	S2	1	ASN
	- Pengadministrasi Perkantoran	Penata Muda , III/a	SLTA	1	ASN
	- Operator Layanan Operasional	Pengatur Muda, II/a	SLTA	1	ASN
	- Operator Layanan Operasional	Pengatur Muda, II/a	SD	1	ASN
	- Penyuluh sosial Ahli Pertama	Penata Muda , III/a	S1	2	CPNS / JF
	- Operator Layanan Operasional	-	SLTA	4	PPPKPW
	- Pengelola Layanan Operasional	-	D.III	1	PPPKPW
	- Pengelola Umum Operasional	-	SD	1	PPPKPW
	- Non Data Base	-	SLTA	2	Non Data Base
5.	**Bidang Rehabilitasi Sosial**				
	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Pembina, IV/a	S2	1	Administrator

NO.	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	- Penyuluh Sosial Ahli Muda	Pembina, IV/a	S2	1	JF
	- Penelaaah Teknis Kebijakan	Penata Tk.I, III/d	S1	1	ASN
	- Pekerja Sosial Ahli Muda	Penata Tk.I, III/d	S1	1	JF
	- Penelaaah Teknis Kebijakan	Penata Muda Tk.I, III/b	S1	1	ASN
	- Pekerja Sosial Ahli Pertama	Penata Muda , III/a	S1	1	CPNS
	- Penata Layanan Operasional	-	S1	2	PPPKPW
	- Pengelola Layanan Operasional	-	D.III	1	PPPKPW
	- Operator Layanan Operasional	-	SLTA	8	PPPKPW
	- Pengelola Umum Operasional	-	SD	1	PPPKPW
	- Non Data Base	-	S1	2	Non Data Base
	Jumlah Pejabat Struktural			6	
	Jumlah Jabatan Fungsional			5	
	Jumlah ASN Pelaksana			13	
	Jumlah CPNS			6	
	Jumlah PPPK			2	
	Jumlah PPPK PW			35	
	Jumlah Non Data Base			6	
	JUMLAH TOTAL			**73**	

Sumber data Kepegawaian Dinas Sosial 2025

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Masih ada beberapa permasalahan yang terkait dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial dengan permasalahan sebagai berikut :

a. Pemberian Honorarium Jasa Penanganan Sosial di bawah Upah Minimum Regional (UMR) karena keterbatasan anggaran;
b. Kurangnya Pemenuhan Penyediaan Alat Bantu Kursi Roda bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia.
c. Kurangnya sarana mobilitas Kendaraan Roda Empat untuk penjangkauan dan asesmen, dan distribusi bantuan sosial
d. Kurang memadai Fasilitas Rumah Singgah.

b. Solusi

Dari permasalahan tersebut di atas, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi Pentahelix untuk pemenuhan keterbatasan anggaran;
2. Verval data secara berkala;
3. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan proses perencanaan;
4. Koordinasi dengan stakeholder pusat dengan mengajukan anggaran Bansos APBN (Kemensos);
5. Mengajukan pengadaan kendaraan roda empat;
6. Pengajuan Revitalisasi Rumah Singgah.

4.7 PROGRAM, KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Pendidikan;
2. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Kesehatan;
3. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Pekerjaan Umum dana Tata Ruang
4. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Perumahan Rakyat;
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Sosial.

Dalam hal pelaksanaannya 6 bidang urusan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Standar Pelayanan Minimal menjadi prioritas yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

a. Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan

Urusan pemerintah bidang pendidikan tahun 2025 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dengan Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

   Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :

   a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

b) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
c) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
d) Pengadaan Perlengkapan PAUD
e) Pengelolaan Dana BOP PAUD
f) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
g) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
h) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
i) Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
b) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
c) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
d) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
e) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
f) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
g) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
h) Pengadaan Mebeul Sekolah
i) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
j) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
k) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
l) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
m) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
n) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
o) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
p) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
q) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
b) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
c) Penambahan Ruang Kelas Baru
d) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
e) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
f) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
g) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
h) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
i) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
j) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
k) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
l) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
m) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
n) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
o) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
p) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan
b) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
c) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, anggaran dan Realisasi standar pelayanan minimal Tahun 2025 dengan rincian tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.7.1

Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
								234,809,684,555	214,222,251,556	91.23 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412						7,580,615,000	7,440,573,032	98.15 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0051	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	300,000,000	295,045,300	98.35 %	
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	480,000,000	480,000,000	100.00 %	
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	50,000,000	24,828,300	49.66 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030	0	0	0.00 %	
		6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040	0	0	0.00 %	
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	0	0	0.00 %	
Kekhususan PAUD											
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0045	783,640,000	782,850,000	99.90 %	
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0046	5,616,975,000	5,540,256,932	98.63 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	100,000,000	89,948,500	89.95 %	
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	100,000,000	96,400,000	96.40 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	0	0	0.00 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	0	0	0.00 %	
		7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026	50,000,000	42,350,000	84.70 %	
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	0	0	0.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	100,000,000	88,894,000	88.89 %	
	JUMLAH INDIKATOR				7,580,615,000	7,440,573,032	98.15 %				
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629						11,469,072,000	11,290,455,811	98.44 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0054	161,360,000	97,002,800	60.12 %	
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	50,000,000	44,711,000	89.42 %	
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	0	0	0.00 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	752,609,000	751,975,000	99.92 %	
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	8,264,805,000	8,257,279,386	99.91 %	
Literasi											

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	75,000,000	74,700,000	99.60 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	500,000,000	487,247,000	97.45 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	0.00 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	0.00 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00 %	
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	103,725,000	103,575,000	99.86 %	
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	50,000,000	43,886,800	87.77 %	
Numerasi											
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	75,000,000	74,700,000	99.60 %	
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	500,000,000	487,247,000	97.45 %	
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	0.00 %	
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	0.00 %	
		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00 %	
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	50,000,000	43,886,800	87.77 %	
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00 %	
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	321,673,000	313,945,025	97.60 %	
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	103,725,000	103,575,000	99.86 %	
Keamanan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	103,725,000	103,575,000	99.86 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	50,000,000	32,000,000	64.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	
Kebhinekaan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	103,725,000	103,575,000	99.86 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	50,000,000	32,000,000	64.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	
Inklusifitas											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	103,725,000	103,575,000	99.86 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	50,000,000	32,000,000	64.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				11,469,072,000	11,290,455,811	98.44 %				
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647						5,735,161,480	5,499,168,706	95.89 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	0	0	0.00 %	
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	2,096,489,480	2,093,944,900	99.88 %	
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	150,000,000	138,270,000	92.18 %	
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051	100,000,000	90,700,000	90.70 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	400,000,000	399,470,000	99.87 %	
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062	236,224,000	227,990,102	96.51 %	
Literasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	236,224,000	227,990,102	96.51 %	
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	480,000,000	477,000,000	99.38 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	100,000,000	89,948,500	89.95 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	0	0	0.00 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	0.00 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00 %	
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	0	0	0.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	300,000,000	274,848,000	91.62 %	
		10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00 %	
Numerasi											
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	0	0	0.00 %	
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	50,000,000	46,625,000	93.25 %	
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	0	0	0.00 %	
		4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00 %	
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	0.00 %	
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	0	0	0.00 %	
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00 %	
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	236,224,000	227,990,102	96.51 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	300,000,000	274,848,000	91.62 %	
Keamanan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	300,000,000	274,848,000	91.62 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	50,000,000	35,000,000	70.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00 %	
Kebhinekaan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	300,000,000	274,848,000	91.62 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	50,000,000	35,000,000	70.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00 %	
Inklusifitas											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	300,000,000	274,848,000	91.62 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	50,000,000	35,000,000	70.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				5,735,161,480	5,499,168,706	95.89 %				
		4	Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20250805052437					100,000,000	46,300,000	46.30 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0001	50,000,000	46,300,000	92.60 %	
		1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0002	50,000,000	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				100,000,000	46,300,000	46.30 %				
		5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842					0	0	0.00 %	
Literasi											
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00 %	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	(Rupiah)	(Rupiah)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Numerasi											
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %				
	JUMLAH PROGRAM				24,884,848,480	24,276,497,549	97.56 %				
KEGIATAN LAINNYA											
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA							176,422,686,000	156,465,178,961	89%	
	1	Literasi									
		1.						50,000,000	48,150,000	96.30 %	
	2	Numerasi									
		1.						9,000,000,000	9,000,000,000	100.00 %	
	3	Inklusifitas									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN INKLUSIFITAS LAINYA											
	4	Kebhinekaan									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEBHINEKAAN LAINYA											
	5	Keamanan									
		1.						1,999,999,775	1,998,457,490	99.92 %	
		2.						9,904,913,200	9,894,795,880	99.90 %	
		3.						11,247,237,100	11,241,338,676	99.95 %	
		4.						1,300,000,000	1,297,833,000	99.83 %	
	1.	4 2025 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1203232						93,382,230,000.00	93,382,230,000.00	100.00 %	
	2.	4 2025 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1203234						52,139,980,000.00	49,176,710,373.00	94.32 %	
	3.	4 2025 Pengelolaan Dana BOP PAUD 1203235						17,010,860,000.00	8,626,931,822.00	50.71 %	
	4.	4 2025 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1203236						11,554,180,000.00	3,061,961,766.00	26.50 %	
	5.	4 2025 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1203250						1,560,436,000.00	1,559,050,000.00	99.91 %	
	6.	4 2025 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1209783						300,000,000.00	289,687,000.00	96.56 %	
	7.	4 2025 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1209805						275,000,000.00	212,170,000.00	77.15 %	
	8.	4 2025 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1209806						200,000,000.00	156,438,000.00	78.22 %	

Sumber Data Dinas Pendidikan 2025

Jenis urusan wajib Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal yang menjadi program pengelolaan pendidikan pendidikan kabupaten Sumedang dengan anggaran

sebesar Rp. 234,809,684,555 dengan Realisasi Rp. 214,222,251,556 dengan serapan 91,23% yang terdiri dari :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412 sebesar RP. 7,580,615,000 Realisasi Rp. 7,440,573,032 dengan serapan 98,15%.untuk sub kegiatan sebanyak 16 jenis layanan yang sudah teranggarkan sebanyak 9 jenis mutu layanan dengan rincian table 4.1 diatas.
2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629 sebesar RP. 11,469,072,000 Realisasi Rp. 11,290,455,811 dengan serapan 98.44 % , untuk sub kegiatan sebanyak 38 jenis layanan yang sudah teranggarkan sebanyak 19 jenis mutu layanan dengan rincian table 4.1 diatas.
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647 sebesar RP. 5,735,161,480 Realisasi Rp. 5,499,168,706 dengan serapan 95.89 %, untuk sub kegiatan sebanyak 38 jenis layanan yang sudah teranggarkan sebanyak 17 jenis mutu layanan dengan rincian table 4.1 diatas.
4. Kegiatan Pendidikan Kesetaraan sebesar RP. 100,000,000 Realisasi Rp. 46,300,000 dengan serapan 89 %, untuk sub kegiatan sebanyak 4 jenis layanan yang sudah teranggarkan sebanyak 2 jenis mutu layanan dengan rincian table 4.1 diatas.
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya sebesar RP. 176,422,686,000 Realisasi Rp. 156,465,178,961 dengan serapan 46,39%, untuk sub kegiatan sebanyak 14 jenis layanan dengan rincian table 4.1 diatas.

2. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG URUSAN KESEHATAN

a. Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan
   Program, kegiatan dan sub kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 bidang urusan Kesehatan.
b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
   Jenis urusan wajib Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal yang menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Kesehatan kabupaten Sumedang sudah teranggarakan semua jenis mutu layanan yang terdiri dari:

   1. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
   2. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
   3. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir

4. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
5. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
7. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
8. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
9. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Adapun serapan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Kesehatan dalam pelaksanaannya ada yang masih di bawah 30 % dengan rincian table 4.2 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan di bawah ini.

Tabel 4.7.2
Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. SUMEDANG				**17,093,169,200**	**16,143,677,535**	**94.45 %**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**17,093,169,200**	**16,143,677,535**	**94.45 %**
	1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237**			**17,093,169,200**	**16,143,677,535**	**94.45 %**
	1.02.02.2.02.0001	**1**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil**	**Orang**	5,263,490,300	5,116,376,268	**97.21 %**
	1.02.02.2.02.0002	**2**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin**	**Orang**	388,825,600	366,327,132	**94.21 %**
	1.02.02.2.02.0003	**3**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir**	**Orang**	335,958,400	313,868,280	**93.42 %**
	1.02.02.2.02.0004	**4**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita**	**Orang**	4,238,675,900	4,076,566,803	**96.18 %**
	1.02.02.2.02.0005	**5**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	**Orang**	1,147,240,200	1,001,555,600	**87.30 %**
	1.02.02.2.02.0006	**6**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif**	**Orang**	2,007,191,400	1,869,798,200	**93.15 %**
	1.02.02.2.02.0007	**7**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut**	**Orang**	610,983,200	567,449,902	**92.87 %**
	1.02.02.2.02.0008	**8**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi**	**Orang**	662,045,600	589,018,400	**88.97 %**
	1.02.02.2.02.0009	**9**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus**	**Orang**	610,588,000	531,682,350	**87.08 %**
	1.02.02.2.02.0010	**10**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**	**Orang**	527,556,000	481,522,800	**91.27 %**
	1.02.02.2.02.0011	**11**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**Orang**	653,448,000	599,096,000	**91.68 %**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.02.02.2.02.0012	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	647,166,600	630,415,800	97.41 %
	JUMLAH INDIKATOR				17,093,169,200	16,143,677,535	94.45 %
	JUMLAH PROGRAM				17,093,169,200	16,143,677,535	94.45 %

Sumber data : Input Aplikasi SPM Tw IV 2025

1. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil

   Pada tahun 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil anggaran sebesar 5,263,490,300 dengan realisasi sebesar 5,116,376,268 dan serapan sebesar 97.21 %
2. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin anggaran sebesar 388,825,600 dengan realisasi sebesar 366,327,132 dan serapan sebesar 94.21 %
3. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir

   Pada tahun 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir anggaran sebesar 335,958,400 dengan realisasi sebesar 313,868,280 dan serapan sebesar 94.21 %
4. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita

   Pada tahun 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita anggaran sebesar 4,238,675,900 dengan realisasi sebesar 4,076,566,803 dan serapan sebesar 93,43%
5. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

   Pada tahun 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar anggaran sebesar 1,147,240,200 dengan realisasi sebesar 1,001,555,600 dan serapan sebesar 87,30%.
6. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif

   Pada tahun 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif anggaran sebesar 2,007,191,400 dengan realisasi sebesar 1,869,798,200 dan serapan sebesar 93,15%
7. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut

Pada tahun 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut anggaran sebesar 610,983,200 dengan realisasi sebesar 567,449,902 dan serapan sebesar 92.87 %.

8. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi

   Pada tahun 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi anggaran sebesar 662,045,600 dengan realisasi sebesar 589,018,400 dan serapan sebesar 88,97%.

9. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

   Pada tahun 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus anggaran sebesar 610,588,000 dengan realisasi sebesar 531,682,350 dan serapan sebesar 87,08%

10. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

    Pada tahun 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat anggaran sebesar 527,556,000 dengan realisasi sebesar 481,522,800 dan serapan sebesar 91,27%.

11. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

    Pada tahun 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis anggaran sebesar 653,448,000 dengan realisasi sebesar 599,096,000 dan serapan sebesar 91,68%.

12. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

    Pada tahun 2025 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV anggaran sebesar 647,166,600 dengan realisasi sebesar 630,415,800 dan serapan sebesar 97,41%

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

a. Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan

   Program, kegiatan dan sub kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 bidang Pekerjaan Umum kabupaten Sumedang.

b. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

   Jenis urusan wajib Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal yang menjadi program, kegiatan bidang Pekerjaan Umum kabupaten

Sumedang sudah teranggarakan, untuk sub kegiatan yang baru teranggarankan terdiri dari :

Tabel 4.7.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang PUTR Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. SUMEDANG				17,067,380,300	16,787,159,913	98.36 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				11,342,121,300	11,075,191,363	97.65 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			11,342,121,300	11,075,191,363	97.65 %
	1.03.03.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0003	3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0004	4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0005	5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0006	6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0007	7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0008	8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0009	9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0010	10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0011	11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0012	12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0013	13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0014	14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0015	15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0016	16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0017	17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0018	18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0019	19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0020	20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0021	21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.03.2.01.0023	23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0024	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0025	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	199,100,000	197,475,300	99.18 %
	1.03.03.2.01.0026	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	150,000,000	149,915,100	99.94 %
	1.03.03.2.01.0027	27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0028	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	10,843,021,300	10,579,400,263	97.57 %
	1.03.03.2.01.0029	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0030	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0031	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0032	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	150,000,000	148,400,700	98.93 %
	1.03.03.2.01.0033	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				11,342,121,300	11,075,191,363	97.65 %
	JUMLAH PROGRAM				11,342,121,300	11,075,191,363	97.65 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5,725,259,000	5,711,968,550	99.77 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			5,725,259,000	5,711,968,550	99.77 %
	1.03.05.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0003	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0004	4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0005	5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0006	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0007	7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0008	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0009	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0010	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0011	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0012	12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0013	13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0014	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.05.2.01.0015	15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0016	16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0017	17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0018	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0019	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0020	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0021	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0022	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0023	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0024	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0025	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0026	26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0027	27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0028	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0029	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0030	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0031	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0032	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0033	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0034	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0035	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0036	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M^3/Hari	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0037	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0038	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0039	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	5,625,259,000	5,612,330,800	99.77 %
	1.03.05.2.01.0040	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2.01.0041	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	100,000,000	99,637,750	99.64 %
	JUMLAH INDIKATOR				5,725,259,000	5,711,968,550	99.77 %
	JUMLAH PROGRAM				5,725,259,000	5,711,968,550	99.77 %

Dengan penjelasan table di atas sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota adalah anggaran sebesar 11,342,121,300 dengan realisasi sebesar 11,075,191,363dan serapan sebesar 97.65 %
2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah anggaran sebesar 199,100,000 dengan realisasi sebesar 197,475,300 dan serapan sebesar 99.18 %
3. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan adalah anggaran sebesar 150,000,000 dengan realisasi sebesar 149,915,100 dan serapan sebesar 99,94 %
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat adalah anggaran sebesar 5,625,259,000 dengan realisasi sebesar 5,612,330,800 dan serapan sebesar 99,77 %
5. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah anggaran sebesar 100,000,000 dengan realisasi sebesar 99,637,750 dan serapan sebesar 99,64 %

4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Tabel 4.7.4
Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. SUMEDANG				1,325,000,000	1,285,774,251	97.04 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1,005,000,000	965,774,251	96.10 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			355,000,000	354,330,251	99.81 %
	1.04.02.2.01.0001	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.04.02.2.01.0002	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	100,000,000	99,700,000	99.70 %
	1.04.02.2.01.0003	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	75,000,000	74,894,369	99.86 %
	1.04.02.2.01.0004	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	80,000,000	79,934,773	99.92 %
	1.04.02.2.01.0005	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0006	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	100,000,000	99,801,109	99.80 %
	1.04.02.2.01.0007	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0008	8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0009	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0010	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				355,000,000	354,330,251	99.81 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			650,000,000	611,444,000	94.07 %
	1.04.02.2.03.0001	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0002	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0003	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0004	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	650,000,000	611,444,000	94.07 %
	1.04.02.2.03.0005	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0006	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0007	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0008	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0009	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0010	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0011	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0012	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				650,000,000	611,444,000	94.07 %
	JUMLAH PROGRAM				1,005,000,000	965,774,251	96.10 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		1.	Pengadaan Tanah Relokasi Rumah Korban Bencana		320,000,000	320,000,000	100.00 %

Sumber data Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2025

Program Pengembangan Perumahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 sebesar 1,325,000,000 realisasi sebesar 1,285,774,251 dengan serapan sebesar 97.04 %.

Dengan penjelasan table di atas sebagai berikut :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten anggaran sebesar 355,000,000 dengan realisasi sebesar 354,330,251 dan serapan sebesar 99.81 %.
2. Sub Kegiatan Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan anggaran sebesar 100,000,000 dengan realisasi sebesar 99,700,000 dan serapan sebesar 99.70 % .
3. Sub Kegiatan Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani anggaran sebesar 75,000,000 dengan realisasi sebesar 74,894,369 dan serapan sebesar 99.86 % .
4. Sub Kegiatan Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana anggaran sebesar 80,000,000 dengan realisasi sebesar 79,934,773 dan serapan sebesar 99.92 % .
5. Sub Kegiatan Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus anggaran sebesar 100,000,000 dengan realisasi sebesar 99,801,109 dan serapan sebesar 99,80% .
6. Sub Kegiatan Pembangunan rumah bagi korban bencana anggaran sebesar 650,000,000 dengan realisasi sebesar 611,444,000 dan serapan sebesar 94,07 %.
7. Program kegiatan lainya Pengadaan Tanah Relokasi Rumah Korban Bencana anggaran sebesar 320,000,000dengan realisasi sebesar 320,000,000 dan serapan sebesar 100 %.

5. BIDANG URUSAN KETRENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Program, Kegiatan Dan Anggaran SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Dan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD).

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.7.5

Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketrentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. SUMEDANG				11,658,168,338	11,390,003,601	97.70 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				4,320,456,800	4,267,882,908	98.78 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			3,964,618,400	3,912,193,908	98.68 %
	1.05.02.2.01.0003	1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	93,598,400	93,001,400	99.36 %
	1.05.02.2.01.0004	2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	153,552,000	150,551,900	98.05 %
	1.05.02.2.01.0005	3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	800,000,000	799,954,000	99.99 %
	1.05.02.2.01.0006	4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	2,053,640,200	2,005,561,208	97.66 %
	1.05.02.2.01.0007	5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0008	6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0009	7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0010	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0011	9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0012	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0013	11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0014	12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	412,379,200	411,718,800	99.84 %
	1.05.02.2.01.0015	14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.02.2.01.0016	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0016	16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	451,448,600	451,406,600	99.99 %
	1.05.02.2.01.0017	17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0018	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				3,964,618,400	3,912,193,908	98.68 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			354,983,400	354,834,000	99.96 %
	1.05.02.2.02.0001	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0002	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	24,309,200	24,309,200	100.00 %
	1.05.02.2.02.0003	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	330,674,200	330,524,800	99.95 %
	1.05.02.2.02.0004	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0005	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0006	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0007	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0008	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0009	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0010	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0011	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.02.0012	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				354,983,400	354,834,000	99.96 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			855	855	100.00 %
	1.05.02.2.03.0002	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0003	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0004	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0005	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0006	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	855	855	100.00 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	JUMLAH INDIKATOR				855	855	100.00 %
	JUMLAH PROGRAM				4,320,456,800	4,267,882,908	98.78 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				4,756,337,838	4,584,415,883	96.39 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			196,593,000	186,237,082	94.73 %
	1.05.03.2.01.0003	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	166,850,000	163,401,282	97.93 %
	1.05.03.2.01.0004	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	29,743,000	22,835,800	76.78 %
	JUMLAH INDIKATOR				196,593,000	186,237,082	94.73 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			4,015,802,650	3,865,735,601	96.26 %
	1.05.03.2.02.0001	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	99,678,000	99.68 %
	1.05.03.2.02.0002	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	343,000,000	327,390,000	95.45 %
	1.05.03.2.02.0003	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1,641,234,000	1,613,786,700	98.33 %
	1.05.03.2.02.0004	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0005	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0006	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	31,620,850	29,910,850	94.59 %
	1.05.03.2.02.0007	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0008	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0009	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	95,418,300	368,3	0.39 %
	1.05.03.2.02.0010	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	26,023,300	24,777,650	95.21 %
	1.05.03.2.02.0011	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0012	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0013	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	29,363,200	29,363,200	100.00 %
	1.05.03.2.02.0014	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0015	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	1,749,143,000	1,740,460,901	99.50 %
	1.05.03.2.02.0016	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0%
	1.05.03.2.02.0017	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4,015,802,650	3,865,735,601	96.26 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			395,880,988	393,141,900	99.31 %
	1.05.03.2.03.0001	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0002	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	40,321,700	39,036,288	96.81 %
	1.05.03.2.03.0003	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	100,117,588	100,117,588	100.00 %
	1.05.03.2.03.0007	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0008	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0009	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	218,103,900	216,650,224	99.33 %
	1.05.03.2.03.0010	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0011	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	37,337,800	37,337,800	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				395,880,988	393,141,900	99.31 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			148,061,200	139,301,300	94.08 %
	1.05.03.2.04.0001	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	19,350,500	17,925,000	92.63 %
	1.05.03.2.04.0002	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	77,504,200	73,702,100	95.09 %
	1.05.03.2.04.0003	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	16,015,000	15,430,000	96.35 %
	1.05.03.2.04.0004	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0005	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	14,961,200	14,378,000	96.10 %
	1.05.03.2.04.0006	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0007	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0008	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0009	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0010	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	20,230,300	17,866,200	88.31 %
	1.05.03.2.04.0011	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0012	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0013	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				148,061,200	139,301,300	94.08 %
	JUMLAH PROGRAM				4,756,337,838	4,584,415,883	96.39 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				2,581,373,700	2,537,704,810	98.31 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			2,581,373,700	2,537,704,810	98.31 %
	1.05.04.2.01.0001	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0002	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2,556,383,700	2,513,811,310	98.33 %
	1.05.04.2.01.0003	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0004	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0005	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	24,990,000	23,893,500	95.61 %
	1.05.04.2.01.0007	6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0008	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0011	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0012	9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0013	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0014	11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0015	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0016	13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0017	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0018	15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
	1.05.04.2.01.0019	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				2,581,373,700	2,537,704,810	98.31 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.02.0001	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.02.0002	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.03.0001	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.04.0001	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.04.2.04.0002	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%
	1.05.04.2.04.0003	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.05.0001	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0002	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0004	3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	1.05.04.2.05.0005	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				2,581,373,700	2,537,704,810	98.31 %

Sumber data Satpol PP dan BPBD 2025

Bidang Urusan Ketrentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Program serta Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah

A. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Peningkatan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar 4,320,456,800 dan Realisasi sebesar 4,267,882,908 dengan serapan program sebesar 98.78 %

a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten dengan anggaran sebesar 3,964,618,400 dan Realisasi sebesar 3,912,193,908 dengan serapan program sebesar 98.68 %

Terdiri dari 18 Layanan yang sudah terdapat anggarab sebanayak 5 layanan yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar 93,598,400 dan Realisasi sebesar 93,001,400 dengan serapan program sebesar 99.36 %.
2. Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar 153,552,000 dan Realisasi sebesar dengan serapan program sebesar %.
3. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dengan anggaran sebesar 800,000,000 dan Realisasi sebesar 799,954,000 dengan serapan program sebesar 99.99 %.
4. Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar 2,053,640,200 dan Realisasi sebesar 2,005,561,208 dengan serapan program sebesar 97.66 %
5. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan dengan anggaran sebesar 412,379,200 dan Realisasi sebesar 411,718,800 dengan serapan program sebesar 99.84 %.

6. Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan anggaran sebesar 451,448,600 dan Realisasi sebesar 451,406,600 dengan serapan program sebesar 99.99 % .

b) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati dengan anggaran sebesar Rp. 354,983,400 dan Realisasi sebesar Rp. 354,834,000 dengan serapan program sebesar 99.96 %.

Terdiri dari 12 layanan yang mendapatkan anggaran sebanyak 2 layanan yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp. 24,309,200 dan Realisasi sebesar Rp. 24,309,200 dengan serapan program sebesar 100. %.
2. Sub Kegiatan penanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp. 330,674,200 dan Realisasi sebesar Rp. 330,524,800 dengan serapan program sebesar 99.95 %.

B. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)

Program Penanggulangan Bencana anggaran sebesar 4,756,337,838 dan Realisasi sebesar 4,584,415,883 dengan serapan program sebesar 96.39 %.

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456 terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota anggaran sebesar 166,850,000 dan Realisasi sebesar 163,401,282 dengan serapan program sebesar 97.93 %.

2. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) anggaran sebesar 29,743,000 dan Realisasi sebesar 22,835,800 dengan serapan program sebesar 76.78 %.

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443 anggaran sebesar 4,015,802,650 dan Realisasi sebesar 3,865,735,601 dengan serapan program sebesar 96.26 %.

1. Sub Kegiatan Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota anggaran sebesar 100,000,000 dan Realisasi sebesar 99,678,000 dengan serapan program sebesar 99.68 %.
2. Sub Kegiatan Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten anggaran sebesar 343,000,000 dan Realisasi sebesar 327,390,000 dengan serapan program sebesar 95.45 %.
3. Sub Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota anggaran sebesar 1,641,234,000 dan Realisasi sebesar 1,613,786,700 dengan serapan program sebesar 98.33 %.
4. Sub Kegiatan Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana anggaran sebesar 31,620,850 dan Realisasi sebesar 29,910,850 dengan serapan program sebesar 94.59 % .
5. Sub Kegiatan Penyusunan rencana kontijensi anggaran sebesar 95,418,300 dan Realisasi sebesar 95,418,300 dengan serapan program sebesar 100 %
6. Sub Kegiatan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana anggaran sebesar 26,023,300 dan Realisasi sebesar 24,777,650 dengan serapan program sebesar 95.21 % .

7. Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota anggaran sebesar 29,363,200 dan Realisasi sebesar 29,363,200 dengan serapan program sebesar100 %
8. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota anggaran sebesar 1,749,143,000 dan Realisasi sebesar 1,740,460,901 dengan serapan program sebesar 99.50 %.

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445

   anggaran sebesar 395,880,988 dan Realisasi sebesar 393,141,900 dengan serapan program sebesar 99.31 % terdiri dari :

   1. Sub Kegiatan Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota anggaran sebesar 40,321,700 dan Realisasi sebesar 39,036,288 dengan serapan program sebesar 96.81 %.
   2. Sub Kegiatan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota anggaran sebesar 100,117,588 dan Realisasi sebesar 100,117,588 dengan serapan program sebesar 100%

d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446 anggaran sebesar 148,061,200 dan Realisasi sebesar 139,301,300 dengan serapan program sebesar 94.08 % terdiri dari:

   1. Sub Kegiatan Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota anggaran sebesar 19,350,500 dan Realisasi sebesar 17,925,000 dengan serapan program sebesar 92.63 %.
   2. Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota anggaran sebesar 77,504,200 dan Realisasi sebesar 73,702,100 dengan serapan program sebesar 95.09 %.
   3. Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota anggaran sebesar

16,015,000 dan Realisasi sebesar 16,015,000 dengan serapan program sebesar 96.35 %.

4. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana anggaran sebesar 14,961,200 dan Realisasi sebesar 14,378,000 dengan serapan program sebesar 96.10 %.
5. Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota anggaran sebesar 20,230,300 dan Realisasi sebesar 17,866,200 dengan serapan program sebesar 88.31 %.

e. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449 anggaran sebesar 2,581,373,700 dan Realisasi sebesar 2,537,704,810 dengan serapan program sebesar 98.31 % terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Kota anggaran sebesar 2,556,383,700 dan Realisasi sebesar 2,556,383,700 dengan serapan program sebesar 98.33 % %.
2. Sub Kegiatan Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri Kota anggaran sebesar 24,990,000 dan Realisasi sebesar 23,893,500 dengan serapan program sebesar 95.61 %.

6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7.6

Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. SUMEDANG				3,467,602,500	3,375,791,242	97.35 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3,467,602,500	3,375,791,242	97.35 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			2,968,434,400	2,920,466,042	98.38 %
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan permakanan	Orang	2,097,262,800	2,076,685,289	0%
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	115,228,500	114,269,500	0%
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang	274,827,300	269,175,300	0%
	1.06.04.2.01.0004	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	46,992,500	36,842,500	0%
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	39,020,000	37,620,000	0%
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	36,101,900	34,201,900	0%
	1.06.04.2.01.0007	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0008	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	324,502,700	321,567,353	0%
	1.06.04.2.01.0010	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	14,595,300	14,592,800	0%
	1.06.04.2.01.0011	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	19,903,400	15,511,400	0%
	1.06.04.2.01.0012	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				2,968,434,400	2,920,466,042	98.38 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			499,168,100	455,325,200	91.22 %
	1.06.06.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang	431,524,000	388,255,200	89.97 %
	1.06.06.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	67,644,100	67,070,000	99.15 %
	1.06.06.2.01.0003	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
	1.06.06.2.01.0004	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
	1.06.06.2.01.0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				499,168,100	455,325,200	91.22 %
	JUMLAH PROGRAM				3,467,602,500	3,375,791,242	97.35 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber data Dinas Sosial Tahun 2025

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2025Program rehabilitasi sosial adalah sebesar Rp. 3,467,602,500 sementara pagu biaya sebesar Rp. 3,375,791,242 Sehingga dengan serapan realisasi anggaran sebesar 97.35 % yang terdiri dari :

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152 adalah sebesar Rp. 2,968,434,400 sementara realisasi biaya sebesar Rp. 2,920,466,042 Sehingga dengan serapan realisasi anggaran sebesar 98.38 % teridiri dari :

1. Penyediaan permakanan

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk mendukung Sub Kegiatan Penyediaan permakanan adalah sebesar Rp. 2,097,262,800 sementara pagu biaya sebesar Rp. 2,076,685,289 Sehingga dengan serapan realisasi anggaran sebesar 99,02%

2. Penyediaan sandang

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk mendukung Sub Kegiatan Penyediaan sandang adalah sebesar Rp. 115.228.500 sementara pagu biaya sebesar Rp. 114.269.500 Sehingga dengan serapan realisasi anggaran sebesar 99,17%

3. Penyediaan alat bantu

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk mendukung Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu adalah sebesar Rp. 274.827.300 sementara pagu biaya sebesar Rp. 269.175.300 Sehingga dengan serapan realisasi anggaran sebesar 97.94 %

4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk mendukung Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga adalah sebesar Rp 46.992.500 sementara pagu biaya sebesar Rp. 36.842.500 Sehingga dengan serapan realisasi anggaran sebesar 78,40 %

5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk mendukung Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social adalah sebesar Rp. 39.020.000 sementara pagu biaya sebesar Rp. 37.620.000 Sehingga dengan serapan realisasi anggaran sebesar 96,41 %

6. Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat anggaran sebesar 36.101.900 relisasi 34.201.900 dan Serapan 94,74%
7. Pemberian layanan data dan pengaduan

   Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk mendukung Kegiatan Pemberian layanan data dan pengaduan adalah sebesar Rp. 324.502.700 realisasi Rp. 321.567.353 Sehingga dengan serapan sebesar 99,10%
8. Sub Kegiatan Pemberian layanan kedaruratan sebesar 14.595.300 realisasi 14.592.800 dan serapan sebesar 99,98%
9. Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga sebesar 19.903.400 realisasi 15.511.400 dan serapan sebesar 77,93%

b. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Penyediaan makanan adalah sebesar Rp. 499.168.100 sementara pagu biaya sebesar Rp. 455.325.200 Sehingga dengan serapan realisasi anggaran sebesar 91,22 %
   1. Sub Kegiatan Penyediaan makanan adalah sebesar Rp. 431.524.000 sementara pagu biaya sebesar Rp. 388.255.200 Sehingga dengan serapan realisasi anggaran sebesar 89,97% .
   2. Sub Kegiatan Penyediaan sandang adalah sebesar Rp. 67.644.100 sementara pagu biaya sebesar Rp. 67.070.000 Sehingga dengan serapan realisasi anggaran sebesar 99,15 %.

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur sesuai amanat Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 merupakan bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah. Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sistematika penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Apabila mencermati hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2025, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama tahun tersebut disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan dan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga dalam perjalanan masih menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama para stakeholder sebagai modal dasar dalam pelaksanaan percepatan sehingga hasilnya dapat semakin optimal. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada Tahun 2025 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 -2029 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang di Laporan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk melaksanakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang untuk mencerminkan dan memperlihatkan kinerja yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang selama Tahun Anggaran 2025, sebagai bahan evaluasi untuk

melaksanakan perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Sumedang pada khususnya.

Selanjutnya Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif untuk mengisi pembangunan Kabupaten Sumedang di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.